



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
- 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
- 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
 - 2.1.2 Topografi
 - 2.1.3 Klimatologi
 - 2.1.4 Kondisi Biologi
 - 2.1.5 Kondisi Hidrologi
 - 2.1.6 Penggunaan Lahan
 - 2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah
 - 2.1.8 Wilayah Rawan Bencana
 - 2.1.9 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan hidup untuk pembangunan
 - 2.1.10 Kondisi Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Pertumbuhan PDRB
 - 2.2.2 PDRB per Kapita
 - 2.2.3 Gini Ratio
 - 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.2.5 Persentase Penduduk Miskin
 - 2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.1 Layanan Urusan wajib
 - 2.3.2 Layanan Urusan Pilihan
 - 2.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.4.1 pengeluaran perkapita
 - 2.4.2 angka kriminalitas
 - 2.4.3 Ratio ketergantungan
- 2.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - 2.5.1 Penerapan SPM Tahun 2019
 - 2.5.2 Penerapan SPM Tahun 2020

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1 Kinerja Pelayanan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah

- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.1.1 Fokus permasalahan perekonomian daerah
 - 4.1.2 Fokus permasalahan infrastruktur dasar
 - 4.1.3 Fokus permasalahan sumber daya manusia
 - 4.1.4 Fokus permasalahan keragaman budaya
 - 4.1.5 Fokus Permasalahan Birokrasi
- 4.2 Isu Strategis
 - 4.2.1 Isu Internasional
 - 4.2.2 isu atau Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 4.2.3 isu atau kebijakan daerah
 - 4.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023
 - 4.2.5 Telaahan RPJMD Daerah Sekitar
 - 4.2.6 Penetapan isu strategis Kabupaten Barito Timur

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan
- 6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan
- 6.4 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

- 9.1 Kaidah Pelaksanaan
- 9.2 Pedoman Transisi

- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAN MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 67

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 03,7712021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Barito Timur. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018- 2023 belum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.

2. Evaluasi hasil RPJMD

- a. substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur setiap tahun belum jelas arahnya.
- b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan restrukturisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Rembang yang menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru.
- c. bahwa dalam rangka memberikan ukuran pencapaian tujuan dalam RPJMD 2016-2021 perlu ditambahkan indikator tujuan yang merupakan dasar mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Bupati, Wakil Bupati.
- d. RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 perlu menambahkan indikator daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

- e. RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan sasaran, strategi, arah kebijakan maupun indikatornya belum selaras dan berdampak langsung pada keluarga miskin.
3. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai AKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah CC. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perludilakukan:
 - a. sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penjabaran (*cascading*) kinerja dituangkan secara berjenjang dalam indikator kinerja RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 55

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD provinsi, dan RPJMN.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal terutama adanya berbagai perubahan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 maupun kebijakan Pemerintah terkait perencanaan, penganggaran, dan pemerintahan daerah sangat berpengaruh pada pembangunan daerah menyebabkan perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD ini diikuti dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2022 dan 2023.

Rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen ini menjadi tolok ukur bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai akhir periode pemerintahan yaitu tahun 2023 sehingga tercapai visi



Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah.

Bupati Barito Timur,

Ampera A.Y. Mebas, SE, MM

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.5	Sistematika Penulisan	I-14
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.2	Topografi	II-5
2.1.3	Klimatologi	II-7
2.1.4	Kondisi Geologi	II-8
2.1.5	Kondisi Hidrologi	II-9
2.1.6	Penggunaan Lahan	II-10
2.1.7	Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
2.1.8	Wilayah Rawan Bencana	II-21
2.1.9	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung	II-22
2.1.10	Kondisi Demografi	II-30
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.2.1	Pertumbuhan PDRB	II-34
2.2.2	PDRB per Kapita	II-39
2.2.3	Gini Ratio	II-40
2.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-41
2.2.5	Persentase Penduduk Miskin	II-43
2.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-45
2.2.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-46
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.3.1	Layanan Urusan wajib	II-48
2.3.2	Layanan Urusan Pilihan	II-79
2.3.3	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-107
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II-115



2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-122
2.4.1	pengeluaran perkapita	II-122
2.4.2	angka kriminalitas	II-123
2.4.3	Ratio ketergantungan	II-123
2.5	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-154
2.5.1	Penerapan SPM Tahun 2019	II-154
2.5.2	Penerapan SPM Tahun 2020	II-156
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelayanan APBD	III-1
3.1.2	Neraca Daerah	III-13
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-21
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-29
3.3	Kerangka Pendanaan	III-32
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-33
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-41
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Fokus permasalahan perekonomian daerah	IV-4
4.1.2	Fokus permasalahan infrastruktur dasar	IV-8
4.1.3	Fokus permasalahan sumber daya manusia	IV-11
4.1.4	Fokus permasalahan keragaman budaya	IV-14
4.1.5	Fokus Permasalahan Birokrasi	IV-16
4.2	Isu Strategis	IV-18
4.2.1	Isu Internasional	IV-18
4.2.2	isu atau Kebijakan Nasional dan Provinsi	IV-24
4.2.3	isu atau kebijakan daerah	IV-33
4.2.4	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	IV-63
4.2.5	Telaahan RPJMD Daerah Sekitar	IV-91
4.2.6	Penetapan isu strategis Kabupaten Barito Timur	IV-97



BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 Visi	V-1
	5.2 Misi	V-3
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V-10
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1 Strategi	VI-1
	6.2 Arah Kebijakan	VI-10
	6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan	VI-16
	6.4 Program Pembangunan Daerah	VI-24
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
	9.2 Pedoman Transisi	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan Tahun 2019	II-4
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-4
Tabel 2.3	Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-8
Tabel 2.4	Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-14
Tabel 2.5	Luas dan Produksi Palawija di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-14
Tabel 2.6	Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-15
Tabel 2.7	Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-16
Tabel 2.8	Gambaran Umum dan Potensi per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-16
Tabel 2.9	Potensi Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-17
Tabel 2.10	Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Timur	II-26
Tabel 2.11	Klasifikasi Jasa Lingkungan	II-28
Tabel 2.12	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan	II-30
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019	II-31
Tabel 2.14	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-32
Tabel 2.15	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (Persen)	II-36
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-37
Tabel 2.17	PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (Juta Rupiah)	II-40
Tabel 2.18	Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-42
Tabel 2.19	Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-44
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	II-47



Tabel 2.21	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2020	II-51
Tabel 2.22	Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2019	II-51
Tabel 2.23	Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten barito Timur Tahun 2015-2019	II-56
Tabel 2.24	Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2019	II-56
Tabel 2.25	Indikator Urusan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2020	II-57
Tabel 2.26	Indikator GERMAS	II-62
Tabel 2.27	Gambaran Stunting di Barito Timur Tahun 2019 dan 2020	II-63
Tabel 2.28	Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020	II-66
Tabel 2.29	Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2020	II-67
Tabel 2.30	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (km)	II-68
Tabel 2.31	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 (km)	II-69
Tabel 2.32	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016–2020	II-70
Tabel 2.33	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Timur, 2016–2020 (Persen)	II-71
Tabel 2.34	Daya Terpasang, Produksi dan distribusi Listrik PT. PLN Rayon Kabupaten Barito Timur, Tahun 2015-2020	II-72
Tabel 2.35	Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-73
Tabel 2.36	Capaian Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Tahun 2015-2020	II-74
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2020	II-77
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-78
Tabel 2.39	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Timur, 2015-2020	II-80
Tabel 2.40	Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-81
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2020	II-81



Tabel 2.42	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-83
Tabel 2.43	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-84
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2020	II-84
Tabel 2.45	Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur	II-86
Tabel 2.46	Capaian Indikator Urusan pemerintahan bidang pertanian di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-86
Tabel 2.47	Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan Kabupaten Barito Timur	II-87
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019	II-89
Tabel 2.49	Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2020	II-90
Tabel 2.50	Data BUMDes Per-Kecamatan	II-91
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pmberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2019	II-94
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019	II-95
Tabel 2.53	Statistik Perhubungan Kabupaten Barito Timur 2015-2020	II-97
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020	II-98
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-98
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-99
Tabel 2.57	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	II-101
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019	II-101
Tabel 2.59	Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-102
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.61	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-103
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019	II-104
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2020	II-105



Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-107
Tabel 2.65	Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-108
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2020	II-110
Tabel 2.67	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2015-2020	II-111
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 dan 2020	II-113
Tabel 2.69	Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Dan Nilai Produksi Pada Industri Kecil Dan Industri Menengah Di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2020	II-114
Tabel 2.70	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2015-2020	II-114
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019	II-115
Tabel 2.72	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	II-116
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-117
Tabel 2.74	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-118
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-118
Tabel 2.76	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020	II-119
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Diklat di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-119
Tabel 2.78	Hasil-Hasil Penelitian yang Diterapkan Untuk Kepentingan Perencanaan Tahun 2015-2017	II-120
Tabel 2.79	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-121
Tabel 2.80	Angka Pengeluaran Per-Kapita Menurut Kelompok Barang Makanan dan non Makanan di Kabupaten Barito Timur (Ribuan Rp) Tahun 2015-2020	II-122
Tabel 2.81	Rasio Ketergantungan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-124
Tabel 2.82	Indikator Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-127
Tabel 2.83	Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah	II-154
Tabel 2.84	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Daerah	II-156
Tabel 2.85	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	II-156
Tabel 2.86	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	II-158



Tabel 2.87	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-160
Tabel 2.88	Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-160
Tabel 2.89	Realisasi SPM Bidang Sosial	II-161
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.3	Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017	III-6
Tabel 3.4	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017	III-6
Tabel 3.5	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-7
Tabel 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-9
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-11
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017	III-14
Tabel 3.9	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2017	III-17
Tabel 3.10	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-21
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-24
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-26
Tabel 3.13	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	III-28
Tabel 3.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-29
Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017	III-30
Tabel 3.17	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017	III-31
Tabel 3.18	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020	III-34
Tabel 3.19	Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023 (Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	III-38
Tabel 3.20	Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Kabupaten Barito Timur	III-40



Tahun 2018-2023

Tabel 3.21	Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020	III-41
Tabel 3.22	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023	III-43
Tabel 3.23	Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020	III-44
Tabel 3.24	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023	III-46
Tabel 3.25	Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020	III-48
Tabel 3.26	Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023	III-49
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan”	IV-6
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan “Belum meratanya pendapatan masyarakat”	IV-8
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan”	IV-10
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia Barito Timur”	IV-13
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah”	IV-15
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”	IV-17
Tabel 4.7	Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahap II Tahun 2017-2021	IV-51
Tabel 4.8	Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur Tahap II Tahun 2017-2021	IV-54
Tabel 4.9	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur Tahun 2011-2031	IV-60
Tabel 4.10	Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan berkelanjutan	IV-63
Tabel 4.11	Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB	IV-65
Tabel 4.12	Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD	IV-66
Tabel 4.13	Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD	IV-68
Tabel 4.14	Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD	IV-69



Tabel 4.15	Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD	IV-71
Tabel 4.16	Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-74
Tabel 5.1	Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028	V-8
Tabel 5.2	Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	V-9
Tabel 5.3	Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024	V-10
Tabel 5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	V-16
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VI-11
Tabel 6.3	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-18
Tabel 6.4	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Perdagangan Karet Kabupaten Barito Timur	VI-20
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VI-26
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VIII-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur	II-3
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-7
Gambar 2.4	Peta tutupan lahan Kabupaten Barito Timur	II-11
Gambar 2.5	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur	II-20
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur	II-22
Gambar 2.7	Daya Dukung Pangan di Kabupaten Barito Timur	II-23
Gambar 2.8	Peta Kebutuhan Energi Pangan Kabupaten Barito Timur	II-24
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Energi Pangan Kabupaten Barito Timur	II-25
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Barito Timur	II-26
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 – 2019	II-31
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2019	II-34
Gambar 2.13	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 dan ADHB di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Miliar rupiah)	II-35
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 (Persen)	II-39
Gambar 2.15	Gini Ratio Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019	II-41
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-42
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-44
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-46
Gambar 2.19	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-49



Gambar 2.20	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020	II-50
Gambar 2.21	Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-54
Gambar 2.22	Angka Kesakitan (Angka Morbiditas) di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2020	II-55
Gambar 2.23	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-72
Gambar 2.24	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-76
Gambar 2.25	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-77
Gambar 2.26	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019	II-109
Gambar 2.27	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-110
Gambar 2.28	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Listrik (%) Kabupaten Barito Timur, 2015-2017	II-112
Gambar 2.29	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	II-112
Gambar 2.30	Angka Kriminalitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017	II-123
Gambar 4.1	Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur	IV-3
Gambar 4.2	Misi, Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-27
Gambar 4.3	Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-64
Gambar 4.4	Capaian TPB setiap tujuan Kabupaten Barito Timur	IV-66
Gambar 4.5	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial	IV-67
Gambar 4.6	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan	IV-69
Gambar 4.7	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi	IV-70
Gambar 4.8	Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum	IV-71
Gambar 5.1	Hubungan Antarpokok Visi Kabupaten Barito Timur	V-2
Gambar 5.2	Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Timur Tahun	V-7



	2018-2023	
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	VI-13
Gambar 6.2	Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)	VI-19
Gambar 6.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur	VI-24

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur berkewajiban menyusun RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan dilantikannya **Bupati Kabupaten Barito Timur (Ampera A.Y. Mebas, SE, MM) dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur (Habib Said Abdul Saleh)**, maka telah disusun dan ditetapkan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD disusun untuk mewujudkan visi pembangunan “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, serta



memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengambil kebijakan melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perubahan RPJMD memenuhi poin ketiga Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa kebijakan nasional telah terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diatur dalam RPJMD, dan bersifat wajib untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.



Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur perlu melakukan penyesuaian RPJMD untuk menerapkan atau melaksanakan amanat dari kebijakan nasional, yang antara lain meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Alasan lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur adalah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dan telah ditetapkan sebagai bencana Nasional nonalam. Penyebaran COVID-19 yang melanda dunia telah berdampak negatif pada kesehatan, aspek sosial dan ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan keadaan Indonesia akibat pandemi COVID-



19 juga dirasakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia telah dan masih terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi dan sosial.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah dan seluruh pemerintah daerah telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan ini berdampak pada perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah sejak tahun 2020, dan memerlukan penyesuaian untuk tahun-tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018–2023. Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD, hal ini sesuai amanat Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dalam pelaksanaannya, Perubahan RPJMD disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) dan politik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-



atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, yaitu:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023.
- c. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah
- d. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan



- Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034; dan
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan R-APBD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur wajib berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memerhatikan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kabupaten Barito Timur.

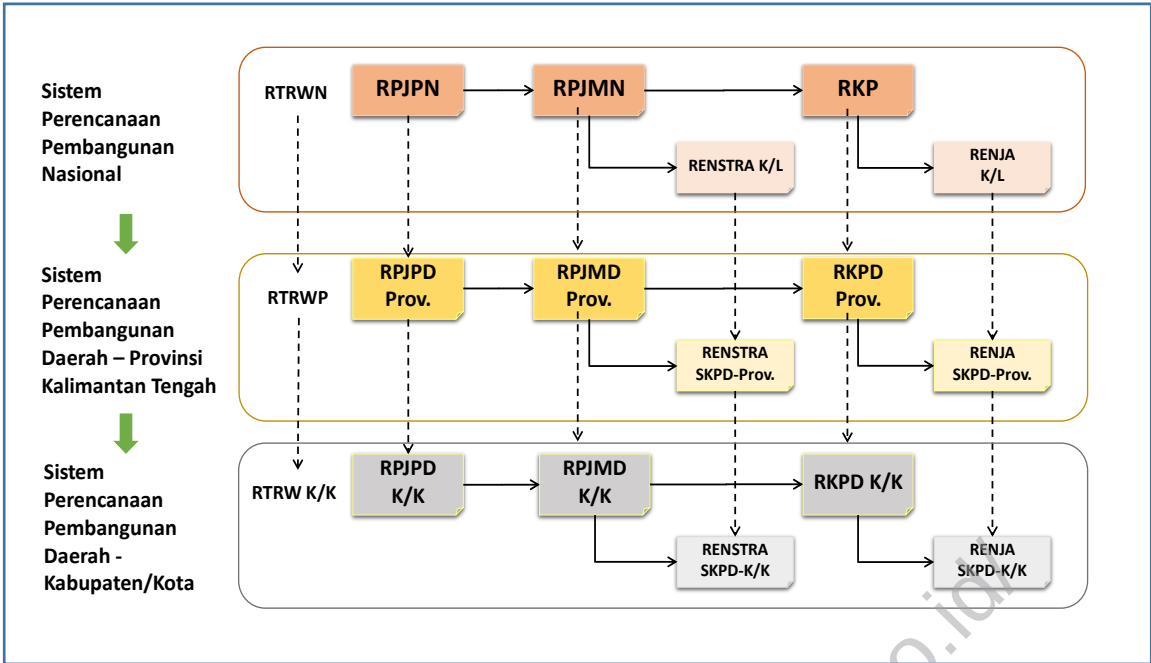
Posisi Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur apabila dilihat dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada berikut ini. Hubungan antar



dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Barito Timur, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Mempedomani RPJPD Kabupaten Barito Timur dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur sebagai pedoman pembangunan jangka menengah, dan dalam penyusunannya bersamaan dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan RPJMD menjadi acuan bagi



perangkat daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang melaksanakan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD menjadi prioritas pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, perencanaan dalam RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahunan.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling terkait, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai rencana pemanfaatan ruang. Dengan demikian, implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Barito Timur.

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi

Penyusunan Perubahan RPJMD Barito Timur mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan RPJMD Barito Timur dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;



1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Perubahan RPJMD berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *impact*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan agenda atau prioritas nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD dengan KLHS

Penyusunan Perubahan RPJMD selain memperhatikan dokumen-dokumen diatas, juga mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penelaahan KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur. Penyusunan kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan percepatan ataupun peningkatan sebagaimana hasil KLHS.

Pengintegrasian hasil KLHS dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dimuat dalam beberapa bab, sebagai berikut:

- Bab I: Penjelasan bahwa penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan KLHS, dimuat pada subbab 1.3. Hubungan Antar Dokumen.
- Bab II: Daya dukung dan daya tampung hasil analisis KLHS dimuat pada subbab 2.1. Aspek Geografi dan Demografi.



- Bab IV: Telaahan KLHS khususnya analisis capaian TPB, isu strategis TPB, dan rekomendasi pencapaian TPB, dimuat pada subbab 4.2. Isu Strategis
- Bab VI: Program pembangunan daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target, dan pagu anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Perubahan RPJMD, sekaligus untuk mendukung pencapaian target TPB dimuat pada subbab 6.4. Program Pembangunan Daerah.
- Bab VII: Memuat program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target, dan pagu anggaran yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, sekaligus untuk mendukung pencapaian target TPB.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan yang selaras dengan perkembangan keadaan, kondisi wilayah, dan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat, bagi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Timur.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 yaitu:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
- b. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Menetapkan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi.
- d. Mewujudkan pedoman bagi perencanaan dan penganggaran tahunan.
- e. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dan daerah sekitar.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 terdiri atas 9 (sembilan) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).



BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah ditetapkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timurserta pagu anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 penanggungjawab bidang urusan/program Perangkat Daerah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terbaru.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.



BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara formal, Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ini dikeluarkan, wilayah Kabupaten Barito Timur pernah berkembang dari Kabupaten Barito Timur menjadi Wilayah Pembantu Bupati Barito Timur, sejak undang-undang tersebut berlaku, maka secara resmi wilayah Barito Timur memisahkan diri dari Kabupaten Barito Selatan dan menjadi daerah otonom sendiri dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Timur oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari keempat aspek tersebut.



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 tiga kelurahan, 101 desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Secara administratif berbatasan dengan:

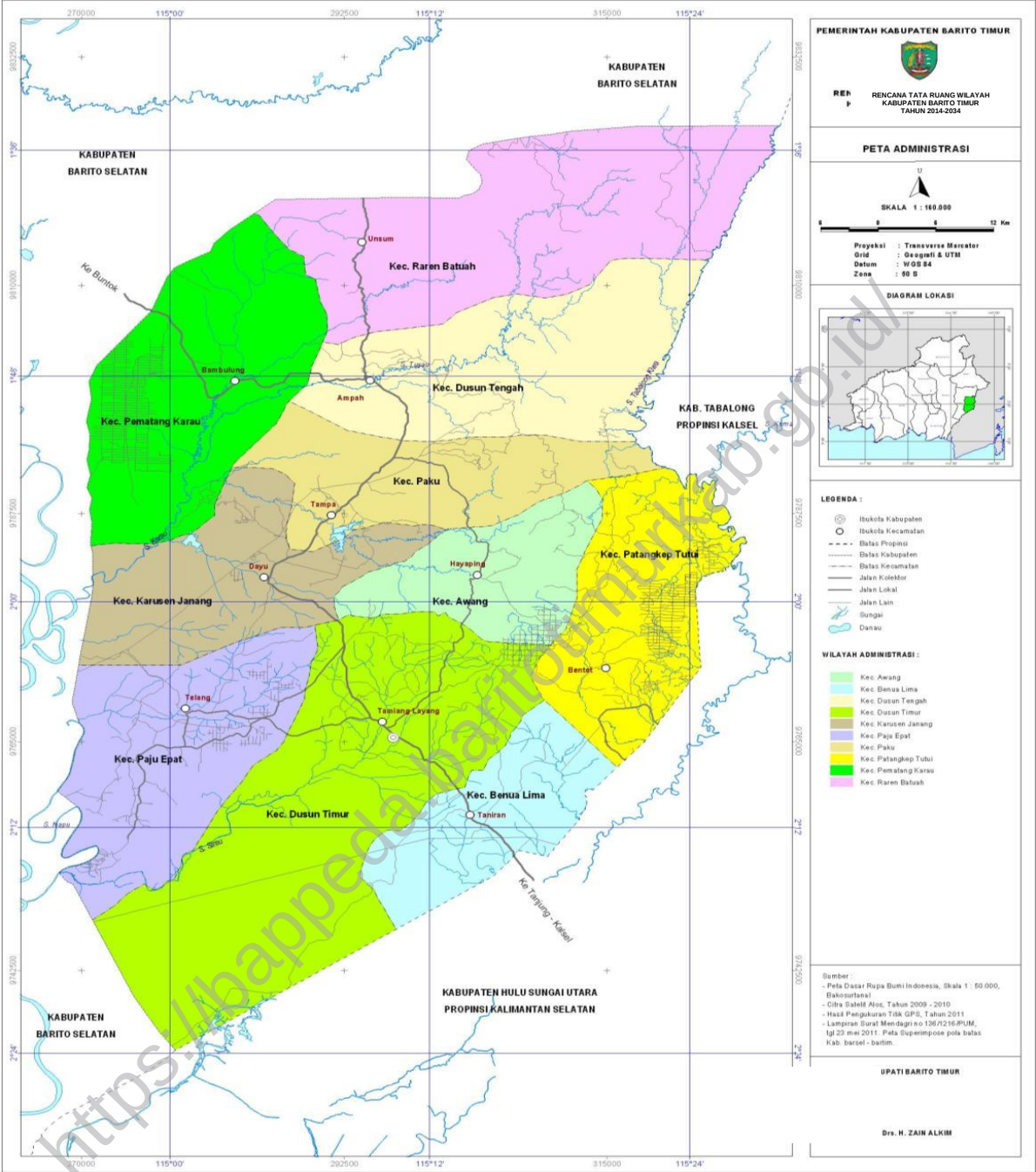
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km² (atau 2,50% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 153.564 Km²), menduduki urutan ke-12 (dua belas) terluas dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak

sekitar 418 Km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya).

Wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

Luas wilayah Kabupaten Barito Timur menurut kecamatan berdasarkan data tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur
Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Benua Lima	Taniran	258	6,73
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33
4.	Awang	Hayaping	203	5,29
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255	6,65
6.	Dusun Tengah	Ampah Kota	371	9,68
7.	Raren Batuah	Unsum	186	4,85
8.	Paku	Tampa	272	7,09
9.	Karusen Janang	Dayu	178	4,64
10.	Pematang Karau	Bambulung	579	15,10
	Barito Timur	Tamiang Layang	3.834	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Paju Epat merupakan Kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km² dan 664,30 km² atau luas kedua kecamatan tersebut mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur, sedangkan Kecamatan Karusen Janang merupakan kecamatan yang paling kecil, yaitu 178 km².

Jumlah desa menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Benua Lima	7	7	7	7	7
2.	Dusun Timur	17	17	17	17	17
3.	Paju Epat	9	9	9	9	9
4.	Awang	11	11	11	11	11
5.	Patangkep Tutui	10	10	10	10	10
6.	Dusun Tengah	8	8	8	8	8
7.	Raren Batuah	9	9	9	9	9
8.	Paku	12	12	12	12	12
9.	Karusen Janang	7	7	7	7	7
10.	Pematang Karau	13	13	13	13	13
Total		103	103	103	103	103

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020



2. Letak dan Kondisi Geografis

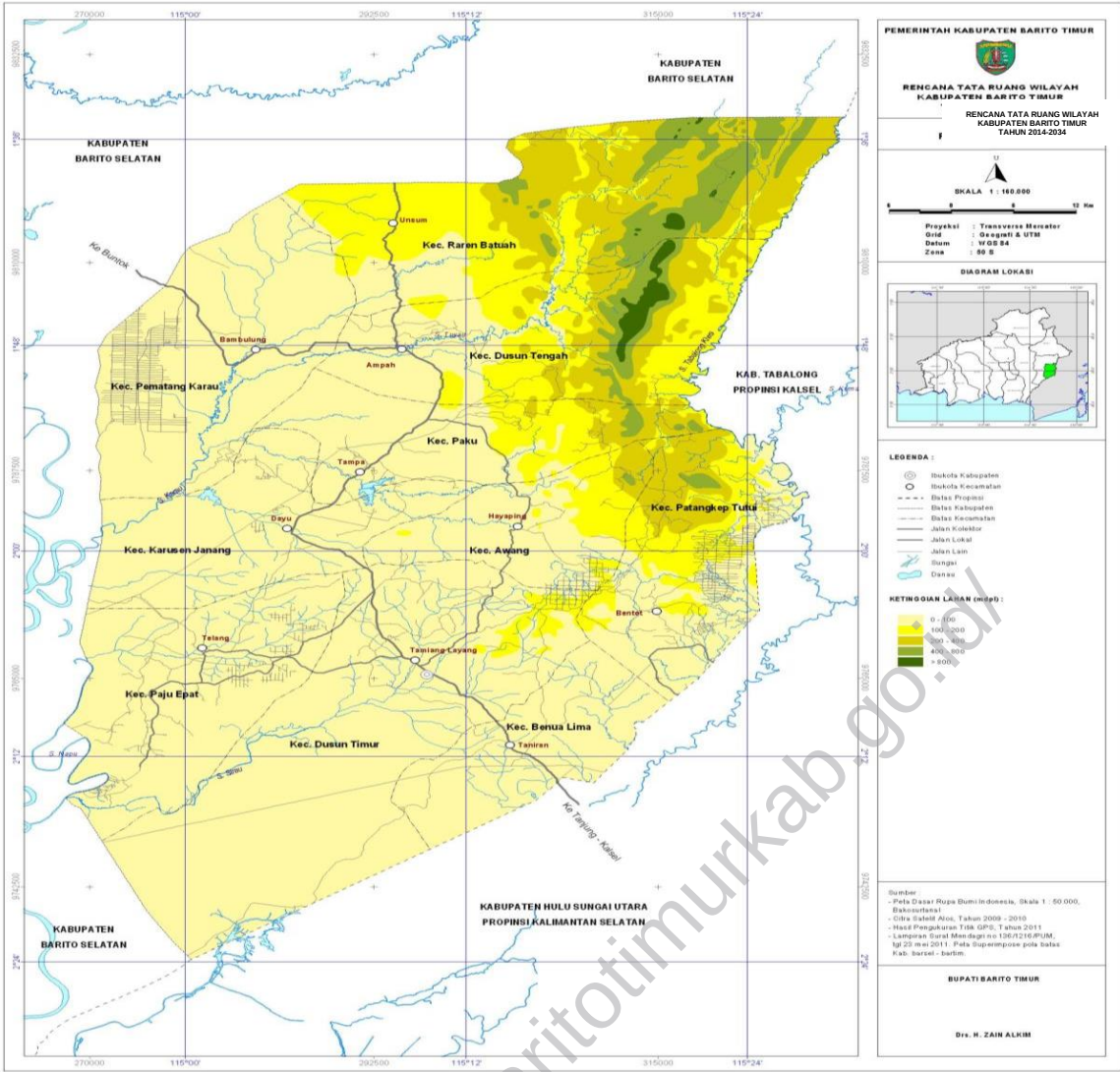
Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, secara geografis Kabupaten Barito Timur terletak di posisi geografis $1^{\circ} 38' 38,1''$ Lintang Selatan - $2^{\circ} 23' 34,2''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 56' 15''$ - $115^{\circ} 26' 31,3''$ Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km².

2.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-100m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 - 2%, 2 - 15% dan 15 - 40 %. Wilayah dengan kemiringan 0 - 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 - 15% dan 15 - 40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan di atas 40% dapat dijumpai di bagian sisi utara sebelah timur. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2

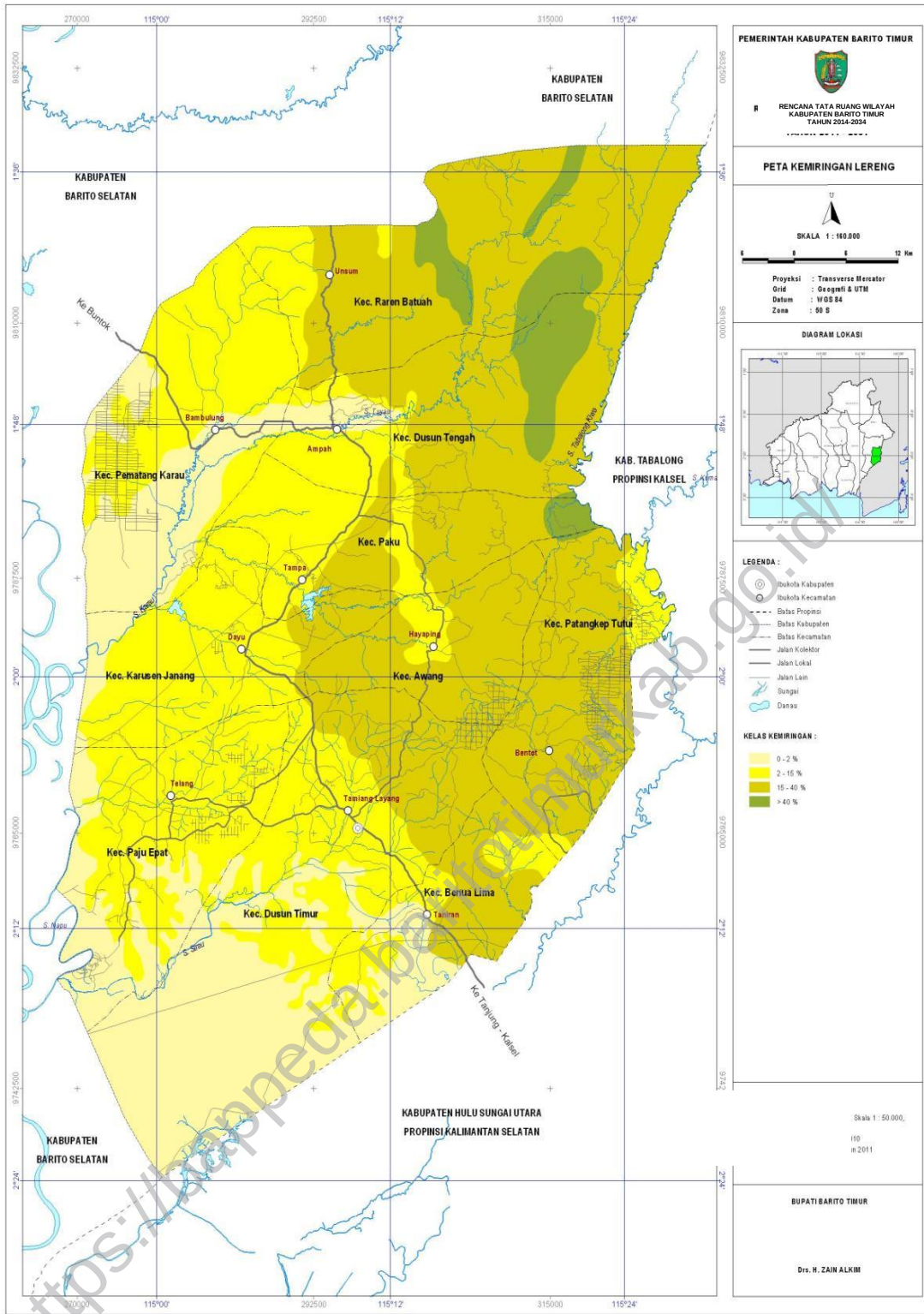
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

Sedangkan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

2.1.3. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Barito Timur dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni

sampai dengan Oktober arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim tropis wilayah Kabupaten Barito Timur rata-rata mendapat penyinaran matahari sebesar 51,48 sepanjang tahun, rata-rata suhu udaranya sepanjang 2017 relative sejuk, yaitu 27,36⁰, sedangkan rata-rata curah hujannya relative tinggi yaitu mencapai 232,06 mm per bulan.

Tabel 2.3
Statistik Klimatologi
Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Bulan	Rata-rata Suhu Udara	Rata-rata Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	26,64	87,59	1.010,8	17	48,79	311,40
Februari	27,03	85,48	1.006,7	7	43,70	221,70
Maret	26,44	86,98	1.011,3	12	43,15	410,70
April	26,98	86,61	1.011,7	12	53,33	224,70
Mei	27,55	86,80	1.011,1	12	56,90	240,90
Juni	27,17	86,80	1.011,9	10	56,77	187,30
Juli	26,84	86,16	1.012,1	10	50,77	133,10
Agustus	26,84	87,00	1.011,4	8	44,29	209,60
September	27,67	83,57	1.012,1	10	57,87	84,80
Oktober	27,45	84,32	1.010,4	15	61,90	128,30
November	27,17	86,03	1.009,1	14	49,20	294,40
Desember	27,00	85,58	1.010,1	25	51,10	337,80

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.1.4. Kondisi Geologi

Secara geologis, susunan atau struktur bebatuan di Kabupaten Barito Timur dibentuk oleh formasi geologi sebagai berikut, *Qh/Qvt = Swam Deposit Land, Clay, Ralelygravel, Mut And Decayet Wagelation Brown*, yang terbentuk oleh batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kalsium lainnya, bersusunan antara andesit sampai *basalt*.



Berdasarkan informasi geologi, formasi geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis formasi, yaitu; Batuan Vulkanik, Formasi Alluvium, Formasi Berai, Formasi Dahor, Formasi Mortalat, Formasi Tanjung, Formasi Warukin dan Granit Kapur.

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur cukup banyak, antara lain: Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir dari utara ke selatan dengan pola aliran sungai adalah dendritik, yaitu pola aliran yang berkembang bebas dalam segala arah dan mempunyai banyak cabang. Saat ini sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sebagai sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, untuk kegiatan pertanian maupun lainnya. Kabupaten Barito Timur memiliki 4 (empat) hulu sungai, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: (1) Hulu Sungai Karau terletak di Kecamatan Dusun Tengah di Desa Baruyan, Desa Unsum, Desa Lenggang dan Desa Batuah; (2) Hulu Sungai Paku terletak di Kecamatan Dusun Tengah Desa Kalamus dan Desa Tamiang; (3) Hulu Sungai Sirau terletak di Kecamatan Dusun Timur Desa Pulau Padang dan Desa Jaar dan (4) Hulu Sungai Dayu di Kecamatan Dusun Timur Desa Dayu.

Dari ke empat hulu sungai tersebut mengalir dari arah utara ke selatan yang melalui wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan saluran utama dalam sistem drainase sebagai saluran pembuangan akhir, baik sisa pembuangan dari limpasan air hujan maupun buangan dari rumah tangga.



2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kabupaten Barito Timur terbagi ke dalam dua tipe lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan basah terdiri dari belukar rawa, hutan rawa primer, rawa dan tubuh air, sisanya merupakan lahan kering. Dari luasan yang ada, lahan kering merupakan lahan yang memiliki lahan paling luas yaitu 325.485 Ha (84,89%), dan lahan basah 57.915 Ha (15,11%). Dari tutupan lahan (*landcoverage*) hasil analisis citra, di Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh semak/belukar yaitu 148.113 Ha (38,63%), diikuti hutan rawa sekunder 59.627 Ha (15,55%), dan hutan lahan kering primer 55,467 Ha (14,47%). Pemanfaatan lahan yang paling kecil adalah permukiman 273 Ha dan tubuh air 268 Ha.

Di Kabupaten Barito Timur, proporsi lahan-lahan diluar kawasan hutan yang penguasaannya sudah di administrasikan masih sangat kecil. Proporsi lahan di luar kawasan hutan meliputi lahan-lahan di perkotaan, lahan transmigrasi, dan lahan perkebunan besar. Lahan-lahan tersebut dan lahan yang belum diadministrasikan sudah berupa pemukiman dan pertanian intensif yang berada di perdesaan dengan tingkat penguasaannya sangat tinggi. Sedangkan pada lahan-lahan pertanian yang penggarapannya tidak intensif, seperti ladang berpindah dan hutan rakyat, tingkat penguasaannya tergolong rendah.

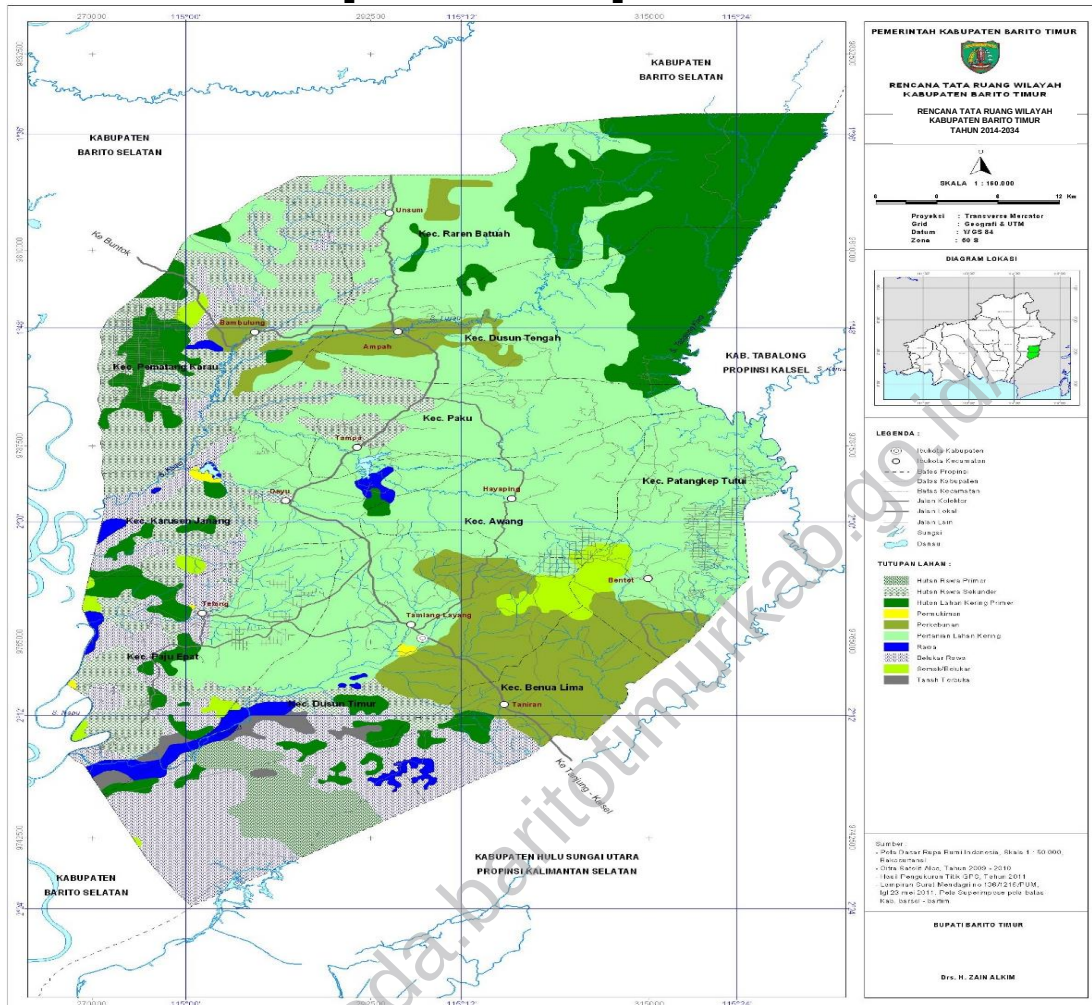
status Kawasan hutan Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9415/MenlhkPKTL/KUH/PLA-2/11/2019 tanggal 6 November 2019, yaitu :

- Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 32405.546993 Ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) = 524,27 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 20.042,31 ha



- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) = 55.628,79 ha
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) = 35.957,80 ha

Gambar 2.4
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Potensi Sumber Daya Alam Per Kecamatan

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan. Adapun jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan



9.879 Ha tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui, Awang seluas 3.074 Ha. Bahan galian C sepertipasir kuarsa sebesar 8.447 Ha di Kecamatan Paju Epat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 bahwa Kawasan lindung berupa kawasan arboretum di Kecamatan Pematang Karau dengan luas 235,75 Hektar. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 65.610,43 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Raren Batuan. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 39.697,01 Hektar terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi dengan luas 32.405,55 Hektar terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karusen Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di seluruh kecamatan dengan luas 24.026,93 Hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Barito Timur dengan luas 29.530,82 Hektar.

Kawasan peruntukan industri dengan luas 1.266,33 Hektar terdiri dari kawasan industri di Kecamatan Pematang Karau dan kawasan industri di Kecamatan Paju Epat. Kawasan transmigrasi dengan luas 735,02 Hektar tersebar dimasing-masing kecamatan kawasan permukiman perdesaan.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur.



Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas 14.683,24 Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa padi sawah dan padi ladang dengan luas 2.383,71 Hektar tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah. Kawasan pertanian lahan kering berupa jagung, ubi jalar, ubi kayu dengan luas 4.355,50 Hektar tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 86.635,39 Hektar sentra tanaman karet terdapat di seluruh kecamatan; sentra tanaman kelapa sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Patangkep Tutui, Paju Epat, Karusen Janang, Paku; sentra tanaman kelapa terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku; sentra tanaman kakao terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Tengah; sentra tanaman lada terdapat di Kecamatan Pematang Karau dan Dusun Tengah; sentra tanaman kemiri terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku. Kawasan perkebunan besar dengan luas 60.061,31 Hektar terdiri atas perkebunan besar swasta dengan komoditi karet terdapat di Kecamatan Awang, Karusen Janang. Perkebunan besar swasta dengan komoditi sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Paku, Karusen Janang, Paju Epat, Awang, Patangkep Tutui.

Potensi pertanian terdiri dari padi sawah dengan luas panen 9.848 ha dan total produksi 45.096 ton dengan rata-rata produktivitas 45,79 ton/Ha. Sedangkan komoditi padi ladang dengan luas panen 2.978 Ha dan total produksi sebesar 5.932 ton dengan rata-rata produktivitas 19,92 ton/ ha. Potensi pertanian untuk padi sawah dapat dikembangkan di Kecamatan Dusun Tengah, Pematang Karau dan Paku, sehingga pengembangan potensi di kecamatan tersebut

diarahkan sebagai Kawasan Agropolitan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Luas dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas	Produk si	Produktivitas	Luas	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Ton)	(Ku/Ha)	(Ha)	(Ton)	(Kw/Ha)
1	Benua Lima	220	660	30	500	900	18
2	Dusun Timur	271	867	32	349	558	16
3	Paju Epat	47	103	22	492	787	16
4	Awang	457	1.462	32	430	1.075	25
5	P. Tutui	256	870	34	561	1.010	18
6	Dusun Tengah	3.912	21.125	54	295	708	24
7	Raren Batuah	620	2.604	42	59	130	22
8	Paku	1.409	6.622	47	170	442	26
9	Karusen Janang	623	2.243	36	72	202	28
10	P. Karau	2.033	8.539	42	50	120	24
Total		9.848	45.096	45,79	2.978	5.932	19,92

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Potensi palawija di Kabupaten Barito Timur terdiri dari jagung dengan luas panen sebesar 558 Ha produksi jagung sebesar 3.373,21 ton, ubi kayu dengan luas panen sebesar 65 Ha produksi ubi kayu sebesar 1.737,13 ton, dan ubi jalar dengan luas panen sebesar 18 Ha produksi ubi jalar sebesar 254,23 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas dan Produksi Palawija di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Benua Lima	-	-	3	73,71	-	-
2	Dusun Timur	26	141,96	5	132,80	-	-
3	Paju Epat	4	13,00	3	73,68	-	-
4	Awang	45	251,10	5	112,25	3	42,75
5	Patangkep Tutui	-	-	10	275,80	2	28,04

6	Dusun Tengah	98	555,66	9	239,13	8	112,48
7	Raren Batuah	185	1.069,30	5	142,90	3	42,84
8	Paku	119	866,08	14	390,04	-	-
9	Karusen Janang	42	251,16	9	243,54	2	28,12
10	Pematang Karau	39	224,95	2	53,28	-	-
Total		558	3.373,21	65	1.737,13	18	254,23

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Potensi perkebunan di Kabupaten Barito Timur terdiri dari kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, kakao, dan lada. Dengan komoditi perkebunan utama adalah tanaman karet.

Potensi Peternakan yang telah ada di Kabupaten Barito Timur antara lain ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Populasi ternak besar (sapi potong dan kerbau) pada tahun 2020 berjumlah 899 ekor yang didominasi jenis sapi potong sebesar 14 ekor, sedangkan untuk ternak kerbau sebanyak 885 ekor. Populasi ternak kecil (kambing dan babi) pada tahun yang sama berjumlah 39.409 ekor yang didominasi ternak babi sebanyak 38.454 ekor, dan sisanya berupa ternak kambing sebanyak 955 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jenis dan Populasi Ternak di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2020

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi
1	Benua Lima	-	-	29	1.820
2	Dusun Timur	9	421	38	14.697
3	Paju Epat	2	464	128	1.720
4	Awang	-	-	32	3.868
5	Patangkep Tutui	-	-	9	1.369
6	Dusun Tengah	-	0	167	8.026
7	Raren Batuah	-	-	145	470
8	Paku	3	-	235	4.296
9	Karusen Janang	-	-	8	1.689
10	Pematang Karau	-	-	164	499
Total		14	885	955	38.454

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2021

Produksi perikanan di Kabupaten Barito Timur berasal dari hasil perikanan darat yang dibedakan menjadi perikanan umum dan budidaya. Tahun 2020 produksi perikanan budidaya secara keseluruhan produksinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak

1.390.880 kg. Kecamatan dengan produksi ikan tertinggi adalah Kecamatan Karusen Janang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Produksi Budidaya Ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Budidaya Air Tawar (Kg)		Jumlah (Kg)
		Kolam	Keramba	
1	Benua Lima	2.300	0	2.300
2	Dusun Timur	136.000	57.000	193.000
3	Paju Epat	23.000	217.000	239.000
4	Awang	15.000	0	15.000
5	Patangkep Tutui	8.000	0	8.000
6	Dusun Tengah	143.580	12.000	155.580
7	Raren Batuah	145.000	0	145.000
8	Paku	51.000	75.000	126.000
9	Karusen Janang	43.000	14.000	57.000
10	Pematang Karau	160.000	290.000	450.000
Total		725.880	665.000	1.390.880

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun, 2021

Pengembangan wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi wilayah yang ada. Dan tujuannya adalah untuk pemeratakan pertumbuhan di daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan pengembangan di daerah adalah dengan cara meningkatkan, mengembangkan dan mempromosikan suatu produk sehingga masyarakat dapat merasa bangga. Berikut gambaran umum dan potensi per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.8
Gambaran Umum dan Potensi per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Potensi Sektor-Sub Sektor (berdasarkan nilai produksi, luas lahan, dan pengembangan eksisting)
Benua Lima	Taniran	258	7.136	Buah,Ayam kampung
Dusun Timur	Tamiang Layang	867,7	33.339	Padi Ladang, kacang panjang, terong, timun, bayam, duku, cempedak, sapi potong, babi, ayam kampung, itik
Paju Epat	Telang	664,3	5.256	Kelapa sawit, wisata, ubi kayu, nenas, rambutan, mangga, kerbau rawa
Awang	Hayaping	203	6.304	Karet, jagung, kedelai

Patangkep Tutui	Bentot	255	10.190	Karet, ayam broiler, air minum
Dusun Tengah	Ampah Kota	371	27.426	Wisata, karet, padi sawah, jagung, kacang tanah, kacang panjang, durian, coklat, sapi potong, kolam ikan
Raren Batuah	Unsum	186	9.611	Buah cempedak, Sapi potong
Paku	Tampa	272	8.951	Pisang, kambing
Karusen Janang	Dayu	178	5.972	Padi sawah
Pematang Karau	Bambulung	579	12.690	Karet, rotan, kelapa sawit, kelapa, kopi, keramba ikan

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.9
Potensi Lainnya per Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Perusahaan Perdagangan Besar	IKM	Koperasi	Potensi Objek Wisata	Persentase Jalan yang telah Aspal
Benua Lima	-	2.885	5	3	22,38
Dusun Timur	5	4.863	26	10	134,28
Paju Epat	1	870	7	5	29,11
Awang	-	887	10	2	39,31
Patangkep Tutui	1	949	9	4	45,94
Dusun Tengah	-	878	29	10	63,53
Raren Batuah	1	692	13	4	13,68
Paku	-	881	13	4	35,30
Karusen Janang	1	1.226	7	5	15,30
Pematang Karau	1	1.197	13	-	19,26

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020



2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang perlu didorong dan dikembangkan adalah:

a. Kawasan Agropolitan Bambulung

Penetapan kawasan Agropolitan di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dikarenakan kawasan ini merupakan pemasok utama tanaman padi di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan DED prasarana kawasan yang dikembangkan secara terpadu kawasan agropolitan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

b. Kawasan Perkotaan Tamiang Layang dan Perkotaan Ampah

Tamiang Layang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Ampah sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan kedepan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan dan RTBL dan sub kawasan yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan ini merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati Tahun 2010 yang berada di Desa Tampa Kecamatan Paku.

d. Kawasan Tambak

Kawasan perikanan milik masyarakat yang berada di wilayah Barito Timur perlu didorong pengembangannya untuk mendukung dan menunjang sektor unggulan kawasan.



3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah Kawasan Konservasi Taman Anggrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat.

4. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

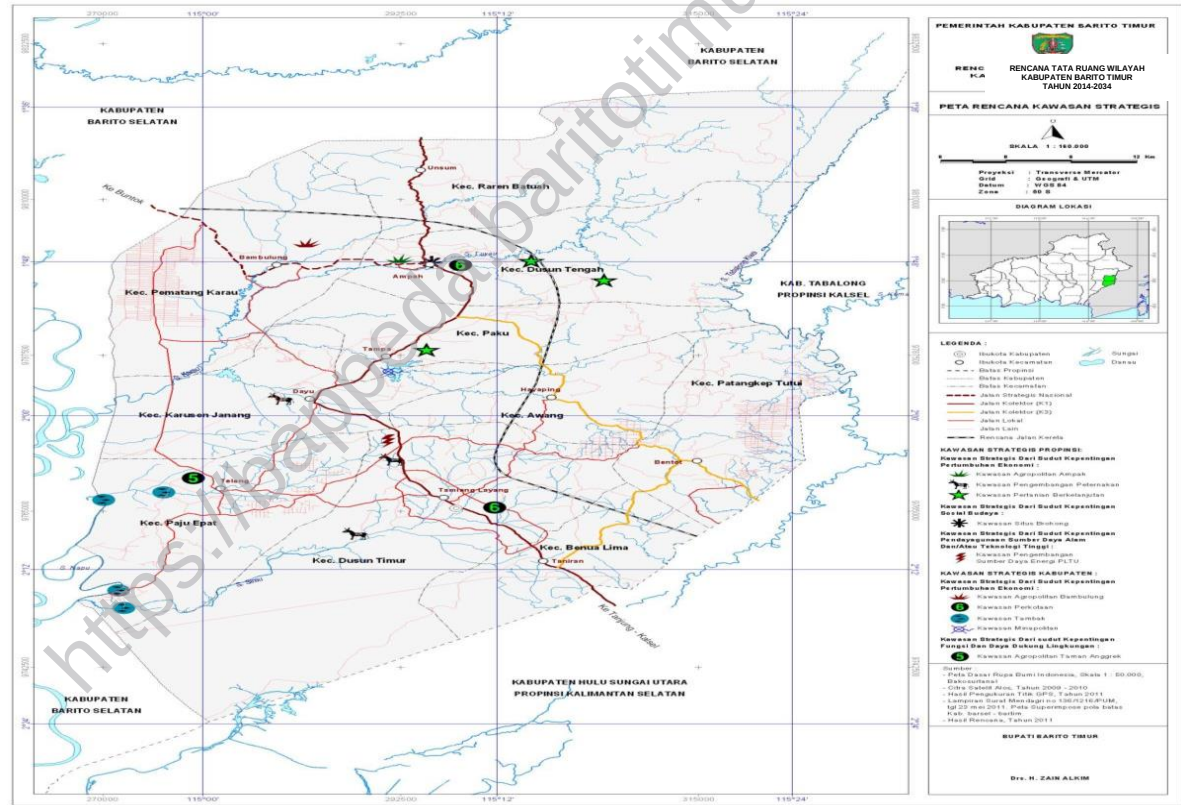
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi ini adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang, Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat; Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur; Desa Wuran, Ipu

Mea Kecamatan Karusen Janang; Desa Apar Batu, Janah Jari, Gunung Karasik Kecamatan Awang; Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; Desa Tarinsing Kecamatan Paku; Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (*stock pile* Batu Bara) terdapat di Desa Lalap.

Pengembangan kawasan strategis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan energi listrik yang diperlukan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kepentingan lainnya.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5
Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

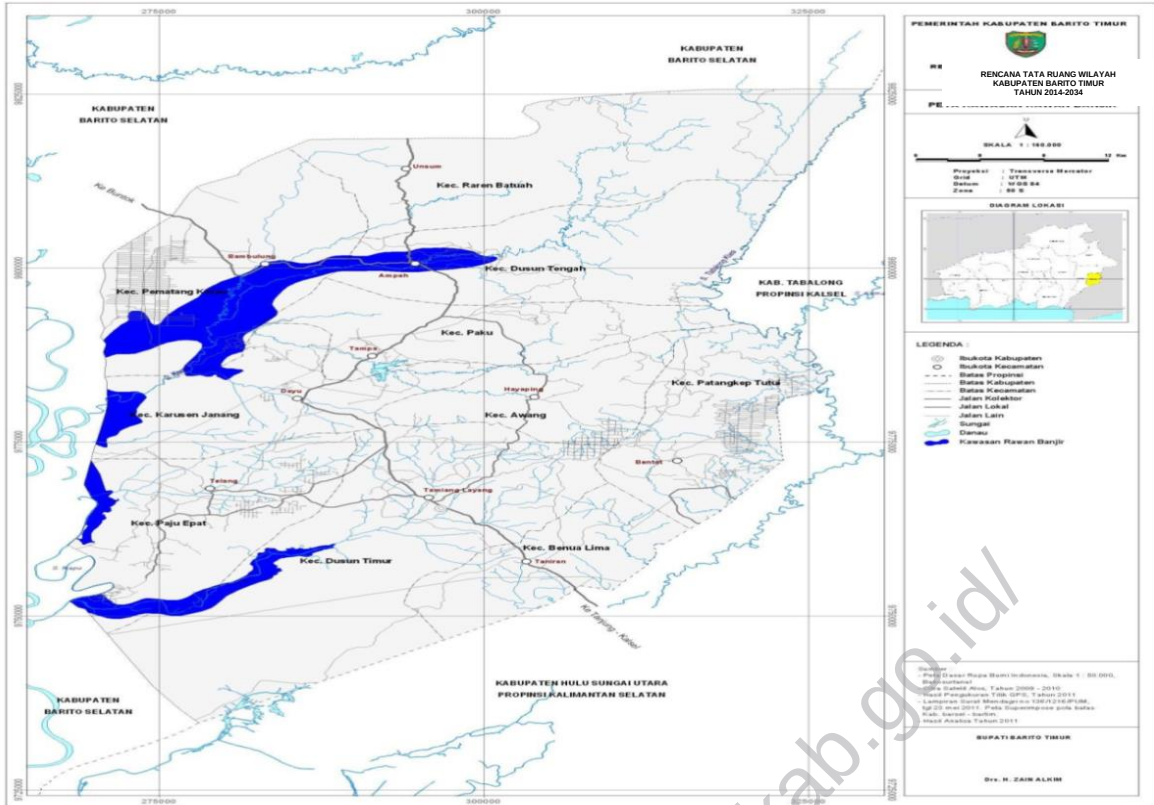


2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung. Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang rawan terkena bencana alam banjir dan tanah longsor.

Kabupaten Barito Timur mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana longsor, maupun banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana, hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Barito Timur umumnya berupa tanah longsor (erosi) dan banjir.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

2.1.9. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk menguantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Status DDLH kemudian

ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum.

A. Daya Dukung Pangan

Daya dukung energi pangan di Kabupaten Barito Timur di hitung berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dibandingkan dengan ketersediaan energi yang dapat didukung oleh tanaman pangan khususnya sawah di Kabupaten Barito Timur.

Tingkat ketersediaan energi pangan yang paling besar dapat ditemukan di Kecamatan Dusun Tengah yaitu mencapai 1.401 Kkal/tahun. Sedangkan untuk kebutuhan energi pangan tergolong besar ditemukan di Kecamatan Dusun Timur mencapai 21.678.718.750 KKal/tahun. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di kecamatan tersebut yang paling besar sehingga tingkat kebutuhan energi atau konsumsi pangannya pun juga semakin besar.

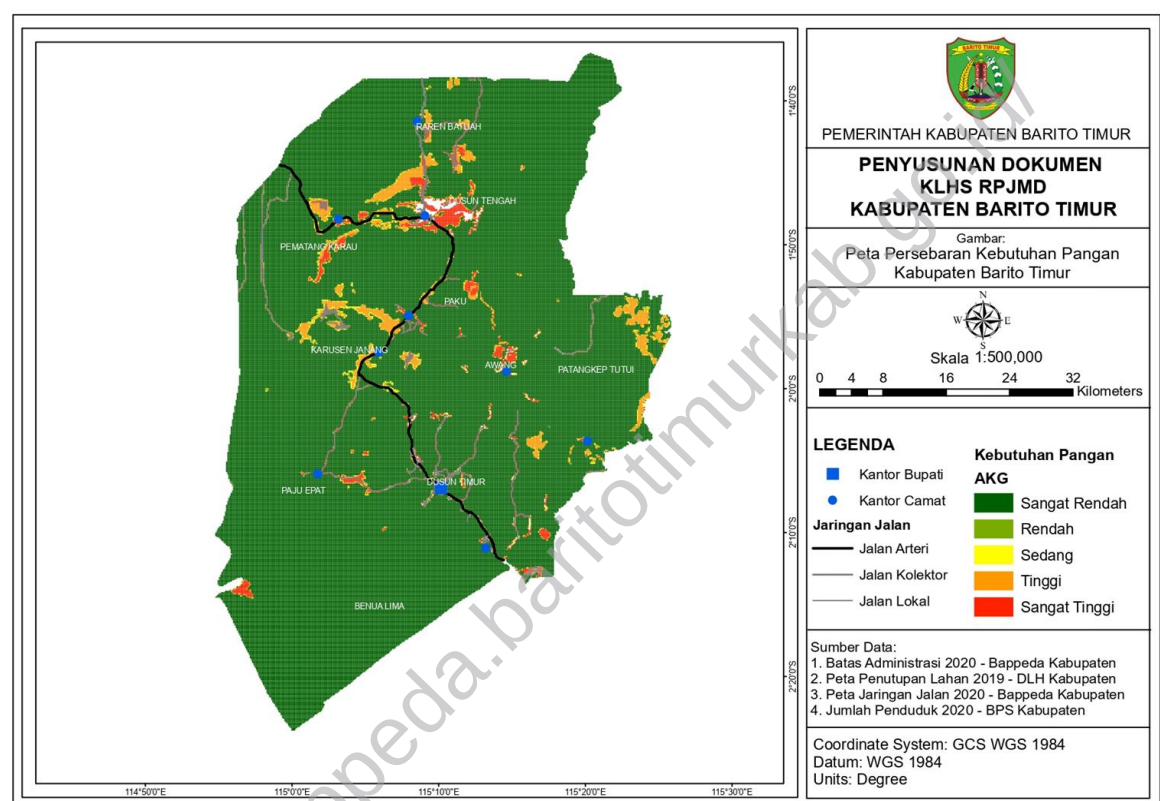
Gambar 2.7
Daya Dukung Pangan di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Kebutuhan Pangan (KKal)	Ketersediaan Pangan (KKal)	Daya Dukung Pangan (KKal)	Status
Awang	0.00	4,991,794,750.00	0.00	(4,991,794,750.00)	Defisit
Banua Lima	0.00	5,160,516,000.00	0.00	(5,160,516,000.00)	Defisit
Dusun Tengah	827.55	19,435,903,250.00	1,401.65	(19,435,901,848.35)	Defisit
Dusun Timur	0.00	21,678,718,750.00	0.00	(21,678,718,750.00)	Defisit
Karunsenjanang	0.00	4,080,700,000.00	0.00	(4,080,700,000.00)	Defisit
Pajuepat	0.00	4,688,881,250.00	0.00	(4,688,881,250.00)	Defisit
Paku	112.71	7,003,893,750.00	190.92	(7,003,893,559.08)	Defisit
Patangkeptutui	2.97	5,510,514,500.00	5.02	(5,510,514,494.98)	Defisit
Pematangkarau	794.50	10,108,364,750.00	1,345.52	(10,108,363,404.48)	Defisit
Rarenbatuah	0.00	6,753,558,500.00	0.00	(6,753,558,500.00)	Defisit

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

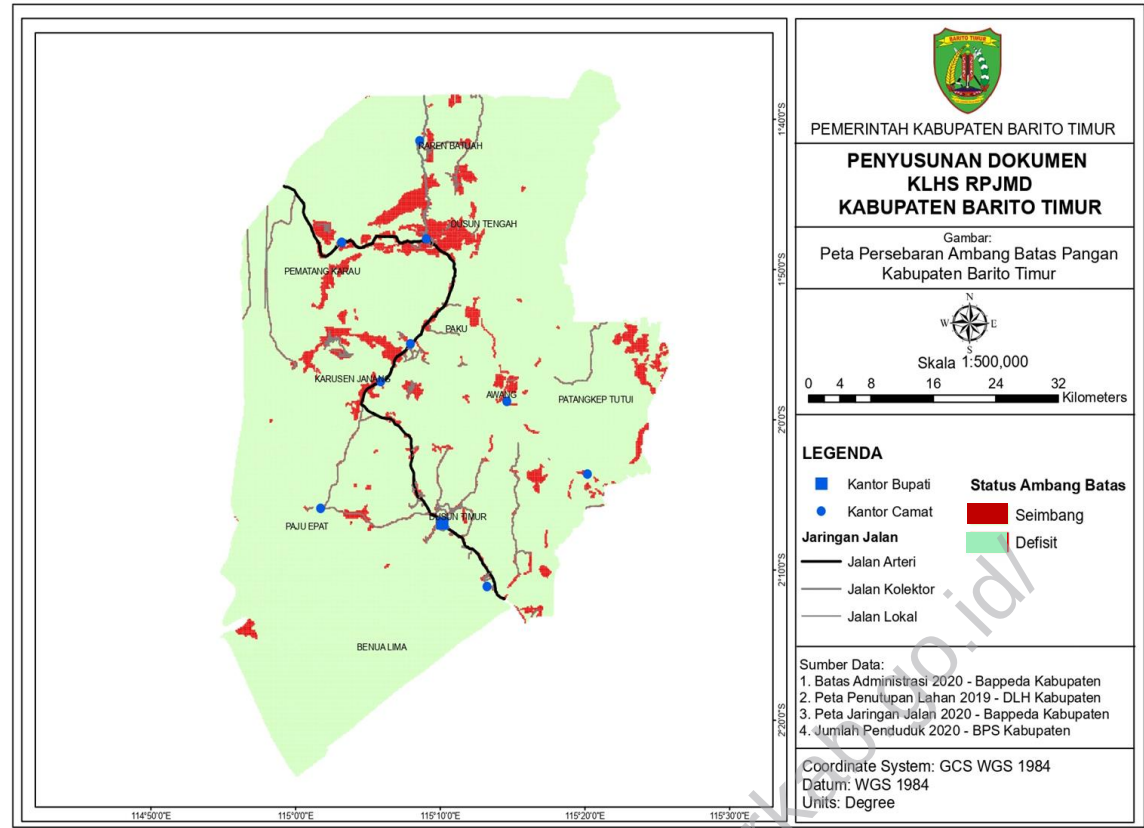
Status data dukung energi pangan di Kabupaten Barito Timur dapat dilihat dari selisih atau perbandingan antara energi pangan yang tersedia dengan kebutuhan energi setiap penduduk di tiap kecamatan dalam satu tahun. Kondisi daya dukung energi pangan dapat dilihat pada Tabel 3.3. Semua kecamatan di Kabupaten Barito Timur masih memiliki status energi pangan belum terlampaui atau defisit, artinya lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Barito Timur masih mampu mendukung kebutuhan pangan untuk masyarakat Barito Timur.

Gambar 2.8
Peta Kebutuhan Energi Pangan Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Energi Pangan Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

B. Daya Dukung Air

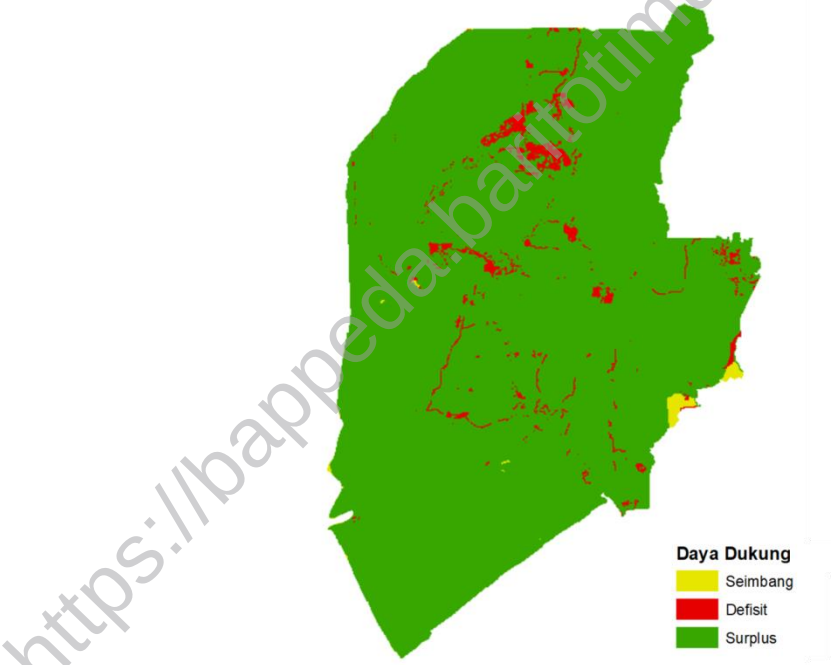
Daya dukung air di Kabupaten Barito Timur dilakukan berdasarkan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik. Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Barito Timur seluruhnya surplus.

Tabel 2.10
Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Timur

Kecamatan	Daya Dukung Air	Status
Awang	218425289.3	Surplus
Banualima	206609074.6	Surplus
Dusun Tengah	320369341.6	Surplus
Dusun Timur	980161161.5	Surplus
Karusenjanang	635541183.8	Surplus
Pajuepat	1373289839	Surplus
Paku	297807177.8	Surplus
Patangkeptutui	356144373.8	Surplus
Pematangkarau	703546440.4	Surplus
Rarenbatuah	243462731.3	Surplus

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Gambar 2.10
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan
RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023



C. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005).

Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

- Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
- Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
- Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Klasifikasi Jasa Lingkungan



No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:



- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan)
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Secara umum di Kabupaten Barito Timur lahan yang mampu menyediakan bahan pangan dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 127.382.03 ha. Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 81.875,75 ha.

Tabel 2.12
Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Grand Total
Awang	26.69426	1205.223341		19590.24	1160.128	21982.28185
Banua Lima	3843.632	1184.255934	3398.551423	11129.3	6988.228	26543.96793
Dusun Tengah	65.67089	16072.22273	10792.28851	20815.61	1992.919	49738.70708
Dusun Timur	28002.74	3752.442538	27929.82012	14776.35	12719.59	87180.93999
Karusen Janang	2233.344	597.8240621	28923.11039	4455.158	13152.61	49362.0511
Paju Epat	4163.48	102.5028936	34992.66781	1861.988	18235.28	59355.92123
Paku	733.3422	1250.758367	11849.10242	15594.06	5694.777	35122.03641
Patangkep Tutui	13.26355	2871.862945	106.9506537	26766.48	2994.479	32753.03585
Pematang Karau	16181.36	4601.560261	9389.545064	17079.51	15997.98	63249.95335
Raren Batuah	5175.463	25010.44129		22629.23	2939.753	55754.88664
Grand Total	60438.99	56649.09437	127382.0364	154697.9	81875.75	481043.7814

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

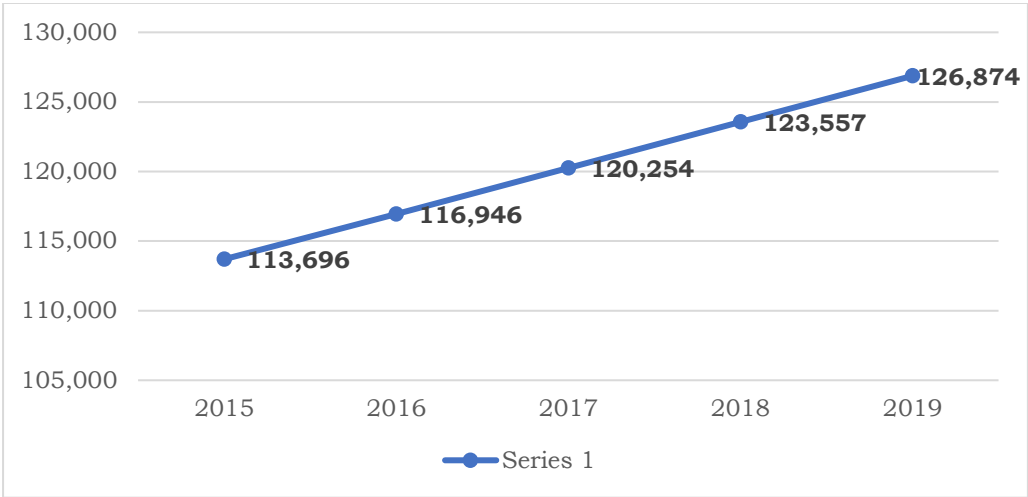
2.1.10. Kondisi Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek).

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur cenderung bertambah, pada tahun 2015 jumlah penduduk 113.696 jiwa dan pada tahun 2019 naik menjadi 126.874 jiwa. Ini menunjukkan terjadi pertambahan sebanyak 13.178 jiwa dalam empat tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur

Tahun 2015-2019



Sumber:

- 1. Barito Timur dalam Angka Tahun 2018 dan 2020
- 2. RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan tabel dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun 2019 ada di Kecamatan Dusun Timur yaitu 33.339 jiwa dan Dusun Tengah yaitu 27.426 jiwa, hal tersebut menggambarkan bahwa kedua Kecamatan dimaksud memiliki pusat kekuatan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Barito Selatan. Sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang kearah kota perdagangan.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Benua Lima	3.770	3.367	7.136
2	Dusun Timur	16.931	16.408	33.339
3	Paju Epat	2.764	2.492	5.256
4	Awang	3.227	3.077	6.304
5	Patangkep Tutul	5.409	4.781	10.190
6	Dusun Tengah	13.949	13.477	27.426
7	Raren Batuah	5.067	4.544	9.611

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Paku	4.637	4.314	8.951
9	Karusen Janang	3.085	2.887	5.972
10	Pematang Karau	6.580	6.110	12.690
	Barito Timur	65.419	61.455	126.874
	2018	63.689	59.868	123.557
	2017	61.962	58.292	120.254
	2016	60.246	56.700	116.946

Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

Secara administratif, Kabupaten Barito Timur terdiri atas 100 (seratus) desa dan 3 (tiga) kelurahan yang tersebar dalam 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Dusun Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yakni 867,70 km2 atau 22,63 persen dari total luas wilayah Barito Timur. Sementara itu, Karusen Janang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni 178,0 km2 (4,64 persen).

Tabel 2.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)
1	Benua Lima	258,0	6.686	26
2	Dusun Timur	867,7	28.493	33
3	Paju Epat	664,3	6.060	9
4	Awang	203,0	6.472	32
5	Patangkep Tutul	255,0	7.182	28
6	Dusun Tengah	371,0	26.020	70
7	Raren Batuah	186,0	8.811	47
8	Paku	272,0	9.371	34
9	Karusen Janang	178,0	5.261	30
10	Pematang Karau	579,0	13.365	23
	Barito Timur	3.834,0	117.721	31

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

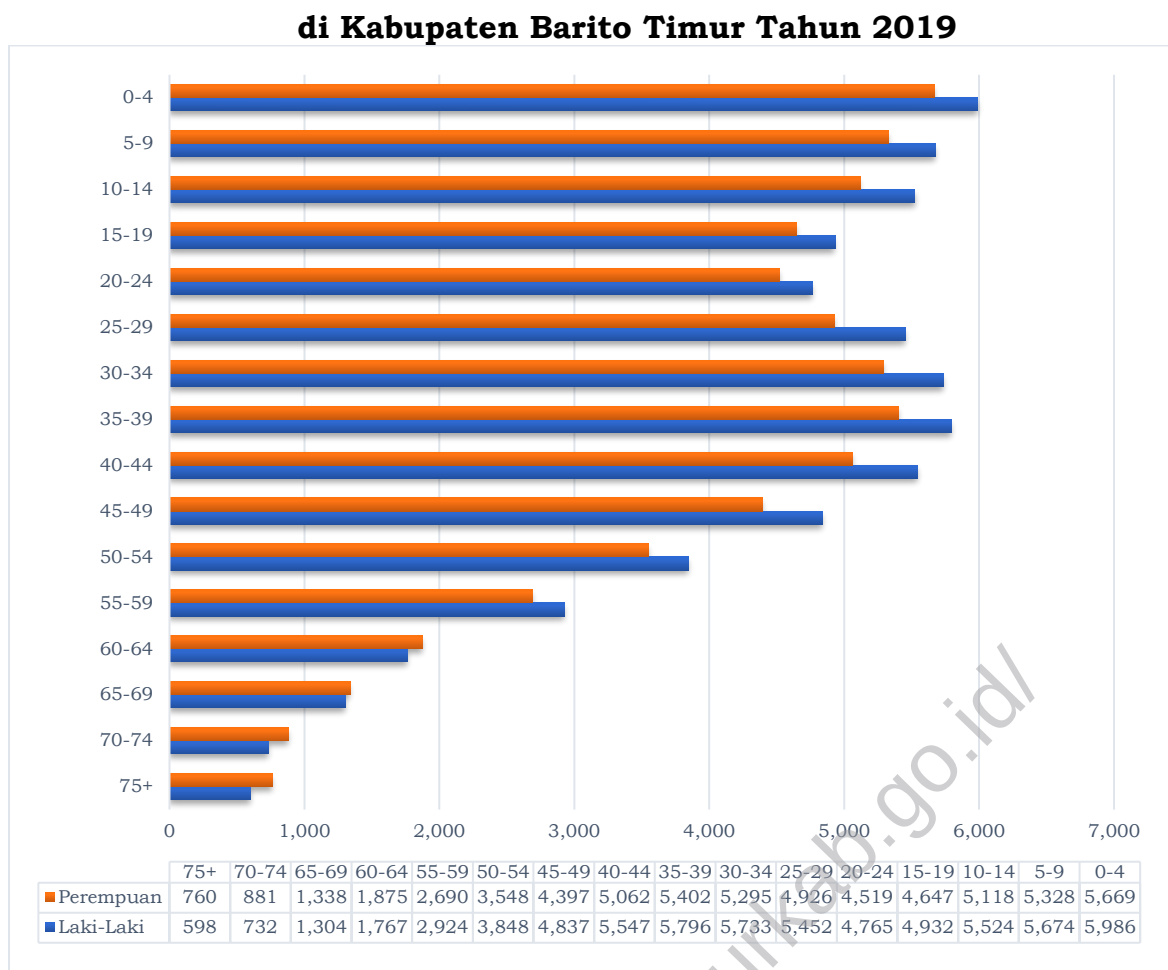
Persebaran penduduk di Kabupaten Barito Timur masih belum merata. Hampir 50 persen penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan yakni Dusun Timur dan Dusun Tengah, sedangkan sisanya tersebar di delapan kecamatan lain. Hal ini disebabkan oleh pusat pemerintahan yang



berlokasi di Kecamatan Dusun Timur (Kelurahan Tamiang Layang), serta tersedianya berbagai sarana/fasilitas perekonomian di Kecamatan Dusun Tengah khususnya di Kelurahan Ampah Kota. Posisi geografis Kecamatan Dusun Tengah cukup strategis karena berada di jalur Palangka Raya-Banjarmasin-Muara Teweh. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dusun Tengah menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 70 jiwa/km² mengingat tingginya aktivitas ekonomi di kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Paju Epat yang memiliki luas wilayah terbesar ke-2 di Kabupaten Barito Timur memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga kepadatan penduduk pun menempati posisi terendah, yakni hanya 9 jiwa/km².

Berdasarkan komposisinya, penduduk Barito Timur tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia muda dan dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada gambar dibawah ini adalah terjadi pengerucutan pada kelompok penduduk usia 15–24 tahun. Hal ini disebabkan karena pada umumnya penduduk pada usia tersebut sedang mengenyam pendidikan atau mencari pekerjaan di luar Kabupaten Barito Timur.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

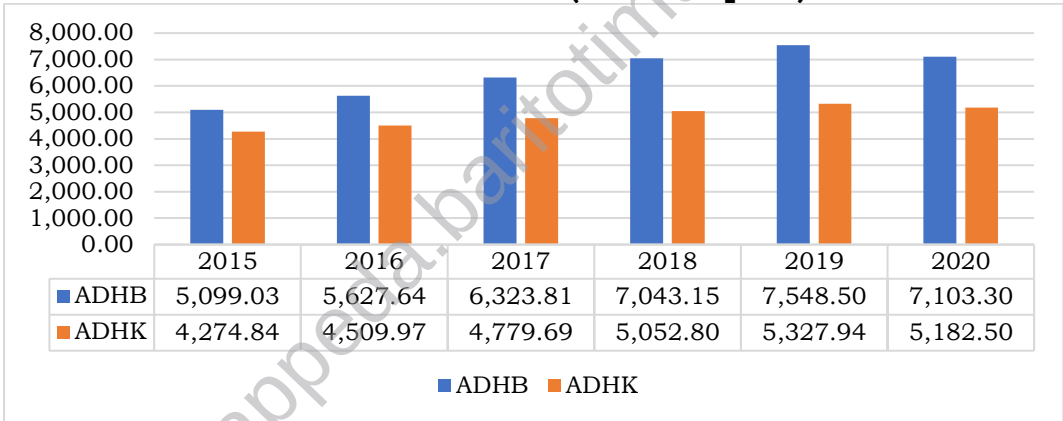
Aspek kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penyajiannya PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku nilainya mencapai 5.099,03 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 7.548,50 miliar, namun di tahun 2020 menurun menjadi 7.103,35 miliar. Sama halnya dengan PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK juga terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 nilainya mencapai 4.274,84 miliar dan pada tahun 2019 naik menjadi 5.327,94 miliar, namun menurun di tahun 2020 menjadi 5.182,50 miliar. Penurunan PDRB baik ADHK maupun ADHB pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Secara lengkap PDRB ADHK dan PDRB ADHB tahun 2015-2020 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.13
Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 dan ADHB
di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2020 (Miliar rupiah)



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2021

Distribusi PDRB Kabupaten Barito Timur sebagian besar masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sektor tersebut walaupun mendominasi komposisi distribusi PDRB terhadap lapangan usaha, namun angkanya cenderung menurun dalam enam tahun terakhir. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat pada tahun 2020 menjadi 19,67 persen yang semula 17,28 persen di tahun 2019.

Data kontribusi PDRB ADHB pada tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh sektor mengalami peningkatan, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan cukup besar. Secara lebih rinci laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2020 berdasar lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,81	19,03	18,47	17,34	17,28	19,67
B	Pertambangan dan Penggalian	39,17	37,40	37,13	37,69	35,86	28,02
C	Industri Pengolahan	6,60	7,06	7,33	6,99	7,02	8,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
F	Konstruksi	7,35	7,90	7,99	7,90	8,40	8,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,49	6,83	6,95	7,27	7,47	8,36
H	Transportasi dan Pergudangan	4,33	4,59	4,74	4,97	5,28	5,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,40	1,43	1,45	1,52	1,54
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,14	1,16	1,18	1,23	1,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,23	1,23	1,25	1,30	1,61
L	Real Estate	2,22	2,29	2,36	2,42	2,49	2,57
M, N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	3,92	3,94	4,05	4,26	5,20
P	Jasa Pendidikan	4,44	4,82	4,83	4,96	5,21	6,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,64	1,65	1,73	1,86	2,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,57	0,58	0,61	0,61	0,64	0,68
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2021
Keterangan: * Angka Smeentara ** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur pada periode 2015 sampai dengan 2019 terus menunjukkan tren yang positif. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,73 persen. Penurunan PDRB ADHK dari tahun 2019 ke 2020 menunjukkan bahwa selama tahun 2020



terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi mencapai 2,73 persen, lajunya lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,45 persen.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (Persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,03	3,91	6,37	4,38	4,59	3,15
B	Pertambangan dan Penggalian	1,10	3,44	4,57	5,32	4,89	-10,31
C	Industri Pengolahan	9,69	9,75	7,62	5,77	5,71	3,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,89	6,38	9,58	7,82	8,71	7,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,84	8,74	1,28	7,84	6,52	-1,31
F	Konstruksi	12,37	8,86	4,37	3,80	7,77	-5,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,81	8,94	8,81	8,40	4,26	4,70
H	Transportasi dan Pergudangan	8,21	9,46	7,81	8,00	7,49	0,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	8,87	7,99	8,13	5,75	-4,83
J	Informasi dan Komunikasi	11,96	9,83	9,35	8,42	7,87	4,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,46	10,12	7,83	8,20	7,95	11,83
L	Real Estate	4,95	4,44	8,74	5,86	4,36	-2,64
M, N	Jasa Perusahaan	5,89	5,43	8,20	7,84	5,58	-0,79
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,53	6,69	6,18	7,21	6,75	8,54
P	Jasa Pendidikan	9,98	9,95	8,84	8,12	7,40	7,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,98	8,98	7,79	7,91	7,69	7,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,89	7,91	8,70	6,93	5,86	0,15
Produk Domestik Regional Bruto		5,16	5,50	5,98	5,71	5,45	-2,73

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur, 2021

Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2015 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur mencapai 5,16 persen dan posisi tahun 2019 sebesar 5,45 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi -2,73 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi yang sudah bebas dari pengaruh inflasi terutama pada kategori pertambangan dan penggalian, serta subkategori tanaman pangan. Penurunan juga terjadi pada hampir seluruh kategori. Hal ini disebabkan



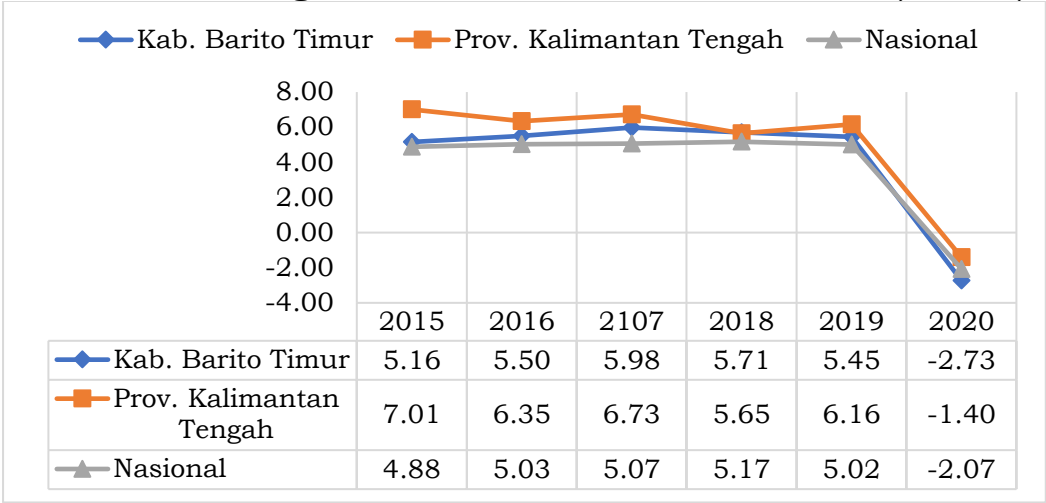
karena pandemi COVID-19, sehingga banyak lapangan usaha yang mengurangi bahkan memberhentikan sementara kegiatan usahanya.

Jika dirinci menurut lapangan usahanya, maka Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur, yaitu sebesar 0,63 persen dari pertumbuhan ekonomi Barito Timur yang sebesar -2,73 persen di tahun 2020. Kategori lainnya yang memberikan andil cukup besar adalah Jasa Pendidikan (0,38 persen); serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 persen). Sedangkan kontribusi kategori lain tidak signifikan.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2020 berada di urutan ke-11 dengan nilai sebesar -2,73 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar -1,40 persen. Posisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tepat berada di bawah Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan -2,67 persen, dan di atas Kabupaten Barito Selatan dengan laju pertumbuhan -2,91 persen. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan LPE nasional yang mencapai -2,07 pada tahun 2020, maka posisi LPE Barito Timur lebih rendah.

Gambar 2.14

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur dan BPS RI, 2021

2.2.2. PDRB Per Kapita

Apabila perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Timur diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk maka akan berdampak pada PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Barito Timur berdasarkan harga berlaku mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Barito Timur mengalami pertumbuhan sebesar 3,84 persen menjadi Rp 44,80 juta rupiah, dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,37 persen menjadi Rp 59,50 juta rupiah. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -8,30 persen menjadi Rp 54,56 juta rupiah. Untuk harga konstan tahun 2015 tumbuh sebesar 2,15 persen menjadi Rp. 37,60 juta, tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,69 persen menjadi Rp. 41,99 juta rupiah. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan -5,21 persen menjadi Rp. 39,81 juta rupiah.

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur

Tahun	PDRB Perkapita			
	ADHB	% Pertumbuhan	ADHK	% Pertumbuhan
2015	44,80	3,84	37,60	2,15
2016	48,10	7,30	38,60	2,57
2017	52,59	9,28	39,75	3,06
2018	57,00	8,40	40,89	2,89
2019	59,50	4,37	41,99	2,69
2020	54,56	-8,30	39,81	-5,21

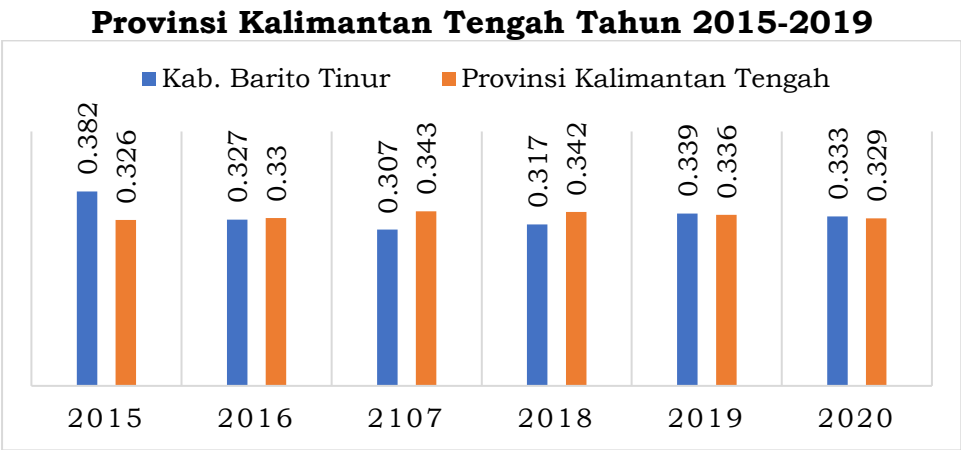
Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur, 2021

2.2.3. Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Barito Timur mengalami fluktuasi yang ditunjukkan oleh indeks gini. Pada tahun 2020, Kabupaten Barito Timur memiliki gini ratio sebesar 0,333 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1. Kondisi 2020 ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,339.

Bila dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah, maka gini ratio Barito Timur berada di bawah provinsi. Pada tahun 2020, gini ratio provinsi sebesar 0,329 yang berarti lebih rendah dibanding gini ratio Barito Timur yang mencapai 0,333. Nilai Gini Ratio Kabupaten Barito Timur dalam 6 (enam) tahun terakhir pada umumnya lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali pada tahun 2015, 2019 dan 2020.

Gambar 2.15
Gini Ratio Kabupaten Barito Timur dan



Sumber:
1. BPS Kabupaten Barito Timur, 2021
2. BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

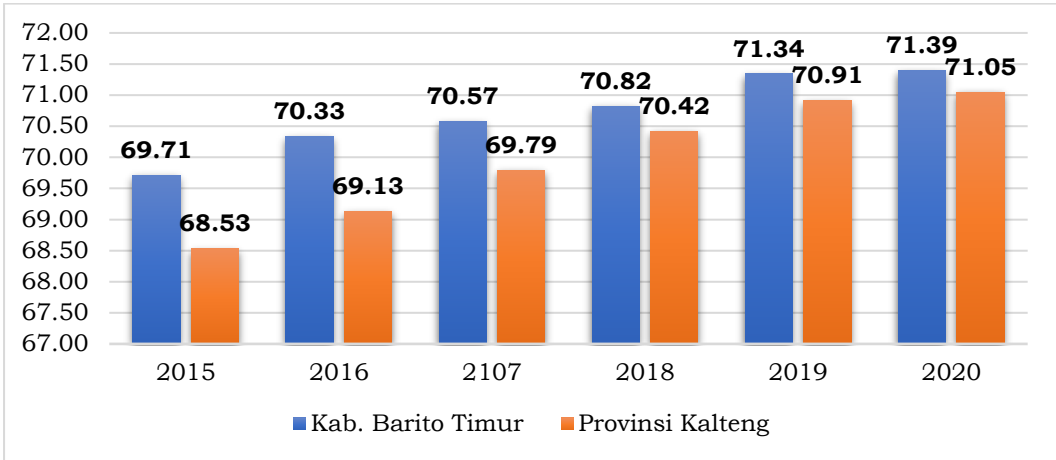
2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2020. IPM Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 mencapai 69,71 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 71,39. Nilai IPM Kabupaten Barito Timur selama periode tersebut selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah. Secara lengkap perkembangan IPM Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2020



Sumber:
1. Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS RI, 2020

Seluruh komponen pembentuk dari IPM Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam periode 2015-2020, kecuali pada komponen Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 11.000 ribu rupiah. Tahun berikutnya mengalami peningkatan, namun tahun 2020 kembali turun. Penurunan Pengeluaran Per Kapita tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh memburuknya kondisi perekonomian akibat pandemic COVID-19. Komponen penyusun IPM yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita dalam 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.18
Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,02	9,03	9,04	9,05	9,20	9,21
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,79	12,80	12,81	12,82	12,83
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,71	67,84	67,97	68,06	68,14	68,22
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	10.570	10.631	10.808	11.000	11.333	11.319
IPM	Poin	69,71	70,33	70,57	70,82	71,34	71,39

Sumber: BPS RI, 2021



2.2.5. Persentase Penduduk Miskin

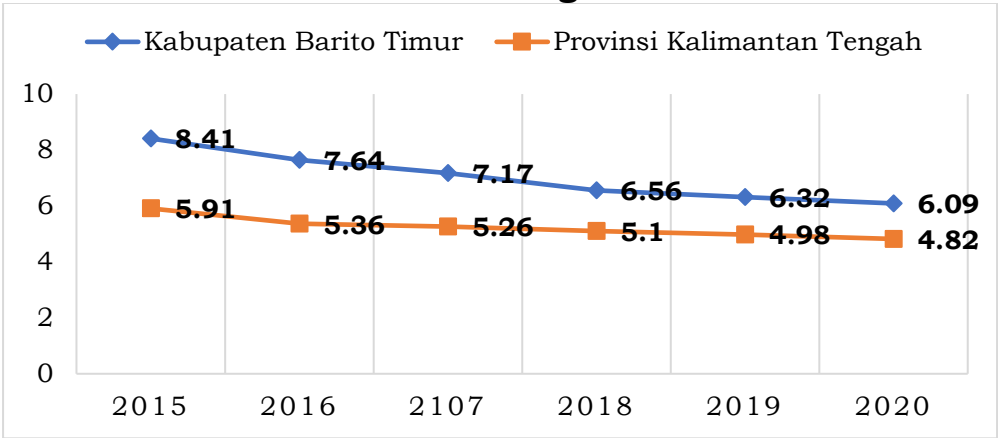
Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur dalam enam tahun terakhir sudah menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Timur sebesar 6,09 persen, atau turun dari tahun 2019 yang sebesar 6,32 persen. Sementara berdasarkan jumlahnya, banyaknya penduduk miskin di Barito Timur tahun 2020 adalah 7.876 orang. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah, maka posisi Barito Timur masih lebih tinggi. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,82%, turun 0,17 poin dibanding tahun sebelumnya.

Banyaknya penduduk miskin ini dipengaruhi oleh besarnya garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, menjadi faktor pendorong semakin bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Besarnya garis kemiskinan Kabupaten Barito Timur tahun 2020 adalah Rp517.183,- yang meningkat sebesar 6,16 persen dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2.17

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2020



Sumber: BPS RI, 2021

Selanjutnya perkembangan berbagai indikator kemiskinan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.19
Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Garis Kemiskinan (Rp)	415.710	442.070	467.090	478.510	487.185	517.183
2	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	9.510	8.880	8.560	8.050	7.970	7.880
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,41	7,64	7,17	6,56	6,32	6,09
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,29	0,97	1,01	0,72	0,55
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,15	0,34	0,21	0,25	0,12	0,08

Sumber: BPS RI, 2021

Selain masalah jumlah dan persentase penduduk miskin, sisi lain yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan evaluasi berbagai kebijakan penanggulangan datau penanganan kemiskinan, adalah permasalahan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan



menyatakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Barito Timur masing-masing sebesar 0,55 dan 0,08. Besarnya kedua indeks tersebut turun dibandingkan tahun 2019 yang masing-masing mencapai 0,72 dan 0,12. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Barito Timur cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan dengan menurunnya nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di wilayah tersebut.

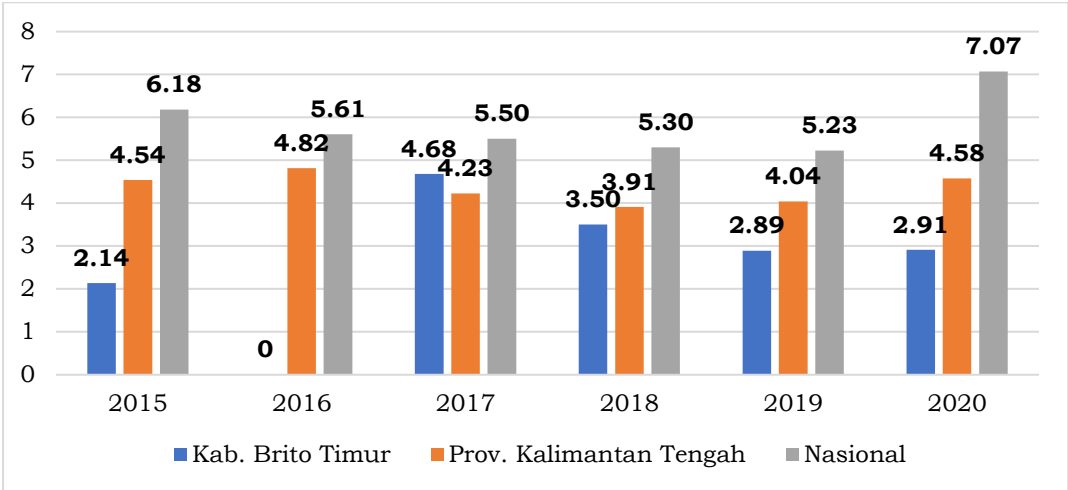
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Berdasarkan data BPS, TPT Kabupaten Barito Timur pada periode 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. TPT terendah terjadi pada Agustus 2019, yakni sebesar 2,89 persen dan yang tertinggi mencapai 4,68 persen tahun 2017. TPT tahun 2020 sebesar 2,91 persen, mengalami peningkatan 0,02 poin dari keadaan Agustus 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 berdampak pada meningkatnya pengangguran di Barito Timur sebanyak 2.148 orang. Walau mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, namun TPT Barito Timur tetap jauh di bawah TPT Provinsi Kalimantan Tengah (4,58 persen) maupun nasional (7,07 persen).

Gambar 2.18

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Barito Timur dan BPS RI, 2021, diolah

2.2.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Secara nasional capaian IPG tahun 2019 adalah 90,99. Jika melihat standar ini, Kabupaten Barito Timur masih jauh dibawah, artinya kesenjangan pembangunan perempuan dan laki-laki masih besar. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang luas. Tetapi terkadang yang terjadi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan menjadi semacam budaya yang tidak bisa dihapus, terutama kepercayaan terhadap perempuan di bidang politik, karena memang pada kenyataannya di Kabupaten Barito Timur partisipasi aktif perempuan dalam kancah politik sangat kurang. Akses dan kurangnya rasa percaya masyarakat sendiri terhadap perempuan sangat berpengaruh pada kemajuan IPG di Kabupaten Barito Timur.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender pencapaian yang didapat berdasarkan hasil survey tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 88,7 untuk Kabupaten Barito Timur. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yaitu 88,41, artinya terjadi peningkatan dalam kemajuan pembangunan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan sebuah indikator yang memberi informasi sejauhmana perempuan terlibat dalam bidang ekonomi dan politik. Nilai IDG Kabupaten Barito Timur selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) mengalami peningkatan, dengan pencapaian terakhir tahun 2019 sebesar 82,67. Walau menunjukkan peningkatan, nilai IDG Barito Timur masih berada di bawah IDG Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 83,20 pada tahun 2019. Peningkatan IDG baik di kabupaten maupun provinsi menunjukkan bahwa perempuan di wilayah tersebut telah memiliki peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2107	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
1. Kab. Barito Timur	88,16	-	88,36	88,41	88,76
2. Provinsi Kalimantan Tengah	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
1. Kab. Barito Timur	75,80	-	76,46	76,50	82,67
2. Provinsi Kalimantan Tengah	77,87	78,23	79,36	77,03	83,20

Sumber: BPS RI, 2020

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan



umum terdiri dari dua aspek yakni fokus layanan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

2.3.1.1. Pendidikan

Indikator tingkat perkembangan pendidikan salah satunya dapat dievaluasi dengan melihat unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

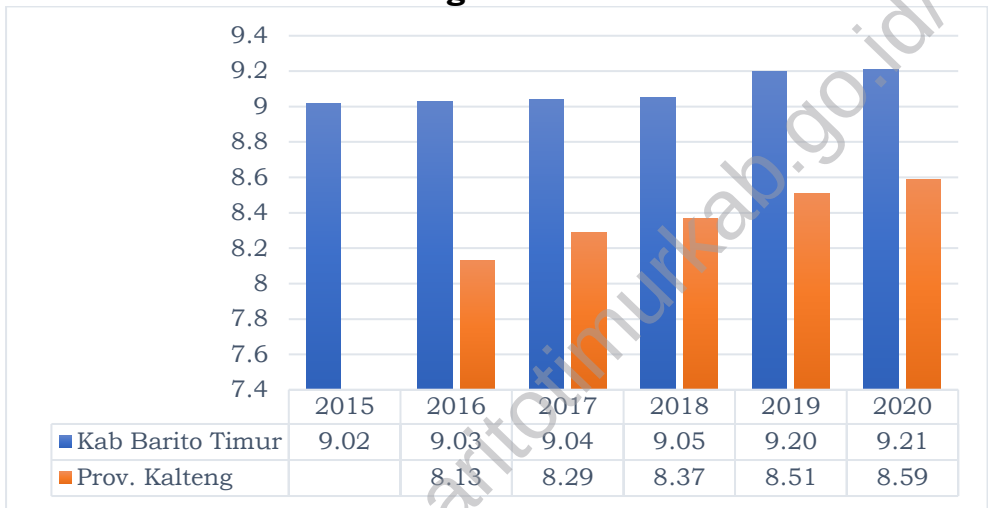
1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena

digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Sepanjang tahun 2016–2020, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Barito Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Barito Timur telah mencapai 9,21 tahun atau setara dengan SMP kelas 3. Angka ini meningkat 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Besarnya nilai rata-rata lama sekolah Barito Timur ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya sebesar 8,59 tahun saja.

Gambar 2.19
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

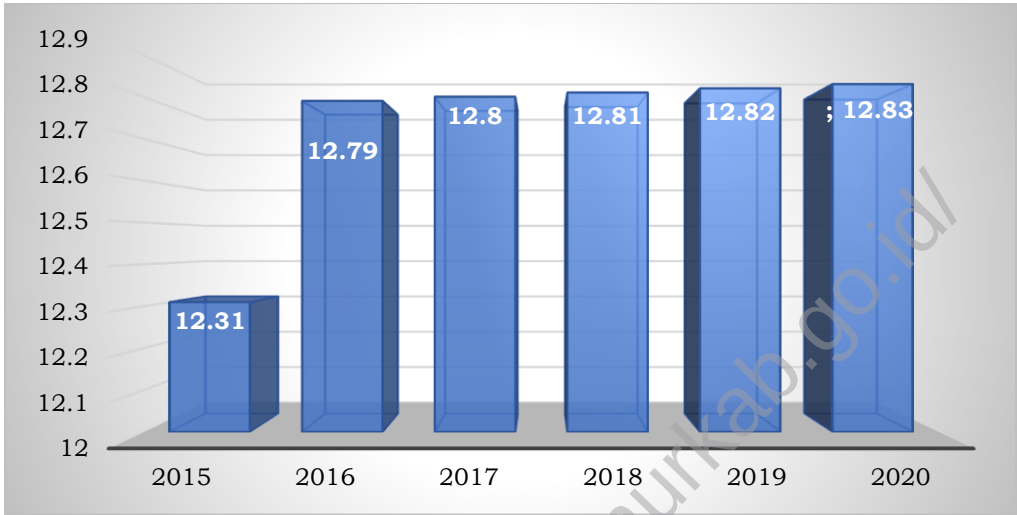
2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan Lama Sekolah ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Timur 2020 mencapai 12,83 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur

7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 12 hingga 13 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan jenjang SMA/SMK maupun kuliah. Rincian kenaikan HLS dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca dan menulis merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang

baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. AMH Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 sebesar 99,45 persen. Nilai AMH yang hampir mendekati 100 persen ini, menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Barito Timur sudah mampu membaca dan menulis baik huruf latin, arab, maupun lainnya. Sementara berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini terlihat dari besarnya AMH laki-laki di Barito Timur tahun 2020 sebesar 99,84 persen dibandingkan AMH perempuan sebesar 99,05 persen.

Tabel 2.21
Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2020

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki (%)		100,00	99,61	99,45	99,73	99,84
Perempuan (%)		99,32	97,33	99,70	98,86	99,05
Laki-laki + Perempuan (%)	96,19	99,67	98,50	99,57	99,30	99,45

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020.

Indikator lainnya pada urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015–2019

Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB	Persen	109,65	109,65	92,07	103,68	91,36
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs/SMPLB	Persen	118,5	101,32	76,1	105,9	80,51
3	Angka partisipasi kasar SLTA/ MA/ SMK	Persen	103	98,38	70,79	73,71	
4	Angka partisipasi murni SD/ MI/SDLB	Persen	99	97	98,47	99,42	99,19



Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
5	Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB	Persen	105	77,36	75,33	74,29	75,71
6	Angka partisipasi murni SLTA/ MA/ SMK	Persen	115	71,24	59,02	64,96	63,99
7	Angka partisipasi sekolah SD/ MI	persen	97,7	100	100	99,42	99,51
8	Angka partisipasi sekolah SLTP/ MTs	persen	95,99	97,11	94,59	93,66	93,77
9	Angka partisipasi sekolah SLTA/ MA/ SMK	persen	64,45	65,38	70,64	72,91	69,97
10	Rasio Murid terhadap Guru SD Negeri	Per 1 guru	7	7	8	8	8
11	Rasio Murid terhadap Guru SD Swasta	Per 1 guru	8	11	10	11	10
12	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Negeri	Per 1 guru	8	9	9	9	10
13	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Swasta	Per 1 guru	10	11	9	9	10
14	Rasio Murid terhadap Guru SLTA Negeri	Per 1 guru	9	9	10	10	11
15	Rasio Murid terhadap Guru SMK Negeri	Per 1 guru	7	7	8	9	9
16	Rasio Murid terhadap Guru SLTA/SMK Swasta	Per 1 guru	7	10	7	8	9
17	Rasio murid SD Negeri terhadap sekolah		80	79	77	79	81
18	Rasio murid SD Swasta terhadap sekolah	Rasio	151	179	167	174	180
19	Rasio murid SLTP Negeri terhadap sekolah	Rasio	157	160	162	163	170
20	Rasiomurid SLTP Swasta terhadap sekolah	Rasio	188	184	183	185	200
21	Rasiomurid SLTA Negeri terhadap sekolah	Rasio	212	232	238	240	245
22	Rasio murid SMK Negeri terhadap sekolah	Rasio	216	221	235	235	240
23	Rasio murid SLTA/SMK Swasta terhadap sekolah	Rasio	152	154	153	155	160
24	Angka putus sekolah SD/MI/SDLB	Persen	8	8	7	6	6
25	Angka Putus Sekolah SMP/ MTs/SMPLB	Persen	0	0	3	3	2
26	Angka putus sekolah SMA/ SMK/MA	persen	0	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur 2015-2019



2.3.1.2. Kesehatan

Pada bagian ini disajikan kinerja beberapa indikator di bidang Kesehatan pada beberapa tahun terakhir.

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

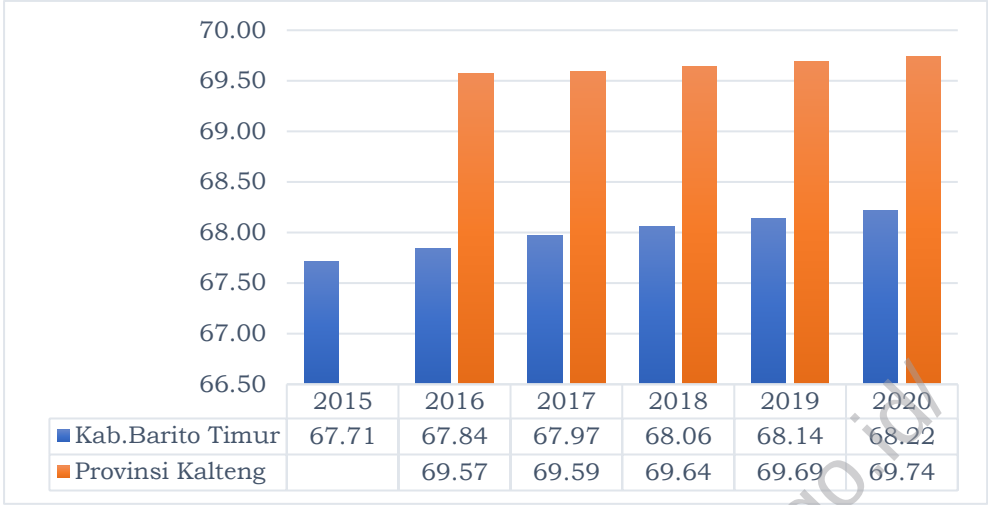
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata lama hidup seseorang dari sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa selama enam tahun terakhir (2015-2020), AHH masyarakat Kabupaten Barito Timur masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Namun demikian, besarnya AHH Barito Timur terus mengalami peningkatan. Besarnya AHH Barito Timur tahun 2020 adalah 68,22 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 68,14 tahun. Sementara itu, AHH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 69,74 tahun meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 69,69 tahun. Semakin meningkatnya AHH ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain kondisi ini perlu diwaspadai karena memungkinkan terjadinya peningkatan penduduk usia lanjut. Dengan meningkatnya penduduk berusia lanjut, semakin besar pula beban ketergantungan bagi penduduk usia produktif. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan kesehatan masyarakat pada waktu tertentu merupakan gambaran dari kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Keadaan ini ditandai dengan ada tidaknya keluhan kesehatan yang dirasakan masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Indikator inilah yang dikenal dengan Angka Kesakitan (Angka Morbiditas). Semakin tinggi angka morbiditas,

menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang merasakan gangguan akibat keluhan kesehatan

Gambar 2.21
Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

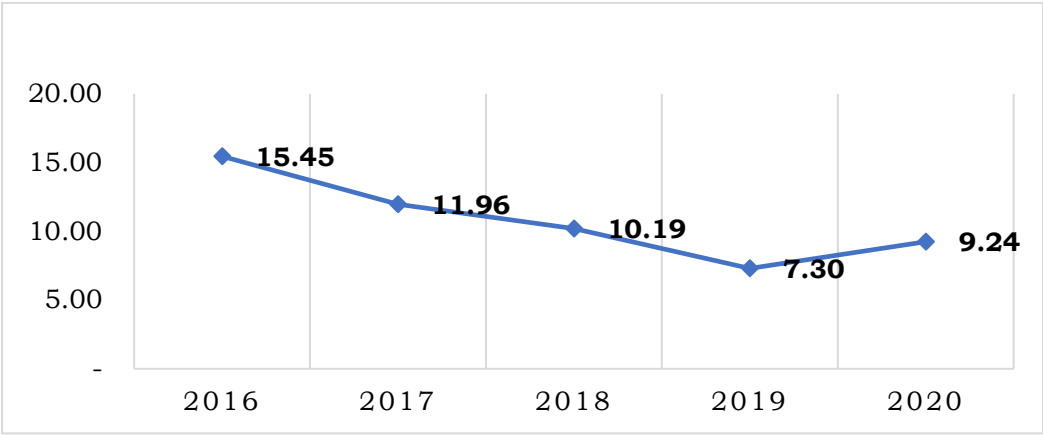


Sumber:
1. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS, 2020
2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur, BPS, 2020.

2. Angka Kesakitan (Angka Morbiditas)

Berdasarkan hasil Susenas, angka morbiditas Kabupaten Barito Timur selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kecenderungan menurun. Tahun 2019, angka morbiditas Barito Timur sebesar 7,30 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,19 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 angka morbiditas meningkat kembali mencapai 9,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah mewabahnya pandemi covid 19 yang membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Gambar 2.22
Angka Kesakitan (Angka Morbiditas)
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016–2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020.

3. **Angka Kematian Ibu dan Bayi**

Angka kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian Ibu di Barito Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya yang terlihat pada tahun 2017 yang mencapai angka 50 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan hingga menjadi hanya 2 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal. Disamping itu AKB juga berhubungan dengan pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi di Barito Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2017 sebanyak 6 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2016 hanya 2 kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Di tahun 2019 angka kematian bayi di Kabupaten Barito Timur adalah yang tertinggi yaitu 15 kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.23
Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	1/1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	6/1000 KH	9/1000 KH	15/1000 KH
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.000 KH	208/100.000 KH	52/100.000 KH	50/100.000 KH	0/100.000	2/100.000 KH

Sumber:

- Dinas Kesehatan Barito Timur Tahun 2018
- RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021

4. Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan, tetapi juga dari ketersediaan dan kemudahan mencapai fasilitas untuk pergi berobat. Dari informasi tersebut, dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk baik dalam mengakses maupun memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan, serta faktor sosial ekonomi.

Pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan kualitas maupun kuantitas baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Timur yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri atas 1 unit rumah sakit yakni RSUD Tamiang Layang yang berlokasi di Tamiang Layang, 11 unit puskesmas, 246 unit posyandu, dan 69 unit poskesdes yang tersebar di 10 kecamatan.

Tabel 2.24
Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015–2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Fasilitas Kesehatan (Unit)					
1. Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2. Puskesmas	11	11	11	11	11
3. Posyandu	163	164	164	164	246
4. Poskesdes	69	69	69	69	69
Tenaga Kesehatan (Orang)					
1. Dokter Spesialis	5	5	9	11	9
2. Dokter Umum	23	19	35	22	23
3. Dokter Gigi	5	6	5	3	2
4. Perawat	168	232	274	259	213
5. Bidan	151	183	214	198	176

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020.

Jumlah tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan bidan masih perlu ditingkatkan karena belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Tenaga kesehatan yang bertugas di Barito Timur tahun 2019, terdiri atas dokter spesialis sebanyak 9 orang, dokter umum 22 orang, dokter gigi 3 orang, perawat 213 orang, dan bidan 176 orang.

Adapun Indikator lainnya di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Indikator Urusan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015–2020

Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	jumlah/persen	1936/94	1508/104	2213/82,64	2105/94,31	2105/78,17	1862/82
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	jumlah/persen	296/82	121/100	1974/77,17	1856/72,22	1856/72,22	1675/78
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi aru lahir sesuai standar	jumlah/persen	1971/110	1887/74	1973/84,57	1875/76,60	1875/76,60	1819/89
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehtan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	jumlah/persen	9039/87	8011/74	8481/88,61	8487/89,00	8487/89	5988/45



Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	jumlah/persen	2608/96	-	3906/121,76	3208/82	7714/59	2512/112
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	jumlah/persen	15189/87	11834/59	5829/96,35	41441/62,42	41441/62,42	11198/62
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/persen	-	-	-	1773/84	12270/132	2203/22
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/persen	-	-	-	6051/100	6554/20	3653/85
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/persen	-	-	-	4206/100	1371/107	979/89
10	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kabupaten yang mendapat pelayanan	jumlah/persen	-	-	-	196/100	273/176	167/88



Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun							
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/persen	-	-	-	306/4 9,02	103/3 1,8	341/2 0
12	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/persen	-	-	-	6/100	633/2 3	1076/ 40
13	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen		82,63	100	100	100	100
14	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen		77,17	100	100	100	100
15	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen		84,56	100	100	100	100
16	Pelayanan kesehatan balita	Persen		88,61	100	100	100	100
17	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen		121,7 6	100	100	100	100
18	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen		96,34	62,42	100	100	100
19	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen		84,42	100	100	100	100
20	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen		18,37	100	100	100	100
21	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (dm)	Dm		17,09	100	100	100	100



Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (odgi) berat	Persen		7,14	100	100	100	100
23	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (tb)	Persen		107,6 ₄	49,01	52,67	63,07	65,82
24	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv	Persen		100	100	100	100	100
25	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	Persen	94,41	103,5 ₇	96,03	72,01	73,43	85,23
26	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	82,45	25,83	88,43		35,61	
27	Cakupan pertolongan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	110,67	104,1 ₉	110,7 ₄	100	100	100
28	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,87	134,1 ₁	101,1 ₁	100	100	100
29	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	77,09	87,84	82,65		20,33	23,69
30	Cakupan kunjungan bayi	Persen	96,92	70,01	72,48	72,68	73,30	78,40
31	Cakupan desa/ kelurahan uci	Persen	84,62	89,39	91,35	100	100	100
32	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	87,08	104,8 ₄	87,07	100	100	100
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	Persen	58,43	99,14	57,63	59,60	64,63	67,73
34	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	0,4	100	0,4	100	100	100



Uraian		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
35	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	96,52	95,05	104,57	100	100	100
36	Cakupan Peserta KB aktif	Persen	87,71	91,48	95,56	96,42	97,35	98,12
37	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita pneumonia balita	Persen	34,7	36,35	42,1	42,31	43,12	43,57
38	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita baru TB BTA +	Persen	48,23	71,23	72,09	75,23	76,12	76,23
39	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penderita DBD yang ditangani	Persen	87,1	94,05	85,71	86,31	86,71	86,91
40	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penemuan penderita Diare	Persen	36,65	34,65	36,02	37,12	37,52	38,02
41	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	36,96	36,96	36,72	37,28	42,03	42,58
42	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	8,87	1,73	8,85	8,85	9,25	9,85
43	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	Persen	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Epidemiologi < 24 jam							

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur 2017-2019

Selain uraian kinerja di atas, Barito Timur juga telah menerapkan kebijakan nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan upaya mendukung penurunan Stunting. Tujuan dari Germas adalah menurunkan beban penyakit; Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Bentuk kegiatan Germas di Barito Timur meliputi aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban. Pelaku Germas adalah semua komponen bangsa, yakni (1) Pemerintah, baik pusat maupun daerah, (2) Dunia pendidikan, (3) Swasta dan dunia usaha, (4) Organisasi kemasyarakatan, dan (5) Individu, keluarga dan masyarakat.

Tabel 2.26
Indikator GERMAS

No	Uraian Kegiatan	Indikator (2020)	
		Jumlah	%
1	Keluarga Mengikuti Program KB	7.290	25,30%
2	Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	1.675	78,00%
3	Bayi mendapatkan Imunisasi Lengkap	1.763	97,00%
4	Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif	839	47,00%
5	Balita Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan	71.363	32,00%
6	Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur	1.505	-
7	Penderita Sakit Jiwa Mendapatkan Pengobatan dan Tidak Mendapatkan Pengobatan	188	-
8	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	48.215	67,00%
9	Keluarga mempunyai Akses Air Minum	18.536	88,20%
10	Keluarga Mempunyai Akses menggunakan Jamban Sehat	19.146	89,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Barito Timur, 2021

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Tahun 2018, melalui hasil RISKESDAS, Kab.

Barito Timur ditetapkan sebagai kabupaten prioritas penanganan stunting nasional. Jumlah desa lokus stunting pada tahun 2018 dan 2019 adalah 10 desa, tahun 2020 sebanyak 53 dan tahun 2021 sebanyak 42 desa lokus.

Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM, stunting di Barito Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 25,86 persen menjadi 18,63 persen, walau demikian upaya penurunan stunting harus terus menjadi perhatian. Adapun kondisi stunting di Barito Timur pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.27
Gambaran Stunting di Barito Timur Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Balita Ditimbang 2019	Jumlah Stunting	Tahun 2019	Jumlah Sasaran Balita Ditimbang 2020	Jumlah Stunting	Tahun 2020
				%			%
1	Pasar Panas	6	0	0,00%	230	55	23,91%
2	Tamiang Layang	412	100	24,27%	710	136	19,15%
3	Edison Jaar	302	112	37,09%	600	71	11,83%
4	Hayaping	107	13	12,15%	300	71	23,67%
5	Bentot	306	70	22,88%	442	69	15,61%
6	Ampah	648	111	17,13%	1278	287	22,46%
7	Bambulung	387	147	37,98%	536	118	22,01%
8	Telang Siong	145	37	25,52%	358	40	11,17%
9	Unsum	57	23	40,35%	376	95	25,27%
10	Tampa	80	21	26,25%	400	41	10,25%
11	Dayu	9	2	22,22%	244	37	15,16%
total kabupaten		2459	636	25,86%	5474	1020	18,63%

Sumber: Dinas Kesehatan Barito Timur, 2021

Gambaran kondisi stunting Kabupaten Barito Timur dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Determinan Yang Memerlukan Perhatian

Faktor determinan yang menjadi kendala dalam perbaikan status gizi baduta:

1. Masih rendah jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif.
2. Pola asuh/pola makan yang kurang tepat (pemberian MP ASI terlalu dini, MP ASI tidak seimbang).
3. Kurangnya haigine perorangan (cuci tangan pakai sabun, kebiasaan menggunakan air sungai dan sumber air tidak



- terlindungi) khusus desa lokus stunting dan Kec. Pemantang Karau, Kec. Dusun tengah serta Kec. Patangkep Tutui.
4. Masih ditemukan masyarakat BABS sembarangan, khususnya desa lokus stunting (angka stunting tinggi) dan Kec. Pemantang Karau, Kec. Dusun Tengah, Kec. Awang, Kec Paju Epat dan Kec. Patangkep Tutui
 5. Kurangnya sarana air bersih yang layak khususnya di desa lokus stunting dan dan Kec. Pemantang Karau, Kec. Dusun tengah serta Kec. Patangkep Tutui.
 6. Kejadian Diare masih cukup tinggi karena masuk dalam 10 besar penyakit terbanyak Kabupaten Barito Timur.
 7. Penyakit penyerta lainnya antara lain ISPA, penyakit menular (TB anak).
 8. Kunjungan bayi/balita masih rendah.
 9. Masih terdapat bumil kurang Energi kalori (KEK) oleh beberapa faktor antara lain asupan gizi yang kurang, faktor sosial ekonomi, masa emesisi/ngidam.
 10. Masih terdapat bumil anemia (kurangnya asupan makanan besumber zat besi).
 11. Kepatuhan Ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (Fe) masih rendah.
 12. Masih ada kebiasaan/tradisi pantangan untuk ibu hamil dan ibu nifas (makanan).
 13. Kebiasaan keluarga perokok.

B. Perilaku Kunci RT 1000 HPK yang Masih Bermasalah

1. Pola asuh/pola makan yang kurang tepat ibu hamil, ibu menyusui dan bayi/baduta (ASI Eksklusif, pemberian MP ASI terlalu dini, MP ASI tidak seimbang).
2. Masih rendah pola hidup ber PHBS.
3. Tingkat kepatuhan Ibu hamil minum tablet Fe masih kurang.
4. Makanan pantangan/pamali saat ibu hamil dan ibu nifas.



C. Kelompok Sasaran Beresiko

Kelompok sasaran yang beresiko antara lain: Remaja putri, Ibu hamil Anemia, Ibu hamil KEK, Bayi BBLR, dan Bayi.

D. Rencana Tindak lanjut

Dari hasil analisis masalah di tingkat desa perkecamatan maka rencana tindak lanjut antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan orientasi PMBA bagi kader .
2. Ibu hamil lebih aktif lagi mengikuti kelas ibu hamil.
3. Penyuluhan tentang PHBS.
4. Penyuluhan isi piring ku.
5. Penyuluhan ASI Eksklusif.
6. Meningkatkan kerjasama lintas sektor (BAPEDDA, DPMD, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Diskominfo, Dinas PUPR, PEMDA, Kecamatan, Kades, Kader/Tim PKK desa).
7. Sosialisasi dan pemberian tablet Fe untuk remaja putri.
8. Intervensi PIS-PK.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengolahan air didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau pedesaan), karakteristik tata guna lahan/*Center of Business Development* (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Berdasarkan penentuan wilayah tersebut maka terdapat 20 desa/kelurahan yang merupakan area dengan tingkat resiko menengah dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka menengah melalui perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut dilakukan dengan program pemucuan (CLTS) dan sistem komunal karena dilakukan pada daerah padat penduduk, 20 desa/kelurahan tersebut tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pematang Karau (Desa Ketab dan di pinggir sungai)
2. Kecamatan Dusun Tengah (Desa Rodok, Desa Ampah II, Desa Putai, Desa Sumber Garunggung)
3. Kecamatan Raren Batuah (Desa Unsum, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung)
4. Kecamatan Paku (Desa Patung dan Desa Kalamus)
5. Kecamatan Karusen Janang (Desa Dayu)
6. Kecamatan Paju Epat (Desa Tampu Langit, Desa Juru Banu, Desa Kalinapu)
7. Kecamatan Dusun Timur (Desa Haringen)
8. Kecamatan Patangkep Tutui (Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Pulau Padang)
9. Kecamatan Awang (Desa Hayaping)

Rincian capaian kinerja bidang pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28
Capaian Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	53,36	94,4	94,4	94,78	90,60	96,75
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota)	Rasio	21,34	27	28	26	27	28
Rasio rumah layak huni	%	87,27	94,57	94,57	94,41	90,60	96,50
Rasio permukiman layak huni	%	80,37	80,37	80,37	75,90	99,69	99,7
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	72,25	78,25	84,04	60,21	64,01	64,54
Rasio jaringan irigasi	Persen	71,5	75	85	87	89	91

Sumber: Dinas PUPR Perkim (2021)



Indikator lainnya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2020

Uraian		Satuan	2019	2020
1	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan	persen	87	88
2	Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik (km)	persen	60	64,54
3	Rasio panjang jalan perluas wilayah	persen	70	78
4	Rasio panjang jalan yang telah ditingkatkan	persen	70	11,76
5	Terbentuknya Tim koordinasi pemanfaatan daerah (TKPRD) kabupaten untuk pengawasan pemafaatan ruang	persen	70	91,55
6	Terwujudnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten No 5 Tahun 2014	persen	80	0
10	Nilai LKIP Perangkat Daerah	persen	95	0
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	87	46,67
12	Persentase penduduk berakses air minum layak	persen	85	77,34
13	Jumlah titik genangan	persen	60	95,58
14	Luas kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan (km2)	persen	60	70
15	Tersedianya jalan dan jembatan untuk menjang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lainnya	persen	70	80
16	Tersedianya Data/dokumen jalan dan jembatan	persen	100	100
17	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	persen	76,12	46,67
18	Tesedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	persen	88,3	89,18
19	Tesedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dalam kondisi baik	persen	99,88	46,67
20	Terbangunnya sarana, prasarana Jaringan Pengairan	persen	87,44	89,19
22	Terbangunannya sarana, prasarana pengairan dalam rangka Pengendalian banjir	persen	96,22	97,18
23	Tersedianya Perda RDTRK Perkotaan dan Rencana RDTRK	persen	98,94	91,55
24	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tantang RTR wilayah kabupaten/kota berserta rencana rincinya	persen	97,47	98,44
25	Persentase Luas area yang telah sesuai dengan pola ruang dalam RTR wilayah Kabupaten Barito Timur	persen	99,38	99,77
26	Persentase penduduk berakses air minum layak dan tersedianya sistim air limbah skala komunitas/kawasan/kota	persen	98,53	99,30

Uraian		Satuan	2019	2020
27	Luas kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	persen	93,74	91,99

Sumber: Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur 2021

Berdasarkan data, diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Barito Timur berdasarkan jenis permukaan jalan pada tahun 2020 yaitu aspal (255,98 km), kerikil (306,94 km), Beton (13,44 km) dan tanah (236,82 km), dengan total panjang jalan yaitu 813,19 km.

Tabel 2.30
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 (km)

No.	Kecamatan	Aspal	Kerikil	Beton	Tanah	Jumlah
1.	Benua Lima	6,48	19,47	0,00	19,79	45,74
2.	Dusun Timur	86,68	44,43	2,32	45,21	178,64
3.	Paju Epat	24,76	25,33	0,27	4,00	54,64
4.	Awang	31,16	34,17	0,00	16,00	81,33
5.	Patangkep Tutui	10,07	47,48	0,00	0,00	57,55
6.	Dusun Tengah	37,63	47,68	2,62	49,23	137,16
7.	Raren Batuah	14,17	24,90	0,00	1,60	40,67
8.	Paku	16,67	25,37	0,85	62,19	105,07
9.	Karusen Janang	14,02	29,26	1,60	16,80	61,68
10	Pematang Karau	14,34	8,87	5,78	22,00	50,99
Barito Timur		255,98	306,94	13,44	236,82	813,19
2020		255,98	306,94	13,44	236,82	813,19
2019		255,98	306,94	0,00	250,26	813,19
2018		401,70	251,37	0,00	325,12	978,19
2017		434,48	338,29	0,00	196,20	968,97
2016		377,36	328,49	0,00	263,12	968,97
2015		357,40	340,00	0,00	271,57	968,97

Sumber: Dinas PUPR Perkim, 2021

Sedangkan panjang jalan menurut kondisi jalan diketahui bahwa pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 97,27 km, kondisi sedang mencapai 409,09 km, kondisi rusak mencapai 79,57 km dan kondisi rusak berat mencapai 227,26 km. Masih tingginya kondisi jalan di Kabupaten Barito Timur dalam kondisi rusak dan rusak berat harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal ini diharapkan agar setiap wilayah di Kabupaten Barito Timur semakin mudah dijangkau, sehingga dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang baik juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Tabel 2.31

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 (km)

No.	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1.	Benua Lima	2,66	21,39	0,90	20,79	45,74
2.	Dusun Timur	7,78	117,46	8,95	44,45	178,64
3.	Paju Epat	14,01	28,78	3,50	8,10	54,36
4.	Awang	25,21	24,22	15,10	16,80	81,33
5.	Patangkep Tutui	3,40	46,05	8,10	0,00	57,55
6.	Dusun Tengah	29,11	52,55	16,57	38,93	137,16
7.	Raren Batuah	11,57	7,20	20,30	1,60	40,67
8.	Paku	1,35	41,39	0,15	62,19	105,07
9.	Karusen Janang	0,00	40,08	5,20	16,40	61,68
10.	Pematang Karau	2,18	30,01	0,80	18,00	50,99
Barito Timur		97,27	409,09	79,57	227,26	813,19
2020		97,27	409,09	79,57	227,26	813,19
2019		87,27	399,09	89,57	237,26	813,19
2018		389,66	252,86	202,77	132,89	978,19
2017		431,05	229,09	231,90	76,94	968,97
2016		358,39	199,69	236,63	174,26	968,97
2015		318,78	229,94	239,29	180,97	968,97

Sumber: Dinas PUPR Perkim, 2021

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Fungsi rumah sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri, tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang

memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki lantai terluas bukan tanah; beratapkan beton, genteng sirap, seng maupun asbes; dan dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu.

Tabel 2.32
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016–2020

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Lantai Terluas Bukan Tanah	99,92	99,84	98,97	99,83	98,96
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, dan Asbes	98,60	97,80	98,75	99,73	98,96
Dinding Terluas Tembok dan Kayu	100,00	100,00	99,22	99,89	99,83

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

Berdasarkan Susenas, kondisi perumahan masyarakat Barito Timur pada tahun 2020 sebanyak 98,96 persen rumah tangga memiliki luas lantai terluas bukan tanah; 98,96 persen menggunakan atap baik berupa beton, genteng, sirap, seng dan asbes; dan 99,83 persen menggunakan dinding

terluas berupa tembok dan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kondisi perumahan masyarakat Barito Timur cukup layak huni.

2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas. Kelengkapan fasilitas tersebut mencakup tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan konsumsi sehari-hari merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 2.33
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Timur, 2016–2020 (Persen)

Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
Sumber Air Minum Kemasan, Isi Ulang, dan Leding	38,02	51,02	35,35	31,14	40,43
Keberadaan Tempat Buang Air Besar	93,76	94,53	91,06	95,06	94,09
Tempat Pembuangan Akhir berupa Tangki	43,21	58,04	37,32	46,45	54,64
Sumber Penerangan Utama Listrik PLN	93,03	96,35	91,56	98,13	94,28

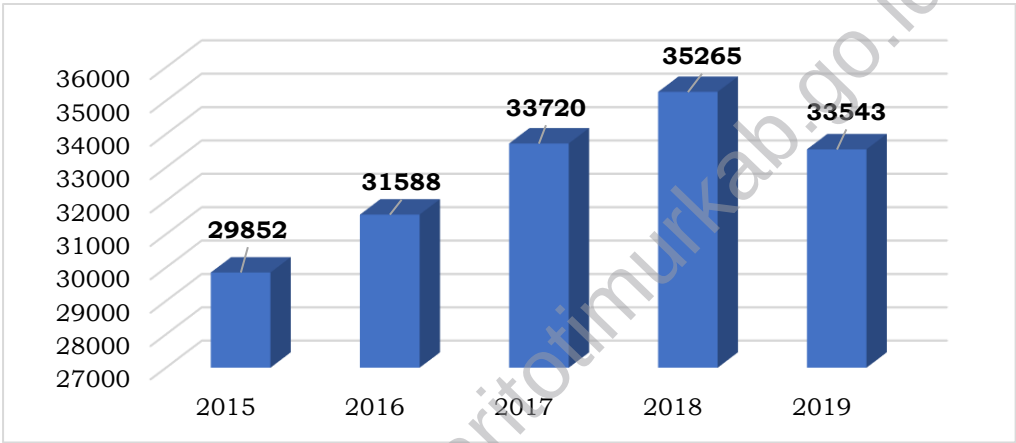
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

Berdasarkan Susenas tahun 2020, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum kemasan, isi ulang, dan leding mencapai 40,43 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 31,14 persen. Keberadaan tempat buang air besar dan tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Barito Timur adalah 94,09 persen dan 54,64 persen. Sementara itu, sumber penerangan utama berupa listrik PLN sudah hampir digunakan oleh seluruh rumah tangga di Barito Timur, hal ini ditandai dengan besarnya persentase rumah tangga yang menggunakannya yakni sebesar 94,28 persen.

3. Jumlah Pelanggan Listrik

Distribusi tenaga listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Ampah dan Tamiang Layang mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan gambar dibawah ini diketahui bahwa Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan, dari yang semula 29.852 pelanggan pada tahun 2015 meningkat menjadi 35.265 pelanggan di tahun 2018. Namun jumlah pelanggan listrik pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 33.543 pelanggan.

Gambar 2.23
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Pada tahun 2015, jumlah pelanggan listrik sebanyak 29.852 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 31.135.106 Kwh. Pada Tahun 2019 jumlah pelanggan meningkat menjadi 33.543 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 33.164`.082 Kwh.

Tabel 2.34
Daya Terpasang, Produksi dan distribusi Listrik PT.PLN Rayon
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2015	6.600	34.146.102	31.135.106	56.105	4.007.608
2016	6.600	32.250.714	28.598.334	57.228	3.652.380
2017	6.600	32.956.071	29.253.120	66.204	3.702.951

2018	6.600	34.553.898	30.921.887	64.154	3.632.011
2019	7.600	36.459.787	33.164.082	63.405	3.295.705
2020	7.600	38.533.021	35.485.568	62.771	3.262.748

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020 dan Dinas PUPR Perkim (2021)

4. Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Minum yang disalurkan oleh PDAM

Pengadaan dan distribusi air minum (air bersih) di Kabupaten Barito Timur dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur. Pada Tahun 2019 jumlah pelanggan PDAM sebesar 4.623 pelanggan, terjadi peningkatan dari Tahun 2018 dengan jumlah 4.189 pelanggan.

Selanjutnya, untuk jumlah air minum yang disalurkan menurut jenis konsumen pada tahun 2020 hanya mencapai 607.725 M² atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 613.409 M². Adapun Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Minum yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah Air yang Disalurkan
2015	3.504	725.445
2016	4.049	775.482
2017	4.200	965.831
2018	4.189	744.388
2019	4.623	613.409
2020	4.272	607.275

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020 dan Dinas PUPR Perkim (2021)

Rincian capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.36
Capaian Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	53,56	94,4	94,4	94,78	90,60	96,75
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota)	Rasio	21,34	27	28	26	27	28
Rasio rumah layak huni	Persen	87,27	94,57	94,57	94,41	90,60	96,50
Rasio permukiman layak huni	Persen	80,37	80,37	80,37	75,90	99,69	99,7
Persentase penduduk berakses air minum	Persen	23		26,7		90,60	77,34
Nilai LKIP Perangkat Daerah	persen					80,45	80,45
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	persen					97,65	98,14
Terjadinya data lahan yang siap digunakan untuk sarana dan prasarana umum di 10 kecamatan	persen					89	90,78
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Berwilayah HPL/HGB	persen					54,79	57,53
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	persen					93,42	
Rasio Pemenuhan Kebutuhan Listrik untuk Ruang Publik	persen					90,46	
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	persen					95,95	
Persentase RT yang terakses air bersih						74,01	
Rehabilitasi Rumah layak Huni	unit					150	
Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)	persen					97,48	
Persentase RTH Publik yang terkelola	persen					0,59	
Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah	meter					5.836	

Sumber: LKPJ Bupati dan Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Timur



2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan kemajuan, ditandai rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, perlu dicermati kecenderungan dan realitas perkembangan kehidupan demokrasi dewasa ini, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan distorsi dalam beberapa sendi kehidupan masyarakat, sehingga derajat kepatuhan atas berbagai norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat luas perlu lebih ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu-rambu hukum.

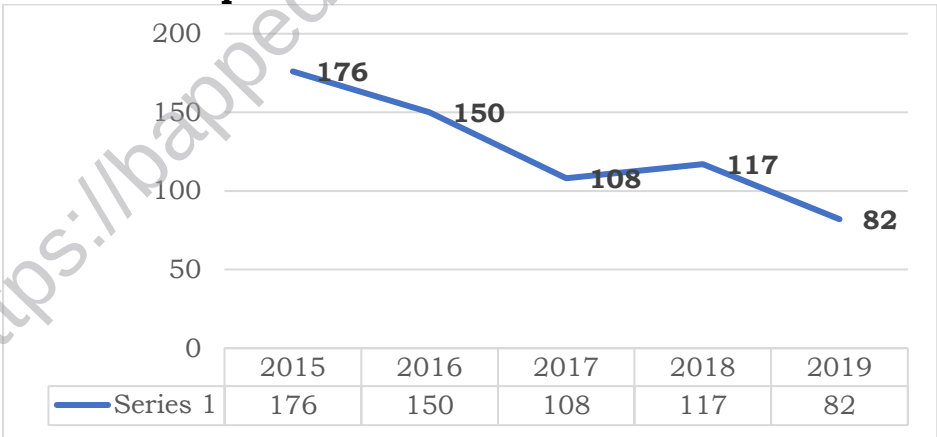
Salah satu sumber masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat yang berkembang di masyarakat adalah kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang cukup memadai. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) telah ditetapkan guna memberikan pelayan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Namun demikian ada beberapa masalah yang cukup mendasar yang dihadapi baik dalam skala nasional maupun lokal (daerah) mengenai pembangunan hukum, umumnya yaitu mencakup aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Pembangunan hukum meliputi bidang

eksekutif, yudikatif, legislatif dan profesi hukum. Persoalan hukum yang bersifat umum meliputi: proses pembentukan hukum yang belum sepenuhnya mengacu kepada kepentingan publik; penerapan hukum belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum; aparat hukum belum ditunjang oleh manajemen dan sarana yang memadai; Rendahnya akses publik untuk berpartisipasi; Belum adanya grand design pembangunan hukum sebagai hasil kesepakatan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk melakukan perbaikan secara medasar untuk mencapai supremasi hukum. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif; Lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

Menurut data dari Kepolisian Resort Kabupaten Barito Timur diketahui bahwa Jumlah tindak pidana di Kabupaten Barito Timur dalam lima tahun terakhir antara 2015-2019 menurun dari 176 kasus di Tahun 2015 menjadi 82 kasus di Tahun 2019. Penurunan tindak pidana ini menjadi gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur menaati hukum yang berlaku.

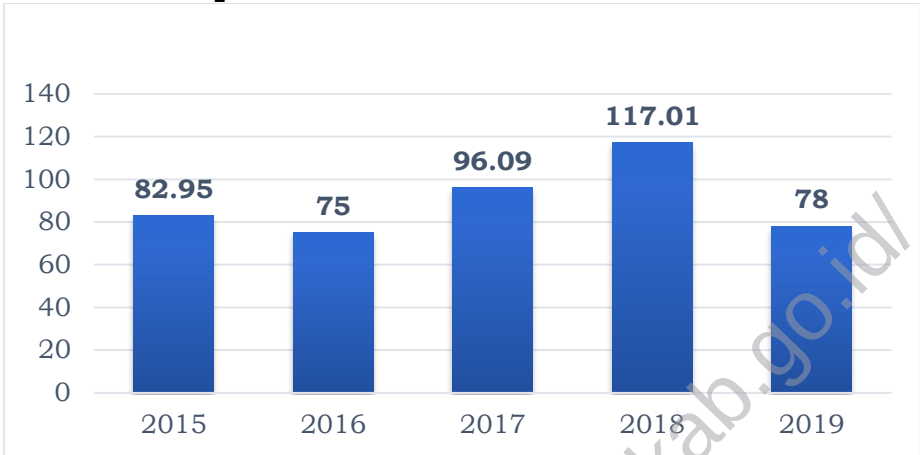
Gambar 2.24
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019



Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

Selanjutnya untuk Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 penyelesaiannya mencapai 82,95% dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 117,01%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 78%.

Gambar 2.25
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019



Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

Adapun Indikator yang ada pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Penegakan Perda	Persen	100	100	87,14	69,61
Terpenuhinya Patroli lingkungan masyarakat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dan tindakan kriminalitas	Persen	98,78	99,73	95,33	90,7
Terpenuhinya Penertiban Umum Masyarakat Kab. Barito Timur	Persen	99	99,68	89,43	99,95
Terlaksanannya Pengawasan dan Pengamanan	Persen	93,19	100	79,5	94,15
Terlaksanannya Kerjasama antara Pol PP dan Damkar dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Persen			89,95	94,15
Terpenuhinya Pengamnan Poskotis Natal dan Tahun Baru	Persen	100	100	99,75	100

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
Terpenuhinya Operasi Ketupat	Persen	99,86	100	99,75	
Terlaksananya Pameran Pembangunan	Persen	100	99,75	100	
Meningkatnya penyebaran himbauan pencegahan dini potensi bahaya bencana banjir	Persen	98,81	100	94,88	94,24
Meningkatnya Penyuluhan pelarangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan	Persen	99,06	100		
Terlaksananya Kegiatan HUT Satpol PP dan Damkar	Persen	100	100	98,85	
Terlaksananya Kesadaran Masyarakat tentang Covid-19	Persen				100

Sumber: Lakip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur

2.3.1.6. Sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain sebagainya yang terdapat di suatu daerah. Adapun capaian indikator yang ada pada urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Terlantar	orang	22	22	58	2	101	1
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	orang	0	3	4	4	5	5
Anak Jalanan	orang	2	2	2	2	2	0
Anak Dengan Kedisabilitasan	orang	20	20	20	20	35	35
Anak yang Menjadi Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah	orang	0	1	2	1	7	7
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	orang	0-	1	1	1	14	14
Lanjut Usia Terlantar	orang	60	63	63	100	182	16
Penyandang Disabilitas	orang	1,315	1,316	1,403	372	373	309
Tuna Susila	orang	101	85	90	60	73	73
Beka Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	orang	15	18	18	8	8	8
Orang Dengan HIV/AIDS	orang	9	17	17	9	9	9
Korban Penyalahgunaan Napza	orang	21	24	26	-	4	4

Sumber: Lakip Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur



2.3.2. Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2020 sebanyak 73.826 orang, di mana 55,88 persen di antaranya adalah laki-laki dan sisanya sekitar 44,12 persen merupakan angkatan kerja perempuan. Dari total angkatan kerja sebanyak 73.826 orang, sebanyak 34,23 persen angkatan kerja tamat SD/ sederajat. Angkatan kerja yang menamatkan jenjang pendidikan menengah sebanyak 20,92 persen tamat SMP/ sederajat, sebanyak 33,45 persen tamat SMA/ sederajat. Sedangkan angkatan kerja yang telah menamatkan jenjang pendidikan tinggi (Diploma/ Sarjana) hanya sekitar 11,39 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada penduduk yang bekerja. Hal ini tentu cukup memprihatinkan, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Tanpa peningkatan pendidikan, akan sangat sulit dalam mencetak tenaga kerja yang handal dan berdaya saing tinggi serta meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang kemudian pada gilirannya juga akan cukup sulit meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja itu sendiri.

Dengan tersedianya kekayaan alam pertanian yang melimpah, maka tidak mengherankan apabila 46,25 persen dari 68.390 orang yang bekerja, bekerja di sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan). Akan tetapi, dengan modal pendidikan rendah yang dimiliki mayoritas tenaga kerja, tentu usaha pertanian yang dapat dilakukan masih bersifat konvensional. Perlu atensi dan peran dari berbagai pihak agar petani-petani tersebut ke depan dapat semakin meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuannya, sehingga akan mampu melahirkan berbagai terobosan atau inovasi guna meningkatkan

kualitas usahanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Barito Timur menurun. TPT tertinggi terjadi pada Agustus 2017, yakni sebesar 4,68 persen. Lalu pada Agustus 2018 TPT menurun menjadi sebesar 3,50 persen. Kemudian pada Agustus 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 2,91 persen.

Dari total pengangguran sebanyak 2.148 orang, sekitar 70,67 persen di antaranya merupakan laki-laki. Sementara apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, sekitar 69,51 persen dari total pengangguran merupakan lulusan SMA. Adapun dilihat dari kategori penganggurannya, pengangguran di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 sebagian besar merupakan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, yakni sekitar 97,02 persen.

Selanjutnya, untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 hanya mencapai 77,73% atau mengalami peningkatan dibanding Tahun 2019 yang mencapai 74,89%. Adapun rincian Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Timur, 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

No	Jenis Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	66.345	NA	65.243	71.966	70.422	73.826
	1. Bekerja	64.928	NA	62.188	69.449	68.390	71.678
	2. Penganggur	1.417	NA	3.055	2.517	2.032	2.148
2	Bukan Angkatan Kerja	16.138	NA	22.795	19.024	23.610	21.146
Jumlah		82.483	NA	88.038	90.990	94.032	94.972
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,43	NA	95,32	96,50	74,89	77,73
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,14	NA	4,68	3,50	2,89	2,91

Sumber:
1. Data diolah dari Barito Timur Dalam Angka 2020
2. RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021

Tingginya angka pengangguran disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, sebagai contoh buruh kasar, buruh kasar banyak yang didatangkan dari luar daerah menyebabkan tenaga lokal tidak terserap.

Data penduduk angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	34.650	NA	34.584	36.254	31.630
Pertambangan dan Penggalian	4.587	NA	2.915	4.282	4.593
Industri Pengolahan	2.969	NA	933	1.957	2.444
Listrik dan Air Bersih	158	NA	275	353	113
Bangunan	2.758	NA	2.430	2.726	2.043
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.883	NA	8.305	7.418	11.193
Pengangkutan dan Telekomunikasi	919	NA	533	2.025	1.707
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	275	NA	771	871	527
Jasa-Jasa	10.279	NA	11.442	13.563	14.140
Jumlah	64.928	NA	62.188	69.449	68.390

Sumber: Data diolah dari Barito Timur Dalam Angka 2020

Capaian indikator lainnya pada urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang bekerja	persen	97,86	NA	95,32	96,50	97,11	97,10
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	orang	66.345	NA	65.243	71.966	70.422	73.826
Angka Sengketa Pengusaha-Pengusaha Pertama	kasus	40	40	45	45	20	20
Rasio Lulusan Diploma /S1/S2/S3	persen	-	NA	13,63	15,14	12,04	11,39
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	persen	78,71	NA	70,63	76,32	72,73	75,47
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap	persen	46,24	NA	41,17	43,44	44,79	52,28



INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang bekerja	persen	97,86	NA	95,32	96,50	97,11	97,10
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	orang	66.345	NA	65.243	71.966	70.422	73.826
total kesempatan kerja							
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Buah PB	40	40	45	40	18	18
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	1009	983	1315	1637	395	309
Besaran Pekerja/ buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	orang	13717	9083	3454	3454	6.569	6.787
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	0	0	0	0	10	207
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	21	118	21	21	51	207
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	0	10	0	0	0	60
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	95,7	99,8	92,91	98,50	94,17	89,05
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	99,53	99,46	88,43	75,00	100,00	100,00
Meningkatnya Disiplin Aparatur	persen	97,8	89,2	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persen	100	92,27	100,00	100,00	85,71	100,00
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	persen	100	100	66,67	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kesempatan Kerja	persen	78,8	75,9	45,00	99,99	54,45	65,56
Meningkatnya Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	persen	96,3	98,21	60,00	74,06	100,00	100,00
Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	persen	98,4	95,33	72,85	57,14	100,00	100,00

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang bekerja	persen	97,86	NA	95,32	96,50	97,11	97,10
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	orang	66.345	NA	65.243	71.966	70.422	73.826
Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja	persen	77,96	84,15	69,29	75	33,33	0,00
Meningkatnya Pengelolaan dan inventarisasi aset	persen	100	99,95	100,00	100	100,00	100,00
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	persen	87,4	75,9	80,00	84,58	22,20	29,85

Sumber: Lakip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2015-2020 menunjukkan angka fluktuasi, dimana pada tahun 2015 sebanyak 0 kasus, meningkat sampai tahun 2017 menjadi 19 kasus, menurun kembali sampai tahun 2019 menjadi 7 kasus dan di tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 8 kasus, seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.42
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fisik	0	0	17	5	0	6
2	Psikis	0	3	1	1	5	0
3	Seksual	0	2	0	1	0	2
4	Penelantaran	0	2	1	1	2	0
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0
6	Eksploritasi	0	0	0	0	0	0
7	Dan Lain-Lain	0	0	0	2	0	0
JUMLAH		0	7	19	10	7	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2015-2020 menunjukkan angka fluktuasi, dimana pada tahun 2015 sebanyak 0 kasus, meningkat sampai tahun 2018 menjadi 19 kasus, menurun kembali di tahun 2019 menjadi 8 kasus dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 12 kasus, seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.43
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fisik	0	1	0	2	0	2
2	Psikis	0	0	4	2	1	1
3	Seksual	0	1	3	12	3	7
4	Penelantaran	0	0	4	0	2	1
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0
6	Eksploritasi	0	0	0	0	0	0
7	Dan Lain-Lain	0	0	0		2	1
JUMLAH		0	2	11	19	8	12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Capaian indikator lainnya pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2017-2020

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Tersedianya pelayanan pengaduan kekerasan. Kerjasama dengan kepolisian	persen	100	100	100	100
Tersedianya Dokumen/laporan hasil penyuluhan Undang-undang penghapusan KDRT	persen	100	100	100	100
Tersedianya Dokumen/Data yang dihsilkan untuk memberikan informasi cara pola asuh Pendidikan Anak yang dibutuhkan publik (masyarakat) maupun siswa/pelajar di Kabupaten Barito Timur	persen	100	100	100	100
Tersedianya Dokumen/Data yang dihasilkan untuk memberikan informasi yang	persen	100	100	100	100



INDIKATOR	SATUAN UKURAN	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
dibutuhkan publik (masyarakat) di Kabupaten Barito Timur					
Tersedianya Informasi mengenai bahaya HIV-AIDS dan cara pencegahan bagi masyarakat dan pelajar sekolah	persen	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	52,93	52,93	53,40	54,56
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	21	28	28	28
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	-		41.456	49,9
Rasio KDRT	Rasio	0,04		0,0154	0,008
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	-	-	0,05	0,03
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,05	-	95,72	6,56
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100	100	100

Sumber: *Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur, 2021*

2.3.2.3. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Barito Timur memiliki ketahanan pangan yang cukup baik dimana rasio pemenuhan beras sudah berada di atas standar kecukupan pangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga hal tersebut patut menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.45
Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio pemenuhan pangan (beras)	Kg	161,81	157,31	135,23	102,77	171,98	173,00
Jumlah produksi padi	Ton	32.721,00	32.721,00	28.923,09	22.084,00	19.904,00	18.311,00
kerawanan pangan	persen	30	30	20	20	20	20
Skor pola pangan harapan	poin	88,40	86,80	89,70	90,20	82,30	84,3
Ketersediaan pangan utama	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	persen	89,70	90,20	92,30	92,35	93,15	93,20
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen / persen			1,00/27,90	1,00	1,00	1,00
Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	dokumen			1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Barito Timur, 2018

2.3.2.4. Pertanian

Indikator Urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Timur yaitu Luas lahan bersertifikat dan Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan, dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46



**Capaian Indikator Urusan pemerintahan bidang pertanahan di
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Luas lahan bersertifikat (Ha)	17.670,21	1.027,10	14.112,22		
Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan	1.236	2.065	3.611	4.268	1.590

Sumber: Barito Timur Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 mencapai 17.670,21 ha dan pada tahun 2017 turun menjadi hanya 14.112,22 ha.

Sedangkan untuk jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 1.236 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi 4.268. namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1.590.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH merupakan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.47
Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan
Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Kec. Awang	2.771,81	1,80	14.877,80	69,11	17.720,51
2	Kec. Benua Lima	7.825,77	785,90	5.107,97	2.396,02	16.115,66
3	Kec. Dusun Tengah	9.737,68	9.687,53	20.176,41	5.012,96	44.614,57

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
4	Kec. Dusun Timur	21.394,37	9.301,17	16.086,90	34.559,17	81.341,60
5	Kec. Karusen Janang	1.579,81	9.501,10	2.827,67	8.062,17	21.970,76
6	Kec. Paju Epat	-	15.463,21	1.219,86	25.841,44	42.524,50
7	Kec. Paku	4.248,07	3.820,91	14.100,28	6.114,29	28.283,55
8	Kec. Patangkep Tutui	12.168,02	569,80	16.564,76	3.154,67	32.457,25
9	Kec. Pematang Karau	5.605,68	8.651,99	11.501,39	25.942,61	51.701,67
10	Kec. Reren Batuah	9.103,03	21.464,67	14.895,65	1.206,56	46.669,91
	Luas Total	74.434,23	79.248,09	117.358,68	112.359,00	383.400,00

Sumber: KLHS RPJMD Barito Timur

Daya dukung dan Daya tampung ketersediaan air di Kabupaten Barito Timur, termasuk kategori tinggi sebesar 117.358,68 ha (30,61%) dan kategori rendah sebesar 74.434,23 ha (19,41%). Untuk sebaran wilayah kecamatan, daya dukung dan daya tampung dominan tersebar di wilayah timur dan selatan seperti Kecamatan Patangkep Tutui dan Banua Lima, sedangkan kategori tinggi sampai tinggi tersebar di Kecamatan Paju Empat dan sebagian Kecamatan Reren Batuah.

Potensi lahan kritis di Kabupaten Barito Timur dominan merupakan daerah potensial kritis dan agak kritis yakni masing-masing sebesar 42,93% dan 30,49%, sedangkan kategori kritis sebesar 20,32%. Wilayah kecamatan dengan kategori potensi sangat kritis terdapat di Kecamatan Patangkep Tutui (7,10%) dan potensi kritis ada di Kecamatan Paju Epat (35,34%), dan Kecamatan Dusun Timur (23,59%).

Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan untuk hutan lahan kering primer sebesar 222 ton/ha, hutan rawa primer 122 ton/ha dan hutan rawa sekunder 92 ton/ha. Dengan luas hutan 121.478,90 ha maka total stok karbon di Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 19.049.888,31 ton. Daerah yang memiliki stok karbon tertinggi yakni Kecamatan Reren Batuah (28,36%) dan Pematang Karau (21,03%), sedangkan terendah ada di Kecamatan Awang hanya 0,33%.

Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan,

potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi perikanan. Potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur berdasarkan data AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 terdiri dari pertambangan batubara dengan luas kawasan 9.879 Ha tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah seluas 1.000 Ha; Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat seluas 2.213 Ha; Kecamatan Karusen Janang, Paku, Awang seluas 1.000 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui seluas 2.592 Ha; Kecamatan Patangkep Tutui, Awang seluas 3.074 Ha. Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Barito Timur masih cukup efisien.

Capaian indikator lainnya pada urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	persen	100,00	100,00	100,00
UKL dan UPL meningkat Jumlah Kelengkapan	persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah kerusakan lingkungan yang tercegah dan terpantau	persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah penegakan hukum lingkungan	persen	61,11	40	
Jumlah kerusakan lingkungan yang tertangani	persen	100	100	100,00
Terpenuhinya kegiatan pengelolaan persampahan	persen	85,1	97,09	97,09
Terlaksananya pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	persen	99	98,42	98,72
Tercapainya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persen		96,02	96,42
Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	persen	91,71	99,67	99,67
Tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan sarana	persen	87,09	96,93	97,43
Tercapainya peningkatan sanitasi pemukiman	persen	75,39	76,49	76,89
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah/Provinsi	Dokumen	1	1	1



Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks			35
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks			90.722
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/Kota	perusahaan			22
Presentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	persen			5
Presentase perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (ekosistem dan keanekaragaman hayati)	persen			24
Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	dokumen			3
Timbunan sampah yang ditangani	ton/tahun			17.598,23

Sumber: Lakip Dinas Lingkungan Hidup Barito Timur, 2017-2019

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Adapun capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio penduduk berktip per satuan penduduk	%	80,43	71,41	83,89	85,51	87,66	89,72
Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	Lembar	1.799	2.653	3.586	5.237	6.762	7.489

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan	Lembar	401	323	408	376	426	453

Sumber: Barito Timur Dalam Angka, 2020

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dalam pencapaian perekonomian masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan adanya BUMDes yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.50
Data BUMDes Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
1	Pematang Karau	Ketab	Ketab Mandiri	Keramba ikan
		Kupang Bersih		
		Muara Plantau	Hapakat Bersama	Moulding
		Bambulung	Karya Bersama	Wisata desa dan Musik Elektron
		Bararawa	Tambun Jaya	Perdagangan
		Pinang Tunggal	Pinang sejahtera	Perdagangan
		Muru Duyung	Nansarunai	Perdagangan
		Lebo	Sabuahan	Perdagangan
		Tuyau	Tuyau Jaya	Perdagangan
		Lampeong	Karya Bersama	Perdagangan
		Nagaleah	Maju Bersama	Jual saprodi pertanian
				Internet desa
		Tumpung Ulung	Jaya Bersama	
		Sumber Rejo	Sumber Rejo Sejahtera	Ternak Sapi
				Jual saprodi pertanian
2	Dusun Tengah	Rodok	Rodok Karya Mandiri	Bidang Jasa
		Saing	Niwung Harapan	Internet desa
		Sumber Garunggung	Garunggung Mandiri	Toko Obat/Bahan pertanian
				Internet desa
		Netampin	Tetei Pamelum	Penangkapan bibit padi
				Peternakan
		Muara Awang	Awang Berjaya	Pengeloaan air bersih
				Jual beli karet
3	Raren Batuah	Ampah II	Tunas Harapan	Bidang Jasa
		Putai	Putai Lestari	
		Unsum	Mirapakat	Jual gas LPG 3 kg
		Baruyan	Tetei Pamelum	Jual beli Getah Karet
				Jual gas LPG 3 kg
		Batuah	Batuah Maju Bersama	Pasar desa
				Sarang burung walet

Paku	Luau Jawuk	Mandiri Luau Jawuk	Perikanan
			Ternak itik pada penggemukan sapi
	Patung	Arial Munge	Ikan kolam terpal
			simpan pinjam
	Runggu Raya	Karya Bersama	Pengadaan barang, jasa telekomunikasi, kelistrikan
	Kalamus	Kalamus Berjaya	Usaha umum, o pembayaran rek listrik
	Tampa	Paku Sejahtera	Jual beli gabah, mineral, desa wisata Desa
	Paku Beto	Paku Makmur	Jual alat Pertanian
			Jual beras merah
	Bantai Napu	Harapan Kahai	Jual gas LPG 3 liter, Pulsa
	Tarinating	Bauntung Mupakat	Penjualan BBM
			Sarana air bersih
			Sewa barang inventory desa
	Gandrung	Mira lalati	Jual beli sembako
Simpang bingkuang	Harapan jari	Bebek organik	
		Jual paket internet	
Kupang Baru	Mara'al Nakayaan	Jual beli ayam petelur	
		simpan pinjam	
Karusen Janang	Ipu Mea	Martang Janggut	Jasa Angkutan
	Wuran	Wulan membangun	

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
6	Paju Epat			Usaha bidang jasa
		Dayu	Karya Bersama	Bengkel Motor
		Siong	Maju Bersama	Air bersih yang bisa dikonsumsi
				Saprodi Pertanian
		Murutawu	Murutawu Sejahtera	Penjualan gas LPG
		Malpe	Karya Bersama	Pengolahan air minum
		Tampulangit	Uriya Mandiri	Perdagangan
		Kalinapu	Mulia	Perikanan
		Juru Banu	Sumber Rejeki	abon ikan haruan
				Penjualan gas LPG
7	Dusun Timur	Telang Baru	Sumber Usaha	Perdagangan
		Telang	Pakat Rama	Pasar desa
		Magantis	Tunas Harapan	Perikanan
		Karang langit	Karuntu Jaya	Pengelolaan Pasar Desa
				Penyewaan tenda kursi
				Penitipan hasil usaha masyarakat
		Harigen	Sameh Ampun	Kerajinan Anyaman
		Harara	Totei Pamehun	Bidang Jasa
		Sarapat	Sarapat Mandiri	Perdagangan
		Pulau Patai	Amuan Sasameh	Pengelolaan air bersih, parkir pasar desa, perdagangan
		Dorong	Usaha Dagang Bersama	Jual Beli karet dna percetakan
		Didi	Daya Pakat	Multiguna
		Mangkarap	Kalungkung Jari Mangkarap	Perdagangan
		Matabu	Maburai	Toko ATK dan Foto Copy
		Maragut	Sumber Rejeki	Home industri (batako), Perdagangan dan Jasa Penyewaan
		Matarah	Itung Janji	Perdagangan dan Penyewaan tenda kursi
		Sumur	Sumur Berjaya	Ternak Ayam petelor
				Penyewaan tenda kursi
		Jaweten	Barkat Sasameh	Perdagangan dan Jasa Penyewaan
8	Benua Lima	Bagok	Mira Putut	Perdagangan dan Penyewaan tenda kursi
		Gudang seng	Harapan Bersama	Penggilingan Padi
		Banyu Landas	Bauntang	Simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, pertambangan dan jasa konstruksi
		Kandris	Harapan Jaya	Jasa dan perdagangan
		Bamban	Pangarawah	Perdagangan, peternakan
		Tewah Pupuh	Tewah Jari	Jasa pencucian motor, perdagangan dan peternakan
9	Patangkep Tutul	Lalap	Mitra Harapan Jaya	Simpan pinjam dan isi ulang air minum
		Ampari Bura	Harapan Bersama	Jual beli karet, isi ulang air minum, sembako

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
		Kambitin	Beringin Jaya	Perbengkelan
				Simpan pinjam
		Jango	Jango Sejahtera	Jual beli karet
				Jual pulsa
		Kotam	Kotam Membangun	Simpan pinjam, perdagangan, air isi ulang
		Mawani	Mawani Maju Bersama	Simpan pinjam dan jual beli karet
		Batang Nalong	Karya Sasameh	Jual beli Gabah
		Pulau Padang	Barakat Sabar	Perdagangan dan POM mini minyak
10	Awang	Ramania	Maju Bersama	Perdagangan dan isi ulang air minum
		Danau	Unru Nyingkai	Jasa sewa tenda kursi
		Biwan	Biwan Bersama	Penggilingan Padi
		Ampari	Tetei Pakat	Perbengkelan
		Planggu	Lekang Watu	Penggilingan Padi
		Apar Batu	Apar Batu Jaya	Peternakan dan perdagangan
		Tangkan	Hamen Maju	Perdagangan dan Jasa Penyewaan
		Janah Jari	Rirung Munge	Perdagangan
		Bangkirayan	Gunung Sion	Perdagangan
		Wungkur Nanakan	Tunas Harapan	Jasa dan perdagangan
		Hayaping	Jarau Matudi	Peternakan dan perdagangan

Sumber Data: DPMD Kabupaten Barito Timur, 2018

Capaian indikator lainnya pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pmberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2019

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Usaha	Jumlah	101,00	102	102
Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah	104,00	104,00	104
Jumlah Desa Binaan	Jumlah	101,00	101,00	101
Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	persen		2,00	11,00
Jumlah lembaga desa yang berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan desa	lembaga		8,00	21,00
Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan melestarikan Sumber Daya Alam	persen		5,00	15,80
Persentase peningkatan kegiatan gotong-royong masyarakat desa	persen		5	15
Jumlah PKK	Desa	86	90	100

Sumber: Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Barito Timur, 2018-2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Selain berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Capaian indikator pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun	orang	1,2	3,00	2,50
Rasio Akseptor KB keluarga menurun	persen	123	PB. 1.465 AKS, 70 %	
Partisipasi KB pria meningkat	persen	196	179	
Peserta KB Aktif meningkat	AKS	18.623	18.236	
Peserta KB Mandiri meningkat	persen	30	41,50	
Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	21.560	21.529	
Kesehatan Repruduksi / WUS 15 -49 thn	orang	30.726	31.726	
Jumlah TFR	persen	2	2,76	
Jumlah Kesehatan Jumlah Kesehatan Meningkat	KK	30.577	31.266	
Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas meningkat	klp	25	29	
Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD meningkat	klp	20	30	
Jumlah Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dan berkelanjutan meningkat	klp	25	29	
Jumlah Kelompok Bina Remaja dan Mahasiswa Meningkat	k	18	29	
Pengembangan model operasional BKR/mahasiswa	klp	12	29	
Laju pertumbuhan penduduk	persen			2,36
Total Fertility Rate (TFR)	persen			2,4
Persentase Dinas yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	persen			16.498
Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk	persen			30,4



Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan	sektor			20.108
Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	persen			79,4
Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan sudah menikah usia 15-49 tahun	persen			79,4
Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	persen			33,45
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun	persen			70
Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen			10,35
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen			70
Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen			13,04
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	persen			57
Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	persen			45
Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	persen			40
Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	persen			3
Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	persen			255
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen			60
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen			55,35
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (jumlah PPKBD : jumlah desa)	persen			1
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen			100
Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen			100
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	persen			53,05
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	persen			23
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan	persen			53,05



Indikator	Satuan	2017	2018	2019
melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				
Persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen			90

Sumber: Lakip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Barito Timur, 2017-2019

2.3.2.9. Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Demi memperlancar akses mobilitas masyarakat, jalan dan jembatan perlu mendapat perbaikan baik dari kecamatan ke desa, antar desa, bahkan dari desa ke akses jalan utama.

Tabel 2.53
Statistik Perhubungan Kabupaten Barito Timur 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kendaraan bermotor	Unit	14.388	18.898	19.659	20.891	21.430	21.566
Panjang jalan kabupaten	Km	968,97	968,97	968,97	973,98	966,58	977,63
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Ribu Orang	743,39	345,7	349,5	432,0	324,0	288,3
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Ribu Jumlah	155,4	415,9	349,47	287,4	243,5	195,7
Rasio Ijin Trayek	Rasio						
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	kendaraan	1102	952	743	420	380	362
Jumlah Terminal Bus	terminal	3	3	3	3	3	3
Jumlah Dermaga Sungai	dermaga	3	3	4	4	4	5
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	-	-	-	-		
Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	Orang / Ton	155,4	415,9	349,47	287,4	234,9	217,6
Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal Per Tahun	Orang / Ton	-	-	-	-	-	-

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	Persen	66	66	66	66	66	100
Persentase cakupan area pelayanan	Persen	67	67	67	67	67	100

Sumber:

- Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020
- Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari ketersediaan website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berikut disajikan data capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Tahun 2015-2020.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jaringan komunikasi	Persen	34	37	37	61,17	75,73	75,73
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Per 1.000 penduduk	24	50	50	0	0	0
Jumlah surat kabar nasional/ local	-	25	19	19	30	35	35
Jumlah penyiaran radio/TV local	-	12	3	3	12	2	2
Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	0,76	0,91	0,91	0,93	0,94	0,94
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	85,12	93,03	96,35	91,56	98,13	99,01
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	68,20	64,67	77,86	78	78,34	79,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur

Capaian indikator lainnya pada urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020**

Indikator	Satuan	2020
Peningkatan Jumlah fasilitas unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	Fasilitas	0
Peningkatan Jumlah berita kegiatan pemda yang dipublikasi pada media massa/elektronik	Berita	7500
Peningkatan Jumlah media social elektronik milik pemerintah	medsos	4
Peningkatan Jumlah Pengikut/follower masyarakat dalam media sosial resmi pemerintah daerah	follower	5.500
Peningkatan Jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	media	0
Peningkatan Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didesiminasikan /dipublikasikan kepada masyarakat	media	36
Jumlah media massa / elektronik yang dibina	media massa	15
Jumlah kantor PD/UPTD terkoneksi internet/intranet	PD	40
Jumlah Data Center (server) milik pemerintah daerah	server	1
Jumlah CCTV terpasang diruang public dan fasilitas vital milik pemerintah daerah	server	2
Jumlah aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi	aplikasi	9
Jumlah dokumen perencanaan command center milik pemerintah daerah	dokumen	0
Jumlah regulasi terkait penyelenggraan TIK/ E-Government	regulasi	1
Jumlah media website milik pemerintah daerah	doamain/su bdomain	88
Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	pengunjung	182.776
Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN pemerintah daerah	akun	48
Rasio jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil di distribusikan	surat	13

Sumber: Lakip Dinas Komunikasi dan Informasi Barito Timur, 2021

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat pada capaian Indikator Kinerja Urusan KUKM Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020



Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif	%	90,77	90,77	90,77	46,15	44,70	45
Jumlah koperasi	unit	118	129	130	130		
Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	Unit	3.352	15.328	15.328			
Persentase Koperasi sehat	Persen				45,00	26	20
Koperasi Berkualitas	Koperasi				27,00		33
Koperasi melaksanakan RAT	Koperasi				27,00	30	18
Pengurus koperasi terlatih	Koperasi				50,00		68
Koperasi berprestasi	Koperasi					16	6
Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	Orang					184	68
Jumlah UMKM aktif	UMKM				15.328,00	15.328,00	4,859
Jumlah Tenaga kerja KUMKM	Orang				16.766,00		
Jumlah UMKM potensi	UMKM				218,00		220
IUMK yang diterbitkan	IUMK				50,00		430
Produk unggulan	Produk				5,00		8
KUMKM penerima modal	KUMKM				652,00		4.859
Jumlah industri	Produk				637,00		-
Terpromosinya produk industri	Kali				1,00		-
LPE Sektor Industri Pengolahan	Persen					2,57	30
Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam aktif	Koperasi					26	30
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki IUMK	UKM					147,00	430

Sumber: *Lakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Barito Timur, 2018-2020*

2.3.2.12. **Penanaman Modal**

Investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Timur. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu iklim investasi

yang kondusif, kemudahan dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Jumlah investasi swasta nasional, PMA-PMDN di Kabupaten Barito Timur berdasarkan bidang usaha seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Barito Timur
Tahun 2017

Bidang Usaha	PMDN	PMA	Jumlah
Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit	7	1	8
Perkebunan Tanaman Karet	1	0	1
Jasa Angkutan Pertambangan Batu Bara	1	0	1
Pertambangan Batu Bara	15	0	15
Industri Prduk dari Batu Bara	0	1	1
Pertambangan Batu Baara, Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi	1	0	1
Pedagang Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	1	0	1
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	1	0	1
Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus/Jasa Angkutan Bahan Bakar Cair	1	0	1
TOTAL	28	2	30

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Selanjutnya, untuk capaian indikator kinerja urusan penanaman modal tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	40	41	43		
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	68,7	68,7	505,5		
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Ribu US\$	61.517	62.044	4.879		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan olah raga di Kabupaten Barito Timur tampak pada tabel di bawah ini. Terjadi peningkatan jumlah gedung olah raga dan klub olah raga setiap tahun. Jumlah organisasi olahraga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebanyak 21 sedangkan tahun 2017 sebanyak 22. Jumlah organisasi pemuda tahun 2016 sebanyak 19 sedangkan tahun 2017 sebanyak 21. Jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015-2017 sebanyak 58. Secara lengkap Perkembangan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Perkembangan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

No.	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah gedung olah raga	1	14	14	58	42	42
2.	Jumlah organisasi pemuda	19	19	21	30	31	31
3.	Jumlah organisasi olahraga	19	21	22	22	22	22
4.	Jumlah kegiatan kepemudaan	58	58	58	58	58	covid
5.	Jumlah kegiatan olahraga	17	25	25	33	32	32

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 s/d 2020

Capaian Indikator lainnya pada urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemuda (organisasi kepemudaan) yang mendapatkan pembinaan (pelatihan) di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	13,64	-
Persentase Cabang Olahraga yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi	Persen	15,80	26,30	2,70	16,67	-
Jumlah Perolehan Medali Emas/Juara Pertama dalam Kejuaraan Nasional	Medali	6,00	3,00	3,00	2,00	-

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali dalam Kompetisi tingkat Regional dan Nasional	Persen	58,00	20,00	33,00	66,67	-
Prestasi Cabang Olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat	-	24,00	-	22,00	-
Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	80	100	95,45	70	70
Persentase organisasi olahraga yang aktif	persen	100	100	100	70	70
Cakupan pelatih yang bersertifikat	orang/persen			27/69,23	27/60	10/25,64
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	buah/persen			113/69,23	183/85,11	183/86,72
Jumlah atlet berprestasi	orang/persen			147/204	152/81,72	152/211

Sumber: Lakip Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Barito Timur, 2017-2020

2.3.2.14. Kebudayaan

Kabupaten Barito Timur memiliki aset kebudayaan yang dapat dikembangkan menjadi festival budaya yang rutin dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Barito Timur. Festival budaya tersebut antara lain Festival Jari Janang Kalalawah (JAJAKA), Festival Lagu Daerah Nansarunai, dan Festival Pembangunan BARTIM EXPO.

Kebudayaan di Barito Timur perlu dilestarikan sebagai penghormatan bagi leluhur. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur membangun gedung kesenian sebagai sarana untuk mengekspresikan karya seniman. Dalam lima tahun jumlah grup kesenian di Kabupaten Barito Timur meningkat. Pada tahun 2020, jumlah grup kesenian di Kabupaten Barito Timur sebanyak 29 grup.

Tabel 2.61
Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian	Jumlah	30	30	30	32	32	29
2.	Jumlah gedung kesenian	Jumlah	1	1	1	1	1	1

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2015	2016	2017	2018	201 9	2020
3.	Jumlah penyelenggaraan pagelaran dan festival seni dan budaya meningkat	Jumlah	4	9	5	3	3	-
4.	Persentase pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya	Persen	58	58	58	58	207,14	-
5.	Persentase benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	17	25	281	33	112	221

Sumber: LKPJ Bupati dan Lakip Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Bartim

2.3.2.15. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten di Barito Timur mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada dalam kategori “ada”.

Adapun capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Buku Kab. Barito Timur Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kab. Barito Timur	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur

2.3.2.16. Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa penting.

2.3.2.17. Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jiwa	17.588	19.339	19.557	13.855	13.983	32.693
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	17.500	19.621	19.621	19.455	20.014	23.086
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Orang/tahun	71.928	101.120	101.300	1.155	1.165	2.724

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah			3.815	8.820	8.961	10.562
Jumlah perpustakaan desa	poin	50	50	75	75	16,00	32,00
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	orang	16.616	17.855	19.626	13.855	13.983	2.129
Jumlah pengunjung perpustakaan desa pertahun	orang	75.000	25.000	103.300	27.167	27.167,00	15.360
Mobil unit perpustakaan (MUPK) ke desa	MPUK	40	20	50	6	12,00	
Mobil unit perpustakaan (MUPK) ke sekolah	MPUK	50	50	50	15	-	-
Jumlah perangkat daerah kabupaten/ kota (termasuk kecamatan dan BUMD kabupaten/ kota yang dibina dalam rangka akuntabilitas publik	OPD	35	35	35	35	11	11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur

2.3.2.18. Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berupaya untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Kabupaten Barito Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh

skala Kabupaten Barito Timur, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Adapun capaian indikator yang ada pada urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor poin	poin	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	98,45
Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	persen	89,7	90	89,7	80	80	98
Jumlah Desa/ kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	Desa/Kel.	50	70	79	101	65	101
Jumlah arsip yang dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah kabupaten kota, BUMD kabupaten/kota dan desa/ kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam boks pertahun)	arsip	400	700	744	745	750	750

Sumber: Lakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barito Timur, 2017-2020

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Timur.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Barito Timur.

Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 mencapai 1.130,40 Ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 1.436,88 Ton.

Tabel 2.65
Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai produksi perikanan	Rp.	30.929.800	48.032.509	48.570.350	50.998.867	58.322,793	96.642.780
– Nilai Produksi Budidaya (Rp)	Rp.	14.124.800	26.064.000	27.484.500	28.858.725	29.147	28.737.600
– Nilai Produksi Tangkap (Rp)	Rp.	16.805.000	21.968.509	21.085.850	22.140.142	29.175,481	67.905.180
Jumlah Produksi perikanan	ton	1.917,40	2.069,20	2.198,20	2.198,20	2.198,20	3.377,03
– Produksi Perikanan Tangkap	ton	787,00	888,40	851,20	1049,953	1.595,11	1.940,15
– Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.130,40	1.180,80	1.268,40	1308,15	1.390,88	1.436,88
RTP Pembudidaya Ikan (kolam+keramba)		1.255	1.134	1.314	1.284	1.300	1.363
RTP Nelayan (sungai, danau, rawa)		1.500	1.500	1.500	1.310	1.310	1.310
Luas Areal (Ha) Budidaya							
– Kolam	Ha	34,20	34,68	34,68	36,40	36,60	37,20
– Keramba	Ha	13,10	13,50	13,60	13,68	14,20	13,70

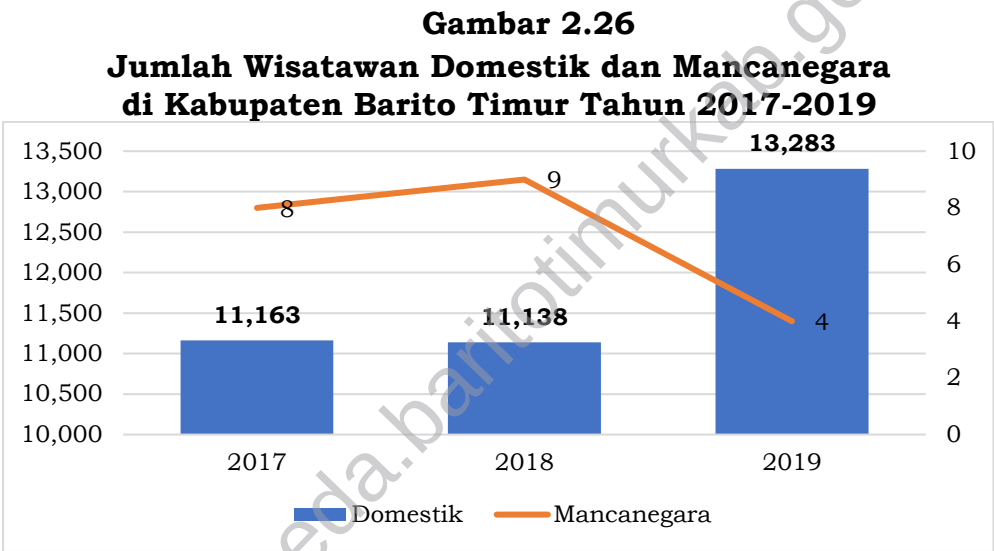
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Timur, 2021

2.3.2.2. **Pariwisata**

Jika dilihat dari berbagai sumber daya yang ada, maka potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dari seluruh potensi pariwisata tersebut, perlu adanya berbagai fasilitas penunjang dalam

peningkatan kepariwisataan seperti akomodasi maupun penyediaan makan dan minum bagi wisatawan.

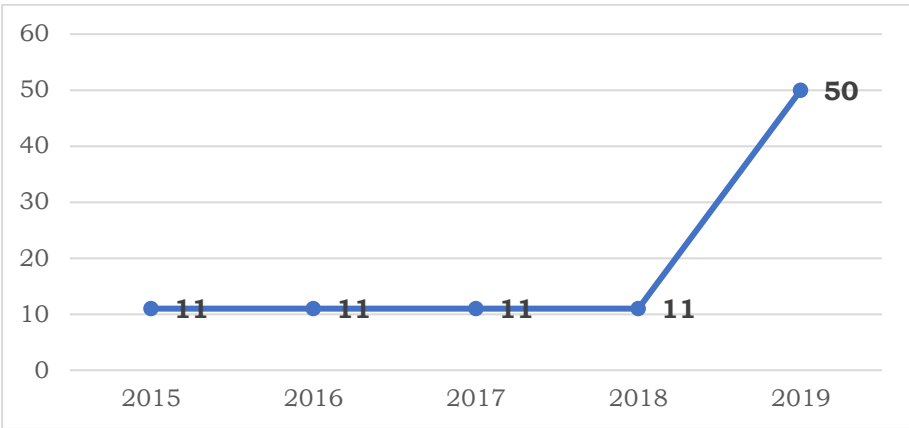
Berdasarkan gambar dibawah ini diketahui bahwa Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 mencapai 11.163 wisatawan dan pada tahun 2019 angkanya naik menjadi 13.283 wisatawan. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2017 jumlahnya hanya 8 wisatawan dan pada tahun 2018 naik menjadi 9 wisatawan. Namun pada tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara turun menjadi 4 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pandemi covid-19 yang sedang melanda hampir seluruh dunia dan kawasan Indonesia.



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Selanjutnya untuk jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih sama yaitu 11. Namun pada tahun 2019 jumlahnya meningkat tajam menjadi 50 buah. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.27
Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2019



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Indikator lainnya pada urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
PAD sektor pariwisata	Rp.	14.460.000	64.683.000
Jumlah kunjungan wisatawan	orang	13.283	15.300
Rasio obyek wisata yang dipasarkan	persen	31	32
Rasio destinasi wisata unggulan yang dikembangkan	persen	15	17
Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	persen	60	60

Sumber: Lakip Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Barito Timur

2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan komoditi utama Kabupaten Barito Timur untuk dikembangkan menjadi agribisnis. Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sektor perkebunan Kabupaten Barito Timur sedang dikembangkan dengan komoditi utama karet dan kelapa sawit. Kabupaten Barito Timur menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, dan cacao. Tanaman

perkebunan yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah karet sebanyak 11.862,78 ton pada tahun 2017. Produksi karet di Kabupaten Barito Timur sangat terkenal di dunia industri karena kualitasnya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB dalam lima tahun menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang ingin mengembangkan pertanian sebagai basis ekonomi selain sektor pertambangan.

Tabel 2.67
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Tahun 2015-2020

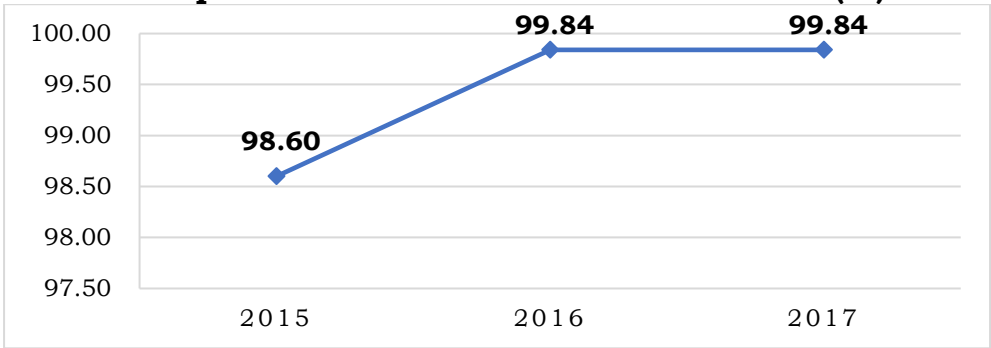
No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	19,81	19,03	18,47	17,34	17,29	17,37
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	6,03	3,91	6,37	4,41	4,59	3,15

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.3.2.4. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah adalah fasilitas listrik, supaya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Barito Timur secara layak selama 24 jam. Jika dilihat dari data yang ada, maka sebagian besar penduduk di Kabupaten Barito Timur sudah merasakan fasilitas listrik. Sebanyak 99,84 persen rumah tangga sudah menggunakan fasilitas listrik dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Gambar 2.28
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Listrik Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017 (%)

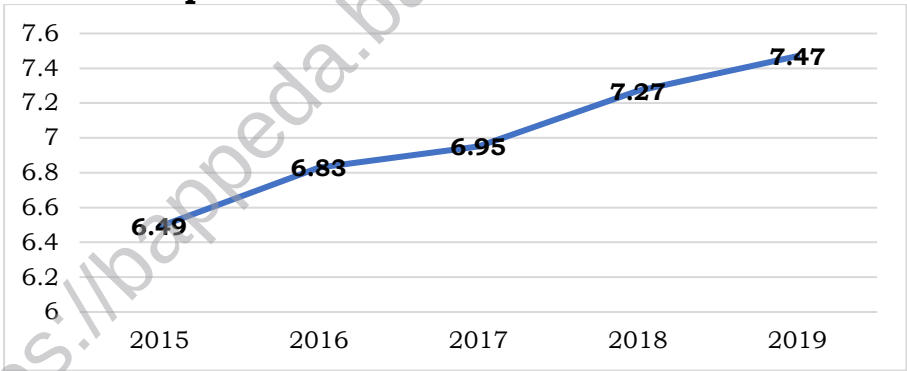


Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

2.3.2.5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Barito Timur masih belum dioptimalkan, khususnya dari sisi kualitas produk dan pemasarannya. Meskipun begitu, pergerakan sektor ini dalam perekonomian di Barito Timur mengalami peningkatan yang terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor perdagangan (termasuk reparasi kendaraan bermotor) dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 mencapai angka 6,95 persen.

Gambar 2.29
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019



Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Capaian indikator yang ada pada urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 dan 2020

Indikator	2019	2020
Penunjang Kinerja Pelayanan Aparatur	94,49%	88,32%
Koperasi Aktif, KUD aktif Setiap Desa, Koperasi yang berkualitas, KSP/USP Sehat dan Berdirinya/Aktifnya kopearsi di Desa PM2L	132 Koperasi	133 Koperasi
Jumlah dan Tenaga Kerja UMKM serta UMKM potensi Produk Lokal	220	306
KUMKM Penerima Modal	600	4.859
Produk UMKM Masuk Pasar, Produk OVOM KUMKM, dan Promosi KUMKM	5	7
Pengurus KUMKM yang terlatih	60 orang	60 orang
Industri Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi yang tangguh dan Unggul serta Berdaya Saing	685	685
Industri yang Tangguh, unggul serta daya saing dan berwawasan Lingkungan sehingga mampu meningkatkan perekonomian	-	-
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	86,34%	93,48%
Kelembagaan Perdagangan dan Profesionalisme Pelaku Usaha dalam rangka perluasan Pasar	92,02%	92,73%

Sumber: *Lakip Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Barito Timur, 2015-2020*

2.3.2.6. Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang sedang berkembang di Kabupaten Barito Timur dan diharapkan bisa menjadi andalan ekonomi Barito Timur. Sektor industri terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri kecil dan industri menengah menjadi industri yang berkembang di Kabupaten Barito Timur. Sektor indutri kecil merupakan sektor industri yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaku dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi pada masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Dan Nilai Produksi Pada Industri Kecil Dan Indusri Menengah Di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2020

Klasifikasi industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Produksi (juta)
	Sedang	Kecil dan IKKRT	Sedang	Kecil dan IKKRT	
Industri Makanan	-	65	-	147	10.723.000
industri Minuman	-	38	-	56	957.720
Industri pakaian jadi	-	96	-	161	16.623.150
Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya	-	71	-	349	52.688.000
Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	-	2	-	6	378.500
Industri farmasi, produk obat, dan jamu	-	1	-	1	36.000
Industri barang logam kecuali mesin dan peralatannya	-	139	-	166	7.737.200
Industri pengolahan lainnya	-	-	-	-	-
Jasa reparasi dan pemasangan mesin lainnya	-	194	-	259	21.589.350

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Adapun perkembangan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2015-2020 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	6,60	7,06	7,33	6,99	7,01	
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan	persen	9,69	9,75	7,62	5,84	5,71	
3	Pertumbuhan IKM	IKM					663,00	685,00
4	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (juta)	Juta Rp.					126.968,00	129.421,220
5	Jumlah IKM Baru	IKM					26	35
6	Jumlah IKM	IKM	594	606	623		663	685
7	Jumlah Tenaga Kerja Industri	orang	1.329	1.367	1.389		1421	1473
8	Nilai investasi industri (juta)	Rp.	12.671,45	12.813,95	13.352,45		12920	4.099.500,001

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018 dan Lakip Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Barito Timur, 2015-2019

2.3.2.7. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah serta membina administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Persentase selesainya Penanganan Tata Batas dengan Kabupaten Barito Selatan dan Penyelesaian Tata Batas dengan Kabupaten Tabalong	persen	75,00	80,00	80,00
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa (jumlah pelaksanaan lelang secara elektronik melalui ULP/SPSE)	paket		35,00	578,00
Jumlah PN/WL yang menyampaikan LHKPN	persen		26,00	42,00
Persentase selesainya Penataan Batas Kecamatan	persen	38,00		
Persentase fasilitasi persiapan eLHKPN	persen	90,00		



Indikator	Satuan	2017	2018	2019
Persentase selesai tersusunnya LKIP tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00
Persentase tersusunnya LPPD dan IKK	persen	100,00	100,00	100,00
Raperda menjadi Perda	persen	5,00	8,00	11,00
Persentase peraturan perundang-undangan yang terdokumentasikan	persen	100,00	100,00	100,00
Persentase terlaksananya fasilitasi penyerahan Raskin di kecamatan	persen	98,00	99,00	
Persentase terlaksananya sosialisasi, bimtek dan ujian sertifikasi PBJ	orang			4,00
Persentase terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persen			97.91
Persentase terlaksananya pembentukan PD baru dan penggabungan PD	persen			50

Sumber: Lakip Sekretariat Daerah Barito Timur, 2017-2019

2.3.3.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Barito Timur adalah 25 orang yang terdiri atas 18 laki-laki dan 7 perempuan dari 9 partai politik. Jumlah ini tidak mengalami perubahan sejak hasil pemilu tahun 2018. DPRD Barito Timur secara rutin melakukan sidang paripurna dan telah menghasilkan berbagai keputusan daerah.

Tabel 2.72
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Partai Politik	Anggota DPRD		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai Golongan Karya	3	2	5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	0	3
Perindo	1	1	2
Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2
Partai Nasional Demokrat	2	1	3
Partai Gerindra	2	1	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	2	3
Partai Demokrat	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1
Jumlah	18	7	25

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur, 2021

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.5.1. Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator pada urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik	persen	100	100	100	100	95	95
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	persen	100	100	100,00	100,00	95,00	95
Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.	persen	100	100	100	100	95	95
Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	persen	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	persen			43,60	87,20	5,00	34,67
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	111,11	111,11	97	97

Sumber: Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Barito Timur, 2017-2019

2.3.5.2. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur di tahun 2016 sampai tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.74
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

No	Tahun	Opini Publik
1.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WDP)
2.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018

Capaian indikator lainnya pada urusan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Laporan yang ditetapkan tepat waktu	Persen	99,26	83,1	88,07	99,91	89,29	89,34
Persentase kepuasan Masyarakat dalam	Persen	99,26	81,86	92,47	94,33	93,53	77,06

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
pengurusan keuangan							
Rekonsialisasi Barang Milik Daerah	Persen	99,26	100	88,07	99,91	99,95	90,86
Meningkatnya Pengeloaan Keuangan Daerah	Persen	99,26	88,84	92,47	94,33	91,82	75,11

Sumber: Laki**p** BPKAD Barito Timur, 2018-2019

2.3.5.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan pendidikan, jumlah PNS terbanyak pada tahun 2020 adalah Tingkat Sarjana/Doktor sebanyak 2.394 orang; Diploma III/Akta III/Sarjana Muda sebanyak 394 orang; Sekolah Menengah atas sebanyak 549 orang; Diploma I, II/Akta I, II sebanyak 198 orang; SLTP sebanyak 35 orang; dan Sekolah Dasar sebanyak 13 orang. Secara lengkap Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.76
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020

NO	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020
1.	SD	18	14	13
2.	SLTP	40	37	35
3.	SMA	650	587	549
4.	Diploma I,II/Akta I, II	410	243	198
5.	Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	448	427	394
6.	Tingkat Sarjana/Doktor	2.151	2.392	2.394
Jumlah		3.717	3.700	3.583

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020

Capaian indikator lainnya pada urusan Kepegawaian dan Diklat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian dan Diklat
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	C	C	C	C	CC	CC



Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	-	-	67,76	82,8	0,00	67,74
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persen	9,85	80,84	81,38	75,14	85,32	6,01
Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	31	35,00	28,00	24,00	32,00
Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	Orang	149	143	146,00	129,00	136,00	132,00
Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	orang	485	496	473,00	397,00	428,00	384,00
Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	orang	1409	910	915,00	1.052,00	1.138,00	1.118,00
Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	orang	2324	2436	2.344,00	2.086,00	1.972,00	1.928,00

Sumber: Lapid Badan Kepegawaian dan Diklat Barito Timur, 2017-2019

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pemerintah daerah terkait penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah. Capain indikator tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.78
Hasil-Hasil Penelitian yang Diterapkan Untuk Kepentingan
Perencanaan Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017

Hasil-Hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan perencanaan (dokumen):	13	10	5
- Study kelayakan ttg ekonomi	2	3	2
- Study kelayakan ttg ekonomi	4	4	2
- Study kelayakan ttg ekonomi	7	3	1

Sumber: LAKIP Bappeda Tahun 2018 dan 2019

2.3.6. Pengawasan (Inspektorat Daerah)

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2017 adalah 48,86 dengan kategori C atau kategori kurang. Pada tahun 2019 sudah memenuhi target, yaitu CC atau kategori Cukup.

Tabel 2.79
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2019

Komponen	Bobot	2015	2016	2017	2018	2019
Perencanaan Kinerja	30	13,46	15,16	15,16	18,92	18,94
Pengukuran Kinerja	25	9,23	10,70	9,7	10,91	10,84
Pelaporan Kinerja	15	8,94	9,12	9,12	9,4	8,98
Evaluasi Kinerja	10	3,13	3,44	3,44	0,83	0,92
Capaian Kinerja	20	10,31	9,40	8,82	10,1	10,48
Total	100	45,07	47,82	46,24	50,16	50,16
Kategori		C	C	C	C	CC

Sumber: Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2016, Indeks maturitas SPIP

Kabupaten Barito Timur berada di level 1 sehingga masuk kategori rintisan. Rintisan berarti praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, kelemahan tidak teridentifikasi.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan, yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya. Angka pengeluaran menurut kelompok barang makanan dan non makanan tahun 2015-2020, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Angka Pengeluaran Per-Kapita Menurut Kelompok Barang Makanan dan non Makanan di Kabupaten Barito Timur (Ribuan Rp) Tahun 2015-2020

No	Tahun	Kelompok Barang Makanan (Ribuan Rp)	Kelompok Barang Non Makanan (Ribuan Rp)	Total
1.	2015	512.031	611.432	1.123.463
2.	2016	555.760	653.629	1.209.389
3.	2017	602.120	481.779	1.083.899
4.	2018	605.265	561.621	1.166.886
5.	2019	587.432	548.621	1.136.053
6.	2020	657.576	595.305	1.252.881

Sumber:

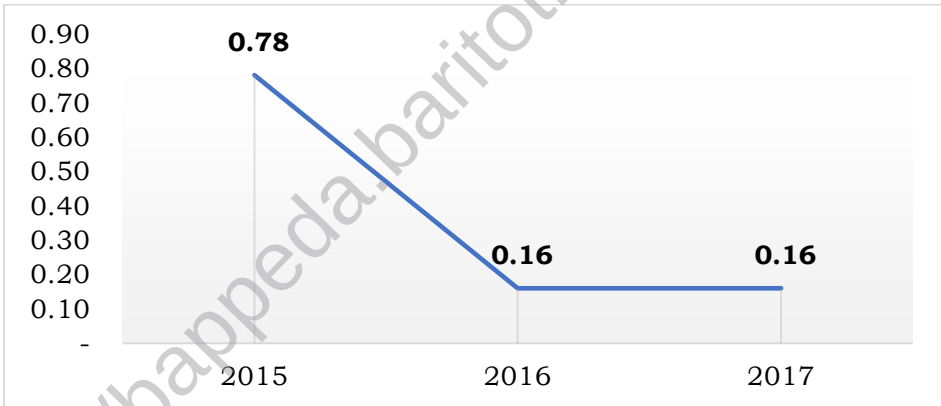
1. Barito Timur Dalam Angka Tahun 2020
2. RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021
3. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

Data beberapa tahun sebelumnya menunjukkan Pengeluaran rata-rata perkapita per bulan penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2020 terdiri atas Rp657.576,- untuk konsumsi makanan, dan Rp595.305,- non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan proporsi jenis pengeluarannya, persentase pengeluaran untuk makanan lebih tinggi yakni 52,49 persen, sedangkan non makanan sebesar 47,51 persen.

2.4.2. Angka Kriminalitas

Kriminalitas berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, juga aspek ekonomi. Tingginya angka kriminalitas akan berimbas pada perkembangan ekonomi. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi. Maka dari itu perlu adanya menjaga stabilitas keamanan, politik dan beberapa bidang penting lainnya untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Angka kriminalitas Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 berada di angka 0,16.

Gambar 2.30
Angka Kriminalitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

2.4.3. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan dapat menjadi salah satu indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Angka beban ketergantungan yang kecil memberikan kesempatan

bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15–64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk belum produktif (usia 14 tahun ke bawah) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Selain itu, penduduk usia belum produktif dan penduduk usia tidak produktif lagi sering bergantung secara ekonomi.

Sebagaimana data yang tersedia, terlihat sebanyak 85.580 jiwa penduduk Barito Timur (68,86 persen) merupakan penduduk usia produktif. Sementara itu, sebanyak 38.694 jiwa (31,14 persen) merupakan penduduk usia nonproduktif. Dengan demikian, angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2020 sebesar 45,21 persen, yang berarti bahwa setiap seratus orang penduduk usia produktif harus menanggung beban sekitar 45 hingga 46 orang berusia nonproduktif.

Tabel 2.81
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia non produktif	36.142	36.787	37.476	38.188	38.912	38.694
- jumlah penduduk usia 0-14 tahun	31.655	32.064	32.492	32.909	33.299	
- jumlah penduduk diatas 64 tahun	4.487	4.723	4.984	5.279	5.613	
Jumlah penduduk usia produktif	77.554	80.159	82.778	85.369	87.962	85.580
- jumlah penduduk usia 15-64 tahun	77.554	80.159	82.778	82.778	87.962	85.580
RASIO KETERGANTUNGAN	46,60	45,89	45,27	44,73	44,24	45,21

Sumber:
1. Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017 dan 2020;
2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020.

Seluruh data dan informasi pembangunan Kabupaten Barito Timur periode 2015 sampai dengan 2019 yang merupakan potret keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek

pembangunan daerah disajikan pada tabel di bawah. Pada tabel ini terdapat beberapa data yang tidak lengkap disajikan selama 5 (lima) tahun sebab data tahun 2015 sampai dengan 2018 merupakan kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 sedangkan data tahun 2019 merupakan kinerja tahun pertama dari RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat indikator yang digunakan selama kedua periode RPJMD tersebut, namun ada juga yang hanya digunakan di periode RPJMD sebelumnya atau hanya periode RPJMD yang saat ini.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



Tabel 2.82
Indikator Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019

No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,25	5,16	5,98	5,71	5,45
2	PDRB ADHB	Milyar Rp	4.770,20	5.627,63	6.323,81	7.043,15	7.548,50
3	PDRB per kapita	Juta Rp	44,8	48,1	52,6	57,0	59,5
4	Indeks gini	persen	0,382	0,327	0,307	0,317	0,312
5	Garis Kemiskinan (Rp)	Rp.	415.710	442.070	467.090	478.510	487.185
6	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Orang	9.510	8.880	8.560	8.050	7.970
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	persen	8,41	7,64	7,17	6,56	6,32
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,83	1,29	0,97	1,01	0,72
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,15	0,34	0,21	0,25	0,12
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,16	-	88,36	88,41	88,76
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,80	-	76,46	76,50	82,67
12	Tingkat pengangguran	persen	2,14	3,6	4,68	3,50	2,89
13	Pendapatan perkapita	Juta	44,8	48,1	52,6	57,0	59,5
14	Paritas daya beli	Rp	10.570	10.631	10.808	11.333	11.319
15	Jumlah penduduk	Jiwa	113.696	116.946	120.254	123.557	126.874
16	Pengeluaran perkapita	Rp	1.123.463	1.209.389	1.083.899	1.166.886	1.136.053
17	IPM	Persen	69,71	70,33	70,57	70,82	71,34
18	Angka melek huruf	Persen	96,19	99,67	98,50	99,57	99,30
19	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,02	9,03	9,04	9,05	9,20
20	Angka partisipasi kasar SD/ MI/ SDLB	Persen	109,65	109,65	92,07	103,68	91,36
21	Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs/ SMPLB	persen	118,5	101,32	76,1	105,9	80,51
22	Angka partisipasi kasar SLTA/ MA/ SMK	Persen	103	98,38	70,79	73,71	
23	Angka partisipasi murni SD/ MI/SDLB	Persen	99	97	98,47	99,42	99,19
24	Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB	Persen	105	77,36	75,33	74,29	75,71
25	Angka partisipasi murni SLTA/ MA/ SMK	Persen	115	71,24	59,02	64,96	63,99
26	Angka harapan hidup	Tahun	67,71	67,84	67,97	68,06	68,14
27	Angka Kesakitan (Angka Morbiditas)	Nilai		15,45	11,96	10,19	7,30

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
II. Aspek Pelayanan Umum							
A	Urusan pemerintahan wajib						
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1.1	Urusan pendidikan						
1.1.1.a	Angka partisipasi sekolah SD/ MI	persen	97,7	100	100	99,42	99,51
1.1.1.b	Angka partisipasi sekolah SLTP/ MTs	persen	95,99	97,11	94,59	93,66	93,77
1.1.1.c	Angka partisipasi sekolah SLTA/ MA/SMK	persen	64,45	65,38	70,64	72,91	69,97
1.1.2a	Rasio Murid terhadap Guru SD Negeri	Per 1 guru	7	7	8	8	8
	Rasio Murid terhadap Guru SD Swasta	Per 1 guru	8	11	10	11	10
1.1.2b	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Negeri	Per 1 guru	8	9	9	9	10
	Rasio Murid terhadap Guru SLTP Swasta	Per 1 guru	10	11	9	9	10
1.1.2c	Rasio Murid terhadap Guru SLTA Negeri	Per 1 guru	9	9	10	10	11
	Rasio Murid terhadap Guru SMK Negeri	Per 1 guru	7	7	8	9	9
	Rasio Murid terhadap Guru SLTA/SMK Swasta	Per 1 guru	7	10	7	8	9
1.1.3a	Rasio murid SD Negeri terhadap sekolah		80	79	77	79	81
	Rasio murid SD Swasta terhadap sekolah	Rasio	151	179	167	174	180
1.1.3b	Rasio murid SLTP Negeri terhadap sekolah	Rasio	157	160	162	163	70
	Rasio murid SLTP Swasta terhadap sekolah	Rasio	188	184	183	185	200
1.1.3c	Rasio murid SLTA Negeri terhadap sekolah	Rasio	212	232	238	240	245
	Rasio murid SMK Negeri terhadap sekolah	Rasio	216	221	235	235	240
	Rasio murid SLTA/SMK Swasta terhadap sekolah	Rasio	152	154	153	155	
1.1.4a	Angka putus sekolah SD/MI/SDLB	Persen	8	8	7	6	6
1.1.4b	Angka Putus Sekolah SMP/ MTs/SMPLB	Persen	0	0	3	3	2
1.1.4c	Angka putus sekolah SMA/ SMK/MA	persen	0	1	1	1	1
1.2	Urusan Kesehatan						
1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,52	1,46	1,46		1:2
	Jumlah posyandu	Unit	163	164	164	164	164
1.2.2a	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 30.000 penduduk	75,15	86	86		1:1
	Jumlah puskesmas	Unit	11	11	11	11	11

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	21,73:100.000	21,3 :100.000	25,73 :100.000		1:3.666
	Jumlah Dokter umum	orang	23	19	35	22	23
	Jumlah dokter spesialis	orang	5	5	9	11	9
	Jumlah dokter gigi	orang	5	6	5	3	2
	Jumlah bidan	orang	151	107	214	198	176
	Jumlah perawat	orang	168	232	274	259	213
1.2.6	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	1000 KH	3/1000 KH	2/1000 KH	6/1000 KH	9/1000 KH	15/1000 KH
1.2.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1/100.000 KH	208/ 100.000 KH	52/ 100.000 KH	50/ 100.000 KH	0/100.000	2/100. 000 KH
1.2.8	Cakupan Desa Siaga aktif	Persen	70,37	83,02	75		70
1.2.9	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	jumlah/ persen	1936/94	1508/104	2213/82,64	2105/94,31	2105/78,17
1.2.10	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	jumlah/ persen	296/82	121/100	1974/77,17	1856/72,22	1856/72,22
1.2.11	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi aru lahir sesuai standar	jumlah/ persen	1971/110	1887/74	1973/84,57	1875/76,60	1875/76,60
1.2.12	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	jumlah/ persen	9039/87	8011/74	8481/88,61	8487/89,00	8487/89
1.2.13	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	jumlah/ persen	2608/96	-	3906/121,76	3208/82	7714/59
1.2.14	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	jumlah/ persen	15189/87	11834/59	5829/96,35	41441/62,42	41441/62,42

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.2.15	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	1773/84	12270/132
1.2.16	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	6051/100	6554/20
1.2.17	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	4206/100	1371/107
1.2.18	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kabupaten yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kuurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	196/100	273/176
1.2.19	Jumlah orang yang mendapatkan pelayan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	306/49,02	103/31,8
1.2.20	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 1 tahun	jumlah/ persen	-	-	-	6/100	633/23
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	318,78	358,39	431,05	389,66	87,27
1.3.2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	72,25	78,25	84,04	60,21	64,01
1.3.3	Rasio jaringan irigasi	rasio	71,5	75	85	87	89
1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	53,36	94,4	94,4	94,78	90,60
	Akses terhadap sanitasi layak	Persen					
1.3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	21,34	27	28	26	27
1.3.6	Rasio rumah layak huni	Per 1.000 penduduk	87,27	94,57	94,57	94,41	90,60
1.3.7	Rasio permukiman layak huni	rasio	80,37	80,37	80,37	75,90	99,69
1.3.9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	21,1	49,5	49,5		54,79

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.3.10	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	45,1	48,4	48,4	100	
1.3.11	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan dan jembatan	kegiatan/ persen				1/100	87
1.3.12	Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik (km)	kegiatan/ persen				2/100	60
1.3.13	Rasio panjang jalan perluas wilayah	kegiatan/ persen				1/100	70
1.3.14	Rasio panjang jalan yang telah ditingkatkan	kegiatan/ persen				2/100	70
1.3.15	Terbentuknya Tim koordinasi pemanfaatan daerah (TKPRD) kabupaten untuk pengawasan pemanfaatan ruang	kegiatan/ persen					70
1.3.16	Terwujudnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten No 5 Tahun 2014	kegiatan/ persen					80
1.3.17	Rasio ketersediaan kebutuhan dokumen tata ruang	kegiatan				100	
1.3.18	Ketaatan terhadap RTRW	kegiatan				100	
1.3.19	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen				100	87
1.3.20	Persentase penduduk berakses air minum layak	persen				100	85
1.3.21	Jumlah titik genangan	persen				100	60
1.3.22	Luas kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan (km2)	persen				100	60
1.3.23	Tersedianya jalan dan jembatan untuk menjang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lainnya	persen					70
1.3.24	Tersedianya Data/dokumen jalan dan jembatan	persen					100
1.3.25	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	persen					76,12
1.3.26	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	persen					88,3

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.3.27	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dalam kondisi baik	persen					99,88
1.3.28	Terbangunnya sarana, prasarana Jaringan Pengairan	persen					87,44
1.3.29	Terencananya Pengembangan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	persen					0
1.3.30	Terbangunannya sarana, prasarana pengairan dalam rangka Pengendalian banjir	persen					96,22
1.3.31	Tersedianya Perda RDTRK Perkotaan dan Rencana RDTRK	persen					98,94
1.3.32	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tantang RTR wilayah kabupaten/kota berserta rencana rincinya	persen					97,47
1.3.33	Persentase Luas area yang telah sesuai dengan pola ruang dalam RTR wilayah Kabupaten Barito Timur	persen					99,38
1.3.34	Persentase penduduk berakses air minum layak dan tersedianya sistim air limbah skala komunitas/kawasan/kota	persen					98,53
1.3.35	Luas kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	persen					93,74
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	0,13	76,2	76,2		
1.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	Persen	98,6	99,84	99,84		
1.4.3	Rumah tangga ber sanitasi	Persen	53,56	94,4	94,4	94,78	90,60
1.4.4	Persentase rumah layak huni	Persen	87,27	94,57	94,57	94,41	90,60
1.4.5	Rasio permukiman layak huni	Persen	80,37	80,37	80,37	75,90	99,69
1.4.6	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	23		26,7		90,60
1.4.7	Nilai LKIP Perangkat Daerah	persen					80,45

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.4.8	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	persen					97,65
1.4.9	Terjadinya data lahan yang siap digunakan untuk sarana dan prasarana umum di 10 kecamatan	persen					89
1.4.10	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Berwilayah HPL/HGB	persen					54,79
1.4.11	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	persen					93,42
1.4.12	Rasio Pemenuhan Kebutuhan Listrik untuk Ruang Publik	persen					90,46
1.4.13	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	persen					95,95
1.4.14	Persentase RT yang terakses air bersih						74,01
1.4.15	Rehabilitasi Rumah layak Huni	unit					150
1.4.16	Rasio Elektrifikasi (Rumah Tangga Pengguna Listrik)	persen					97,48
1.4.17	Persentase RTH Publik yang terkelola	persen					0,59
1.4.18	Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah	meter					5.836
1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan	Persen	82,95	75	96,09	117,01	78
1.5.2	Angka kriminalitas	Nilai	0,78	0,16	0,16		
1.5.3	Jumlah terpidana	Kasus	142	140	181		
1.5.4	Jumlah Tindak Pidana	Kasus	176	150	108	117	82
1.5.5	Penyelesaian Tindak Pidana	Kasus	82,95	75	96,09	117,01	78
1.5.6	Meningkatnya Penegakan Perda	Persen			100	100	87,14
1.5.7	Terpenuhinya Patroli lingkungan masyarakat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dan tindakan kriminalitas	Persen			98,78	99,73	95,33
1.5.8	Terpenuhinya Penertiban Umum Masyarakat Kab. Barito Timur	Persen			99	99,68	89,43
1.5.9	Terlaksanannya Pengawasan dan Pengamanan	Persen			93,19	100	79,5

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.5.10	Terlaksananya Kerjasama antara Pol PP dan Damkar dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Persen					89,95
1.5.11	Terpenuhinya Pengamnan Poskotis Natal dan Tahun Baru	Persen			100	100	99,75
1.5.12	Terpenuhinya Operasi Ketupat	Persen			99,86	100	99,75
1.5.13	Terlaksananya Pameran Pembangunan	Persen			100	99,75	100
1.5.14	Meningkatnya penyebarluasan himbauan pencegahan dini potensi bahaya bencana banjir	Persen			98,81	100	94,88
1.5.15	Meningkatnya Penyuluhan pelarangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan	Persen			99,06	100	
1.5.16	Terlaksananya Kegiatan HUT Satpol PP dan Damkar	Persen			100	100	98,85
1.6	Urusan sosial						
1.6.1	Anak Terlantar	orang	22	22	58	2	101
1.6.2	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	orang	0	3	4	4	5
1.6.3	Anak Jalanan	orang	2	2	2	2	2
1.6.4	Anak Dengan Kedisabilitas	orang	20	20	20	20	35
1.6.5	Anak yang Menjadi Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah	orang	0	1	2	1	7
1.6.6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	orang	0-	1	1	1	14
1.6.7	Lanjut Usia Terlantar	orang	60	63	63	100	182
1.6.8	Penyandang Disabilitas	orang	1,315	1,316	1,403	372	373
1.6.9	Tuna Susila	orang	101	85	90	60	73
1.6.10	Beka Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	orang	15	18	18	8	8
1.6.11	Orang Dengan HIV/AIDS	orang	9	17	17	9	9
1.6.12	Korban Penyalahgunaan Napza	orang	21	24	26	-	4
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.1	Urusan tenaga kerja						
2.1.1	Rasio Penduduk yang bekerja	persen	97,86	NA	95,32	96,50	97,11
2.1.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	orang	66.345	NA	65.243	71.966	70.422
2.1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	80,43	NA	95,32	96,5	74,89
2.1.4	Angka Sengketa Pengusaha- Pengusaha Pertahun	kasus	40	40	45	45	20
2.1.5	Rasio Lulusan Diploma/S1/S2/S3	persen	-	NA	13,63	15,14	12,04
2.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,14	NA	4,68	3,5	2,89
2.1.7	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	persen	78,71	NA	70,63	76,32	72,73
2.1.8	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	persen	46,24	NA	41,17	43,44	44,79
2.1.9	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Buah PB	40	40	45	40	18
2.1.10	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	1009	983	1315	1637	395
2.1.11	Besaran Pekerja/ buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	orang	13717	9083	3454	3454	6.569
2.1.12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	0	0	0	0	10
2.1.13	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	21	118	21	21	51
2.1.14	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	0	10	0	0	0
2.1.15	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	95,7	99,8	92,91	98,50	94,17
2.1.16	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	99,53	99,46	88,43	75,00	100,00
2.1.17	Meningkatnya Disiplin Aparatur	persen	97,8	89,2	100,00	100,00	100,00
2.1.18	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persen	100	92,27	100,00	100,00	85,71
2.1.19	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	persen	100	100	66,67	100,00	100,00
2.1.20	Meningkatnya Kesempatan Kerja	persen	78,8	75,9	45,00	99,99	54,45

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.1.21	Meningkatnya Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	persen	96,3	98,21	60,00	74,06	100,00
2.1.22	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	persen	98,4	95,33	72,85	57,14	100,00
2.1.23	Meningkatnya Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja	persen	77,96	84,15	69,29	75	33,33
2.1.24	Meningkatnya Pengelolaan dan inventarisasi aset	persen	100	99,95	100,00	100	100,00
2.1.25	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	persen	87,4	75,9	80,00	84,58	22,20
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	52,93	52,93	53,40	54,56	52,93
2.2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	92,4	100	92,8		41,456
2.2.3	Persentase KDRT	Persen	2,82	1,01	1,99		
2.2.4	Tindak kekerasan terhadap perempuan	jiwa	0	7	19	10	7
2.2.5	Tersedianya pelayanan pengaduan kekerasan. Kerjasama dengan kepolisian	laporan/ persen			100	100	100
2.2.6	Tersedianya Dokumen/laporan hasil penyuluhan Undang-undang penghapusan KDRT	laporan/ persen			100	100	100
2.2.7	Tersedianya Dokumen/Data yang dihsilkan untuk memberikan informasi cara pola asuh Pendidikan Anak yang dibutuhkan publik (masyarakat) maupun siswa/pelajar di Kabupaten Barito Timur	laporan/ persen			100	100	100
2.2.8	Tersedianya Dokumen/Data yang dihasilkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan publik (masyarakat) di Kabupaten Barito Timur	laporan/ persen			100	100	100
2.2.9	Tersedianya Informasi mengenai bahaya HIV-AIDS dan cara pencegahan bagi masyarakat dan pelajar sekolah	laporan/ persen			100	100	100
2.2.10	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen			21	28	28

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.2.11	Rasio KDRT	Rasio			0,04		0,0154
2.2.12	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen			-		0,05
2.2.13	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen			37,05		95,72
2.2.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen			100	100	100
2.2.15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen			100	100	100
2.2.16	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen			100	100	-
2.2.17	Tindak Kekerasan Terhadap Anak	kasus	0	2	11	19	8
2.3	Urusan pangan						
2.3.1	Rasio pemenuhan pangan (beras)	Persen \Kg	161,81	157,31	135,23	102,77	171,98
2.3.2	Jumlah produksi padi	Ton	32,721	32,721	28.923,09	22.084,00	19.904,00
2.3.3	Kerawanan pangan	Persen	30	30	20	20	20
2.3.4	Skor pola pangan harapan		88,4	86,8	89,7	90,2	82,30
2.3.5	Ketersediaan pangan utama	Persen	100	100	100	100	100
2.3.6	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	persen	89,70	90,20			
2.3.8	Penguatan Cadangan Pangan	gapoktan			1,00		
2.3.9	Penanganan Daerah Rawan Pangan	dokumen			1,00		
2.3.10	Penanganan Daerah Rawan Pangan	persen			97,90		
2.3.11	Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	dokumen			1,00		
2.4	Urusan pertanahan						
2.4.1	Luas lahan bersertifikat	ha	17.670,21	1.027,10	14.112,22		
2.4.2	Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan	Jumlah	1.236	2.065	3.611	4.268	1.590

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.5	Urusan lingkungan hidup						
2.5.1	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	21,67	23,7	30,56		90,60
2.5.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah/Provinsi		0	0	0		1
2.5.3	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	53,04	28,179	56,66		35
2.5.4	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	0	97,736	83,9011		90,722
2.5.5	Persentase indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	0	0	0		
2.5.6	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pennggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	perusahaan	22	20	15		22
2.5.7	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1	5	5	5		
2.5.8	Peningkatan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	0	0	0		
2.5.9	Timbulan sampah yang ditangani	M ³ /tahun			19.384		17.598,23
2.5.10	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	0%	0	0	0		5
2.5.11	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)	Persen	0	0	0		24
2.5.12	Presentase lahan kritis yang tertangani	Persen	0	0	0		
2.5.13	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	0	0	0	0		
2.5.14	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	dokumen	20	26	201		3
2.5.15	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	persen			100,00	100,00	
2.5.16	UKL dan UPL meningkat Jumlah Kelengkapan	persen			100,00	100,00	

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.5.17	Jumlah kerusakan lingkungan yang tercegah dan terpantau	persen			100,00	100,00	
2.5.18	Jumlah penegakan hukum lingkungan	persen			61,11	40	
2.5.19	Jumlah kerusakan lingkungan yang tertangani	persen			100	100	
2.5.20	Terpenuhinya kegiatan pengelolaan persampahan	persen			85,1	97,09	
2.5.21	Terlaksananya pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	persen			99	98,42	
2.5.22	Tercapainya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persen				96,02	
2.5.23	Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	persen			91,71	99,67	
2.5.24	Tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan sarana	persen			87,09	96,93	
2.5.25	Tercapainya peningkatan sanitasi pemukiman	persen			75,39		
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	80,43	71,41	83,89	85,51	87,66
2.6.2	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	Lembar	1.799	2.653	3.586	5.237	6.762
2.6.3	Jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan	Lembar	401	323	408	376	426
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.7.9	Jumlah Kelompok Usaha	Kelompok Usaha				101,00	
2.7.10	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel				104,00	
2.7.11	Jumlah Desa Binaan	Desa				101,00	
2.7.12	Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	persen					2,00
2.7.13	Jumlah lembaga desa yang berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan desa	lembaga					8,00
2.7.14	Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan melestarikan Sumber Daya Alam	persen					5,00
2.7.15	Persentase peningkatan kegiatan gotong-royong masyarakat desa	persen					5

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak			1,2	3,00	2,50
2.8.2	Rasio akseptor KB	Rasio	84	85,92	123		
2.8.3	Cakupan peserta KB aktif	pasangan	30,4	88,58	88,58		
2.8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun	orang			1,2	3,00	2,50
2.8.5	Rasio Akseptor KB keluarga menurun	persen			123	PB. 1.465 AKS, 70 %	
2.8.6	Partisipasi KB pria meningkat	persen			196	179	
2.8.7	Peserta KB Aktif meningkat	AKS			18.623	18.236	
2.8.8	Peserta KB Mandiri meningkat	persen			30	41,50	
2.8.9	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS			21.560	21.529	
2.8.10	Kesehatan Repruduksi / WUS 15 -49 thn	orang			30.726	31.726	
2.8.11	Jumlah TFR	persen			2	2,76	
2.8.12	Jumlah Kesehatan Jumlah Kesehatan Meningkat	KK			30.577	31.266	
2.8.13	Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas meningkat	klp			25	29	
2.8.14	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD meningkat	klp			20	30	
2.8.15	Jumlah Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dan berkelanjutan meningkat	klp			25	29	
2.8.16	Jumlah Kelompok Bina Remaja dan Mahasiswa Meningkat	klp			18	29	
2.8.17	Pengembangan model operasional BKR/mahasiswa	klp			12	29	
2.8.18	Laju pertumbuhan penduduk	persen					2,36
2.8.19	Total Fertility Rate (TFR)	persen					2,4
2.8.20	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	persen					70
2.8.21	Persentase Dinas yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	persen					16.498

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.8.22	Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk	persen					30,4
2.8.23	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan	sektor					20.108
2.8.24	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	persen					79,4
2.8.25	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan sudah menikah usia 15-49 tahun	persen					79,4
2.8.26	Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	persen					33,45
2.8.27	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun	persen					70
2.8.28	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen					10,35
2.8.29	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen					70
2.8.30	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen					13,04
2.8.31	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	persen					57
2.8.32	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	persen					45
2.8.33	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	persen					40
2.8.34	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	persen					3
2.8.35	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK- R/M)	persen					255
2.8.36	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen					60

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.8.37	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen					55,35
2.8.38	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (jumlah PPKBD : jumlah desa	persen					1
2.8.39	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen					100
2.8.40	Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen					100
2.8.41	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	persen					53,05
2.8.42	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	persen					23
2.8.43	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen					53,05
2.8.44	Persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen					90
2.9	Urusan perhubungan						
2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	450	346	350		
2.9.2	Jumlah kendaraan bermotor	Unit	14,388	18,898	19,659	20,891	21,43
2.9.3	Panjang jalan kabupaten	Km	968,97	968,97	968,97	973,98	966,58
2.9.4	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Ribu Orang	743,39	345,7	349,5	4320	3240
2.9.5	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah	155,4	415,9	349,47	287,4	-
2.9.6	Rasio Ijin Trayek	Rasio	-	-	-	-	-
2.9.7	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Jumlah	1102	952	743	420	-

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.9.8	Jumlah Terminal Bus	Jumlah	3	3	3	3	-
2.9.9	Jumlah Dermaga Sungai	Jumlah	3	3		4	-
2.9.10	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	-	-	-	-	-
2.9.11	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	Orang / Ton	155,4	415,9	349,47	287,4	-
2.9.12	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga /Terminal Per Tahun	Orang / Ton	-	-	-	-	-
2.9.13	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	Persen (%)	-	-	-	-	66
2.9.14	Persentase cakupan area pelayanan	Persen (%)	-	-	-	-	67
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah jaringan komunikasi	Persen	34	37	37	61,17	75,73
2.10.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Per 1.000 penduduk	24	50	50	0	0
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Surat kabar	25	19	19	30	35
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Siaran	12	3	3	12	2
2.10.6	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	0,76	0,91	0,91	0,93	0,94
2.10.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	85,12	93,03	96,35	91,56	98,13
2.10.7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	68,20	64,67	77,86	78	78,34
2.10.8	Peningkatan Jumlah fasilitas unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID (0 fasilitas);	fasilitas					1
2.10.9	Peningkatan Jumlah berita kegiatan pemda yang dipublikasi pada media massa/elektronik	berita					7600
2.10.10	Peningkatan Jumlah media social elektronik milik pemerintah	medsos					14
2.10.11	Peningkatan Jumlah Pengikut/follower masyarakat dalam media sosial resmi pemerintah daerah	Follower					4980

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.10.12	Peningkatan Jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	media					2
2.10.13	Peningkatan Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didesiminasikan /dipublikasikan kepada masyarakat	media					80
2.10.14	Jumlah media massa / elektronik yang dibina	media massa					10
2.10.15	Jumlah kantor PD/UPTD terkoneksi internet/intranet (5 PD)	PD					29
2.10.16	Jumlah Data Center (server) milik pemerintah daerah (1 server)	server					1
2.10.17	Jumlah aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi (3 aplikasi)	aplikasi					5
2.10.18	Jumlah regulasi terkait penyelenggaraan TIK/ E-Government (1 regulasi)	regulasi					1
2.10.19	Jumlah media website milik pemerintah daerah (5 domain/subdomain)	doamain/ subdomai n					20
2.10.20	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	pengunju ng					194195
2.10.21	Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN pemerintah daerah (43 akun)	akun					54
2.10.22	Rasio jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil di distribusikan (365 surat)	Surat					365/100
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
2.11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	90,77	90,77	90,77	46,15	44,70
2.11.2	Jumlah koperasi	unit	118	129	130	130	
2.11.3	Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	Unit	3.352	15.328	15.328		
2.11.4	Persentase Koperasi aktif	Persen				46,15	44,70
2.11.5	Persentase Koperasi sehat	Persen				45,00	26
2.11.6	Koperasi Berkualitas	Koperasi				27,00	
2.11.7	Koperasi melaksanakan RAT	Koperasi				27,00	30

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.11.8	Pengurus koperasi terlatih	Koperasi				50,00	
2.11.9	Koperasi berprestasi	Koperasi					16
2.11.10	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	orang					184
2.11.11	Jumlah UMKM aktif	UMKM				15.328,00	15.328,00
2.11.12	Jumlah Tenaga kerja KUMKM	orang				16.766,00	
2.11.13	Jumlah UMKM potensi	UMKM				218,00	
2.11.14	IUMK yang diterbitkan	IUMK				50,00	
2.11.15	Produk unggulan	produk				5,00	
2.11.16	KUMKM penerima modal	KUMKM				652,00	
2.11.17	Jumlah industri	produk				637,00	
2.11.18	Terpromosinya produk industri	kali				1,00	
2.11.19	LPE Sektor Industri Pengolahan	persen					2,57
2.11.20	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam aktif	Koperasi					26
2.11.21	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki IUMK	UKM					147,00
2.12	Urusan penanaman modal						
2.12.1	Rata-rata hari proses perijinan investasi	Hari	3-15	3-15	3-15		
2.12.2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	40	41	43		
2.12.3a	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	68,7	68,7	505,5		
2.12.3b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Ribu US\$	61.517	62.044	4.879		
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
2.13.1	Jumlah gedung olah raga	Gedung	1	14	14	58	42
2.13.2	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	19	19	21	30	31
2.13.3	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	19	21	22	22	22
2.13.4	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	58	58	58	58	58
2.13.5	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	17	25	25	33	32

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.13.5	Persentase pemuda (organisasi kepemudaan) yang mendapatkan pembinaan (pelatihan) di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Persen		100,00	100,00	100,00	13,64
2.13.6	Persentase Cabang Olahraga yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi	Persen		15,80	26,30	2,70	16,67
2.13.7	Jumlah Perolehan Medali Emas/Juara Pertama dalam Kejuaraan Nasional	Medali		6,00	3,00	3,00	2,00
2.13.8	Persentase Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali dalam Kompetisi tingkat Regional dan Nasional	Persen		58,00	20,00	33,00	66,67
2.13.9	Prestasi Cabang Olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat		-	24,00	-	22,00
2.13.10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		80	100	95,45	70
2.13.11	Persentase organisasi olahraga yang aktif	Persen		100	100	100	70
2.13.12	Cakupan pelatih yang bersertifikat	orang/ persen				27/69,23	27/60
2.13.13	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	buah/ persen				113/69,23	183/85,11
2.13.14	Jumlah atlit berprestasi	orang/ persen				147/204	152/81,72
2.14	Urusan Kebudayaan						
2.14.01	Jumlah grup kesenian	Jumlah	30	30	30	32	32
2.14.02	Jumlah gedung kesenian	Jumlah	1	1	1	1	1
2.14.03	Jumlah penyelenggaraan pagelaran dan festival seni dan budaya meningkat	Jumlah	4	9	5	3	3
2.14.04	Persentase pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya	Persen	58	58	58	58	207,14
2.14.05	Persentase benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	17	25	281	33	112
2.15	Urusan statistik						

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.15.1	Buku Kab. Barito Timur dalam angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.16.2	Buku PDRB Kab.Barito Timur	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.16	Urusan Perpustakaan						
2.16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jiwa	17.588	19.339	19.557	13.855	13.983
2.16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	17.500	19.621	19.621	19.455	20.014
2.16.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun		71.928	101.120	101.300	1.155	1.165
2.16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah			3.815	8.820	8.961
2.16.5	Jumlah perpustakaan desa	poin	50	50	75	75	16,00
2.16.6	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	orang	16.616	17.855	19.626	13.855	13.983
2.16.7	Jumlah pengunjung perpustakaan desa pertahun	orang	75.000	25.000	103.300	27.167	27.167,00
2.16.8	Mobil unit perpustakaan (MUPK) ke desa	MPUK	40	20	50	6	12,00
2.16.9	Mobil unit perpustakaan (MUPK) ke sekolah	MPUK	50	50	50	15	-
2.16.10	Jumlah perangkat daerah kabupaten/ kota (termasuk kecamatan dan BUMD kabupaten/ kota yang dibina dalam rangka akuntabilitas publik	OPD	35	35	35	35	11
17	Urusan Arsip						
2.17.1	Skor poin	poin	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
2.17.2	Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	persen	89,7	90	89,7	80	80
2.17.3	Jumlah Desa/ kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	Desa/Kel.	50	70	79	101	65
2.17.4	Jumlah arsip yang dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah kabupaten kota, BUMD kabupaten/kota dan desa/ kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam boks pertahun)	arsip	400	700	744	745	750
B	Urusan Pemerintahan Pilihan						

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1.1	Produksi perikanan	Ton	1.130,40	1.180,80	1.268,40		
1.2	Nilai produksi perikanan	Rp.	30.929.800	48.032.509	48.570.350	50.998.867	58.322,793
	- Nilai Produksi Budidaya (Rp)	Rp.	14.124.800	26.064.000	27.484.500	28.858.725	29.147
	- Nilai Produksi Tangkap (Rp)	Rp.	16.805.000	21.968.509	21.085.850	22.140.142	29.175,481
1.3	Jumlah Produksi perikanan	ton	1.917,40	2.069,20	2.198,20	2.198,20	2.198,20
	- Produksi Perikanan Tangkap	ton	787,00	888,40	851,20	1049,953	1.595,11
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.130,40	1.180,80	1.268,40	1308,15	1.390,88
1.4	RTP Pembudidaya Ikan (kolam+keramba)		1.255	1.134	1.314	1.284	1.300
1.5	RTP Nelayan (sungai, danau, rawa)		1.500	1.500	1.500	1.310	1.310
1.6	Luas Areal (Ha) Budidaya						
	- Kolam	Ha	34,20	34,68	34,68	36,40	36,60
	- Keramba	Ha	13,10	13,50	13,60	13,68	14,20
2	Urusan pariwisata						
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	-	-	10.969		13.283
	- Wisatawan Domestik				11.163	11.138	13.283
	- Wisatawan Mancanegara				8	9	4
2.2	Jumlah Potensi Pariwisata yang telah didata	Obyek	4	7	18		
2.3	Jumlah Restoran/Rumah Makan		11	11	11	11	50
2.4	PAD sektor pariwisata	Rp.					14.460.000
2.5	Rasio obyek wisata yang dipasarkan	persen					31
2.6	Rasio destinasi wisata unggulan yang dikembangkan	persen					15
2.7	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	persen					60
3	Urusan pertanian						
3.1	Luas sawah	Ha	8.065	8.843	9.374		
3.2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	40,38	28,67	31,32		

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Produktivitas padi lading	kw/ha	25,27	17,06	15,58		
3.3	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	19,81	19,03	18,47	17,34	17,29
3.4	Produksi padi	Ton	32.721	25.012	28.505		
3.5	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	6,03	3,91	6,37	4,41	4,59
3.6	Jumlah produksi daging (sapi, kerbau, kambing dan babi)	Ton	263.086	206.304	138.144	132.240	148.608
3.7	Jumlah produksi daging ayam/unggas	Ton	631.054	608.811	609.550	607.548	585.356
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	39,17	37,40	37,13	37,69	35,90
4.2	Produksi listrik	KWh	34.146.102	32.250.714	32.956.071	34.553.898	36.459.787
	\						
5	Urusan perdagangan						
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	Persen	6,49	6,83	6,95	7,27	7,47
5.2	Jumlah pedagang besar	Unit	31	41	43		
5.3	Jumlah pedagang menengah	Unit	162	189	218		
5.4	Jumlah pedagang kecil	Unit	152	170	210		
5.5	Koperasi Aktif, KUD aktif Setiap Desa, Koperasi yang berkualitas, KSP/USP Sehat dan Berdirinya/Aktifnya kopearsi di Desa PM2L	Koperasi	9	9	-	-	132
5.6	Jumlah dan Tenaga Kerja UMKM serta UMKM potensi Produk Lokal	Orang	12	7	-	-	220
5.7	KUMKM Penerima Modal	KUMKM	5	1	-	-	600
5.8	Produk UMKM Masuk Pasar, Produk OVOM KUMKM, dan Promosi KUMKM	Produk	4	4	-	-	5

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
5.9	Pengurus KUMKM yang terlatih	Orang	10	2	-	-	60
5.10	Industri Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi yang tangguh dan Unggul serta Berdaya Saing	IKM	9	1	-	-	685
5.11	Industri Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi yang tangguh dan Unggul serta Berdaya Saing		3	2	-	-	
5.12	Kelembagaan Perdagangan dan Profesionalisme Pelaku Usaha dalam rangka perluasan Pasar		4	3	-	-	-
5.13	Industri Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi yang tangguh dan Unggul serta Berdaya Saing		3	5	-	-	-
5.14	Industri yang Tangguh, unggul serta daya saing dan berwawasan Lingkungan sehingga mampu meningkatkan perekonomian		3	8	-	-	-
5.15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		5	5			86,34
5.16	Kelembagaan Perdagangan dan Profesionalisme Pelaku Usaha dalam rangka perluasan Pasar		11	-			92,02
5.17	Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran Produk Daerah		-	-			
6	Urusan perindustrian						
6.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	6,60	7,06	7,33	6,99	7,01
6.2	Jumlah IKM	IKM	594	606	623		663
6.3	Tenaga kerja industry	orang	1.329	1.367	1.389		1.421
6.4	Nilai investsi industry	(000 Rp)	12.671,45	12.813,95	13.352,45		12.920
C	Urusan Pendukung		C	C	C	C	CC
1.2	Persentase selesainya Penanganan Tata Batas dengan Kabupaten Barito Selatan dan	persen			75,00	80,00	80,00

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Penyelesaian Tata Batas dengan Kabupaten Tabalong						
1.3	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa (jumlah pelaksanaan lelang secara elektronik melalui ULP/SPSE)	paket				35,00	578,00
1.4	Jumlah PN/WL yang menyampaikan LHKPN	persen				26,00	42,00
1.5	Persentase selesainya Penataan Batas Kecamatan	persen			38,00		
1.6	Persentase selesainya pelayanan pengadaan barang dan jasa	persen			247,00		
1.7	Persentase fasilitasi persiapan eLHKPN	persen			90,00		
1.8	Persentase selesai tersusunnya LKIP tepat waktu	persen			100,00	100,00	100,00
1.9	Persentase tersusunnya LPPD dan IKK	persen			100,00	100,00	100,00
1.10	Raperda menjadi Perda	persen			5,00	8,00	11,00
1.11	Persentase peraturan perundang- undangan yang terdokumentasikan	persen			100,00	100,00	100,00
1.12	Persentase terlaksananya fasilitasi penyerahan Raskin di kecamatan	persen			98,00	99,00	
1.13	Persentase terlaksananya sosialisasi, bimtek dan ujian sertifikasi PBJ	orang					4,00
1.14	Persentase terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persen					97.91
1.15	Persentase terlaksananya pembentukan PD baru dan penggabungan PD	persen					50
2.	Sekretariat DPRD						
2.1	Jumlah Anggota DPRD		25	25	25	25	25
D	Unsur Penunjang						
1.	Perencanaan						
1.1	Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik	persen	100	100	100	100	95

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	persen	100	100	100,00	100,00	95,00
1.3	Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.	persen	100	100	100	100	95
1.4	Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	persen	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
1.5	Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	persen			43,60	87,20	5,00
1.6	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	111,11	111,11	97
2.	Keuangan						
2.1	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase Penyerapan APBD setiap SKPD	Persen					
2.3	Persentase Penyelesaian Opini BPK-RI setiap tahunnya dan Penyusunan SOP, Renja, Renstra.	Persen	99,26	81,86	92,47	94,33	93,53
2.4	Meningkatnya Pengeloaan Keuangan Daerah dan Terlaksananya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	99,26	88,84	92,47	94,33	91,82
2.5	Rekonsialisasi Barang Milik Daerah dan Penyusunan SOP, Renja, Renstra	Persen	99,26	100	88,07	99,91	99,95
3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
3.1	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	C	C	C	C	CC
3.2	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	-	-	67,76	82,8	0,00
3.3	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persen	9,85	80,84	81,38	75,14	85,32
3.4	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	31	35,00	28,00	24,00
3.5	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	Orang	149	143	146,00	129,00	136,00
3.6	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	orang	485	496	473,00	397,00	428,00



No	Indikator kinerja daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
3.7	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	orang	1409	910	915,00	1.052,00	1.138,00
3.8	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	orang	2324	2436	2.344,00	2.086,00	1.972,00
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Hasil-Hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan perencanaan	dokumen	13	10	5		
E.	Pengawasan						
1	Hasil Evaluasi AKIP:						
	- Perencanaan Kinerja	30	13,46	15,16	15,16	18,92	18,94
	- Pengukuran Kinerja	25	9,23	10,70	9,7	10,91	10,84
	- Pelaporan Kinerja	15	8,94	9,12	9,12	9,4	8,98
	- Evaluasi Kinerja	10	3,13	3,44	3,44	0,83	0,92
	- Capaian Kinerja	20	10,31	9,40	8,82	10,1	10,48
	Total	100	45,07	47,82	46,24	50,16	50,16
III. Aspek Daya Saing Daerah							
4.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.123.463	1.209.389	1.083.899	1.166.886	1.136.053
4.1.2	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	611.432	653.629	481.779	561.621	548.621
4.1.3	Angka kriminalitas	angka	0,78	0,16	0,16		
4.1.4	Rasio ketergantungan	Rasio	46,60	45,89	45,27	44,73	44,24

Sumber: Bappeda, 2021, diolah

2.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan penerapan SPM, dan dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja daerah. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Penerapan SPM di Kabupaten Barito Timur telah mulai dilakukan sejak tahun 2019. Laporan penerapan SPM Tahun 2019 dan 2020 dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini disajikan laporan penerapan SPM Tahun 2019 dan 2020.

2.5.1. Penerapan SPM Tahun 2019

A. Bidang Pendidikan

Pada bidang Pendidikan terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan SPM yang harus dilaksanakan. Adapun target dari pencapaian SPM bidang Pendidikan adalah 100% untuk setiap indikator. Penerapannya melalui 3 (tiga) program sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.83
Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah

No.	Program	Target
1	2	3
1	Program Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	100%
3.	Program pendidikan non formal dan informal	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

B. Bidang Kesehatan

Pelayanan dasar bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2019 baru 4 (empat) yang dapat diterapkan dari 12 jenis pelayanan yang harus diterapkan, yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dan Pelayanan kesehatan balita. Hal ini dilakukan

melalui Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan target 100%.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Pada bidang pekerjaan umum terdapat 2 (dua) jenis pelayanan SPM yang harus dilaksanakan yaitu air minum sehari-hari dan air limbah. Dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum menggunakan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan target 100%. Adapun alokasi anggaran dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum sebanyak Rp. 4.695.369.000.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan jenis pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat dilaksanakan melalui Program pengembangan kawasan permukiman. Namun dari LPPD tidak diinformasikan berapa realisasi dan anggaran pada program tersebut dalam rangka penerapan SPM bidang perumahan rakyat.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2019, SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak criminal, dan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Target kedua program ini adalah 100%, namun tidak ada informasi mengenai realisasi target pada LPPD. Adapun alokasi anggaran dalam pelaksanaan Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal sebanyak Rp288.895.000, sedangkan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tidak dicantumkan informasi anggarannya.

F. Urusan Sosial

Pelaksanaan jenis pelayanan dasar SPM bidang Sosial dilaksanakan melalui beberapa program, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Namun pada LPPD Tahun 2019 tidak dmuat informasi mengenai realisasi dan anggaran penerapan SPM melalui keempat program tersebut.

Tabel 2.84
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Daerah

No.	Program	Target
1	2	3
1	Program pembinaan anak terlantar	100%

No.	Program	Target
2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100%
3	Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	100%
4	Program pembinaan lansia terlantar	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019

2.5.2. Penerapan SPM Tahun 2020

A. Bidang Pendidikan

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu:

Tabel 2.85
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	97,87
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	28,99
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	62,84

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Dalam pelaksanaan SPM ditemui beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan beberapa solusi.

Permasalahan:

- Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar.
- Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1.
- Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.

- Standar Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional.
- Pencapaian rata-rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan baru belum mencapai 7,58 Tahun sebagai indikasi penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- Pendidikan inklusif untuk penanganan pendidikan untuk anak yang kebutuhan khusus

Solusi:

- Optimalisasi penggunaan dana, baik bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai Pemerintah maupun swadaya murni para guru.
- Melalui pemerataan di tingkat Kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru.
- Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
- Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.
- Melaksanakan Pendidikan Inklusif merupakan bagian dari Kolaborasi antara Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penanganan pendidikan yang berkebutuhan khusus

B. Bidang Kesehatan

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

Tabel 2.86
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	82
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	78
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	89



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	45
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	62
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	22
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	85
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	89
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	88
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	20
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	40

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Dalam pelaksanaan SPM ditemui beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan beberapa solusi. Permasalahan:

- Target capaian dari Pusdatin terlalu tinggi.
- Kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan karena tutupnya sekolah selama masa pandemic Covid-19.

- Solusi:
- Target capaian tersaji berdasarkan data real Puskesmas (berdasarkan kasus), dimana kunjungan pasien ke Puskesmas menurun karena pandemic Covid-19.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yaitu:

Tabel 2.87
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	77,34
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	99,87

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

D. Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat tidak dilaksanakan sebab tidak tersedia program dan anggarannya.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu:

Tabel 2.88
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	99,99
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	90,70
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	70,22

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	99,61
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	70,22

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Dalam pelaksanaan SPM ditemui beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan beberapa solusi. Permasalahan:

- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
- Kurangnya pengawasan ke personil yang ditempatkan di OPD lain.
- Kurangnya dukungan dari OPD terkait

Solusi:

- Adanya koordinasi antar bidang dan koordinasi bersama dengan unsur Pimpinan dan OPD terkait

F. Urusan Sosial

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yaitu:

Tabel 2.89
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	0
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	0
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	0
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang	100	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian SPM (%)
	bencana bagi korban bencana kab/kota	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		

Sumber: LPPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

Dalam pelaksanaan SPM ditemui beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan beberapa solusi.

Permasalahan:

- Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi) yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Pelayanan Pemberdayaan, Pelayanan Rehabilitasi, Pelayanan Perlindungan dan Pelayan Kesetiakawanan Sosial, sedangkan cakupan wilayahnya yang luas.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi masalah social, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan masalah tentang kesejahteraan sosial (ASN S1 Psikologi, S1 Sosialogi).
- Fasilitas prasarana jauh dari memadai, sementara luas wilayah kerja begitu luas dalam rangka menjangkau, mendata dan memberikan bantuan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Kurang optimalnya penanganan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Kurangnya terdukungnya dari sisi anggaran untuk melaksanakan Program / Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur.
- Tidak tersedianya anggaran untuk pencapaian 4 (empat) jenis pelayanan dasar akibat dari rasionalisasi anggaran.

Solusi:

- Melakukan peningkatan Sumber Daya Manuasia.
- Melakukan evaluasi kegiatan dan melaksanakan pelatihan SPM bidang Sosial.
- Akan direncanakan dan dianggarkan pada tahun berikutnya.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu disajikan untuk menghasilkan gambaran kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran dari struktur dan akurasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Secara rinci gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:



1) **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2013-2017) selalu meningkat nilainya. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Meskipun secara tren nilai PAD dari tahun 2013-2017 terbilang meningkat, namun fluktuasi masih terjadi di dalamnya. PAD pernah meningkat secara signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari Rp. 15,68 miliar menjadi Rp. 60,79 miliar. Namun dari tahun 2014 ke tahun 2016 nilainya justru menurun drastis menjadi Rp. 34,09 miliar di tahun 2016. Walaupun akhirnya di tahun 2017 terjadi peningkatan nilai PAD secara drastis menjadi Rp. 85,51 miliar, namun ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah yang lain seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah trennya semakin meningkat tiap tahun. Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Barito Timur pada tahun 2013 mencapai Rp. 546,566 miliar dan menjadi Rp. 609,128 miliar di tahun 2017. Sedangkan sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2013 sebesar Rp. 90,009 miliar dan menjadi Rp. 105,849 miliar di tahun 2017.



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	634.427.268.692	760.360.620.234	781.059.959.000	856.991.556.255	800.494.154.102	6,43%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.688.848.273	60.796.731.625	37.869.997.230	34.092.360.685	85.515.924.312	40,38%
1.1.1	Pajak daerah	3.291.846.529	35.479.847.408	5.518.676.628	7.048.900.549	51.907.816.235	73,60%
1.1.2	Retribusi daerah	4.010.291.201	3.871.721.033	5.109.930.967	2.845.408.698	2.454.459.173	-9,35%
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.026.489.291	2.611.767.641	3.644.726.070	6.470.006.257	8.638.910.497	23,34%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	5.360.221.253	18.833.395.544	23.596.663.565	17.728.045.180	22.514.738.407	33,25%
1.2.	Dana Perimbangan	546.566.450.310	609.554.690.329	625.485.350.001	690.787.003.368	609.128.868.099	2,19%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	82.720.533.310	99.464.292.329	102.062.746.001	65.154.514.565	53.023.605.621	-8,51%
1.2.2	Dana alokasi umum	424.326.347.000	464.678.658.000	468.744.476.000	482.815.506.000	477.145.707.000	2,37%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.519.570.000	45.411.740.000	54.678.128.000	90.453.091.553	25.854.788.000	-8,14%
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	52.363.891.250	53.104.767.478	0,70%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.171.970.108	90.009.198.280	117.704.611.769	132.112.192.203	105.849.361.691	7,96%
1.3.1	Hibah	3.037.302.695	15.092.870.155	1.435.334.790	31.069.456.844	1.680.655.594	-11,16%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	20.091.114.065	22.595.274.367	19.427.739.175	24.145.026.359	26.567.196.097	5,75%

PERUBAHAN RENCANA PEMBAYARAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
BUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023



No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	37.789.426.000	44.282.576.000	61.342.732.000	1.212.544.000	-	-57,68%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				-		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	11.254.127.348	8.038.477.758	35.498.805.804	75.685.165.000	77.601.510.000	47,13%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018



Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas, maka dapat dilihat melalui capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2013 mencapai rasio 2,47% dan meningkat menjadi 8,00% pada tahun 2014, namun pada dua tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 3,98%, yang kemudian pada tahun 2017 meningkat tajam mencapai angka 10,68%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 6,00%. Secara keseluruhan perkembangan DOFD Kabupaten Barito Timur periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2017

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2013	15.688.848.273	634.427.268.692	2,47%
2014	60.796.731.625	760.360.620.234	8,00%
2015	37.869.997.230	781.059.959.000	4,85%
2016	34.092.360.685	856.991.556.255	3,98%
2017	85.515.924.312	800.494.154.102	10,68%
Rata-rata	46.792.772.425	766.666.711.656	6,00%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Jika kita perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) kontribusi PAD hanya sebesar 6,00%, Dana Perimbangan sebesar 80,62% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 13,38. Melihat rata-rata tersebut, peningkatan PAD harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kemandirian daerah.



a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:(a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan data realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir, realisasi PAD yang mencapai target terjadi di tahun 2014 dan 2015 dimana target PAD tahun 2014 sebesar Rp. 36,23 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 60,80 miliar, untuk target PAD tahun 2015 sebesar Rp. 34,30 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 37,87 miliar.

Sedangkan realisasi PAD tahun 2013, 2016, dan tahun 2017 tidak mencapai target. Jika dilihat sedikit lebih rinci, sumber PAD yang realisasinya dalam kurun waktu 2013-2017 tidak pernah mencapai target ialah retribusi daerah. Untuk itu pengelolaan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan disamping juga tetap meningkatkan pengelolaan sumber PAD lainnya khususnya pajak daerah.

Jika dilihat secara umum, pada tahun 2017 sebagian besar PAD Barito Timur berasal dari pajak daerah dimana persentasenya mencapai 60,70 persen, padahal tahun-tahun sebelumnya pajak daerah berada jauh di bawah Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah. Disamping itu, retribusi daerah memiliki andil yang sangat rendah jika dibandingkan yang lain yakni hanya sebesar 2,45 milyar rupiah atau sebesar 2,86 persen dari total PAD. Hal ini dikarenakan retribusi daerah sangat jarang mencapai target PAD sehingga perlu adanya peningkatan “kantong-kantong” yang dapat meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Sedangkan pada PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara umum mencapai target yang ditetapkan dimana pada tahun 2017 mencapai 8,64 milyar rupiah dengan proporsi sebesar 10,10 persen dari total PAD.

Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013-2017 sebesar 97,67% (Tabel 3.6). PAD yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2014 dan 2017 yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahun 2014 sebesar 288% dengan realiasi sebesar Rp. 60,796 miliar dan tahun 2017 sebesar 151% dengan realisasi sebesar Rp. 85,515 miliar.



Tabel 3.3
Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Pertumbuhan
2013	15.688.848.273	-
2014	60.796.731.625	288%
2015	37.869.997.230	-38%
2016	34.092.360.685	-10%
2017	85.515.924.312	151%
Rata-rata	46.792.772.425	97,67%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

b. Dana Perimbangan

Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Dana Perimbangan merupakan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.

Jika dilihat dari pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2013-2017 sebesar 3,19%. Penerimaan dari dana perimbangan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,52% dan tahun 2016 sebesar 10,44%. Sedangkan penurunan yang cukup drastis terjadi di tahun 2017 dimana dana perimbangan turun sebesar 11,82%. Realisasi pendapatan sumber Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan
2013	546.566.450.310	-
2014	609.554.690.329	11,52%
2015	625.485.350.001	2,61%
2016	690.787.003.368	10,44%
2017	609.128.868.099	-11,82%
Rata-rata	616.304.472.421	3,19%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Propinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan.

Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013-2017 sebesar 11,96%. Pertumbuhan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 sebesar 24,71% dan tahun 2015 sebesar 30,77%. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2017 sebesar -19,88%. Artinya, terdapat penurunan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2017 sebesar 19,88% dibandingkan realisasi 2016.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pertumbuhan
2013	72.171.970.108	-
2014	90.009.198.280	24,71%
2015	117.704.611.769	30,77%
2016	132.112.192.203	12,24%
2017	105.849.361.691	-19,88%
Rata-rata	103.569.466.810	11,96%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

2) Belanja Daerah

Kinerja Pelaksanaan APBD juga dapat dilihat sisi realisasi belanja pemerintah daerah, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) atau belanja program dan kegiatan. Dalam beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017, realisasi belanja baik berupa BL maupun BTL besarnya selalu dibawah dari target pagu anggaran yang telah direncanakan.



Jika dilihat pertumbuhannya, Rata-rata pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2013-2017 sebesar 6,94% atau rata-rata nominal belanja sebesar RP. 757,83 miliar. Pertumbuhan belanja yang paling signifikan terjadi di tahun 2015 dari RP. 666,28 miliar ditahun 2014 menjadi Rp. 801,88 miliar ditahun 2016. Pertumbuhan yang negatif terjadi di tahun 2017, dimana besaran belanja daerah di tahun 2016 sebesar RP. 861,362 miliar menjadi Rp. 822,232 miliar di tahun 2017

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,98 persen. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,84 persen, pertumbuhan yang cukup signifikan terdapat pada komponen Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik yaitu sebesar 56,37 persen.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 1,14 persen, diantaranya belanja pegawai sebesar 0,7 persen, belanja barang dan jasa sebesar 38,39 persen, namun Komponen belanja barang dan jasa dan Belanja modal mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 4,33 persen dan 1,62 persen.



Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	BELANJA	637.431.025.410	666.286.842.292	801.880.185.942	861.362.730.834	822.232.855.195	6,94
2.1	Belanja Tidak Langsung	321.122.337.682	343.246.937.046	417.528.181.926	474.752.029.380	501.798.950.134	11,98
2.1.1	Belanja Pegawai	257.638.189.146	287.250.383.585	321.654.416.656	317.970.242.373	321.263.724.956	5,84
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	25.479.075.000	18.611.564.200	17.495.050.000	33.193.787.499	33.783.317.000	14,64
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.741.617.500	2.741.990.000	244.600.000	268.660.000	225.000.000	-39,21
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	2.234.650.000	6.755.521.797	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	26.814.267.280	34.192.999.261	77.684.115.270	120.634.689.508	139.321.386.381	56,37
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.999.188.756	-	-	-	-	
2.2	Belanja Langsung	316.308.687.727	323.039.905.245	384.352.004.016	386.610.701.454	320.433.905.061	1,14
2.2.1	Belanja Pegawai	33.876.701.125	40.894.204.674	41.656.779.500	104.563.893.874	83.613.561.121	38,39
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.547.061.530	143.026.343.351	181.968.845.174	136.197.474.791	113.069.750.187	-4,33
2.2.3	Belanja Modal	135.884.925.072	139.119.357.221	160.726.379.343	145.849.332.789	123.750.593.752	-1,62

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2017



3) **Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2013-2017 diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2346,7 persen. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar 26,5 persen. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar -37,7 persen.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
3	PEMBIAYAAN						-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)			94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah						-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah						-
3.2.3	Pembayaran pokok utang						-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah						-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2014-2018



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Selanjutnya terdapat analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Gambaran neraca Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu tahun 2015-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Jumlah aset dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Tercatat nilai aset Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun, menjadi Rp. 1,232 triliun pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 1,341 triliun pada tahun 2017.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Nilai aset lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 115,03 miliar, menurun menjadi Rp. 65,688 miliar pada tahun 2016 dan menurun kembali menjadi Rp. 31,908 miliar pada tahun 2017.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 35,136 miliar dan meningkat menjadi Rp. 41,515 miliar pada tahun 2017. Investasi



jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 ke 2017 dimana nilai kewajiban pada tahun 2015 sebesar Rp. 782 juta menjadi Rp. 23,017 miliar pada tahun 2017. Nilai kewajiban pada tahun 2015 dan 2016 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek dan pada 2017 lebih dari 99% juga merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Barito Timur meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun menjadi 1,341 triliun pada tahun 2017. Itu menunjukkan bahwa sumberdaya keuangan daerah Kabupaten Barito Timur juga semakin baik.

Tabel 3.8

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	ASET				
5.3.1.1	ASET LANCAR				
5.3.1.1.1	Kas				
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas daerah	93.638.802.154,64	41.227.250.874,91	4.279.633.226,69	-73
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	360.277.794,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	445.609.320,20	91.166,20	123.869,20	-32
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	0,00	3.010.098.385,40	4.055.300.812,40	17
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya	464.305.529,20	1.981.189.809,50	251.971.571,01	120
5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	16.973.567.570,01	14.803.916.935,41	13.523.964.574,22	-11
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	1.225.117.614,00	1.583.317.228,00	4.016.749.988,54	91
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	(4.887.642.977,00)	(4.130.661.852,80)	(4.249.893.049,47)	-6
5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	35.812.886,85	41.112.958,25	74.270.375,00	48
5.3.1.1.6	Persediaan	6.775.756.053,90	7.172.373.601,17	9.956.148.255,49	22
	JUMLAH ASET LANCAR	115.031.605.945,80	65.688.689.106,04	31.908.269.623,08	-47
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	
	Dana Bergilir	0,00	0,00	0,00	
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9

PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.3	ASET TETAP				
5.3.1.3.1	Tanah	215.298.530.835,00	230.063.141.260,00	230.205.139.160,00	3
5.3.1.3.2	Peralatan dan mesin	193.066.372.023,91	215.924.473.981,30	218.177.290.618,20	6
5.3.1.3.3	Gedung dan bangunan	420.561.031.163,11	443.724.134.267,12	419.472.369.821,92	0
5.3.1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	474.800.133.472,69	565.935.224.147,69	630.345.055.525,69	15
5.3.1.3.5	Aset tetap lainnya	11.708.211.648,00	13.899.614.674,57	16.407.558.545,01	18
5.3.1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	5.821.696.223,00	5.027.895.028,00	3.507.455.728,00	-22
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(327.714.188.370,90)	(361.406.306.465,90)	(366.787.267.647,07)	6
	JUMLAH ASET TETAP	993.541.786.994,81	1.113.168.176.892,77	1.151.327.601.751,75	8
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.4	ASET LAINNYA				
5.3.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	2.877.556.175,67	2.879.135.876,64	2.491.750.224,10	-7
5.3.1.4.2	Aset Tidak Berwujud	629.489.600,01	812.252.866,67	646.761.766,67	4
5.3.1.4.3	Aset Lain-lain	8.016.549.607,00	8.320.184.959,84	113.779.833.293,28	636
	JUMLAH ASET LAINNYA	11.523.595.382,68	12.011.573.703,15	116.918.345.284,05	439
	JUMLAH ASET	1.155.233.196.627,29	1.232.488.350.296,95	1.341.669.793.010,88	8
5.3.2	KEWAJIBAN				
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.144.335,00	11.540.144,00	10.591.822,00	-10
	Utang Bunga				
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	62.084.561,33	86.955.350,00	281.341.812,50	132
5.3.2.1.3	Utang Beban	558.210.169,00	1.258.536.890,70	2.026.651.163,00	93
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	148.830.036,84	148.830.036,84	20.550.515.506,00	6854
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	782.269.102,17	1.505.862.421,54	22.869.100.303,50	756

PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri	0	0		
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	148.830.036,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	148.830.036,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN	782.269.102,17	1.505.862.421,54	23.017.930.340,34	761
5.3.3	EKUITAS	1.154.450.927.525,12	1.230.982.487.875,41	1.318.651.862.670,54	7
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.155.233.196.627,29	1.232.488.350.296,95	1.341.669.793.010,88	8

Sumber : LKPJ Kabupaten Barito Timur TA. 2015-2017



Berdasarkan dari neraca Kabupaten Barito Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, maka dapat dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan Tabel 3.4 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* yang positif.

Tabel 3.9
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	147,04	43,62	1,39
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	138,38	38,85	0,95
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00067715	0,00122	0,01716
4	Rasio hutang terhadap modal	0,00067761	0,00122	0,01746

Sumber: hasil pengolahan data, 2021

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur yaitu:

1) Rasio Lancar

Rasio lancar menghitung sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 147,0 dan tahun 2017 sebesar 4,5. Hal ini menunjukkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar empat kali lebih.

2) Rasio Cepat

Rasio cepat digunakan menghitung kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang *likuiditasnya* rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi *likuiditas*. quick rasio pada tahun 2013 sebesar 138,3 serta periode tahun 2017 quick rasio sebesar 3,68



hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan analisa kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 0,00067 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0101. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2) Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal merupakan perhitungan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar 0,00067 serta periode tahun 2017 sebesar 0,00102. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Barito Timur, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang



pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
5. serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
6. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak



dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD dan atau Perubahan APBD.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Analisis proporsi penggunaan anggaran selama beberapa tahun lalu diuraikan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Barito Timur.



Tabel 3.10

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013			2014			2015		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
2	BELANJA	704.085.933.970	637.672.851.173	90,6	797.576.917.284	688.862.662.220	86,4	920.968.055.528	821.623.368.335	89,2
2.1	Belanja Tidak Langsung	364.258.589.326	320.571.726.951	88,0	394.349.904.491	342.577.116.597	86,9	487.888.258.562	417.523.015.626	85,6
2.1.1	Belanja Pegawai	293.912.911.562	257.522.176.072	87,6	320.947.041.767	287.097.235.634	89,5	371.000.971.545	321.649.250.356	86,7
2.1.2	Belanja Bunga		-			-			-	
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	450.000.000	100,0	450.000.000	450.000.000	100,0	450.000.000	450.000.000	100,0
2.1.4	Belanja Hibah	29.453.021.500	25.396.735.000	86,2	22.838.594.200	18.222.719.200	79,8	23.902.000.000	17.495.050.000	73,2
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.166.428.357	6.517.617.500	90,9	6.347.363.000	2.668.163.750	42,0	2.770.000.000	244.600.000	8,8
2.1.6	Belanja Bagi Hasil		-			-		1.234.650.000	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	29.276.227.907	26.723.819.623	91,3	41.266.905.524	34.138.998.013	82,7	86.030.637.017	77.684.115.270	90,3
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.961.378.756	99,0	2.500.000.000	-		2.500.000.000	-	
2.2	Belanja Langsung	339.827.344.644	317.101.124.221	93,3	403.227.012.792	346.285.545.622	85,9	433.079.796.965	404.100.352.709	93,3
2.2.1	Belanja Pegawai	35.707.094.504	34.078.321.025	95,4	45.237.413.094	43.763.535.749	96,7	46.851.867.000	41.656.779.500	88,9
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.076.576.579	147.311.258.148	93,2	193.603.486.119	162.663.865.703	84,0	213.595.575.493	199.000.139.027	93,2
2.2.3	Belanja Modal	146.043.673.561	135.711.545.048	92,9	164.386.113.580	139.858.144.171	85,1	172.632.354.472	163.443.434.182	94,7

Lanjutan Tabel 3.10

No.	Uraian	2016			2017			Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata - Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)		
2	BELANJA	996.067.954.265	880.129.249.202	88,4	932.750.181.097	852.798.819.260	91,4	7,83	89,19
2.1	Belanja Tidak Langsung	498.901.965.356	478.239.431.646	95,9	523.852.370.343	501.680.755.573	95,8	12,05	90,42
2.1.1	Belanja Pegawai	331.682.070.185	321.457.644.639	96,9	334.787.316.198	321.210.462.255	95,9	5,85	91,33
2.1.2	Belanja Bunga		-			-			0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	450.000.000	100,0	450.000.000	450.000.000	100,0	0,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	36.970.315.000	33.193.787.499	89,8	38.027.696.777	33.718.385.141	88,7	14,77	83,53
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.960.000.000	268.660.000	13,7	1.500.000.000	225.000.000	15,0	-39,08	34,10
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.234.650.000	2.234.650.000	100,0	6.755.527.797	6.755.521.797	100,0		40,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	123.854.930.171	120.634.689.508	97,4	140.331.829.571	139.321.386.381	99,3	56,52	92,20
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.750.000.000	-		2.000.000.000	-			19,81
2.2	Belanja Langsung	497.165.988.909	401.889.817.555	80,8	408.897.810.754	351.118.063.687	85,9	3,18	87,84
2.2.1	Belanja Pegawai	122.331.027.944	106.574.485.921	87,1	89.937.910.300	83.919.171.121	93,3	39,55	92,30
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.666.995.382	147.155.648.669	92,2	148.369.656.939	139.640.686.713	94,1	0,40	91,33
2.2.3	Belanja Modal	215.167.965.583	148.159.682.966	68,9	170.590.243.515	127.558.205.852	74,8	-0,83	83,26

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017



b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pada bagian ini disajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Belanja aparatur terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja, belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja tidak langsung pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta belanja langsung pada belanja pegawai terdiri dari insentif honor kegiatan, lembur dan lain-lain.

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Barito Timur ditampilkan pada Tabel 3.11 sebagai berikut:



Tabel 3.11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Belanja Tidak Langsung	240.775.479.822	269.718.859.384	321.649.250.356	321.457.644.639	321.210.462.255
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	203.334.586.932	217.949.242.208	239.171.520.971	251.654.129.529	232.263.579.949
2	Belanja Tambahan Penghasilan	36.101.212.890	49.917.785.389	78.930.679.083	67.447.959.036	83.775.908.470
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KKDH/WKDH	1.339.680.000	1.477.250.000	1.793.900.000	1.659.900.000	4.008.300.000
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	222.939.237	1.725.725.916	153.556.857	1.155.518.367
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	151.642.550	27.424.386	542.099.218	7.155.469
	Tunjangan Daerah	16.746.696.250	17.378.376.250			
B.	Belanja Langsung	87.060.143.084	91.899.181.566	91.244.555.203	79.727.122.165	65.718.445.210
1	Belanja Honorarium PNS	11.155.773.500	16.072.532.874	15.501.455.700	17.405.179.497	16.453.935.747
2	Belanja Uang Lembur	345.549.900	680.801.500	997.773.800	971.329.200	1.227.160.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	717.500.000	864.940.000	1.164.000.000	978.175.000	1.180.369.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	11.564.188.450	9.280.937.743	7.436.975.822	4.698.547.581	3.248.240.145
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	230.502.263	91.347.088	76.124.456	141.546.000	128.771.000

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
BUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023



No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	3.860.201.281	4.460.950.870	4.876.515.726	6.237.221.617	5.906.278.428
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	750.485.450	1.375.120.525	937.828.028	1.510.641.675	513.485.500
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.532.210.710	1.035.800.925	1.181.600.250	1.238.993.710	1.233.580.095
9	Belanja Pakaian Kerja	570.670.400	388.927.000	328.947.650	213.039.200	112.335.000
10	Belanja Perjalanan Dinas	44.254.764.125	47.645.387.530	49.808.843.073	37.906.022.335	33.848.308.575
11	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	12.078.297.005	10.002.435.511	8.934.490.698	8.426.426.350	1.865.981.720
TOTAL		327.835.622.906	361.618.040.950	412.893.805.559	401.184.766.804	386.928.907.465

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2013-2017



Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Barito Timur tahun 2013 hingga tahun 2017 relatif fluktuatif dari Rp. 327,83 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp. 386,92 miliar di tahun 2017. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut dibandingkan dengan total pengeluaran maka nilainya menurun dari 51,04 Persen pada tahun 2013 menjadi 46,6 persen pada tahun 2016, namun pada 2017 meningkat kembali sebesar 47,1 persen. Berdasarkan hal tersebut, maka besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun-tahun mendatang perlu diarahkan untuk meningkatkan proporsi anggaran belanja kepada masyarakat.

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2013	327.835.622.906	637.431.025.410	51,4
2	Tahun Anggaran 2014	361.618.040.950	666.286.842.292	54,3
3	Tahun Anggaran 2015	412.893.805.559	801.880.185.942	51,5
4	Tahun Anggaran 2016	401.184.766.804	861.362.730.834	46,6
5	Tahun Anggaran 2017	386.928.907.464	822.232.855.195	47,1

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2013-2017

c. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat disajikan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	256.330.379.445	286.117.969.447	393.651.780.476	438.580.776.147	455.223.987.636	16,10
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	203.334.586.932	217.949.242.208	239.171.520.971	251.654.129.529	232.263.579.949	3,61
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	36.101.212.890	49.917.785.389	78.930.679.083	67.447.959.036	83.775.908.470	26,51
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.339.680.000	1.477.250.000	1.793.900.000	1.659.900.000	4.008.300.000	41,43
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	15.244.680.406	16.018.647.907	71.410.069.993	116.652.906.895	133.467.534.900	107,16
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	310.219.217	380.462.156	592.460.127	470.224.613	545.990.481	18,46
6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	222.939.237	1.725.725.916	153.556.857	1.155.518.367	-
7	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	151.642.550	27.424.386	542.099.218	7.155.469	-
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.050.000.000	6.600.000.000	15.000.000.000	7.400.000.000	-	-
1	Pembentukan dana Cadangan	2.400.000.000	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.650.000.000	6.600.000.000	15.000.000.000	7.400.000.000	-	14,36
	TOTAL A+B	262.380.379.445	292.717.969.447	408.651.780.476	445.980.776.147	455.223.987.636	15,59

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2013– 2017



3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Besaran surplus/defisit riil anggaran yang terjadi di Kabupaten Barito Timur pada periode tahun 2013-2017 relatif berfluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat bahwa pada tahun 2014 terjadi surplus anggaran hingga mencapai Rp. 94,037 miliar. Namun pada tahun berikutnya terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran terbesar dalam kurun waktu 2013-2017 terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 21,73 miliar.

Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	634.427,27	760.360,62	781.059,96	856.991,56	800.494,15
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	637.431,03	666.286,84	801.880,19	861.362,73	822.232,86
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
	Surplus/Defisit riil	-3.003,76	94.073,78	-20.820,23	-4.371,17	-21.738,70

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018, diolah

b. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Defisit riil anggaran yang terjadi pada tahun 2015-2017 dapat ditutup oleh pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun



Sebelumnya (SiLPA). SiLPA diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan dana perimbangan; dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	456%			1057%	39%
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber : BPKAD Kabupaten Barito Timur, 2018 (diolah)

Besaran SiLPA pada tahun 2015 sebesar Rp. 94,89 miliar atau sebesar 456% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah Rp. 20,82 miliar. Sedangkan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 46,20 miliar atau 10,57% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah Rp. 4,37 miliar, dan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 8,57 miliar atau sebesar 39% dari nilai defisit anggaran yang sejumlah Rp. 21,73 miliar. Defisit anggaran yang terjadi di tahun 2017 perlu mendapat perhatian mengingat jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupnya. Oleh karena itu untuk menjaga kesehatan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan defisit anggaran harus memperhatikan proyeksi realistis penerimaan pembiayaan yang mungkin dicapai.

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA:	94.895.850.463,04	100,00	46.207.090.092,01	100,00	8.576.313.788,10	100,00
1.	Pelampauan penerimaan PAD	6.462.497.229,74	6,81	(23.807.180.668,08)	(51,52)	(14.807.335.643,78)	(172,65)
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(34.274.435.740,16)	(36,12)	(53.856.846.282,00)	(116,56)	(135.519.516.703,14)	(1.580,16)
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.130.164.133,00	22,27	30.735.920.844,00	66,52	698.317.674.880,93	8.142,40
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
6.	Kegiatan lanjutan						

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)



c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan menyajikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Barito Timur yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan pada Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo Kas Neraca Daerah	67.233.021.965	131.965.352.408	94.908.994.798	46.218.630.236	8.335.057.908
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	67.233.021.965	131.965.352.408	94.908.994.798	46.218.630.236	8.335.057.908

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2013– 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dijadikan dasar sebagai acuan dalam menetapkan jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Pada tahun 2019 telah terbit peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta selanjutnya Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan hal baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah mulai Tahun Anggaran 2021.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan pendapatan APBD kurun waktu tahun 2013-2017 serta realisasi tahun periode 2018-2020. Selanjutnya, untuk target Tahun 2021 menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2021. Penentuan proyeksi target pendapatan tahun 2022 dan 2023 disusun dengan mengutamakan pertimbangan realisasi tahun 2020 dan APBD tahun 2021 sebab menggambarkan kondisi perekonomian dan keuangan daerah akibat pandemi COVID-19.

Pada Tabel 3.13 disajikan realisasi tahun 2018-2021, realiasi pendapatan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,53 persen, beberapa komponen pendapatan yang mengalami kenaikan diantaranya pendapatan asli daerah sebesar 14,28 persen, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,58 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan yang mengalami minus adalah dana perimbangan sebesar -1,87 persen. Pada sisi belanja pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dengan rata-



rata penurunan sebesar minus 3,56 persen, diantaranya belanja langsung minus 3,19 dan belanja langsung 2,02.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



Tabel 3.18
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020

Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	868.518.371.741	916.966.064.448	875.596.844.480	0,53
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	47.823.932.243	58.023.576.121	62.214.710.623	14,28
1.1.1	Pajak daerah	11.350.422.631	15.438.800.774	19.155.610.161	30,05
1.1.2	Retribusi daerah	2.060.491.752	2.251.525.262	2.111.242.928	1,52
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.635.182.355	7.681.995.596	7.738.215.980	-5,15
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	25.777.835.505	32.651.254.488,76	33.209.641.554	14,19
1.2.	Dana Perimbangan	673.685.663.773	700.926.761.356	646.417.218.652	-1,87
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	76.114.768.831	69.065.134.409	83.956.468.062	6,15
1.2.2	Dana alokasi umum	478.975.191.000	491.080.267.000	443.711.145.000	-3,56
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	118.595.703.942	140.781.359.947	118.749.605.590	1,53
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	147.008.775.725	158.015.726.971	166.964.915.205	6,58
1.3.1	Hibah	13.787.123.390	17.707.463.250	21.796.988.710	25,76
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	30.187.077.335,15	31.802.772.320	23.731.249.294	-10,01
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	27.750.000.000,00	27.096.175.000	35.466.481.000	14,27
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.500.000.000,00		150.000.000	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	73.784.575.000,00	81.409.316.400	85.820.196.200	7,88
2	BELANJA	846.986.529.921	876.574.472.516	783.521.732.107	-3,56
2.1	Belanja Tidak Langsung	535.284.145.892	498.945.329.250	501.019.001.191	-3,19

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023



Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	
2.1.1	Belanja Pegawai	342.452.775.085,00	332.929.510.237	311.994.623.753	-4,53
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	600.000.000	599.999.999	16,67
2.1.4	Belanja Hibah	49.864.780.979	12.175.400.000	17.232.460.000	-17,02
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	889.520.000	567.470.000	528.400.000	-21,54
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	141.627.069.828	152.672.949.013	161.553.421.509	6,81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			9.110.095.929	#DIV/0!
2.2	Belanja Langsung	311.702.384.029	377.629.143.266	282.502.730.916	-2,02
2.2.1	Belanja Pegawai	69.822.392.920,00	67.640.587.583	65.332.978.621	-3,27
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.598.807.451,84	192.940.509.290	145.037.200.809	2,07
2.2.3	Belanja Modal	92.281.183.657	117.048.046.391	72.132.551.485	-5,77
	SURPLUS / DEFISIT	21.531.841.820	40.391.591.933	92.075.112.373	107,77
3	PEMBIAYAAN	8.558.381.463	30.062.956.533	-9.000.000.000	60,67
3.1	Penerimaan Pembiayaan	8.558.381.463	30.062.956.533	1.000.000.000	77,30
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	8.558.381.462,84	30.062.956.532,62		75,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			1.000.000.000	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah			10.000.000.000	

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023



Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO	30.090.223.283	70.454.548.465	83.075.112.373	76,03

Sumber: Diolah dari LRA Kabupaten Barito Timur 2018-2020



Selanjutnya, pada Tabel 3.19 disajikan proyeksi tahun 2021-2023 yang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023. Penyajian berdasarkan peraturan terbaru tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah akan memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2022 dan 2023. Lebih lanjut, Pendapatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditunjang oleh beberapa komponen pendapatan, diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,22 persen, Pendapatan Transfer sebesar 1,46 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan. Belanja periode tahun 2021-2023 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 4,39 persen, diantaranya belanja operasi sebesar 5,57 persen, belanja modal sebesar 2,50 persen, belanja tidak terduga diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan serta belanja transfer diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen.



Tabel 3.19
Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023
(Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (APBD) 2021	Tahun Berjalan 2021 (Penyesuaian PMK 17)	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2023
4	PENDAPATAN	983.196.293.067	825.315.176.814	865.516.427.182	888.443.782.184	3,76
4.1	Pendapatan Asli Daerah	109.676.846.263	67.588.465.609	84.350.405.080	94.167.456.321	18,22
4.1.1	Pajak Daerah	28.138.200.000	23.767.221.692	29.661.492.671	37.017.542.853	24,80
4.1.2	Retribusi Daerah	15.505.750.000	2.816.754.553	3.515.309.682	3.673.498.618	14,65
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.783.215.980	7.794.847.811	9.727.970.068	10.165.728.721	14,65
4.14	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.249.680.283	33.209.641.554	41.445.632.659	43.310.686.129	14,65
4.2	Pendapatan Transfer	786.137.109.000	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	679.515.143.000	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01.01	Dana Perimbangan	679.515.143.000	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	63.852.281.000	63.852.281.000	65.448.588.025	67.084.802.726	2,50
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	451.549.564.000	437.087.627.000	444.081.029.032	451.186.325.497	1,60
4.02.01.02	Dana Transfer Khusus	164.113.298.000	89.821.888.000	89.821.888.000	89.821.888.000	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	106.621.966.000				
4.2.02	Transfer Antar Daerah	69.921.937.804	59.197.730.295	74.047.332.134	78.416.124.730	15,49
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	69.921.937.804	23.731.249.295	74.047.332.134	78.416.124.730	108,96
4.2.02.02	Dana penyesuaian		35.466.481.000			
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17.460.400.000	107.767.184.910	107.767.184.910	107.767.184.910	0,00
4.3.01	Hibah	1.500.000.000	21.796.988.710	21.796.988.710	21.796.988.710	0,00
4.3.02	Dana darurat					
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	15.960.400.000	85.970.196.200	85.970.196.200	85.970.196.200	0,00
5	BELANJA	988.674.936.356	865.793.820.103	865.516.427.182	888.443.782.184	1,31
5.1	Belanja operasi	669.799.753.628	594.144.730.584	586.736.372.070	607.075.971.788	1,11
5.1.01	Belanja pegawai	348.562.306.170	321.078.696.472	329.105.663.884	338.514.678.075	2,68

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (APBD) 2021	Tahun Berjalan 2021 (Penyesuaian PMK 17)	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2023
5.1.02	Belanja barang dan jasa	239.941.226.484	236.752.136.323	221.316.810.398	232.247.395.923	-0,79
5.1.03	Belanja bunga					
5.1.04	Belanja subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,00
5.1.05	Belanja hibah	50.734.140.149	35.015.910.789	35.015.910.789	35.015.910.789	0,00
5.1.06	Belanja bantuan sosial	29.962.080.825	697.987.000	697.987.000	697.987.000	0,00
5.2	Belanja modal	148.351.939.928	100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667	2,50
5.2.1	Belanja Modal	148.351.939.928	100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667	2,50
5.3	Belanja tidak terduga	35.000.000.000	9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929	0,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	35.000.000.000	9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929	0,00
5.4	Belanja transfer	170.523.242.800	161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800	1,43
5.4.01	Belanja bagi Hasil	4.363.495.000	-	-	-	-
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	166.159.747.800	161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800	1,43
	Surplus/Defisit	(5.478.643.289)	(40.478.643.289)	-	-	-
6	PEMBIAYAAN	40.478.643.289	40.478.643.289	-	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	57.478.643.289	57.478.643.289	-	-	-
6.1.01	SiLPA	57.478.643.289	57.478.643.289	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran pembiayaan	17.000.000.000	17.000.000.000			
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-
-	Penyertaan modal daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000			
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	-	-

Sumber: Hasil analisis, diolah dari APBD Tahun 2021



3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi SiLPA

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat kenaikan SiLPA yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp30.062.956.532. Namun pada tahun 2020 berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat nilai SiLPA. Berdasarkan kondisi tersebut maka pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan tidak terdapat SiLPA dan secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Sebelumnya Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi			Proyeksi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	8.558.381.462	30.062.956.532	0	57.478.643.289	0	0

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Penyajian kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dibagi menjadi 2 (dua) konsep. Konsep pertama adalah pengeluaran wajib dan mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk periode tahun 2018-2020. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Konsep ini diterapkan pada pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan data realisasi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.21
Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020

No	Uraian	Realisasi			Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung	468.594.428.618	333.409.114.825	318.675.505.793	-0,17
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	230.036.287.835	238.085.418.972	236.960.254.174	0,02
2	Tambahan Penghasilan PNS	230.036.287.835	87.057.391.265	68.353.487.539	-0,42
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	426.562.650	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-
5	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.549.300.000	7.786.700.000	6.680.882.040	-0,06
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	545.990.298	479.604.588	6.680.882.040	6,40
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	10.000.000.000	-
1	Penyertaan Modal	-	-	10.000.000.000	-
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	468.594.428.618	333.409.114.825	328.675.505.793	-0,15

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Sedangkan untuk proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan definisi belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dimuat pada Tabel 3.16. Pada bagian penjelasan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sedangkan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja wajib yang harus dialokasikan anggarannya sesuai besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: 1). pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah; 2). kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji; 3). penggunaan dana transfer umum



yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; 4). pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan 5). pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi, maka total belanja wajib dan mengikat tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan dari Rp 815.245.384.220 menjadi Rp 828.823.586.952. Secara rinci besaran masing-masing komponen disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 3.22
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	%	2022	%	2023	%
A	Belanja Mengikat	348.562.306.170		329.105.663.884		338.514.678.075	
1	Belanja Pegawai	348.562.306.170	39,5%	329.105.663.884	38,0%	338.514.678.075	38,1%
B	Belanja Wajib	466.683.078.050		478.350.155.001		490.308.908.876	
1	Pendidikan	228.982.089.215	22,0%	234.706.641.445	22,1%	240.574.307.482	22,2%
2	Kesehatan	108.260.643.166	10,4%	110.967.159.245	10,5%	113.741.338.226	10,5%
3	Infrastruktur	118.127.898.753	11,4%	121.081.096.222	11,4%	124.108.123.627	11,5%
4	Peningkatan kapasitas SDM	6.661.308.903	0,6%	6.827.841.626	0,6%	6.998.537.666	0,6%
5	Penguatan APIP	4.651.138.013	0,4%	4.767.416.463	0,4%	4.886.601.875	0,5%
C	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Penyertaan modal daerah						
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo						
4	Pemberian Pinjaman Daerah						
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurundang-undangan.						
	Total Belanja Wajib Mengikat	815.245.384.220		807.455.818.885		828.823.586.952	

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021



c. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan. Proyeksi kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan mengelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah sehingga dapat diketahui besaran dana untuk mendanai pembangunan.

Dalam Perubahan RPJMD ini, proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Barito Timur dibagi menjadi 2 (dua) metode penghitungan sebab adanya perubahan kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah adalah belanja langsung yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan. Berdasarkan pola penghitungan tersebut, maka realisasi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2020

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
Pendapatan	868.518.371.741	916.966.064.448	875.596.844.480
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	8.558.381.463	30.062.956.533	0
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-
Total penerimaan	877.076.753.204	947.029.020.981	875.596.844.480
Dikurangi:			
Pengeluaran pembiayaan	0	0	10.000.000.000
Belanja Tidak Langsung	535.284.145.892	498.945.329.250	501.019.001.191



Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	341.792.607.312	448.083.691.731	364.577.843.289

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Proyeksi kapasitas keuangan daerah menggambarkan seluruh penerimaan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berlaku lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Selanjutnya, pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya yang mempengaruhi perhitungan APBD seluruh daerah di Indonesia Tahun 2021. Untuk itu, konsep penghitungan kapasitas keuangan daerah tahun 2021 sampai dengan 2023 telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel di bawah.

<https://bappeda.baritoimutimkab.go.id/>

Tabel 3.24
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan 2021 (Penyesuaian PMK 17/2021)	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2023
4	PENDAPATAN	825.315.176.814	865.516.427.182	888.443.782.184	3,76
4.1	Pendapatan Asli Daerah	67.588.465.609	84.350.405.080	94.167.456.321	18,22
4.1.1	Pajak Daerah	23.767.221.692	29.661.492.671	37.017.542.853	24,80
4.1.2	Retribusi Daerah	2.816.754.553	3.515.309.682	3.673.498.618	14,65
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.794.847.811	9.727.970.068	10.165.728.721	14,65
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.209.641.554	41.445.632.659	43.310.686.129	14,65
4.2	Pendapatan Transfer	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01.01	Dana Perimbangan	590.761.796.000	599.351.505.057	608.093.016.222	1,46
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	63.852.281.000	65.448.588.025	67.084.802.726	2,50
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	437.087.627.000	444.081.029.032	451.186.325.497	1,60
4.2.01.02	Dana Transfer Khusus	89.821.888.000	89.821.888.000	89.821.888.000	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	0,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	59.197.730.295	74.047.332.134	78.416.124.730	15,49
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	23.731.249.295	74.047.332.134	78.416.124.730	108,96
4.2.02.02	Dana penyesuaian	35.466.481.000	-	-	0,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107.767.184.910	107.767.184.910	107.767.184.910	0,00
4.3.01	Hibah	21.796.988.710	21.796.988.710	21.796.988.710	0,00
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	0,00
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	85.970.196.200	85.970.196.200	85.970.196.200	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	57.478.643.289	-	-	-
6.1.01	SiLPA	57.478.643.289	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan 2021 (Penyesuaian PMK 17/2021)	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2023
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	882.793.820.103	865.516.427.182	888.443.782.184	0,35
5	BELANJA	865.793.820.103	865.516.427.182	888.443.782.184	1,31
5.1	Belanja operasi	594.144.730.584	586.736.372.070	607.075.971.788	1,11
5.1.01	Belanja pegawai	321.078.696.472	329.105.663.884	338.514.678.075	2,68
5.1.02	Belanja barang dan jasa	236.752.136.323	221.316.810.398	232.247.395.923	-0,79
5.1.03	Belanja bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,00
5.1.05	Belanja hibah	35.015.910.789	35.015.910.789	35.015.910.789	0,00
5.1.06	Belanja bantuan sosial	697.987.000	697.987.000	697.987.000	0,00
5.2	Belanja modal	100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667	2,50
5.2.1	Belanja Modal	100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667	2,50
5.3	Belanja tidak terduga	9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929	0,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929	0,00
5.4	Belanja transfer	161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800	1,43
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-	-	-	-
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800	1,43
6.2	Pengeluaran pembiayaan	17.000.000.000	-	-	-
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	15.000.000.000	-	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
	TOTAL PENGELUARAN	882.793.820.103	865.516.427.182	888.443.782.184	0,35

Sumber: Hasil analisis, 2021



d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Pengelolaan belanja merupakan proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan dengan memprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat.
- b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Pencapaian visi, misi, dan program prioritas Kabupaten Barito Timur.
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur.
- e. Percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19.
- f. Mendukung prioritas nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk itu pada periode RPJMD tahun 2019 dan 2020 ditetapkan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut prioritas, sebagai berikut:

- a) Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan visi dan misi Kepala Daerah.
- c) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut kelompok prioritas pada tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Realisasi	
	2019	2020
Kapasitas Riil keuangan daerah:	448.083.691.731	364.577.843.289
Prioritas I	54.244.491.384	58.314.999.436
Prioritas II	199.980.282.050,84	139.210.912.883,54
Prioritas III	193.858.918.296,16	167.051.930.969,46

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021



Selanjutnya untuk proyeksi alokasi kapasitas keuangan daerah tahun 2021-2023 dilakukan dengan mengalokasikan penerimaan daerah untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat yang merupakan prioritas pertama. Selanjutnya, penerimaan daerah dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi pembangunan yang selanjutnya dikelompokkan menjadi prioritas kedua, serta belanja urusan lainnya yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan prioritas ketiga. Dengan demikian alokasi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Barito Timur untuk mendanai pembangunan tahun 2021 sampai dengan 2023, diuraikan sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi alokasi masing-masing prioritas periode tahun 2021-2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.26
Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok
Prioritas Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH:	882.793.820.103	865.516.427.182	888.443.782.184
A. PRIORITAS I & II	840.921.496.917,24	824.376.007.372,66	846.222.572.031,75
B. PRIORITAS III	41.872.323.185,76	41.140.419.809,34	42.221.210.152,25

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan daerah bertujuan untuk memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan daerah. Pembangunan yang berkualitas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan daerah. Dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan daerah maka perlu dilakukan perumusan kebijakan publik, selanjutnya dalam perumusan kebijakan publik, salah satu hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Dalam suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah yang berasal dari permasalahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis baik berskala provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.



Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antara individu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini,” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2019, Kabupaten Barito Timur memiliki rasio gini sebesar 0,312 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang.

Meskipun nilai gini ratio berada dibawah nilai gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, gini ratio Kabupaten Barito Timur cenderung mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang hanya mencapai 0,307. Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah **“Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

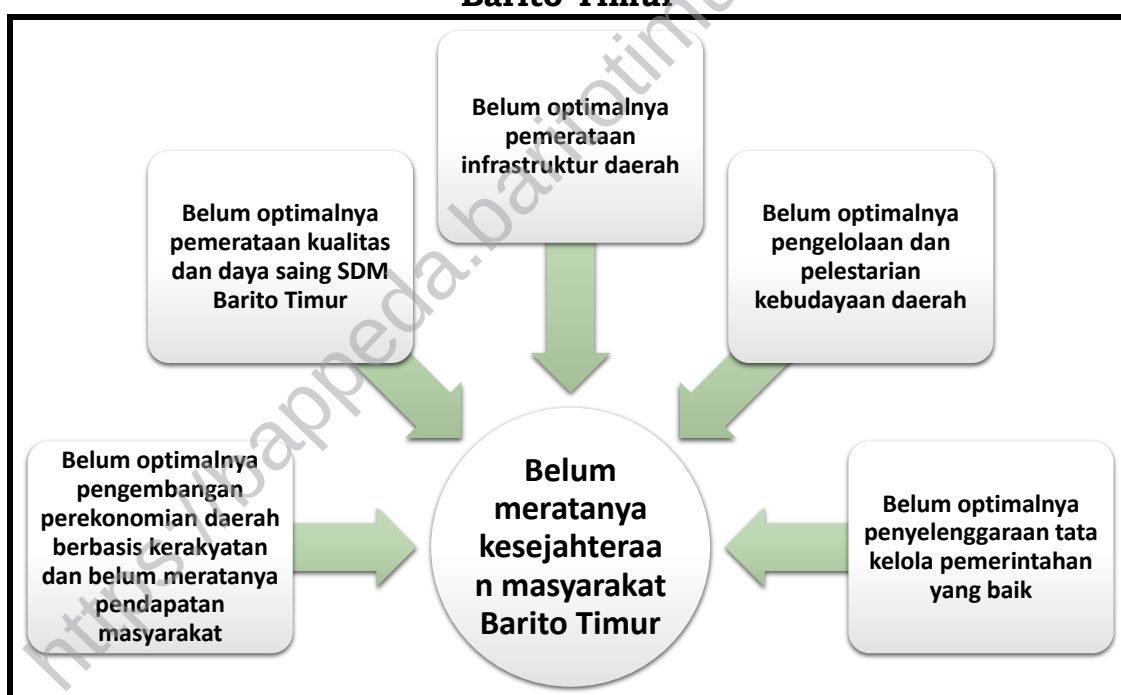
1. Fokus Ekonomi: Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat
2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar: Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan



3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur
4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah
5. Fokus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan kelima fokus permasalahan, maka akan diketahui fokus pembangunan Barito Timur dalam lima tahun kedepan. Melalui fokus pembangunan yang menjabarkan permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari permasalahan dari aspek urusan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Sehingga diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama, fokus permasalahan serta permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur yang disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 4.1
Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur



Sumber: hasil analisis, 2021



Fokus permasalahan dan permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar diatas mempunyai permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik per bidang urusan. Penjabaran permasalahan sebagai berikut.

4.1.1 Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

A. Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan dan Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat

Masalah pokok belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan

Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan, dimana 55,61 persen pekerja usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor ini. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan



inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur mencapai 5,25 persen. Angka ini menurun di tahun 2016 menjadi 5,16 persen. Meskipun mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi sebesar 5,98 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 5,45 persen. Lebih lanjut, LPE Kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 lebih rendah apabila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah (6,16 persen) di tahun 2019.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.



Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Daerah
Berbasis Kerakyatan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan	Urusan Pertanian	Menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian
			Belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai
			Masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul
			Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Urusan perikanan dan Kelautan	Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan	Masih rendahnya tingkat produksi perikanan
			Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan
			Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan
	Urusan pariwisata	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur.	Belum tersedianya obyek wisata yang memadai
			Kurang maksimalnya aksesibilitas ke Obyek Wisata
			Kurang optimalnya sinergisitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata
			Kurang tersedianya sarana dan prasarana di Destinasi Wisata
			Kurang optimalnya informasi dan promosi potensi Pariwisata Kabupaten Barito Timur
			Kurang optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisata
	Urusan Koperasi dan UMKM	Menurunnya koperasi aktif dan belum optimalnya peranan UMKM dalam	Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat
			Belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		perekonomian kerakyatan	Masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik
			Jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan Penduduk asli
			Masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya
	Urusan Industri	Masih rendahnya kontribusi dan laju PDRB sektor industri kecil pengolahan	Belum maksimalnya inovasi produk hasil industri
			Akses pemasaran hasil industri masih terbatas
			Hasil industri belum berkualitas ekspor
	Urusan Perdagangan	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	Akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit
			Daya beli masyarakat masih rendah
			Jumlah pedagang masih rendah

Sumber: hasil analisis, 2021

2) Belum meratanya pendapatan masyarakat

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Barito Timur. Salah satu pendekatan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur dalam enam tahun terakhir sudah menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Timur sebesar 6,09 persen, atau turun dari tahun 2019 yang sebesar 6,32 persen. Sementara berdasarkan jumlahnya, banyaknya penduduk miskin di Barito Timur tahun 2020 adalah 7.876 orang. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,82 persen, maka posisi Barito Timur masih lebih tinggi.



Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	Urusan Sosial	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS	Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS
			Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum
			Belum adanya wadah sarana pembinaan/ pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan
	Urusan Pemberdayaan masyarakat desa		Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA
	Urusan Ketenagakerjaan	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran	Masih Kurangnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Belum Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			Belum Optimalnya pengawasan ketenagakerjaan
		Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Angkatan Kerja mengalami penurunan
			Jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan
			Belum Optimalnya Perluasan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (adanya gap lapangan kerja dan pencari kerja)
	Urusan Penanaman modal	Masih rendahnya iklim investasi	Banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar daerah
			Belum optimalnya proses perijinan usaha
			Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha

Sumber: hasil analisis, 2021

4.1.2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai



layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dirasakan pada masyarakat di daerah terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih belum merata.

A. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai berupa jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Masih tingginya kondisi jalan di Kabupaten Barito Timur dalam kondisi rusak dan rusak berat harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal ini diharapkan agar setiap wilayah di Kabupaten Barito Timur semakin mudah dijangkau, sehingga dapat meningkatkan pergerakan orang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong perekonomian daerah. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.



Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah perurusan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil	Meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat
			Belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah dan cenderung menurun
		Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi	Penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik belum memadai
		Masih rendahnya penanganan sampah	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota) masih rendah
		Belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW	Adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketidaktertiban dalam penggunaan tanah
			Masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan
			Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota dan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota belum ditentukan
	Urusan perumahan dan pemukiman	Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan pemukiman	Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan
			Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum kemasan, isi ulang, dan leding
			Masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan
			Rumah tangga bersanitasi tidak layak masih banyak terdapat di perdesaan maupun perkotaan
			Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan Tempat Pembuangan Akhir berupa Tangki
			Belum ada sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolah, pembuangan (disposal), dan



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			sistem pakai ulang (reuse)
			Jaringan listrik dan komunikasi belum optimal terutama di pedesaan
			Menurunnya Jumlah Pelanggan Listrik
	Urusan perhubungan	Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil	Sarana dan prasarana perhubungan belum memadai
			kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara kawasan kota dan pedesaan
			Fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai masih kurang dan belum merata ke seluruh wilayah kab. Barito timur
			Pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai belum terlaksana dengan maksimal
	Urusan Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Masih lemahnya fungsi Pengawasan dan Penanganan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
			Belum adanya upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air
			Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi
			Pengelolaan sampah belum efektif dan efisien
			Meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem
			Beberapa perusahaan yang beroperasi belum mengantongi AMDAL dan belum memiliki izin lingkungan

Sumber: hasil analisis, 2021

4.1.3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di



berbagai sektor pembangunan daerah. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu Sumber Daya Manusia Barito Timur belum berdaya saing secara optimal.

A. Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Barito Timur

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (attitude) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2020. IPM Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 mencapai 69,71 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 71,39. Nilai IPM Kabupaten Barito Timur selama periode tersebut selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik, namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.



Dilihat dari permasalahan pokok sumber daya manusia, Barito Timur belum berdaya saing secara optimal. Hal ini dijelaskan melalui permasalahan dan akar masalah yang terkait dengan masalah pokok belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing SDM pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia Barito Timur”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Barito Timur	Urusan pendidikan	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar
			Masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan
			Masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan ke luar kota
	Urusan kesehatan	Masih rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Sarana dan prasarana penunjang kesehatan masih belum memadai
			Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata dan ada sebagian tenaga kesehatan masih belum terpenuhi (dokter gigi, perawat gigi, analisis kesehatan)
			Pencapaian pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah
			Proses pengadaan obat-obatan terkendala kebijakan
			Meningkatnya angka kesakitan (angka morbiditas)
			Minimnya kerjasama lintas sektor yang terkait pelaksanaan germas, serta informasi yang diberikan berkaitan dengan 12 indikator Germas tidak sampai kesemua lapisan masyarakat
			Masih cukup tingginya jumlah stunting
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan, kelurahan, dan desa
			Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan

Sumber: hasil analisis, 2021



4.1.4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi sering kali menyebabkan gesekan dalam masyarakat. Semua unsur perbedaan ini harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari fokus permasalahan keragaman budaya terdapat permasalahan pokok, yaitu belum terwujudnya manusia Barito Timur yang beragama dan berbudaya.

A. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah

Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena agama mempunyai peran yang penting sebagai penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, pemupuk rasa solidaritas dan berfungsi sebagai sublimatif atau perubahan ke tingkat yang lebih baik. Sedangkan budaya adalah nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Dua hal ini berbeda dan butuh pendewasaan diri untuk meyatukan keduanya. Perbedaan pada bidang lainnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menyebabkan perpecahan yang mengganggu ketentraman dan keamanan.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 6 dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yaitu sebesar 141 pelanggaran pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Timur di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 224 pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 403 pelanggaran, sedangkan nilai terkecil se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dengan nilai IPM sebesar 38 pelanggaran.

Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat. Dengan ketentraman dan keamanan maka hidup masyarakat akan lebih



tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Dalam bidang ini, pembangunan di Kabupaten Barito Timur masih mempunyai kendala itu masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Pentingnya kenyamanan kota akan mempengaruhi investasi, perekonomian masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per-urusan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional	Masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional
			Masih kurangnya aktraksi budaya daerah
			urangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Nilai- Nilai Budaya Tradisional
			Masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kompleks situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma’anyan lawangan.
	Urusan Pemuda dan olahraga	Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
			Masih rendahnya prestasi pemuda olahraga
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Perlindungan Masyarakat		meningkatnya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja

Sumber: hasil analisis 2021

4.1.5. Fokus Permasalahan Birokrasi

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

A. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus



terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.6
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Baik”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Unsur Sekretariat Daerah, Pengawasan, Perencanaan, dan Keuangan	Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal
			Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal
			Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal
			Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa
			Penyusunan rencana, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara selaras dan terpadu
			Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optiml
			Rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Kinerja aparatur sipil Negara yang belum optimal	Masih Belum Seluruh Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Manajemen SDM Aparatur masih belum optimal
			Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
			Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur masih belum efektif.
	Urusan Kepegawaian dan Diklat		Urusan Komunikasi dan Informatika



4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan kondisi yang dialami secara global dan memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Barito Timur. Terdapat beberapa isu internasional yang perlu ditelaah sebab berdampak bagi pembangunan Kabupaten Barito Timur.

a. **Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah membawa masalah kesehatan hingga sosial dan perekonomian bagi dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini jumlah penderita dan korban masih meningkat dan menyebar luas. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai Langkah telah dilakukan di hampir semua negara. Pembatasan sosial (*social distancing*), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun telah pernah dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem



keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional. Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi dengan segera, kondisi ini akan menjalar ke sektor keuangan, meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk mencegah hal tersebut, seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian.

Sejak penyebaran Covid-19 telah dilakukan berbagai langkah untuk menangani dampak negatif pada masyarakat dan memulihkan ekonomi. Langkah perluasan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan terdampak, termasuk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah juga mendapatkan dukungan pemerintah berupa penundaan pinjaman dan bantuan subsidi bunga pinjaman. Langkah ini diharapkan mampu menambah ketahanan dunia usaha menghadapi tekanan Covid-19 yang sangat berat.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang maka reformasi diarahkan



pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara. Dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Realokasi dan refokusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 dan masih berlanjut sampai tahun 2021 diharapkan dapat lebih mengarahkan pembangunan untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (*zero-based budgeting*), beorientasi hasil (*result-based budgeting*), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (*automatic stabilizer*) sebagai *shock-absorber* otomatis dalam menghadapi ketidakpastian. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. Sementara itu, kebijakan PNBPN 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Sedangkan kebijakan sisi pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung *countercyclical* stabilisasi ekonomi yang dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Tahun 2021 menjadi tahun penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 sekaligus momentum yang tepat dalam melakukan reformasi struktural agar perekonomian Indonesia kembali pada tren pertumbuhan.

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals* (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf,



degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;



5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan



strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Barito Timur, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

c. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti



setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun juga mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu,



pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.



4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

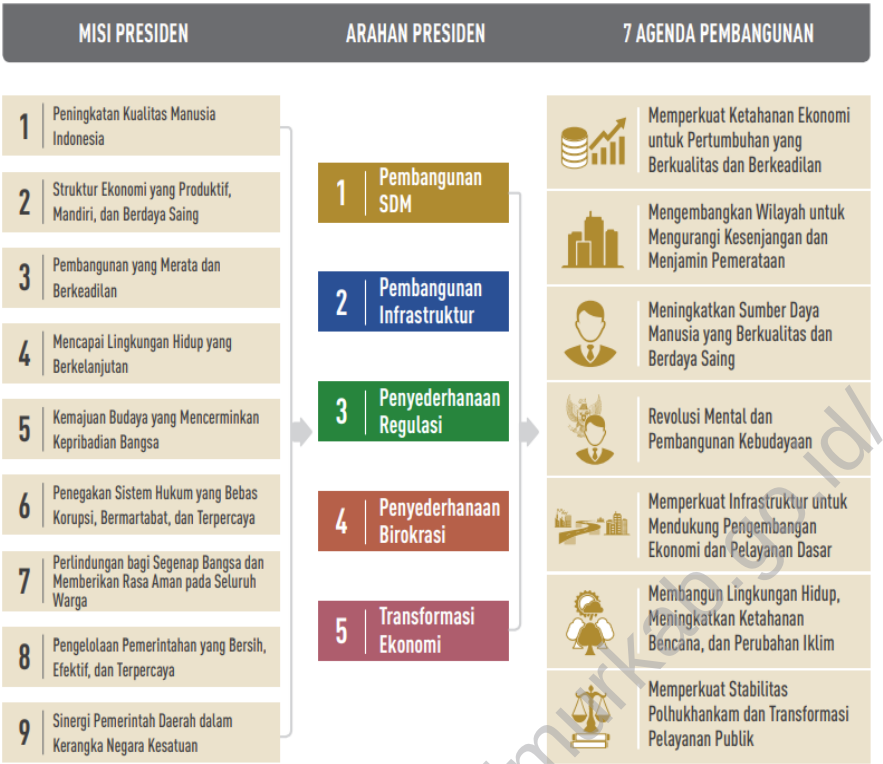
Visi Presiden menjadi visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

”Visi Presiden Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Visi diterjemahkan ke misi pembangunan jangka menengah nasional. Visi dan misi RPJMN 2020–2024 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah:

Gambar 4.2
Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Adapun penjelasan dari masing-masing agenda pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas nasional setiap tahun dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun, diuraikan sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan



nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Keempat pengarusutamaan (*mainstreaming*) tersebut, meliputi: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; dan 4) Transformasi Digital.



c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih lanjut, amanat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan beberapa peraturan menteri terkait yang mengatur standar teknis pelaksanaan SPM.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Standar Pelayanan Minimal dipilah menjadi SPM Daerah provinsi dan SPM Daerah kabupaten/kota. Adapun SPM untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar:

- a. Pendidikan Dasar
- b. Pendidikan Kesetaraan
- c. Pendidikan Kesetaraan

2. SPM Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pelayanan kesehatan balita
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
4. SPM Bidang Pendidikan
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
5. SPM Bidang Pendidikan
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. SPM Bidang Sosial
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti



- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

d. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Ketiga elemen ini yaitu maju, mandiri, dan adil diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.



Misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2.3. Isu atau Kebijakan Daerah

Isu strategis atau kebijakan daerah merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Barito Timur. Isu strategis daerah atau kebijakan Kabupaten Barito Timur yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang antara lain telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur.

a. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2008 hingga tahun 2028. Visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2005-2025 ditetapkan sebagai berikut.

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2004-2020 tidak



dilakukan revisi. Artinya visi pembangunan Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPJP tahun 2004-2020 akan tetap digunakan sebagai visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2008-2028, yaitu:

**“BARITO TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN
BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Rakyat.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban.
4. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan Dan Keberlanjutan SDA Dan Lingkungan Hidup.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan.

Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan terwujud masyarakat yang “Maju, Sejahtera” secara ekonomi dan non ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah “Gumi Jari Janang Kalalawah” yang artinya: Daerah yang Subur Makmur dan Sejahtera Untuk Selamanya.



Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018 – 2023 adalah memfokuskan pada daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan itu, kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat, terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi



perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

b. Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai **Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah** meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung pangan;



- e. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung energi;
- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, **Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi** terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung, Raya Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

- a. **Sistem jaringan transportasi darat:**

1) **Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan**, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

- ✓ Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:



Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

- ✓ Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:

Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km

- ✓ Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

- (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
- (2) Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- (3) Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- (4) Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- (5) Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
- (6) Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- (7) Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- (8) Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- (9) Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
- (10) Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- (11) Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- (12) Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- (13) Rikut Jawa (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- (14) Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:



✓ **Jaringan angkutan sungai dan danau:**

- (1) Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- (2) Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- (4) Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- (5) Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- (6) Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- (7) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;
- (8) Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- (9) Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- (10) Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- (11) Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai - Pagatan;
- (12) Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantan - Muara Sebangau;
- (13) Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- (14) Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
- (15) Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- (16) Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip – Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;



- (17) Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- (18) Anjir Kelampayan: Pulang Pisau - Mandomai;
- (19) Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
- (20) Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- (21) Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

✓ **Jaringan angkutan penyeberangan :**

- (1) Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- (2) Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- (3) Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- (4) Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

- 1) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
 - Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
 - Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang - Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
 - Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
 - Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
 - Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
- 2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:
 - Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
 - Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
 - Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.



- 3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

c. Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- ✓ Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- ✓ Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- ✓ Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- ✓ Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. Sistem jaringan transportasi udara.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya,
terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;

- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;



- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, meliputi;

- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
- ✓ Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- ✓ Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ✓ Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.



- 3) **Gardu Induk (GI)**, terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu
- 4) **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

- 1) **Sistem Jaringan Backbone;**
Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut
- 2) **Remote Metro Junction (RMJ);**
Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio
- 3) **Sistem Jaringan Akses**
Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

- 1) **Wilayah Sungai (WS)**, mencakup;
 - a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:
 - ✓ Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai;
 - ✓ Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;
 - b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.
 - c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:



- ✓ Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;

- a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tamba, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;
- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau,
- c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.



e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

3) **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari;

➤ **Daerah Irigasi (DI)**

- a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat** yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
- b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi**, meliputi:
 - ✓ Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Katingan, yaitu:
 - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
 - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)
- c) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten** meliputi:
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
 - ✓ Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
 - ✓ Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
 - ✓ Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha



- ✓ Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
- ✓ Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
- ✓ Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
- ✓ Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha

➤ **Daerah Rawa (DR)**

a) **Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:

- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)
- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).

b) **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:

- ✓ DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)



- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),
 - **Daerah Rawa Tambak**, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 4) **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
- ✓ pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
 - ✓ pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
 - ✓ pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
 - ✓ pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).
- 5) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:
- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
 - ✓ Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai



- ✓ Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota

6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

a. **kawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:

- 1) hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. **Non kawasan hutan** seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

1) **kawasan peruntukan pertanian** meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $\pm 187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas $178.572,86$ Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64.001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;



- d) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
 - e) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.
- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) **kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) **kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
- a) kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.



- 7) **kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **kawasan peruntukan technopark** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 10) **kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
 - a) kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha,



wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi
di 14 Kabupaten/Kota.

c. Telaahan RTRW Kabupaten Barito Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Untuk mencapai pola dan struktur ruang Kabupaten Barito Timur 2011-2031 diperlukan perwujudan RTRW Kabupaten Barito Timur yang diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Barito Timur.

Tabel 4.7
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur
Tahap II Tahun 2017-2021

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II 2017-2021
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman			
1	Peningkatan Fungsi PKL Tamiang Layang	Peningkatan kapasitas PDAM	Tamiang Layang	
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan	Tamiang Layang	
		Peningkatan jaringan drainase	Tamiang Layang	
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba	Tamiang Layang	
		Pembangunan fasilitas sosial dan umum	Tamiang Layang	
		Pembangunan kawasan taman kota	Tamiang Layang	
2	Peningkatan Fungsi PKLp	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Ampah	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
3	Ampah	Peningkatan daerah irigasi	Ampah	
		Pengembangan Puskesmas Rawap Inap	Ampah	
		Pembangunan sarana transportasi	Ampah	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Ampah	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Ampah	
	Peningkatan Fungsi PPK Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	Penyusunan RDTR	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Penyusunan peraturan zonasi	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan tata batas hutan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan fasilitas penunjang pertanian	Bambulung	
		Pembangunan gudang pengumpul pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan akses perkebunan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, air bersih, limbah, sampah, dan lain-lain).	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan Puskesmas	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain).	
		Pengembangan sarana dan prasarana wisata		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II 2017- 2021
II Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi				
1	Peningkatan Jalan	Peingkatan kualitas ruas jalan Strategis Nasional		
2	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
3	Perbaikan Jalan	Perbaikan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan Terminal Tipe C	Taniran, Bentot, Hayaping, Bambulung	
4	Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga serta bandara	Pembangunan Pelabuhan khusus	Telang Baru	
		Dermaga Wisata Danau Undan	Benua Lima	
III Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air				
1	Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi Hulu Sungai, Anak Sungai dan Danau	Kabupaten Barito Timur	
		Pengamanan hulu sungai. Anak sungai, Danau	Kabupaten Barito Timur	
2	Irigasi	perbaikan irigasi teknis yang rusak	Kabupaten Barito Timur	
		pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
3	Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	
		Pembangunan bak penampung air	Seluruh kecamatan	
4	Penanganan longsor/banjir	Pembangunan Turap/Siring/ Bronjong	Kecamatan Pematang Karau,	
		Sosialisasi	Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah	
IV Sistem Jaringan Prasarana Energi				
1	Peningkatan Energi	Optimalisasi pemanfaatan PLTD berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan	
		Perluasan layanan listrik	Kabupaten Barito Timur	
V Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi				
1	Pembangunan	Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kabupaten Barito Timur	
2	Penyusunan data base	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kabupaten Barito Timur	
VI Sistem Jaringan Prasarana Permukiman				
1	Peningkatan perbaikan permukiman	Perbaikan perumahan semi permanen/tidak permanen	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
2	Pembangunan prasarana pemukiman	Perumahan PNS	Tamiang Layang	
		Pembangunan perumahan perkotaan	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan IPAL	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan drainase	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	di seluruh PPK dan desa-desa	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

Tabel 4.8
Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur
Tahap II Tahun 2017-2021

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II	
				2017-2021	
I Perwujudan Kawasan Lindung					
1	Perwujudan Kawasan Lindung terhadap kawasan bawahannya	Mengendalikan kegiatan hutan agar tetap terpelihara:	Seluruh kecamatan Mangaris		
		a		Identifikasi dan inventarisasi data kawasan lindung	
		b		Mengembalikan dan menjaga kawasan lindung lainnya (kawasan arboretum)	
		c		Rehabilitasi dan konversi kawasan lindung	
		Meningkatkan serta mempertahankan luasan dan fungsi kawasan lindung:			
		a		Pemantauan dan pembatasan kegiatan hutan	
		b		Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi hutan	
		c		Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan	
		d	Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat		
		Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung:		Kabupaten Barito Timur	
		a	Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu		
		b	Kegiatan Rahabilitasi, Redeliniasi kawasan lindung		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		c	Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		
2	Kawasan Konservasi dan resapan air	Mengendalikan kegiatan kawasan agar tetap terpelihara:		Seluruh kecamatan	
		a	Identifikasi dan inventarisasi data kawasan konservasi		
		b	Rehabilitasi dan konversi kawasan konservasi		
		Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan			
		a	Pemantauan dan pembatasan kegiatan kawasan		
		b	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi dan resapan air		
3	Kawasan Lindung Setempat Sempadan Sungai	a	Pembangunan tanggul sungai	Seluruh kecamatan	
		b	Pemeliharaan tanggul sungai		
		c	Pemeliharaan tebing sungai		
		d	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai		
		e	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang di tepi sungai		
4	Sempadan Danau/Waduk	a	Penataan dan pemanfaatan kawasan danau/waduk	Seluruh kecamatan	
		b	Rehabilitasi dan konservasi kawasan danau/waduk		
		c	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk		
		d	Pengembangan kegiatan ekonomi/wisata		
5	Kawasan Mata Air	a	Pemeliharaan kawasan mata air		
6	Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam	Mengendalikan kegiatan kawasan Taman Wisata Alam:		Seluruh kecamatan	
		a	Identifikasi dan inventarisasi data Taman Wisata Alam		
		b	Rehabilitasi dan konversi Taman Wisata Alam		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
7	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Mengendlikan kegiatan kawasan cagar budaya:		Seluruh kecamatan	
		a	Penyusunan peraturan zonasi		
		b	Rehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
8	Rawan Bencana Alam	Mitigasi bencana banjir & longsor adalah :		Kecamatan Pematang Karau, Petangkep Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raren	
		a	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya		
		b	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi tebing sungai yang dekat dengan pemukiman		
		c	Pembangunan jalur evakuasi		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
			bencana alam	Batuah, dan Dusun Tengah	
		d	Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air		
		e	Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah penyangga dan resapan air		
		f	Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		
		g	Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		
		h	Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		
		i	Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor		
		j	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanahongsor		
II	Perwujudan Kawasan Budidaya				
1	Perwujudan HP	a	Pemetaan tata batas kawasan hutan produksi	Kabupaten Barito Timur	
		b	Identifikasi jenis dan kawasan hutan produksi		
		c	Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi		
		d	Pembangunan kerjasama pengelolaan kawasan hutan produksi		
		e	Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan		
2	Perwujudan Kawasan Pertanian	a	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kecamatan Paju Epat, Dusun Tengah, Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Timur, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi,		
		c	pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian (terminal agribisnis)		
		d	Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan		
		e	Pengembangan padi organik bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi		
		f	Pemberian insentif kepada petani/pengusaha bidang pertanian		
		g	Penguatan lembaga petani, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		
a	Perwujudan Pertanian Lahan Kering	a	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kecamatan Raren Batuah, Dusun	
		b	Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		c	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Tengah, Karusen Janang, Dusun Timur, Petangkep Tutui, Awang, Paju Epat	
		d	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		e	Penguatan kelembagaan petani serta pemodalan		
		f	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
b	Perwujudan Pertanian Lahan Basah	a	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		c	Penguatan kelembagaan dan pemasaran serta pemodalan		
		d	penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
3	Perwujudan Kawasan Perkebunan	a	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	
		b	Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		
		-	Subsistem Hulu : sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)		
		-	Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer		
		-	Subsistem Hilir (<i>Down Stream</i>) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan		
		c	Subsistem Kelembagaan (<i>Supporting Institution</i>) perbankan, transportasi.		
		d	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Kebun)		
4	Perwujudan Kawasan Perikanan	a	Pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Paku	
		b	Peningkatan produksi perikanan		
		c	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung peternakan		
		d	Pengadaan bibit dan peralatan		
		e	Penyuluhan		
5	Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	a	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh wilayah	
		b	Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi		
		c	Melakukan kajian daya dukung		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
		lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan mineral		
		d Melakukan kajian suberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan		
		e Pengembangan dan Penataan Wilayah bidang pertambangan dan energi		
		f Pengembangan energi alternatif		
		g Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		
		h Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		i Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan		
		j pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif		
6	Perwujudan Kawasan Pariwisata	a Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Seluruh wilayah pariwisata	
		b Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		
		c Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		
		d Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		
		e Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu manajemen promosi pariwisata daerah		
		f Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		
		g Pembinaan Sumber Daya Insan Pariwisata (Sanggar dan Pesanggrahan)		
7	Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan		
		a Pembangunan perumahan pegawai	Tamiang Layang	
		b Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Ampah	
		c Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas	Seluruh Kecamatan	
		d Pembangunan jalan lingkungan	Seluruh Kecamatan	
		e Pembangunan sistem jaringan prasarana air minum	Seluruh Kecamatan	
		f Pengembangan sistem jaringan prasarana listrik	Seluruh Kecamatan	
		g Pengembangan sistem jaringan	Seluruh	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
			prasarana telekomunikasi	Kecamatan	
		h	Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan limbah	Seluruh Kecamatan	
		i	Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Kecamatan Pematang Karau,	
		j	Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana	Seluruh Kecamatan	
		Permukiman Perdesaan			
		a	Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan		
		b	Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya		
		c	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Seluruh Kecamatan	
		d	Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunya akses tinggi, sedang dan rendah		
		e	Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman		
8	Sektor Pengairan	Pengendalian banjir dan konservasi sumber-sumber air melalui:		Kabupaten Barito Timur	
		a	Pembuatan Tabat		
		Pengembangan jaringan Irigasi			
		Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi			
9	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi	a	Fasilitiasi Kredit Usaha Rakyat	Seluruh Kecamatan	
		b	Fasilitasi kesehatan usaha dan permodalan		
		c	Fasilitasi jaminan keamanan investasi rakyat		
III	Sub Sektor Tata Ruang				
		a	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Barito Timur	
1	Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga				
a	Sub Sektor Pendidikan	a	Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		b	Pembangunan SMU STANDAR NASIONAL/ INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		c	Pembangunan SMK STANDAR NASIONAL / INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		d	Pembangunan SMP/ sederajat	Kabupaten Barito Timur	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		e	Pembangunan SD/ sederajat	Seluruh Kecamatan	
		f	Pembangunan TK	Seluruh Kecamatan	
		g	Rehabilitasi bangunan sekolah	Seluruh Kecamatan	
		h	Pemeliharaan gedung sekolah	Seluruh Kecamatan	
		i	Pembangunan ruang kelas	Seluruh Kecamatan	
b	Sub Sektor Kebudayaan	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan			
		a	Inventarisasi Keanekaragaman Kebudayaan	Kabupaten Barito Timur	
		b	Penggalan Seni Budaya Khas Daerah	Kabupaten Barito Timur	
c	Sub Sektor Olahraga	a	Pengembangan Stadion Olah Raga Standar Nasional	Tamiang Layang	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

Tabel 4.9
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur
Tahun 2011-2031

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017-2021)
1	Perwujudan Kawasan Agropolitan	Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan irigasi teknis	Ampah dan Bambulung	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi,		
		komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Pengelolaan agrikultura dan agroindustri yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani.	Ampah dan Bambulung	
		Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis dan peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparatur)	Ampah dan Bambulung	
		Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan yang saling mendukung dan menguatkan termasuk pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata	Ampah dan Bambulung	
		Menjalin tersedianya sarana	Ampah dan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017- 2021)
		produksi dan permodalan pertanian.	Bambulung	
		Pengembangan kelembagaan petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi balai penyuluhan pengembangan terpadu.	Ampah dan Bambulung	
		Peningkatan perdagangan / pemasaran termasuk pengembangan terminal agribisnis dan pusat lelang/show room hasil pertanian.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan percobaan / pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Ampah dan Bambulung	
2	Perwujudan Kawasan pertanian berkelanjutan dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis	Penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor.	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan penunjang	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian	Kabupaten Barito Timur	
		Peningkatan dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat)	Kabupaten Barito Timur	
3	Perwujudan Kawasan Pengembangan Peternakan	Pembangunan sarana dan prasarana inti kawasan peternakan	Kecamatan Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Pematang Karau, Dusun Dusun Timur	
		Peningkatan sarana prasarana transportasi kawasan		
		Peningkatan pelayanan prasarana (sanitasi, air bersih, drainase)		
		Pemasaran hasil produksi peternakan		
		Peningkatan sumberdaya manusia		
		Penyuluhan		
		Sosialisasi dan penyiapan masyarakat		
4	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan	Kabupaten Barito Timur	
		Pengembangan dan penataan wilayah bidang energi		
		Pengembangan energi alternatif		
		Melakukan kajian		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017- 2021)
		pengembangan energi alternatif		
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		
5	Perwujudan Kawasan Sosial Budaya	Penyusunan masterplan kawasan Situs bersejarah Brohong	Dusun Tengah	
		Penyusunan peraturan zonasi		
		Penyusunan DED		
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Situs		
		Pemeliharaan kawasan		
6	Perwujudan Kawasan Perkotaan	Peningkatan peran dan pelayanan pasar menjadi pasar regional	Ampah	
		Pembangunan perguruan tinggi	Tamiang Layang	
		Peningkatan sekolah menengah umum menjadi bertaraf internasional	Tamiang Layang	
		Peningkatan pelayanan sanitasi kebersihan perkotaan	Tamiang Layang dan Ampah	
		Pembangunan gedung olah raga & kesenian	Tamiang Layang	
		Pembangunan pusat pertokoan	Tamiang Layang & Ampah	
		Peningkatan RSUD	Tamiang Layang	
		Pembangunan perumahan karyawan	Tamiang Layang	
7	Perwujudan Kawasan Tambak	pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan	Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan		
		Bantuan bibit dan peralatan		
		Penyuluhan		
8	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Dusun Tengah	
		Penyediaan peralatan energi listrik dan sumberdaya manusia		
		Pembangunan sarana prasarana pengembangan kawasan		
9	Perwujudan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Desa Siong Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan gedung pusat penelitian		
		Pengembangbiakan jenis anggrek		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031



4.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini akan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Analisis Capaian Kabupaten Barito Timur terhadap Indikator TPB

Secara umum terdapat sekitar 40% dari 220 indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang telah diisi. Sementara 60% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten telah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur yaitu 49 indikator atau sekitar 22,27% telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 39 indikator atau sekitar 17,73% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 132 indikator atau 60% belum ada datanya.

Tabel 4.10
Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

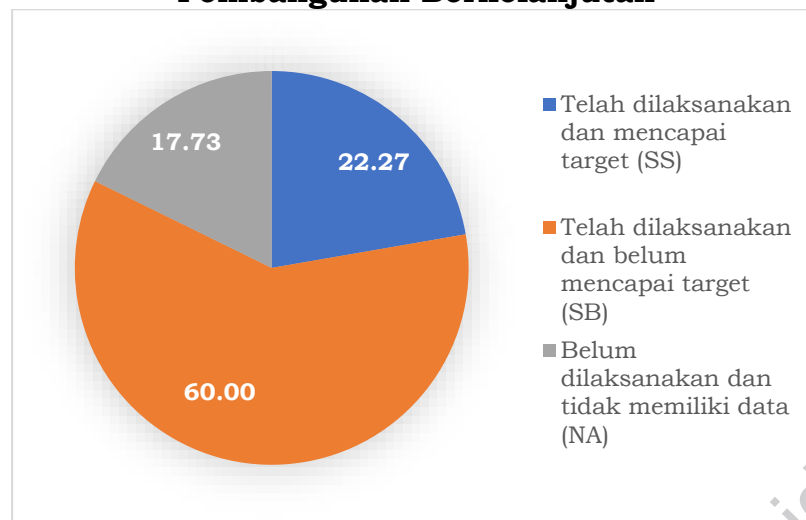
No	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Telah dilaksanakan dan mencapai target (SS)	49	22,27%
2.	Telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	39	17,73%
3.	Belum dilaksanakan dan tidak memiliki data (NA)	132	60%
	Jumlah	220	100%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi ketercapaian target TPB, dimana persentase indikator TPB yang tidak memiliki data mencapai 63,30%. Indikator-indikator tersebut perlu dijadikan perhatian sebagai upaya untuk mengukur dan mendokumentasikan data capaian dengan lebih akurat.

Gambar 4.3
Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Secara lebih rinci, total indikator dari masing – masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.11
Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB

TPB	SS	SB	NA	Ketercapaian	Total Indikator
1. Tanpa kemiskinan	5	4	15	20,83	24
2. Tanpa kelaparan	7	0	4	63,64	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	13	10	32,35	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	3	7	23,08	13
5. Kesenjaraan Gender	1	0	13	7,14	14
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	0	17	5,56	18
7. Energi Terjangkau	0	0	2	0,00	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	7	7	5	36,84	19
9. Infrastruktur	4	0	9	30,77	13
10. Berkurangnya kesenjangan	2	4	5	18,18	11
11. Kota dan Permukiman yang berlanjut	2	0	11	15,38	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	0	1	4	0,00	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	0	0	2	0,00	2
15. Ekosistem Daratan	1	0	3	25,00	4
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	3	1	17	14,29	21
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	6	8	12,50	16
Total	49	39	132	22,27	220

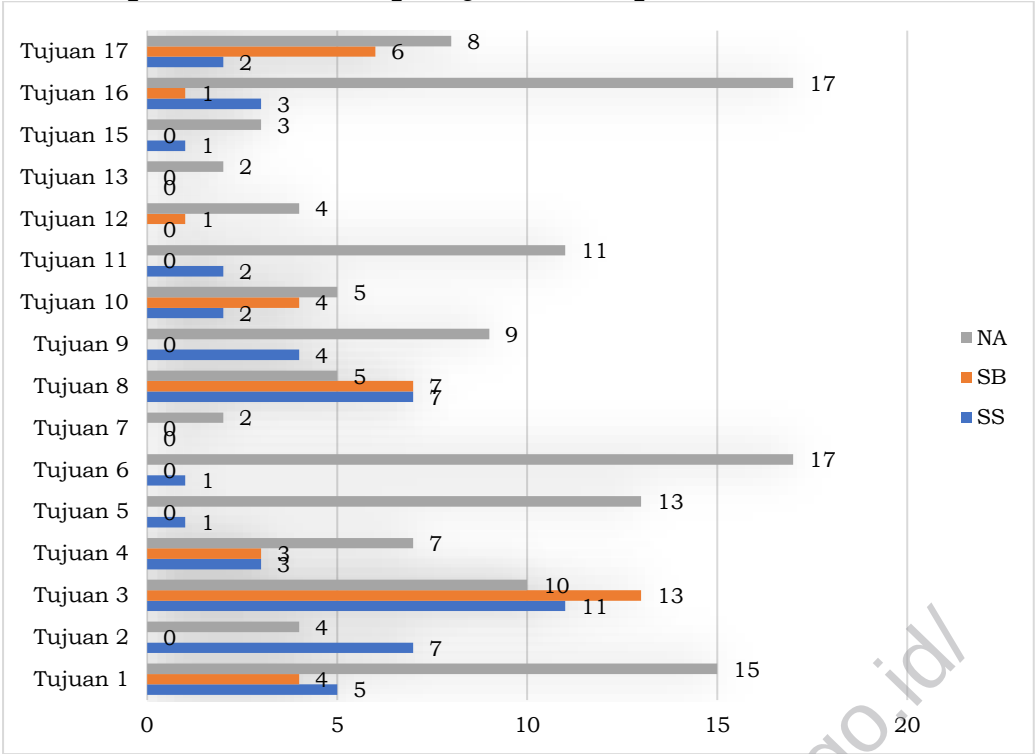
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Ketercapaian indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang sudah mencapai 30% terdiri dari TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Sedangkan untuk indikator TPB lainnya secara keseluruhan masih dibawah 30%, total ketercapaian secara keseluruhan semua indikator TPB adalah 22,27%. Indikator TPB Kabupaten Barito Timur yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 02 (Tanpa Kelaparan) dengan jumlah 7 indikator dari 11 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak terdapat pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh) dengan jumlah 17 indikator dari 21 indikator. Indikator TPB yang memiliki kriteria tidak adanya data (N/A) terbanyak, yakni TPB 06 dan TPB 16 dengan jumlah 17 indikator. Total pencapaian indikator untuk masingmasing tujuan dalam TPB beserta



dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 4.4
Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

b. Hasil Analisis Capaian OPD Kabupaten Barito Timur terhadap indikator TPB

- 1) Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar sosial**
- Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, adalah Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 5. Total jumlah indikator pada pilar sosial adalah 96 indikator, dengan indikator tercapai sebanyak 28 indikator. Berikut merupakan capaian TPB dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 4.12
Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1	0	0
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur	1	0	5
3.	Dinas Kesehatan	20	13	7

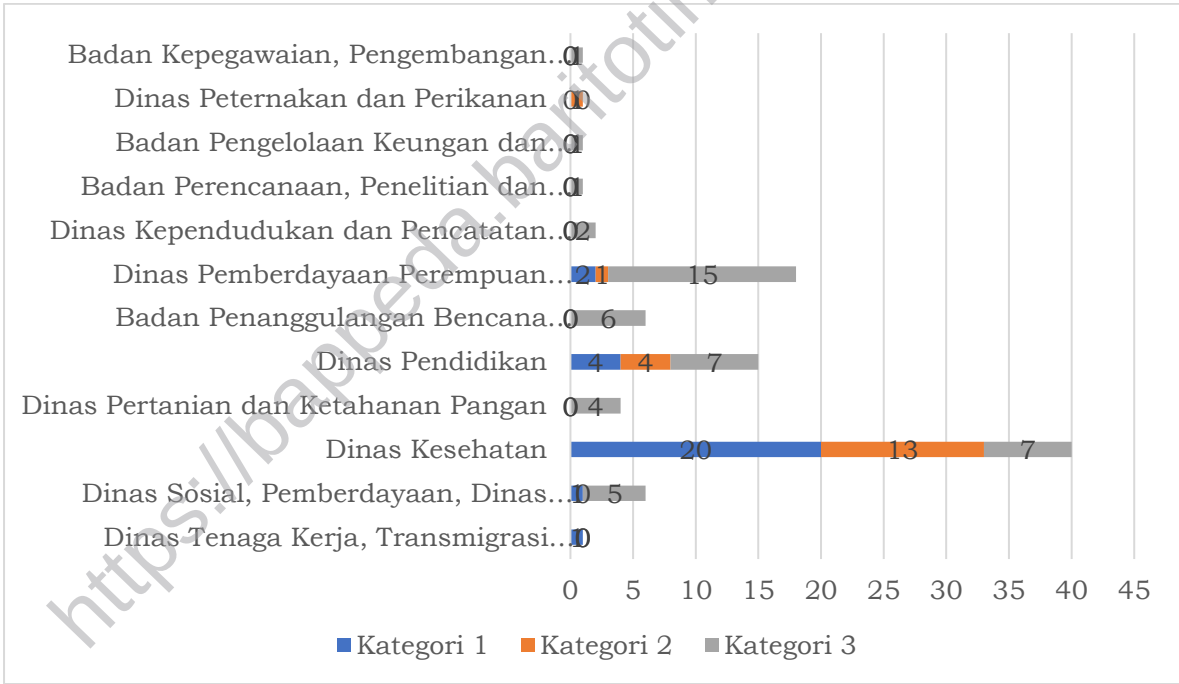


No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	4
5.	Dinas Pendidikan	4	4	7
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0	0	6
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1	15
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2
9.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan	0	0	1
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
11.	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	1	0
12.	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	1

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 12 OPD yang memiliki wewenang pada pilar sosial. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang telah menyelesaikan indikator terbanyak, yaitu 20 indikator. Total indikator yang telah diselesaikan dalam pilar sosial ini sebanyak 28 indikator, yang belum diselesaikan sebanyak 19 indikator dan indikator TPB yang belum memiliki data dalam pilar sosial sebanyak 49 indikator.

Gambar 4.5
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



2) Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15. Total jumlah indikator pilar lingkungan adalah 42 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 4.13
Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD

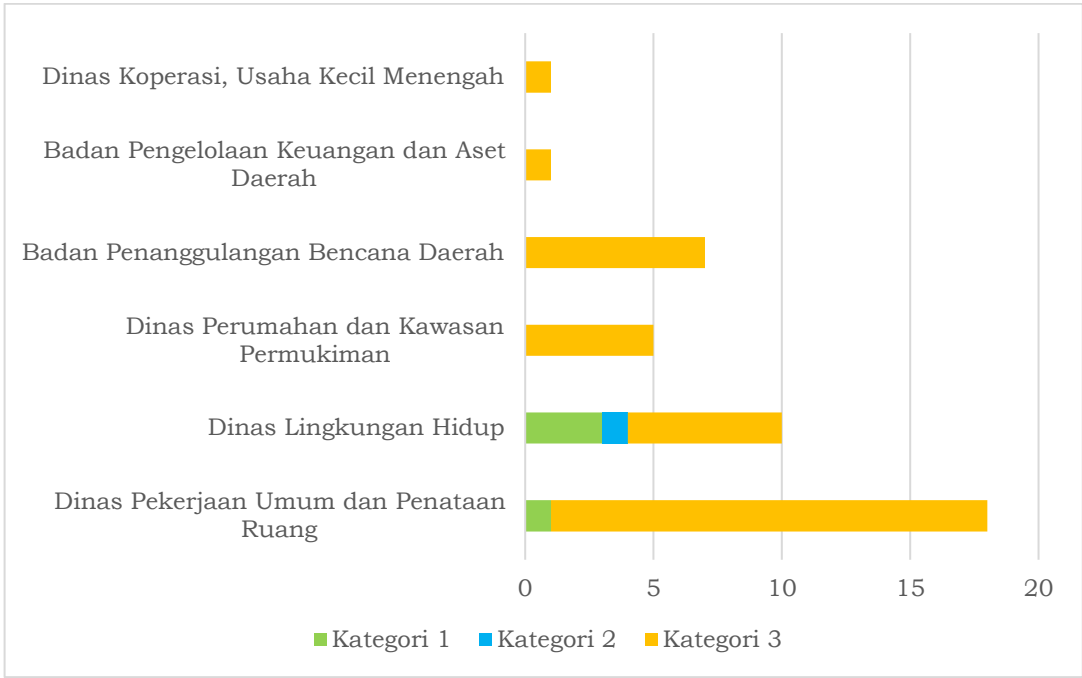
No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	17
2	Dinas Lingkungan Hidup	3	1	6
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	5
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	7
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0	0	1

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 OPD yang berwenang atas pilar lingkungan dengan 6 tujuan. Dimana indikator yang telah diselesaikan sebanyak 4 indikator dari total indikator pilar lingkungan. Indikator yang belum diselesaikan sebanyak 1 indikator dan indikator yang tidak memiliki data pada pilar lingkungan sebanyak 37 indikator dari indikator keseluruhan.



Gambar 4.6
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

3) Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17. Total jumlah indikator pada pilar ekonomi adalah 61 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah Terkait).

Tabel 4.14
Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2
2	Badan Pusat Statistik	6	6	6
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	3	4	2
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	0	0	6
5	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur	3	2	0
7	Dinas Perhubungan	0	0	4
8	Dinas Pendidikan	0	0	1
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1

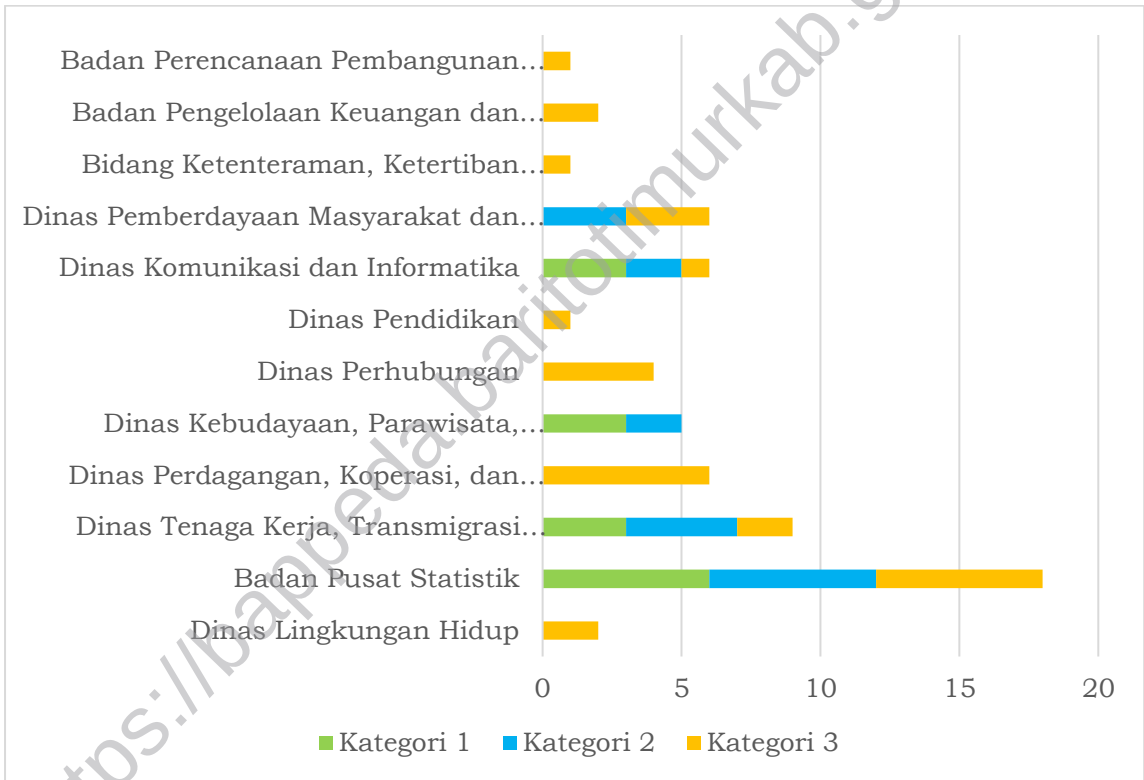


No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	3	3
11	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	1
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	2
13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0	0	1

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, OPD terkait yang berwenang atas pilar ekonomi terdiri dari 13 OPD. Masing-masing OPD memiliki wewenang terhadap indikator TPB dimana, total indikator yang telah diselesaikan adalah 15 indikator, sedangkan indikator TPB yang belum diselesaikan adalah 17 indikator, dan indikator yang belum memiliki data adalah 29 indikator.

Gambar 4.7
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



4) **Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar hukum**

Pilar Hukum hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 dengan total indikator 21 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB yang oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

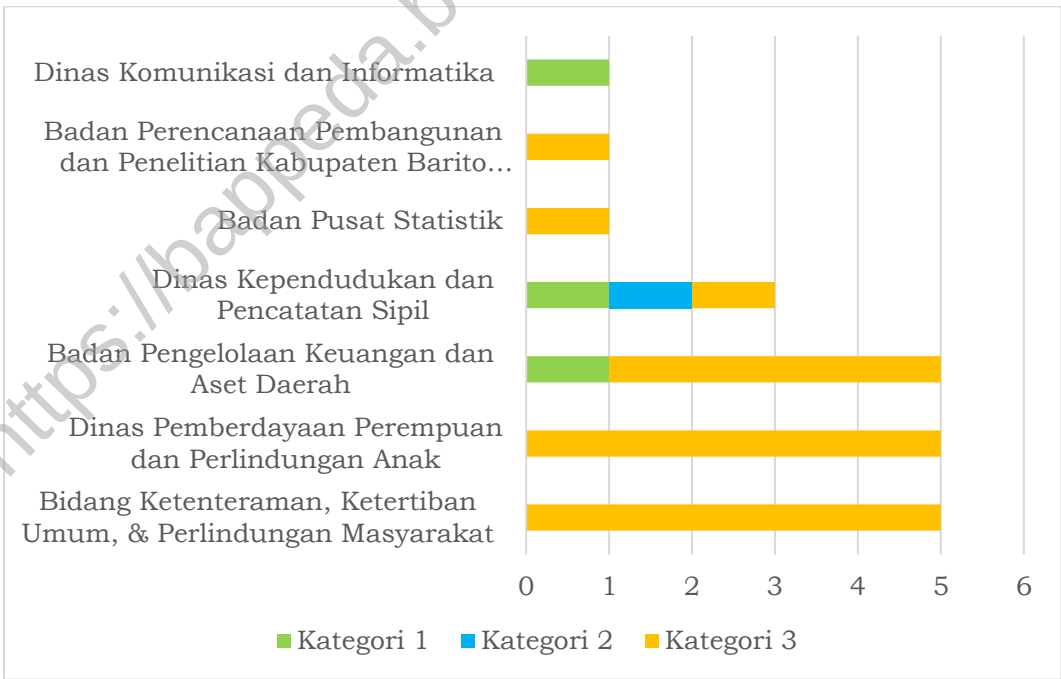
Tabel 4.15
Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	5
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	5
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	4
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1
5	Badan Pusat Statistik	0	0	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Barito Timur	0	0	1
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	0

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator TPB yang telah selesai ada 3 indikator dari total indikator pilar hukum. Capaian indikator yang belum terselesaikan ada 1 indikator dan indikator yang belum memiliki data adalah 17 indikator dari total indikator pilar hukum.

Gambar 4.8
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum





*Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur
Tahun 2021-2023*

5) Isu Strategis TPB

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta konsultasi publik yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa Kabupaten Barito Timur memiliki tujuh isu pembangunan prioritas, di antaranya:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01);
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (TPB 02);
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (TPB 03);
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04);
5. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06);
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08);
7. Mengurangi ketimpangan (TPB 10);
8. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11).

6) Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil integrasi keterkaitan dengan tujuan pembangunan dengan indikator TPB yang relevan maka didapatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus Kabupaten Barito Timur adalah:

TPB 1 Tanpa Kemiskinan

TPB 2 Tanpa Kelaparan

TPB 4 Pendidikan Berkualitas

TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



TPB 15 Ekosistem Daratan

Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur adalah mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023 untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS, sehingga isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Bagian dari KLHS yang diadaptasi meliputi:

1. Permasalahan di Kabupaten Barito Timur yang selaras dengan sasaran dan target sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD
2. Rumusan alternatif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD
3. Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023.

Pemberian rumusan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai. Rekomendasi diuraikan untuk setiap TPB prioritas di Kabupaten Barito Timur pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.16
Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial
					Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin
					Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial
		Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.
					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	perkotaan		
		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perencanaan tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	
		Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan	Program perencanaan tenaga kerja	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		jenis kelamin dan kelompok umur	kelamin dan kelompok umur	tenaga kerja pada usia produktif		Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
		Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
		Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
				Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata Program peningkatan daya tarik pariwisata	
				Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	
		Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
15	Ekosistem Darat	Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan berkualitas baik, terutama melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, khususnya hutan di Kabupaten Barito Timur	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, penghentian deforestasi, dan pemulihan lahan kritis.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang tersinkronisasi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan evaluasi lingkungan hidup dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih rencana dan perizinan antar tingkat pemerintahan yang dapat mengganggu keberjalanan pembangunan yang berkelanjutan.
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Peningkatan pengelolaan DAS, pengelolaan	Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan dengan memperhatikan:



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				kawasan hutan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi ekosistem yang berkelanjutan;
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2. Pengendalian dan pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan rehabilitasi hutan serta sertifikasi hutan;
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	3. Integrasi program konservasi sumber daya air atau DAS terpadu dan konservasi sumber daya air tanah;
					Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	
				Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam.
				Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Program Pendidikan	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				dan perhutanan sosial	dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Tersedianya data dan informasi yang handal mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur	Ketersediaan data mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur masih minim.	Peningkatan pengadaan, pemanfaatan, dan publikasi data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penelitian dan pengembangan daerah bidang lingkungan hidup dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas dan tersinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial
					Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
					Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial
		Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan	Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarkat
					Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Meningkatnya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, serta pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK.
					Program pembinaan Keluarga Berencana (KB).	
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan pada kegiatan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	posyandu dan penyuluhan imunisasi.
			Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu gizi ibu hamil, bayi, dan balita dengan pemenuhan upaya kesehatan melalui pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan ibu hamil, bayi dan balita dengan: 1. Penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. 2. Penanganan kerawanan pangan. 3. Pengawasan keamanan pangan segar. 4. Peningkatan ekonomi keluarga.
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Mengakhiri epidemi dan penyakit menular.	Tingginya prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan
	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular.			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				masyarakat		kesehatan penyakit menular dan tidak menular, serta pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, tidak menular, dan epidemi
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
				Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	Program penelitian dan pengembangan daerah. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penelitian dan pengembangan daerah dalam hal penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
				Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program pemberdayaan sosial.	Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular dan epidemi dengan: 1. Penyelenggaraan penyuluhan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	terkait penyakit menular dan epidemi dan cara pencegahannya. 2. Pemberdayaan peran masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penularan. 3. Peningkatan ketertiban dan penegakkan aturan tentang pencegahan penularan.
				Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	
			Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat dengan pemberdayaan masyarakat dalam KIE perilaku hidup bersih dan sehat.
				Program pemberdayaan sosial.	
	Mengurangi tingkat kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Masih tingginya kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan pandemi dengan cara: a. pemenuhan upaya kesehata melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). b. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, dan epidemi. 2. Pembinaan
	Mengurangi persentase penduduk < 18 tahun yang merokok	Masih tingginya Persentase penduduk < 18 tahun yang merokok		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	
	Mengurangi tingkat Prevalensi tekanan darah tinggi	Masih tingginya tingkat prevalensi tekanan darah tinggi		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
	Mengurangi tingkat Prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun	Masih tingginya tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	
	Meningkatkan angka Prevalensi penggunaan metode	Masih rendahnya angka prevalensi penggunaan metode			



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi. 3. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK
		Meningkatkan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Masih rendahnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	
		Meningkatkan cakupan jaminan Kesehatan nasional	Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan nasional		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	
4	Pendidikan Berkualitas	Mencapai cakupan Kesehatan universal, Termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan dasar



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
						dan reproduksi.
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.
					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata
		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Peningkatan akses masyarakat terhadap air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			sanitasi layak.	bersih baik perdesaan maupun perkotaan		rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja forma	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perencanaan tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa	Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	
		Mengurangi tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
		Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Meningkatkan Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
				Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	
				Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	
		Meningkatkan jumlah Wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
10	Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Tingginya jumlah daerah tertinggal yang belum terentaskan.	Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan	Program Penataan Desa	Fasilitas kerjasama antar desa dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
			Masih banyaknya jumlah desa tertinggal.	Penanganan kemiskinan terpadu lintas sector berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang terkini dan valid.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal masih tinggi		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pendataan penduduk miskin dan pengelolaan data fakir miskin di desa untuk pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



4.2.5. Telaahan RPJMD Daerah Sekitar

Secara administratif, Kabupaten Barito Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan serta Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Kalimantan Selatan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan ketiga kabupaten. Berikut ini adalah telaah isu atau kebijakan strategis Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Uraian masing-masing kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten disajikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah: “Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa”.

Misi pembangunan dari visi di atas sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi



seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur wilayah
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram
4. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung ekonomi unggulan daerah
6. Peningkatan partisipasi publik
7. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

b. Kabupaten Tabalong

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023 adalah: “Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera Dan Mandiri”.

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong didukung oleh 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah



Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai meliputi:

- a. Strategi 1: Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamais
- 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat.

- b. Strategi 2: Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- c. Strategi 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Arah Kebijakan: Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat

- d. Strategi 4: Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Arah Kebijakan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

- e. Strategi 5: Penanggulangan kemiskinan yang terpadu

Arah Kebijakan: Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin

- f. Strategi 6: Peningkatan pendapatan riil per kapita

Arah Kebijakan: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja

- g. Strategi 7: Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

- h. Strategi 8: Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan keluarga sejahtera.



- i. Strategi 9: Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian.
- 2) Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah.

- j. Strategi 10: Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan

Arah Kebijakan: Meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan

- k. Strategi 11: Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen usaha.
- 3) Meningkatkan pengembangan IKM

- l. Strategi 12: Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dan merata

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
- 2) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sanitasi
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air.

- m. Strategi 13: Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis
- 3) Mendorong upaya penurunan emisi

- n. Strategi 13: Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.



- 2) Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- o. Strategi 14: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik
Arah Kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.
 - 2) Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan.
- p. Strategi 15: Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik
Arah Kebijakan: Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI).
- q. Strategi 16: Perwujudan manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Arah Kebijakan:
 - 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan lintas sektor.
 - 2) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

c. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur. Visi bupati dan wakil bupati untuk periode 2017-2022 adalah: “Hulu Sungai Utara MANTAP”.

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis, dan Produktif. Adapun Misi yang mendukung Visi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumber daya lokal dengan berlandaskan potensi daerah;
4. Membangun infrastuktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal;
5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memerhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah
2. Peningkatan sistem pemerintahan yang berkualitas, efektif, dan efisien
3. Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan
4. Peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah
6. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Pemantapan integrasi ekonomi anta sektor primer, sekunder dan tersier
8. Pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian, dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya
9. Penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
10. Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's
11. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan
12. Pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan
13. Penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata
14. Peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan



15. Peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya
16. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa

4.2.6. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional dan regional, isu dan kebijakan daerah, serta telaahan RPJMD daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Barito Timur pada periode pembangunan 2018-2023 sebagai berikut:

a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

b. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.



Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

c. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan,



drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

d. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

e. Pelestarian lingkungan hidup

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem



lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hail alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

f. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal daerah

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan). Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Maanyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ejambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, Isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Maanyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk menikmati kebudayaan lokal daerah. Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi



wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

g. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Kabupaten Barito Timur dikatakan belum melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting diperhatikan bahwa status ini seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Timur baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi bupati dan wakil bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Timur, serta visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh bupati dan wakil bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah:

**"TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN
SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH"**

Visi Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1. Sehat** adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktifitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.
- 2. Cerdas** adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk



beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.

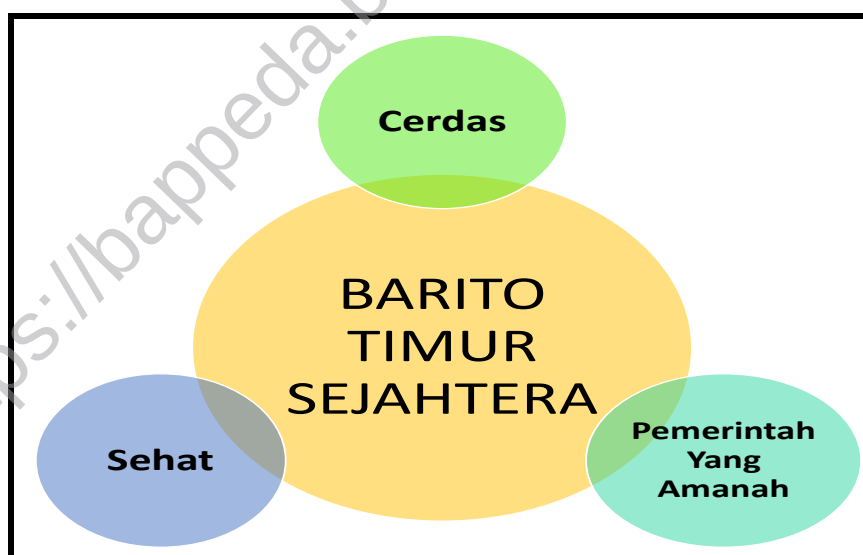
3. **Sejahtera** adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.
4. **Pemerintahan Yang Amanah** adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, makna dari visi Kabupaten Barito Timur adalah Kabupaten Barito Timur ingin mewujudkan daerah yang mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, akan tercipta daerah dengan masyarakat yang kuat, mandiri, handal, tangguh dan nyaman serta sejahtera.

Dengan merujuk pernyataan pokok visi Kabupaten Barito Timur di atas maka hubungan antarelemen visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2021 terlihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1.

Hubungan Antar pokok Visi Kabupaten Barito Timur





Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kabupaten Barito Timur, maka pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan masyarakat yang sehat, cerdas dan pemerintahan yang amanah. Sehingga diharapkan Kabupaten Barito Timur akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata diseluruh lapisan masyarakat.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

Dalam upaya mengoperasionalkan visi “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Barito Timur pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan;**
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia;**
- 3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;**
- 4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan**
- 5. Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.**



Penjelasan dari masing masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi pertama: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur dikembangkan melalui kearifan lokal masyarakat dengan memerhatikan kemampuan dan tradisi masyarakat yang baik sehingga sejumlah strategi dan arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan serta penyediaan alat-alat pertanian, peternakan dan perkebunan dapat terselenggara dengan baik. Selain itu kemajuan koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri. Ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan turunannya maupun dalam pengembangan koperasi dan UMKM merupakan cikal bakal perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ini, maka perlu langkah strategis yaitu dengan cara melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga usulan Rencana Detail Tata Ruang. Mengingat sebagian wilayah Bartim merupakan kawasan peruntukan pertambangan. Sedangkan dalam misi 1 berfokus pada sektor lain sebagaimana dimaksud diatas. Selain itu, hal yang juga penting untuk menudukung misi ini adalah adanya 1 (satu) Peta berkenaan Cadangan Pangan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Misi kedua: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang dikembangkan melalui kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur diperlukan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang kinerja. Dalam upaya meningkatkan penataan kesehatan masyarakat perlu strategi dan arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kinerja



tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kesehatan, perbaikan standarisasi pelayanan kesehatan, penyediaan puskesmas rawat inap, Puskesmas dan Polindes. Sedangkan dari segi pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat terlayani dengan baik sehingga standar mutu pendidikan secara maksimal.

3. Misi ketiga: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, baik yang berbasis ekonomi kerakyatan maupun sektor-sektor ekonomi modern. Peningkatan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih maupun kelitrikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Demi memperlancar akses mobilitas masyarakat, jalan dan jembatan perlu mendapat perbaikan baik dari kecamatan ke desa, antar desa, bahkan dari desa ke akses jalan utama. Pemanfaatan sumber daya air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pengembangan irigasi teknis juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih. Sedangkan infrastruktur kelistrikan diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur dapat terlayani listrik dengan baik. Selain infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan perlu dijaga untuk masa yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan bagi pariwisata yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Timur.

4. Misi keempat: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga

Pembinaan umat beragama merupakan suatu kewajiban di wilayah Republik Indonesia, terlebih di wilayah Kabupaten Barito Timur yang memiliki keberagaman sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Dengan, terpeliharanya kebudayaan di wilayah Barito Timur, budaya leluhur tetap lestari dan dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata kebudayaan. Pembinaan pemuda dan olahraga menjadi



perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghasilkan pemuda yang berprestasi dan olahragawan handal.

Untuk mewujudkan misi khususnya terhadap pembinaan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu langkah strategis yaitu dengan cara melakukan pemetaan Masyarakat Hukum Adat, kemudian menetapkan pengakuan dan perlindungannya dalam Keputusan Bupati. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

5. Misi kelima: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang baik maka Pemerintah harus terus berupaya menyempurnakan aparturnya dari segi organisasi, manajemen, sistem dan prosedur, termasuk pembinaan pegawai (ASN). Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dengan memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi, memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, penyediaan fasilitas kerja dengan perangkat kerja yang memadai, optimalisasi analisis jabatan dengan penempatan aparatur, perencanaan dan informasi, menyediakan fasilitas teknologi informasi, penerapan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas, dan terukur, penguatan regulasi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah daerah.

Perlunya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama sektor retribusi. Antara lain menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Perlunya ditetapkan langkah strategis untuk mengembangkan sumber pendapatan lain, sehingga nanti tidak lagi hanya tergantung dari dana transfer pusat. Melalui peningkatan perekonomian yaitu

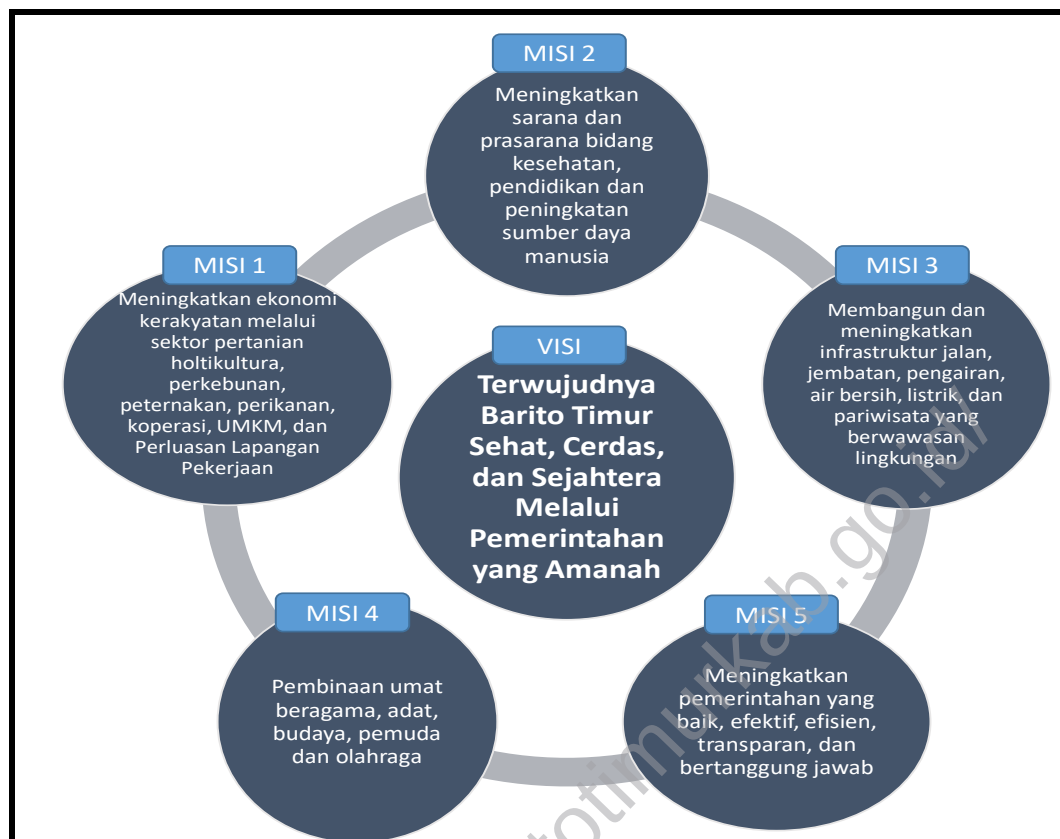


dengan cara pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, baik yang konvensional ataupun yang berbasis digital.

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 5.2.

**Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023**



Dengan demikian, visi mewujudkan Kabupaten Barito Timur mengandung makna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM yang mampu bersaing dan perubahan pola pikir kearah yang produktif dalam memanfaatkan potensi alam dan potensi nilai dan asset budaya sebagai kekuatan yang mendorong peningkatan daya saing dengan dukungan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Visi dan misi pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan. Pernyataan visi dan misi tersebut memiliki keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 sebab merupakan pelaksanaan dari tahap ketiga RPJPD. Adapun gambaran keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1

**Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun
2018-2023 Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028**

MISI RPJPD KABUPATEN BARITO TIMUR	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR
Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Rakyat	Misi 1: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 2: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban	Misi 4: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.
Misi 4: Memacu Pembangunan Infrastruktur	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan dan Keberlanjutan SDA dan Lingkungan Hidup	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 6: Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan	Misi 5: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab

Sumber: hasil analisis, 2021

Dalam upaya sinkronisasi setiap kebijakan pembangunan daerah, maka perlu adanya kesesuaian dan konsistensi antara kebijakan pembangunan kabupaten dengan provinsi. Tak terkecuali perencanaan pembangunan Barito Timur juga memiliki upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan konsistensi setiap kebijakan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun gambaran keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 belum dapat dilakukan sebab masih menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak tahun 2020. Berikut ini disajikan gambaran keterkaitan misi RPJMD Barito Timur dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (periode lalu) sebab terdapat tahun yang saling beririsan pada kedua dokumen tersebut yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021.



Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR
Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan
Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur	Misi 2: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 1: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan
Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 5: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 1: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan

Sumber: hasil analisis, 2021

Selain itu, pada subbab ini juga digambarkan keterkaitan visi dan misi Kabupaten Timur Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.



Tabel 5.3

Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

MISI RPJMN TAHUN 2020-2024	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR
Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 2: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
Misi 2: Sturktur ekonomi yang produktif, nandiri, dan berdaya saing	Misi 1: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan
Misi 3: Pembangunan yang merata dan berkualitas	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan
Misi 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 3: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Misi 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 4: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.
Misi 6: Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 4: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga. Misi 5: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab
Misi 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 4: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga.
Misi 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 5: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab
Misi 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 5: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab

Sumber: hasil analisis, 2021

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dijabarkan atau implementasi kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan menunjukkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Barito Timur dari masing-masing tujuan



dalam rumusan yang lebih spesifik dan. Oleh karena itu, sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur selama periode pembangunan daerah tahun 2019 sampai dengan 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Salah satu wujud kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten. Karena itu Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus berusaha menciptakan upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta mengembangkan tatanan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkeadilan, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam secara umum dan sistem perdagangan yang adil untuk menopang kemajuan industri, mengembangkan pariwisata yang tangguh, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan inti Kabupaten Barito Timur. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah semakin terbukanya berbagai akses hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penjuru wilayah sehingga masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Laju PDRB sektor Pertanian
 - Laju PDRB sektor Industri Pengolahan
- b. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Kontribusi PDRB Sektor pariwisata (digunakan pada tahun 2019 dan 2020)
 - PAD Sektor pariwisata (digunakan mulai tahun 2021)
 - Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)



- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Pengeluaran per kapita.
- d. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai Investasi berskala nasional (PMDN)
 - Nilai investasi berskala nasional (PMA)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka

2. Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM

Peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia merupakan kunci sukses terwujudnya setiap tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang berarti penduduk Kabupaten Barito Timur merupakan pelaksana pembangunan daerah sekaligus yang menikmati hasil-hasil pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan Kabupaten Barito Timur harus memperhatikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan, karena nilai budaya sesungguhnya merupakan aset dalam pembangunan melalui aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Barito Timur yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan kemandirian dalam memberikan sumbangsih optimal dan kesempatan yang lebih terbuka bagi penduduk Kabupaten Barito Timur dalam mengembangkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator:
 - Rata-rata lama sekolah
 - Harapan Lama Sekolah
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup.
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

3. Tujuan 3: Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan



Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan perlu memperhatikan tata ruang yang disusun dalam rencana tata ruang agar dapat berdayaguna. Pembangunan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur daerah akan juga ikut mendorong produktifitas masyarakat dan pembangunan daerah. maka sasaran pembangunan yang harus dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase panjang jalan kondisi baik
 - Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih
 - Persentase Luas Kawasan perumahan Kumuh
 - Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase timbulan sampah yang tertangani
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Udara
 - Indeks Tutupan Lahan

4. Tujuan 4: Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berbudaya

Masyarakat yang beragama dan berbudaya merupakan masyarakat yang mempunyai perilaku/akhlak yang berbudi luhur. Masyarakat yang seperti ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang beragama, maka segala kebaikan dalam unsur keagamaan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Kemudian kehidupan berbudaya perlu diterapkan oleh masyarakat karena budaya merupakan



kekayaan sejati daerah. Dengan mengembangkan budaya daerah maka masyarakat akan mengikuti aturan segala norma yang berlaku dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:

- a. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Persentase konflik yang diselesaikan.
- b. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator:
 - Persentase wirausaha baru (digunakan pada tahun 2019 dan 2020)
 - Persentase organisasi kepemudaan yang aktif.
- c. Meningkatnya prestasi olahraga. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Jumlah Atlet Barito Timur yang Berprestasi.
- d. Meningkatnya kelestarian adat dan budaya daerah. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator:
 - Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya (digunakan pada tahun 2019 dan 2020)
 - Persentase seni budaya yang dilestarikan (digunakan mulai tahun 2021)

5. Tujuan 5: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah.
- b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Jumlah Kasus Korupsi.



- c. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada dokumen ini dilakukan penyesuaian indikator kinerja maupun target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Penyesuaian indikator kinerja maupun target indikator mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang secara umum memburuk di berbagai sektor, terutama sosial, ekonomi, keuangan, maupun kesehatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk 34 provinsi di Indonesia. Beberapa indikator kinerja makro menunjukkan realisasi tahun 2020 yang memprihatinkan dan jauh dari target. Hal ini tidak, saja dialami oleh Kabupaten Barito Timur, namun juga hampir seluruh daerah di Indonesia dan nasional. Untuk merespon kondisi tersebut, maka pemerintah pusat sejak tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat nasional dan melakukan penyesuaian target-target pembangunan.

Pada tabel di bawah disajikan secara rinci keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran sebelum dan sesudah perubahan RPJMD. Tujuan dan sasaran RPJMD sebagai penjabaran misi tidak berubah, namun terdapat penyesuaian beberapa indikator kinerja sasaran dengan pertimbangan penyusunan indikator yang terukur, dapat dikelola dan akuntabel. Terdapat indikator yang tidak dilanjutkan lagi dan diganti dengan indikator baru, seperti PDRB Sektor pariwisata diganti menjadi PAD sektor pariwisata; dan indikator Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya diganti menjadi Persentase seni budaya yang dilestarikan. Sedangkan indikator Persentase wirausaha baru tidak digunakan lagi dan sudah terwakili dengan Persentase organisasi kepemudaan yang aktif. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian target indikator dengan mempertimbangkan kondisi riil pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor.

Tabel 5.4

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR											PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR			
NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD	TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
VISI: TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH														
Misi 1: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan														
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	a Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,98	5,45	-2,73	6,99	7,25	7,5	7,5	2,05	2,86	4,01	4,01
		b Persentase penduduk miskin	Persen	7,17	6,32	6,09	5,97	5,57	5,17	5,17	5,91	5,73	5,42	5,42
1.1	Meningkatnya daya saing eknomi unggulan daerah	a Laju PDRB sektor Pertanian	Persen	4,41	4,59	3,15	7,51	7,76	8	8	3,11	3,17	3,24	3,24
		b Laju PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	5,84	5,71	3,68	9,28	9,64	10	10	2,92	2,31	1,83	1,83
1.2	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah	a Kontribusi PDRB Sektor pariwisata	Persen	N/A			5,3	5,8	6,3	7,32	-	-	-	-
		b PAD sektor pariwisata	Rp	N/A	8.800.000	64.683.000								
		c Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	11.147	13.287	42.138	11.990	12.245	12.500	12.500	43.402	44.704	46.045	46.045
1.3	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah/O rang/Tah un	11.000	11.333	11.319	1.361.330	1.430.665	1.500.000	1.500.000	11.499	11.681	11.866	11.866
1.4	Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran	a Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Miliar	250	71,24	94,6	800	950	1000	1000				
		b Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	2,45	155,446	3.000	8	9,5	10	10				
		c Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,50	2,89	2,91	2,89	2,45	2	2	2,85	2,79	2,74	2,74

RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR											PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR			
NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD	TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
Misi 2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia														
2.	Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM	a Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,82	71,34	71,39	72,53	73	73,5	73,5	71,66	71,93	72,20	72,20
		b Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88,41	88,76	88,74	90,62	91,03	91,5	91,5	88,87	88,99	89,12	89,12
2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	a Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05	9,20	9,21	9,35	9,42	9,5	9,5	9,26	9,30	9,35	9,35
		b Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81	12,82	12,83	14,05	14,34	14,63	14,63	12,84	12,85	12,86	12,86
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	68,06	68,14	68,22	69,32	69,66	70	70	68,32	68,41	68,51	68,51
2.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	76,50	82,67	n/a	82,7	83,85	85	85	84,12	85,59	87,09	87,09
Misi 3: Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik, dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan														
3	Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	a Indeks Gini	Poin	0,317	0,339	0,333	0,286	0,28	0,275	0,275	0,33	0,32	0,30	0,30
		b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,987	57,875	62,800	65,08	65,87	66,65	66,65	60,06	57,66	58,55	58,55
3.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	a Persentase panjang jalan kondisi baik	Persen	60,21	64,01	64,54	64,83	69,91	75	75	64,86	65,19	65,51	65,51
		b Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	Persen	76,20	74,01	77,34	92,07	96,03	100	100	77,76	78,18	78,60	78,60
		c Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh	Persen	34,75	19,27	19,27	11,58	5,79	0	0	18,31	17,39	16,52	16,52
		d Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)	Persen	99,84	98,13	98,81	99,87	99,88	100	100	98,86	98,91	98,96	98,96
3.2	Meningkatkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	a Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	61,98	92,57	93,46	93%	73%	72%	72%	90	90	90	90

RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR											PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR			
NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD	TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	hidup	b Indeks Kualitas Air	Poin	56,66	41,66	46	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	46	46,5	47	47
		c Indeks Kualitas Udara	Poin	96,35	87,64	99,72	Baik	Baik	Baik	Baik	90	91	93	93
		d Indeks Tutupan Lahan	Poin	47,71	47,71	47,71	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	47,71	48	50	50
Misi 4: Pembinaan Umat Beragama, Adat, Budaya, Pemuda dan Olahraga														
4	Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berbudaya	Angka Kriminalitas	Poin	0,16			0,1	0	0	0	0,16	0,16	0,16	0,16
4.1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	82,17	78,01	96,01	36	18	0	0	96,49	96,97	97,46	97,46
4.2	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	a Persentase wirausaha baru	Persen	NA			40	50	60	70	-	-	-	-
		b Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen			58,04					60	60	60	60
4.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	Atlet	231	152	152	289	300	380	450	154	155	157	157
4.4	Meningkatnya kelestarian adat dan budaya daerah	a Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	Even	3	3	-	5	5	6	6	-	-	-	-
		b Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen											
Misi 5: Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan, dan Bertanggung Jawab														
5	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	70	75	80	82	85	85	77	80	83	83
5.1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Predikat	C	CC	CC	BB	BB	A	A	CC	CC	B	B
5.2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan bebas KKN	Jumlah kasus korupsi	Kasus	4			1	0	0	0	0	0	0	0

RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR											PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR			
NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD	TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
5.3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	3,198	3,291		3,265	3,285	3,305	3,533	3,39	3,49	3,59	3,59

Sumber: hasil analisis, 2021



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan daerah bertujuan untuk memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan daerah. Pembangunan yang berkualitas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan daerah. Dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan daerah maka perlu dilakukan perumusan kebijakan publik, selanjutnya dalam perumusan kebijakan publik, salah satu hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Dalam suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah yang berasal dari permasalahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis baik berskala provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.



Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antara individu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini,” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2019, Kabupaten Barito Timur memiliki rasio gini sebesar 0,312 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang.

Meskipun nilai gini ratio berada dibawah nilai gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, gini ratio Kabupaten Barito Timur cenderung mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang hanya mencapai 0,307. Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah **“Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

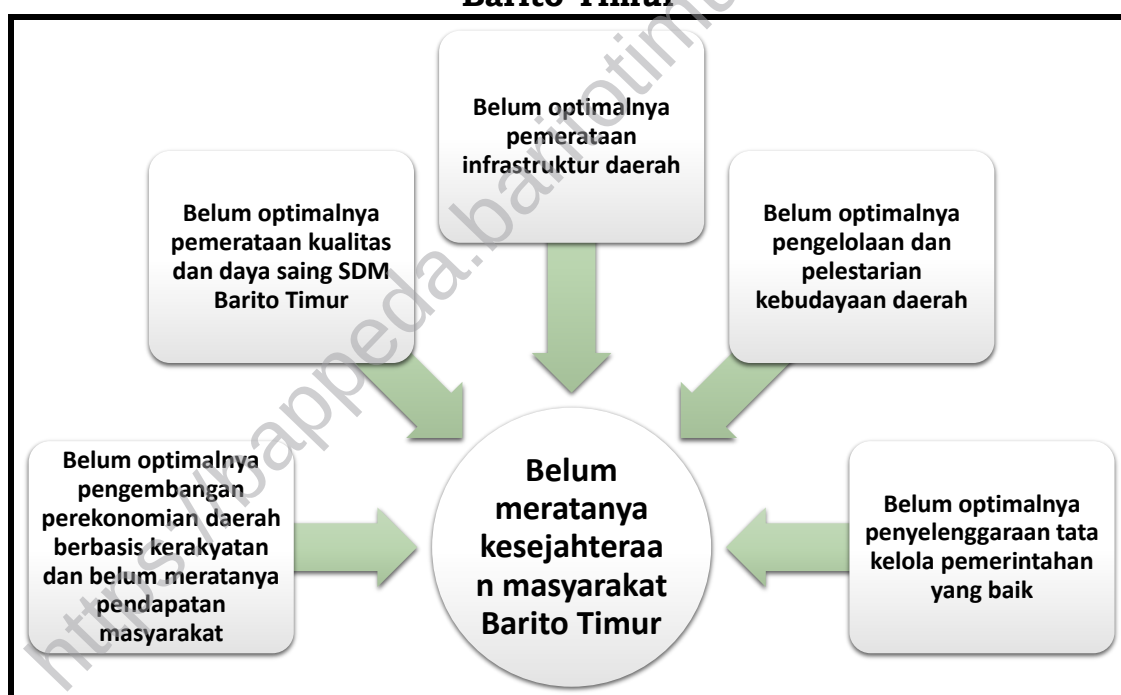
1. Fokus Ekonomi: Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat
2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar: Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan



3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur
4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah
5. Fokus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan kelima fokus permasalahan, maka akan diketahui fokus pembangunan Barito Timur dalam lima tahun kedepan. Melalui fokus pembangunan yang menjabarkan permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari permasalahan dari aspek urusan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Sehingga diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama, fokus permasalahan serta permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur yang disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 4.1
Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur



Sumber: hasil analisis, 2021



Fokus permasalahan dan permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar diatas mempunyai permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik per bidang urusan. Penjabaran permasalahan sebagai berikut.

4.1.1 Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

A. Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan dan Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat

Masalah pokok belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan

Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan, dimana 55,61 persen pekerja usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor ini. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan



inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur mencapai 5,25 persen. Angka ini menurun di tahun 2016 menjadi 5,16 persen. Meskipun mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi sebesar 5,98 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 5,45 persen. Lebih lanjut, LPE Kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 lebih rendah apabila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah (6,16 persen) di tahun 2019.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.



Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pengembangan Perekonomian Daerah
Berbasis Kerakyatan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan	Urusan Pertanian	Menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian
			Belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai
			Masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul
			Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Urusan perikanan dan Kelautan	Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan	Masih rendahnya tingkat produksi perikanan
			Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan
			Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan
	Urusan pariwisata	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur.	Belum tersedianya obyek wisata yang memadai
			Kurang maksimalnya aksesibilitas ke Obyek Wisata
			Kurang optimalnya sinergisitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata
			Kurang tersedianya sarana dan prasarana di Destinasi Wisata
			Kurang optimalnya informasi dan promosi potensi Pariwisata Kabupaten Barito Timur
			Kurang optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisata
	Urusan Koperasi dan UMKM	Menurunnya koperasi aktif dan belum optimalnya peranan UMKM dalam	Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat
			Belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		perekonomian kerakyatan	Masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik
			Jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan Penduduk asli
			Masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya
	Urusan Industri	Masih rendahnya kontribusi dan laju PDRB sektor industri kecil pengolahan	Belum maksimalnya inovasi produk hasil industri
			Akses pemasaran hasil industri masih terbatas
			Hasil industri belum berkualitas ekspor
	Urusan Perdagangan	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	Akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit
			Daya beli masyarakat masih rendah
			Jumlah pedagang masih rendah

Sumber: hasil analisis, 2021

2) Belum meratanya pendapatan masyarakat

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Barito Timur. Salah satu pendekatan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur dalam enam tahun terakhir sudah menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Timur sebesar 6,09 persen, atau turun dari tahun 2019 yang sebesar 6,32 persen. Sementara berdasarkan jumlahnya, banyaknya penduduk miskin di Barito Timur tahun 2020 adalah 7.876 orang. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,82 persen, maka posisi Barito Timur masih lebih tinggi.



Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	Urusan Sosial	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS	Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS
			Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum
			Belum adanya wadah sarana pembinaan/ pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan
	Urusan Pemberdayaan masyarakat desa		Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA
	Urusan Ketenagakerjaan	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran	Masih Kurangnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Belum Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			Belum Optimalnya pengawasan ketenagakerjaan
		Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Angkatan Kerja mengalami penurunan
			Jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan
			Belum Optimalnya Perluasan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (adanya gap lapangan kerja dan pencari kerja)
	Urusan Penanaman modal	Masih rendahnya iklim investasi	Banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar daerah
			Belum optimalnya proses perijinan usaha
			Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha

Sumber: hasil analisis, 2021

4.1.2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai



layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dirasakan pada masyarakat di daerah terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih belum merata.

A. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai berupa jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Masih tingginya kondisi jalan di Kabupaten Barito Timur dalam kondisi rusak dan rusak berat harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal ini diharapkan agar setiap wilayah di Kabupaten Barito Timur semakin mudah dijangkau, sehingga dapat meningkatkan pergerakan orang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong perekonomian daerah. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.



Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah perurusan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil	Meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat
			Belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah dan cenderung menurun
		Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi	Penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik belum memadai
		Masih rendahnya penanganan sampah	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (di kota) masih rendah
		Belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW	Adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketidaktertiban dalam penggunaan tanah
			Masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan
			Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota dan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota belum ditentukan
	Urusan perumahan dan pemukiman	Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan pemukiman	Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan
			Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum kemasan, isi ulang, dan leding
			Masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan
			Rumah tangga bersanitasi tidak layak masih banyak terdapat di perdesaan maupun perkotaan
			Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan Tempat Pembuangan Akhir berupa Tangki
			Belum ada sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolah, pembuangan (disposal), dan



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			sistem pakai ulang (reuse)
			Jaringan listrik dan komunikasi belum optimal terutama di pedesaan
			Menurunnya Jumlah Pelanggan Listrik
	Urusan perhubungan	Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil	Sarana dan prasarana perhubungan belum memadai
			kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara kawasan kota dan pedesaan
			Fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai masih kurang dan belum merata ke seluruh wilayah kab. Barito timur
			Pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai belum terlaksana dengan maksimal
	Urusan Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Masih lemahnya fungsi Pengawasan dan Penanganan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
			Belum adanya upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air
			Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi
			Pengelolaan sampah belum efektif dan efisien
			Meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem
			Beberapa perusahaan yang beroperasi belum mengantongi AMDAL dan belum memiliki izin lingkungan

Sumber: hasil analisis, 2021

4.1.3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di



berbagai sektor pembangunan daerah. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu Sumber Daya Manusia Barito Timur belum berdaya saing secara optimal.

A. Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Barito Timur

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (attitude) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2020. IPM Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 mencapai 69,71 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 71,39. Nilai IPM Kabupaten Barito Timur selama periode tersebut selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik, namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.



Dilihat dari permasalahan pokok sumber daya manusia, Barito Timur belum berdaya saing secara optimal. Hal ini dijelaskan melalui permasalahan dan akar masalah yang terkait dengan masalah pokok belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing SDM pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia Barito Timur”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Barito Timur	Urusan pendidikan	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar
			Masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan
			Masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan ke luar kota
	Urusan kesehatan	Masih rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Sarana dan prasarana penunjang kesehatan masih belum memadai
			Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata dan ada sebagian tenaga kesehatan masih belum terpenuhi (dokter gigi, perawat gigi, analisis kesehatan)
			Pencapaian pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah
			Proses pengadaan obat-obatan terkendala kebijakan
			Meningkatnya angka kesakitan (angka morbiditas)
			Minimnya kerjasama lintas sektor yang terkait pelaksanaan germas, serta informasi yang diberikan berkaitan dengan 12 indikator Germas tidak sampai kesemua lapisan masyarakat
			Masih cukup tingginya jumlah stunting
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan, kelurahan, dan desa
			Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan

Sumber: hasil analisis, 2021



4.1.4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi sering kali menyebabkan gesekan dalam masyarakat. Semua unsur perbedaan ini harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari fokus permasalahan keragaman budaya terdapat permasalahan pokok, yaitu belum terwujudnya manusia Barito Timur yang beragama dan berbudaya.

A. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah

Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena agama mempunyai peran yang penting sebagai penyelamat, perdamaian, kontrol sosial, pemupuk rasa solidaritas dan berfungsi sebagai sublimatif atau perubahan ke tingkat yang lebih baik. Sedangkan budaya adalah nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Dua hal ini berbeda dan butuh pendewasaan diri untuk meyatukan keduanya. Perbedaan pada bidang lainnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menyebabkan perpecahan yang mengganggu ketentraman dan keamanan.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 6 dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yaitu sebesar 141 pelanggaran pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Timur di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 224 pada tahun 2017. Jumlah kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 403 pelanggaran, sedangkan nilai terkecil se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dengan nilai IPM sebesar 38 pelanggaran.

Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat. Dengan ketentraman dan keamanan maka hidup masyarakat akan lebih



tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Dalam bidang ini, pembangunan di Kabupaten Barito Timur masih mempunyai kendala itu masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Pentingnya kenyamanan kota akan mempengaruhi investasi, perekonomian masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per-urusan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional	Masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional
			Masih kurangnya aktraksi budaya daerah
			urangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Nilai- Nilai Budaya Tradisional
			Masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kompleks situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma’anyan lawangan.
	Urusan Pemuda dan olahraga	Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
			Masih rendahnya prestasi pemuda olahraga
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan



Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Perlindungan Masyarakat		meningkatnya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja

Sumber: hasil analisis 2021

4.1.5. Fokus Permasalahan Birokrasi

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

A. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus



terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.6
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Baik”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Unsur Sekretariat Daerah, Pengawasan, Perencanaan, dan Keuangan	Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal
			Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal
			Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal
			Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa
			Penyusunan rencana, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara selaras dan terpadu
			Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optiml
			Rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Kinerja aparatur sipil Negara yang belum optimal	Masih Belum Seluruh Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Manajemen SDM Aparatur masih belum optimal
			Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
			Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur masih belum efektif.
	Urusan Kepegawaian dan Diklat		Urusan Komunikasi dan Informatika



4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan kondisi yang dialami secara global dan memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Barito Timur. Terdapat beberapa isu internasional yang perlu ditelaah sebab berdampak bagi pembangunan Kabupaten Barito Timur.

a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah membawa masalah kesehatan hingga sosial dan perekonomian bagi dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini jumlah penderita dan korban masih meningkat dan menyebar luas. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai Langkah telah dilakukan di hampir semua negara. Pembatasan sosial (*social distancing*), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun telah pernah dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem



keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional. Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi dengan segera, kondisi ini akan menjalar ke sektor keuangan, meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk mencegah hal tersebut, seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian.

Sejak penyebaran Covid-19 telah dilakukan berbagai langkah untuk menangani dampak negatif pada masyarakat dan memulihkan ekonomi. Langkah perluasan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan terdampak, termasuk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah juga mendapatkan dukungan pemerintah berupa penundaan pinjaman dan bantuan subsidi bunga pinjaman. Langkah ini diharapkan mampu menambah ketahanan dunia usaha menghadapi tekanan Covid-19 yang sangat berat.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang maka reformasi diarahkan



pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara. Dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Realokasi dan refokusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 dan masih berlanjut sampai tahun 2021 diharapkan dapat lebih mengarahkan pembangunan untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (*zero-based budgeting*), beorientasi hasil (*result-based budgeting*), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (*automatic stabilizer*) sebagai *shock-absorber* otomatis dalam menghadapi ketidakpastian. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. Sementara itu, kebijakan PNB 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNB. Sedangkan kebijakan sisi pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung *countercyclical* stabilisasi ekonomi yang dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Tahun 2021 menjadi tahun penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 sekaligus momentum yang tepat dalam melakukan reformasi struktural agar perekonomian Indonesia kembali pada tren pertumbuhan.

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals* (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf,



degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;



5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan



strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Barito Timur, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

c. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti



setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun juga mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu,



pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.



4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

**b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024**

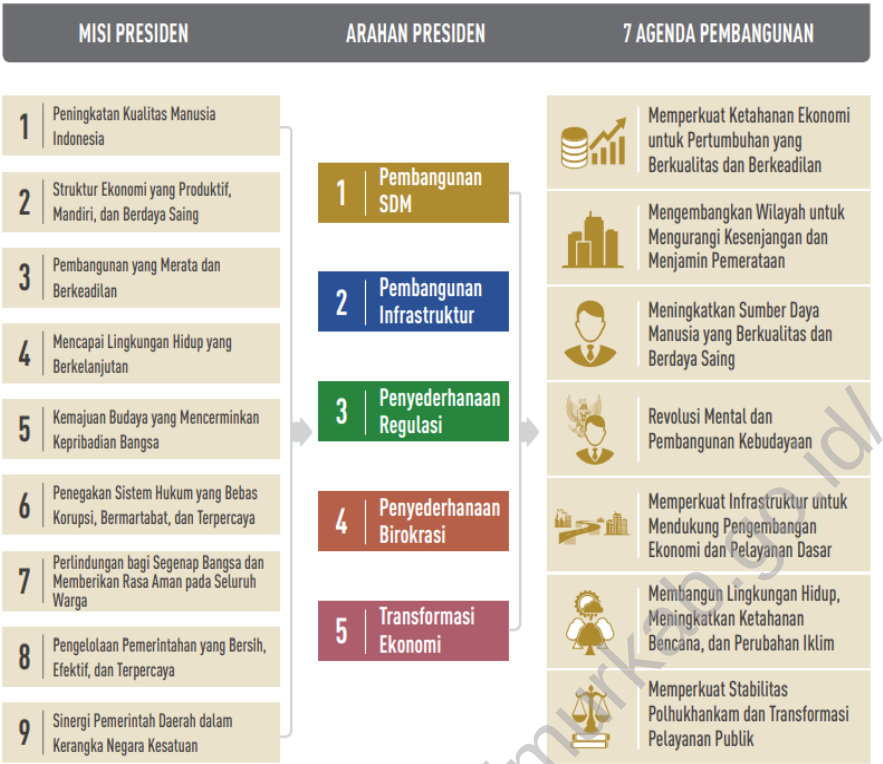
Visi Presiden menjadi visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

**”Visi Presiden Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**



Visi diterjemahkan ke misi pembangunan jangka menengah nasional. Visi dan misi RPJMN 2020–2024 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah:

Gambar 4.2
Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Adapun penjelasan dari masing-masing agenda pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas nasional setiap tahun dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun, diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan



nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Keempat pengarusutamaan (*mainstreaming*) tersebut, meliputi: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; dan 4) Transformasi Digital.



c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih lanjut, amanat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan beberapa peraturan menteri terkait yang mengatur standar teknis pelaksanaan SPM.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Standar Pelayanan Minimal dipilah menjadi SPM Daerah provinsi dan SPM Daerah kabupaten/kota. Adapun SPM untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar:

- a. Pendidikan Dasar
- b. Pendidikan Kesetaraan
- c. Pendidikan Kesetaraan

2. SPM Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pelayanan kesehatan balita
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
4. SPM Bidang Pendidikan
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
5. SPM Bidang Pendidikan
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. SPM Bidang Sosial
- Jenis pelayanan dasar:
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti



- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

d. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri, dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Ketiga elemen ini yaitu maju, mandiri, dan adil diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.



Misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2.3. Isu atau Kebijakan Daerah

Isu strategis atau kebijakan daerah merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Barito Timur. Isu strategis daerah atau kebijakan Kabupaten Barito Timur yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang antara lain telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur.

a. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2008 hingga tahun 2028. Visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2005-2025 ditetapkan sebagai berikut.

Berdasarkan kondisi diatas, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dimiliki, maka visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2004-2020 tidak



dilakukan revisi. Artinya visi pembangunan Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPJP tahun 2004-2020 akan tetap digunakan sebagai visi pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2008-2028, yaitu:

**“BARITO TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN
BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Rakyat.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban.
4. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan Dan Keberlanjutan SDA Dan Lingkungan Hidup.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan.

Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan terwujud masyarakat yang “Maju, Sejahtera” secara ekonomi dan non ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah “Gumi Jari Janang Kalalawah” yang artinya: Daerah yang Subur Makmur dan Sejahtera Untuk Selamanya.



Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018 – 2023 adalah memfokuskan pada daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan itu, kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat, terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi



perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

b. Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai **Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah** meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung pangan;



- e. Perwujudan kalimantan tengah sebagai lumbung energi;
- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, **Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi** terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung, Raya Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

- a. **Sistem jaringan transportasi darat:**

1) **Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan**, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

- ✓ Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:



Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

- ✓ Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:

Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km

- ✓ Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

- (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
- (2) Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- (3) Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- (4) Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- (5) Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
- (6) Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- (7) Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- (8) Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- (9) Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
- (10) Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- (11) Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- (12) Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- (13) Rikut Jawa (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- (14) Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:



✓ **Jaringan angkutan sungai dan danau:**

- (1) Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- (2) Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- (4) Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- (5) Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- (6) Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- (7) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;
- (8) Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- (9) Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- (10) Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- (11) Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai - Pagatan;
- (12) Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantan - Muara Sebangau;
- (13) Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- (14) Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
- (15) Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- (16) Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip – Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;



- (17) Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- (18) Anjir Kelampayan: Pulang Pisau - Mandomai;
- (19) Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
- (20) Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- (21) Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

✓ **Jaringan angkutan penyeberangan :**

- (1) Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- (2) Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- (3) Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- (4) Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

- 1) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
 - Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
 - Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang - Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
 - Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
 - Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
 - Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
- 2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:
 - Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
 - Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
 - Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.



- 3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

c. Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- ✓ Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- ✓ Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- ✓ Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- ✓ Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. Sistem jaringan transportasi udara.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya,
terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;

- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;



- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, meliputi;

- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
- ✓ Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- ✓ Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ✓ Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.



- 3) **Gardu Induk (GI)**, terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu
- 4) **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

- 1) **Sistem Jaringan Backbone;**
Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut
- 2) **Remote Metro Junction (RMJ);**
Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio
- 3) **Sistem Jaringan Akses**
Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

- 1) **Wilayah Sungai (WS)**, mencakup;
 - a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:
 - ✓ Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai;
 - ✓ Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;
 - b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.
 - c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:



- ✓ Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;

- a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tamba, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;
- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau,
- c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.



e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

3) **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari;

➤ **Daerah Irigasi (DI)**

- a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat** yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
- b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi**, meliputi:
 - ✓ Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Katingan, yaitu:
 - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
 - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)
- c) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten** meliputi:
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
 - ✓ Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
 - ✓ Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
 - ✓ Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha



- ✓ Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
- ✓ Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
- ✓ Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
- ✓ Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha

➤ **Daerah Rawa (DR)**

a) **Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:

- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)
- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).

b) **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:

- ✓ DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)
- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)



- ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),
- **Daerah Rawa Tambak**, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 4) **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
- ✓ pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
 - ✓ pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
 - ✓ pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
 - ✓ pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).
- 5) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:
- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
- ✓ Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai



- ✓ Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota

6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsor Tebing Sungai**, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsor Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

a. **kawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:

- 1) hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. **Non kawasan hutan** seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

1) **kawasan peruntukan pertanian** meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $\pm 187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas $178.572,86$ Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64.001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;



- d) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
 - e) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.
- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) **kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) **kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
- a) kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.



- 7) **kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **kawasan peruntukan technopark** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 10) **kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
 - a) kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ± 65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ± 600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha,



wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi
di 14 Kabupaten/Kota.

c. Telaahan RTRW Kabupaten Barito Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Untuk mencapai pola dan struktur ruang Kabupaten Barito Timur 2011-2031 diperlukan perwujudan RTRW Kabupaten Barito Timur yang diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Barito Timur.

Tabel 4.7
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur
Tahap II Tahun 2017-2021

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II 2017-2021
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman			
1	Peningkatan Fungsi PKL Tamiang Layang	Peningkatan kapasitas PDAM	Tamiang Layang	
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan	Tamiang Layang	
		Peningkatan jaringan drainase	Tamiang Layang	
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba	Tamiang Layang	
		Pembangunan fasilitas sosial dan umum	Tamiang Layang	
		Pembangunan kawasan taman kota	Tamiang Layang	
2	Peningkatan Fungsi PKLp	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Ampah	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
3	Ampah	Peningkatan daerah irigasi	Ampah	
		Pengembangan Puskesmas Rawap Inap	Ampah	
		Pembangunan sarana transportasi	Ampah	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Ampah	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Ampah	
	Peningkatan Fungsi PPK Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	Penyusunan RDTR	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Penyusunan peraturan zonasi	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan tata batas hutan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan fasilitas penunjang pertanian	Bambulung	
		Pembangunan gudang pengumpul pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Bambulung	
		Pembangunan jalan akses perkebunan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, air bersih, limbah, sampah, dan lain-lain).	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	
		Pengembangan Puskesmas	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, bersih, limbah, sampah, dan lain-lain).	
		Pengembangan sarana dan prasarana wisata		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II 2017- 2021
II Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi				
1	Peningkatan Jalan	Peingkatan kualitas ruas jalan Strategis Nasional		
2	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
3	Perbaikan Jalan	Perbaikan jalan lokal	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan	
		Pembangunan Terminal Tipe C	Taniran, Bentot, Hayaping, Bambulung	
4	Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga serta bandara	Pembangunan Pelabuhan khusus	Telang Baru	
		Dermaga Wisata Danau Undan	Benua Lima	
III Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air				
1	Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi Hulu Sungai, Anak Sungai dan Danau	Kabupaten Barito Timur	
		Pengamanan hulu sungai. Anak sungai, Danau	Kabupaten Barito Timur	
2	Irigasi	perbaikan irigasi teknis yang rusak	Kabupaten Barito Timur	
		pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
3	Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	
		Pembangunan bak penampung air	Seluruh kecamatan	
4	Penanganan longsor/banjir	Pembangunan Turap/Siring/ Bronjong	Kecamatan Pematang Karau,	
		Sosialisasi	Paku, Raren Batuah, dan Dusun Tengah	
IV Sistem Jaringan Prasarana Energi				
1	Peningkatan Energi	Optimalisasi pemanfaatan PLTD berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan	
		Perluasan layanan listrik	Kabupaten Barito Timur	
V Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi				
1	Pembangunan	Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kabupaten Barito Timur	
2	Penyusunan data base	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kabupaten Barito Timur	
VI Sistem Jaringan Prasarana Permukiman				
1	Peningkatan perbaikan permukiman	Perbaikan perumahan semi permanen/tidak permanen	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
2	Pembangunan prasarana pemukiman	Perumahan PNS	Tamiang Layang	
		Pembangunan perumahan perkotaan	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan IPAL	Tamiang Layang & Ampah	
		Pembangunan drainase	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	di seluruh PPK dan desa-desa	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

Tabel 4.8
Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur
Tahap II Tahun 2017-2021

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II	
				2017-2021	
I Perwujudan Kawasan Lindung					
1	Perwujudan Kawasan Lindung terhadap kawasan bawahannya	Mengendalikan kegiatan hutan agar tetap terpelihara:	Seluruh kecamatan Mangaris		
		a		Identifikasi dan inventarisasi data kawasan lindung	
		b		Mengembalikan dan menjaga kawasan lindung lainnya (kawasan arboretum)	
		c		Rehabilitasi dan konversi kawasan lindung	
		Meningkatkan serta mempertahankan luasan dan fungsi kawasan lindung:			
		a		Pemantauan dan pembatasan kegiatan hutan	
		b		Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi hutan	
		c		Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan	
		d	Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat		
		Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung:		Kabupaten Barito Timur	
		a	Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu		
		b	Kegiatan Rahabilitasi, Redeliniasi kawasan lindung		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		c	Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		
2	Kawasan Konservasi dan resapan air	Mengendalikan kegiatan kawasan agar tetap terpelihara:		Seluruh kecamatan	
		a	Identifikasi dan inventarisasi data kawasan konservasi		
		b	Rehabilitasi dan konversi kawasan konservasi		
		Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan			
		a	Pemantauan dan pembatasan kegiatan kawasan		
		b	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi dan resapan air		
3	Kawasan Lindung Setempat Sempadan Sungai	a	Pembangunan tanggul sungai	Seluruh kecamatan	
		b	Pemeliharaan tanggul sungai		
		c	Pemeliharaan tebing sungai		
		d	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai		
		e	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang di tepi sungai		
4	Sempadan Danau/Waduk	a	Penataan dan pemanfaatan kawasan danau/waduk	Seluruh kecamatan	
		b	Rehabilitasi dan konservasi kawasan danau/waduk		
		c	Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk		
		d	Pengembangan kegiatan ekonomi/wisata		
5	Kawasan Mata Air	a	Pemeliharaan kawasan mata air		
6	Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam	Mengendalikan kegiatan kawasan Taman Wisata Alam:		Seluruh kecamatan	
		a	Identifikasi dan inventarisasi data Taman Wisata Alam		
		b	Rehabilitasi dan konversi Taman Wisata Alam		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
7	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Mengendlikan kegiatan kawasan cagar budaya:		Seluruh kecamatan	
		a	Penyusunan peraturan zonasi		
		b	Rehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan		
		c	Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang		
8	Rawan Bencana Alam	Mitigasi bencana banjir & longsor adalah :		Kecamatan Pematang Karau, Petangkep Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raren	
		a	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya		
		b	Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi tebing sungai yang dekat dengan pemukiman		
		c	Pembangunan jalur evakuasi		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
			bencana alam	Batuah, dan Dusun Tengah	
		d	Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air		
		e	Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air		
		f	Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		
		g	Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		
		h	Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		
		i	Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor		
		j	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanahongsor		
II	Perwujudan Kawasan Budidaya				
1	Perwujudan HP	a	Pemetaan tata batas kawasan hutan produksi	Kabupaten Barito Timur	
		b	Identifikasi jenis dan kawasan hutan produksi		
		c	Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi		
		d	Pembangunan kerjasama pengelolaan kawasan hutan produksi		
		e	Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan		
2	Perwujudan Kawasan Pertanian	a	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kecamatan Paju Epat, Dusun Tengah, Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Timur, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi,		
		c	pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian (terminal agribisnis)		
		d	Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan		
		e	Pengembangan padi organik bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi		
		f	Pemberian insentif kepada petani/pengusaha bidang pertanian		
		g	Penguatan lembaga petani, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		
a	Perwujudan Pertanian Lahan Kering	a	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kecamatan Raren Batuah, Dusun	
		b	Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		c	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Tengah, Karusen Janang, Dusun Timur, Petangkep Tutui, Awang, Paju Epat	
		d	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		e	Penguatan kelembagaan petani serta pemodalan		
		f	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
b	Perwujudan Pertanian Lahan Basah	a	Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah, Dusun Tengah, Karusen Janang, Petangkep Tutui	
		b	Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		
		c	Penguatan kelembagaan dan pemasaran serta pemodalan		
		d	penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)		
3	Perwujudan Kawasan Perkebunan	a	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	
		b	Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		
		-	Subsistem Hulu : sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)		
		-	Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer		
		-	Subsistem Hilir (<i>Down Stream</i>) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan		
		c	Subsistem Kelembagaan (<i>Supporting Institution</i>) perbankan, transportasi.		
		d	Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Kebun)		
4	Perwujudan Kawasan Perikanan	a	Pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Paku	
		b	Peningkatan produksi perikanan		
		c	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung peternakan		
		d	Pengadaan bibit dan peralatan		
		e	Penyuluhan		
5	Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	a	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh wilayah	
		b	Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi		
		c	Melakukan kajian daya dukung		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II
				2017-2021
		lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan mineral		
		d Melakukan kajian suberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan		
		e Pengembangan dan Penataan Wilayah bidang pertambangan dan energi		
		f Pengembangan energi alternatif		
		g Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		
		h Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		i Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan		
		j pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif		
6	Perwujudan Kawasan Pariwisata	a Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Seluruh wilayah pariwisata	
		b Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		
		c Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		
		d Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		
		e Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu manajemen promosi pariwisata daerah		
		f Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		
		g Pembinaan Sumber Daya Insan Pariwisata (Sanggar dan Pesanggrahan)		
7	Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan		
		a Pembangunan perumahan pegawai	Tamiang Layang	
		b Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Ampah	
		c Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas	Seluruh Kecamatan	
		d Pembangunan jalan lingkungan	Seluruh Kecamatan	
		e Pembangunan sistem jaringan prasarana air minum	Seluruh Kecamatan	
		f Pengembangan sistem jaringan prasarana listrik	Seluruh Kecamatan	
		g Pengembangan sistem jaringan	Seluruh	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
			prasarana telekomunikasi	Kecamatan	
		h	Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan limbah	Seluruh Kecamatan	
		i	Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Kecamatan Pematang Karau,	
		j	Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana	Seluruh Kecamatan	
		Permukiman Perdesaan			
		a	Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan		
		b	Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya		
		c	Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Seluruh Kecamatan	
		d	Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah		
		e	Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman		
8	Sektor Pengairan	Pengendalian banjir dan konservasi sumber-sumber air melalui:		Kabupaten Barito Timur	
		a	Pembuatan Tabat		
		Pengembangan jaringan Irigasi			
		Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi			
9	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi	a	Fasilitiasi Kredit Usaha Rakyat	Seluruh Kecamatan	
		b	Fasilitasi kesehatan usaha dan permodalan		
		c	Fasilitasi jaminan keamanan investasi rakyat		
III	Sub Sektor Tata Ruang				
		a	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Barito Timur	
1	Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga				
a	Sub Sektor Pendidikan	a	Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang	
		b	Pembangunan SMU STANDAR NASIONAL/ INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		c	Pembangunan SMK STANDAR NASIONAL / INTERNASIONAL	Tamiang Layang	
		d	Pembangunan SMP/ sederajat	Kabupaten Barito Timur	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan		Lokasi	Tahap II
					2017-2021
		e	Pembangunan SD/ sederajat	Seluruh Kecamatan	
		f	Pembangunan TK	Seluruh Kecamatan	
		g	Rehabilitasi bangunan sekolah	Seluruh Kecamatan	
		h	Pemeliharaan gedung sekolah	Seluruh Kecamatan	
		i	Pembangunan ruang kelas	Seluruh Kecamatan	
b	Sub Sektor Kebudayaan	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan			
		a	Inventarisasi Keanekaragaman Kebudayaan	Kabupaten Barito Timur	
		b	Penggalian Seni Budaya Khas Daerah	Kabupaten Barito Timur	
c	Sub Sektor Olahraga	a	Pengembangan Stadion Olah Raga Standar Nasional	Tamiang Layang	

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031

Tabel 4.9
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Timur
Tahun 2011-2031

No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017-2021)
1	Perwujudan Kawasan Agropolitan	Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan irigasi teknis	Ampah dan Bambulung	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi,		
		komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan	Ampah dan Bambulung	
		Pengelolaan agrikultura dan agroindustri yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani.	Ampah dan Bambulung	
		Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis dan peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparatur)	Ampah dan Bambulung	
		Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan yang saling mendukung dan menguatkan termasuk pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata	Ampah dan Bambulung	
		Menjalin tersedianya sarana	Ampah dan	



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017- 2021)
		produksi dan permodalan pertanian.	Bambulung	
		Pengembangan kelembagaan petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi balai penyuluhan pengembangan terpadu.	Ampah dan Bambulung	
		Peningkatan perdagangan / pemasaran termasuk pengembangan terminal agribisnis dan pusat lelang/show room hasil pertanian.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.	Ampah dan Bambulung	
		Pengembangan percobaan / pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Ampah dan Bambulung	
2	Perwujudan Kawasan pertanian berkelanjutan dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis	Penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor.	Kabupaten Barito Timur	
		Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan penunjang	Kabupaten Barito Timur	
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian	Kabupaten Barito Timur	
		Peningkatan dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat)	Kabupaten Barito Timur	
3	Perwujudan Kawasan Pengembangan Peternakan	Pembangunan sarana dan prasarana inti kawasan peternakan	Kecamatan Tengah, Paju Epat, Raren Batuah, dan Pematang Karau, Dusun Dusun Timur	
		Peningkatan sarana prasarana transportasi kawasan		
		Peningkatan pelayanan prasarana (sanitasi, air bersih, drainase)		
		Pemasaran hasil produksi peternakan		
		Peningkatan sumberdaya manusia		
		Penyuluhan		
		Sosialisasi dan penyiapan masyarakat		
4	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan	Kabupaten Barito Timur	
		Pengembangan dan penataan wilayah bidang energi		
		Pengembangan energi alternatif		
		Melakukan kajian		



No.	Program/ Sektor / Sub Sektor	Sub Program / Kegiatan	Lokasi	Tahap II (2017- 2021)
		pengembangan energi alternatif		
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		
5	Perwujudan Kawasan Sosial Budaya	Penyusunan masterplan kawasan Situs bersejarah Brohong	Dusun Tengah	
		Penyusunan peraturan zonasi		
		Penyusunan DED		
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Situs		
		Pemeliharaan kawasan		
6	Perwujudan Kawasan Perkotaan	Peningkatan peran dan pelayanan pasar menjadi pasar regional	Ampah	
		Pembangunan perguruan tinggi	Tamiang Layang	
		Peningkatan sekolah menengah umum menjadi bertaraf internasional	Tamiang Layang	
		Peningkatan pelayanan sanitasi kebersihan perkotaan	Tamiang Layang dan Ampah	
		Pembangunan gedung olah raga & kesenian	Tamiang Layang	
		Pembangunan pusat pertokoan	Tamiang Layang & Ampah	
		Peningkatan RSUD	Tamiang Layang	
		Pembangunan perumahan karyawan	Tamiang Layang	
7	Perwujudan Kawasan Tambak	pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan	Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan		
		Bantuan bibit dan peralatan		
		Penyuluhan		
8	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Kecamatan Dusun Tengah	
		Penyediaan peralatan energi listrik dan sumberdaya manusia		
		Pembangunan sarana prasarana pengembangan kawasan		
9	Perwujudan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Penyusunan peraturan zonasi kawasan	Desa Siong Kecamatan Paju Epat	
		Pembangunan gedung pusat penelitian		
		Pengembangbiakan jenis anggrek		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan		

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2011-2031



4.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini akan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Analisis Capaian Kabupaten Barito Timur terhadap Indikator TPB

Secara umum terdapat sekitar 40% dari 220 indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang telah diisi. Sementara 60% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten telah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur yaitu 49 indikator atau sekitar 22,27% telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 39 indikator atau sekitar 17,73% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 132 indikator atau 60% belum ada datanya.

Tabel 4.10
Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

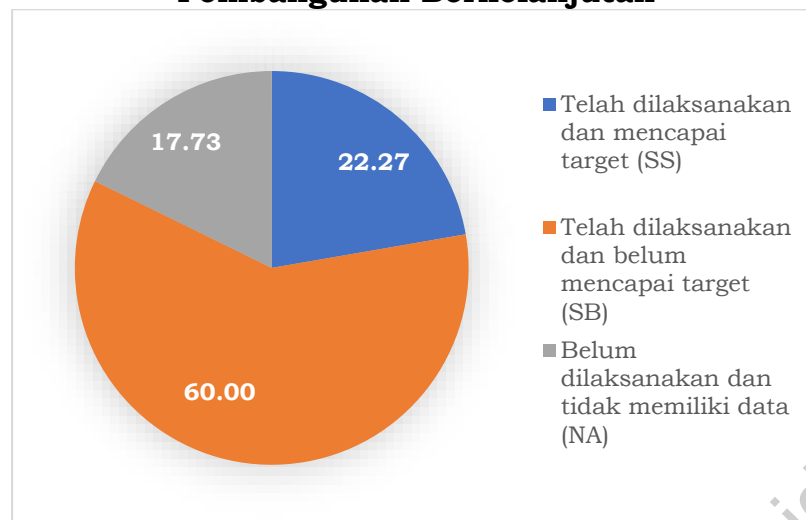
No	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Telah dilaksanakan dan mencapai target (SS)	49	22,27%
2.	Telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	39	17,73%
3.	Belum dilaksanakan dan tidak memiliki data (NA)	132	60%
	Jumlah	220	100%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi ketercapaian target TPB, dimana persentase indikator TPB yang tidak memiliki data mencapai 63,30%. Indikator-indikator tersebut perlu dijadikan perhatian sebagai upaya untuk mengukur dan mendokumentasikan data capaian dengan lebih akurat.

Gambar 4.3
Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Secara lebih rinci, total indikator dari masing – masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.11
Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB

TPB	SS	SB	NA	Ketercapaian	Total Indikator
1. Tanpa kemiskinan	5	4	15	20,83	24
2. Tanpa kelaparan	7	0	4	63,64	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	13	10	32,35	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	3	7	23,08	13
5. Kesenjaraan Gender	1	0	13	7,14	14
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	0	17	5,56	18
7. Energi Terjangkau	0	0	2	0,00	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	7	7	5	36,84	19
9. Infrastruktur	4	0	9	30,77	13
10. Berkurangnya kesenjangan	2	4	5	18,18	11
11. Kota dan Permukiman yang berlanjut	2	0	11	15,38	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	0	1	4	0,00	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	0	0	2	0,00	2
15. Ekosistem Daratan	1	0	3	25,00	4
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	3	1	17	14,29	21
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	6	8	12,50	16
Total	49	39	132	22,27	220

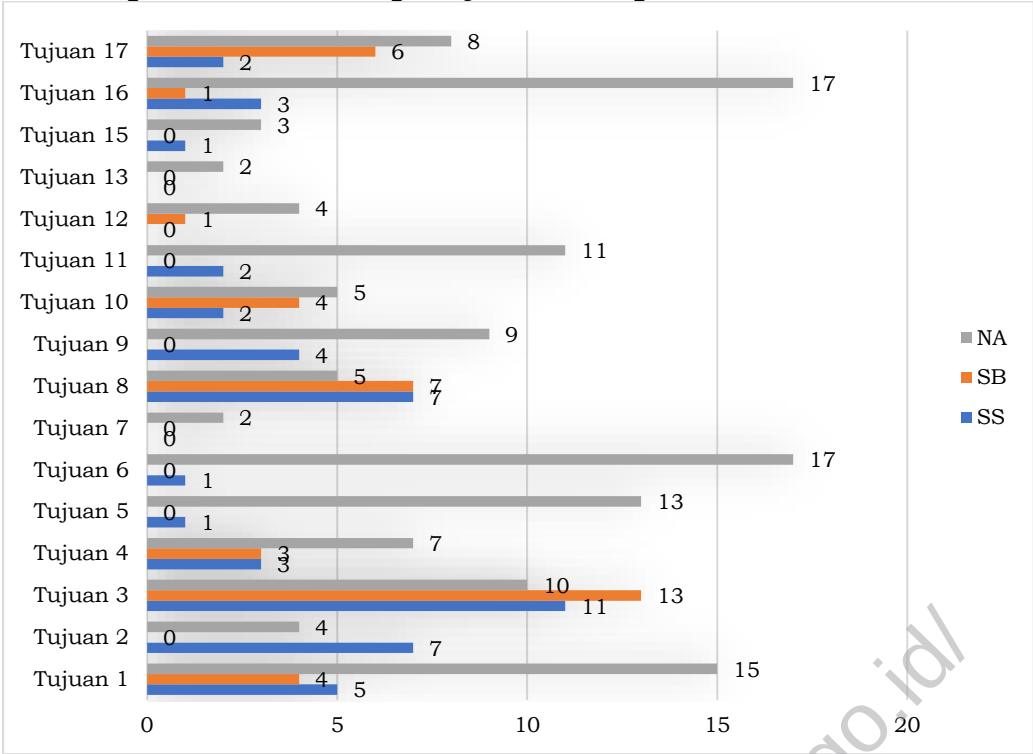
Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Ketercapaian indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang sudah mencapai 30% terdiri dari TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Sedangkan untuk indikator TPB lainnya secara keseluruhan masih dibawah 30%, total ketercapaian secara keseluruhan semua indikator TPB adalah 22,27%. Indikator TPB Kabupaten Barito Timur yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 02 (Tanpa Kelaparan) dengan jumlah 7 indikator dari 11 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak terdapat pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh) dengan jumlah 17 indikator dari 21 indikator. Indikator TPB yang memiliki kriteria tidak adanya data (N/A) terbanyak, yakni TPB 06 dan TPB 16 dengan jumlah 17 indikator. Total pencapaian indikator untuk masingmasing tujuan dalam TPB beserta



dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 4.4
Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Barito Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

b. Hasil Analisis Capaian OPD Kabupaten Barito Timur terhadap indikator TPB

- 1) Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar sosial**
- Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, adalah Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 5. Total jumlah indikator pada pilar sosial adalah 96 indikator, dengan indikator tercapai sebanyak 28 indikator. Berikut merupakan capaian TPB dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 4.12
Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD

No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1	0	0
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur	1	0	5
3.	Dinas Kesehatan	20	13	7

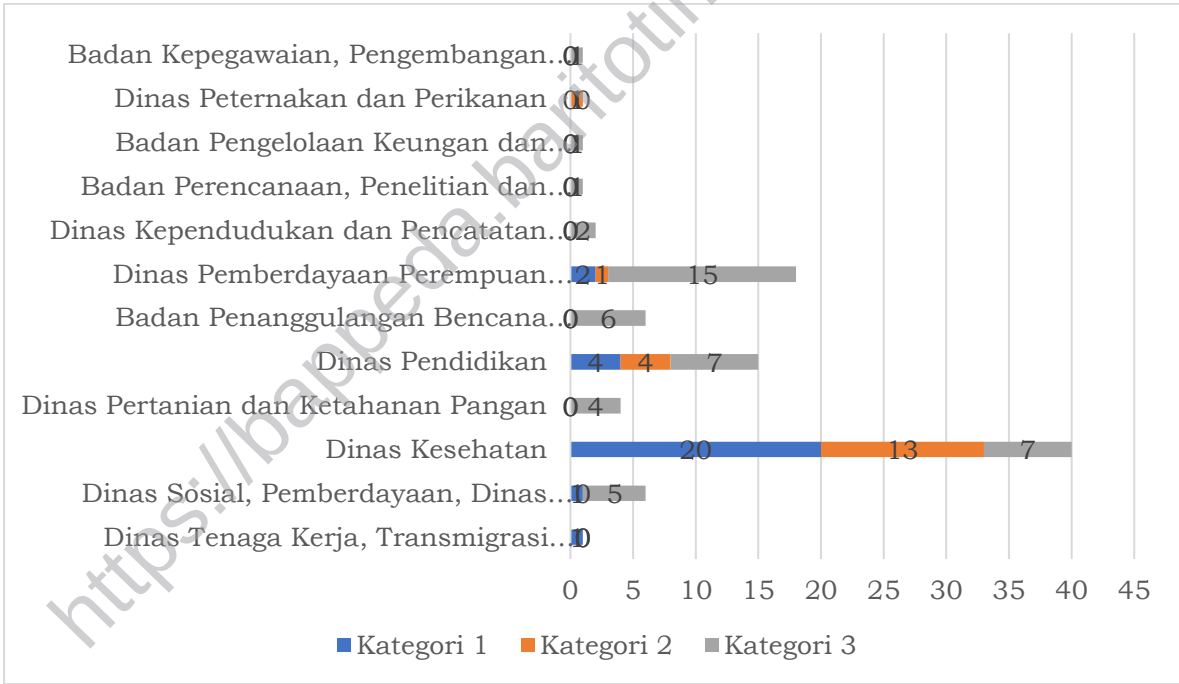


No	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	4
5.	Dinas Pendidikan	4	4	7
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0	0	6
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1	15
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2
9.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan	0	0	1
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
11.	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	1	0
12.	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	1

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 12 OPD yang memiliki wewenang pada pilar sosial. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang telah menyelesaikan indikator terbanyak, yaitu 20 indikator. Total indikator yang telah diselesaikan dalam pilar sosial ini sebanyak 28 indikator, yang belum diselesaikan sebanyak 19 indikator dan indikator TPB yang belum memiliki data dalam pilar sosial sebanyak 49 indikator.

Gambar 4.5
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



2) **Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar lingkungan**

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15. Total jumlah indikator pilar lingkungan adalah 42 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 4.13
Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD

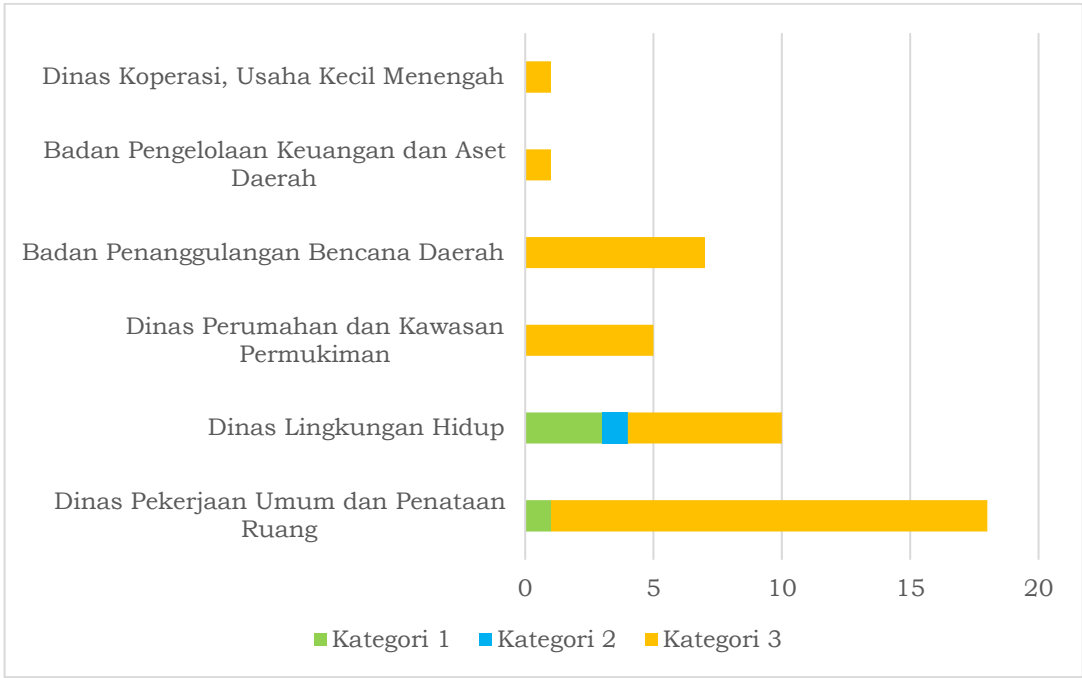
No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	17
2	Dinas Lingkungan Hidup	3	1	6
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	5
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	7
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0	0	1

Sumber: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 OPD yang berwenang atas pilar lingkungan dengan 6 tujuan. Dimana indikator yang telah diselesaikan sebanyak 4 indikator dari total indikator pilar lingkungan. Indikator yang belum diselesaikan sebanyak 1 indikator dan indikator yang tidak memiliki data pada pilar lingkungan sebanyak 37 indikator dari indikator keseluruhan.



Gambar 4.6
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

3) Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17. Total jumlah indikator pada pilar ekonomi adalah 61 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah Terkait).

Tabel 4.14
Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2
2	Badan Pusat Statistik	6	6	6
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	3	4	2
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	0	0	6
5	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur	3	2	0
7	Dinas Perhubungan	0	0	4
8	Dinas Pendidikan	0	0	1
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1

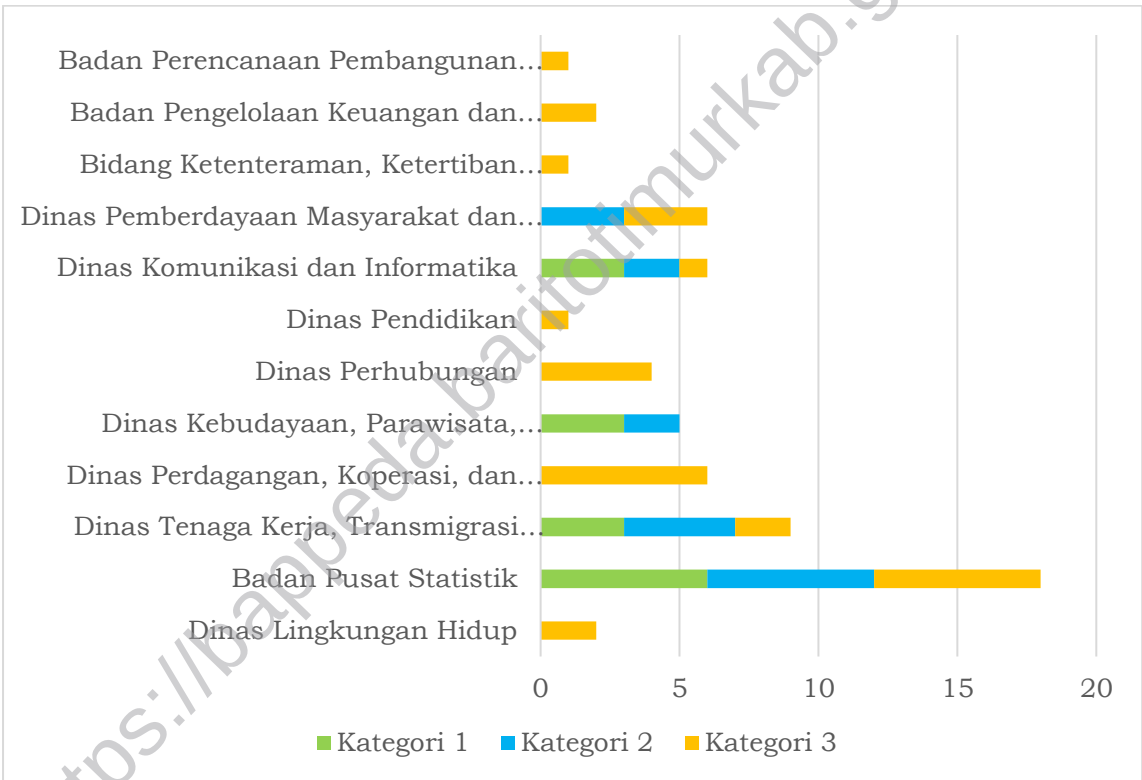


No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	3	3
11	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	1
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	2
13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0	0	1

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, OPD terkait yang berwenang atas pilar ekonomi terdiri dari 13 OPD. Masing-masing OPD memiliki wewenang terhadap indikator TPB dimana, total indikator yang telah diselesaikan adalah 15 indikator, sedangkan indikator TPB yang belum diselesaikan adalah 17 indikator, dan indikator yang belum memiliki data adalah 29 indikator.

Gambar 4.7
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



4) **Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar hukum**

Pilar Hukum hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 dengan total indikator 21 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB yang oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

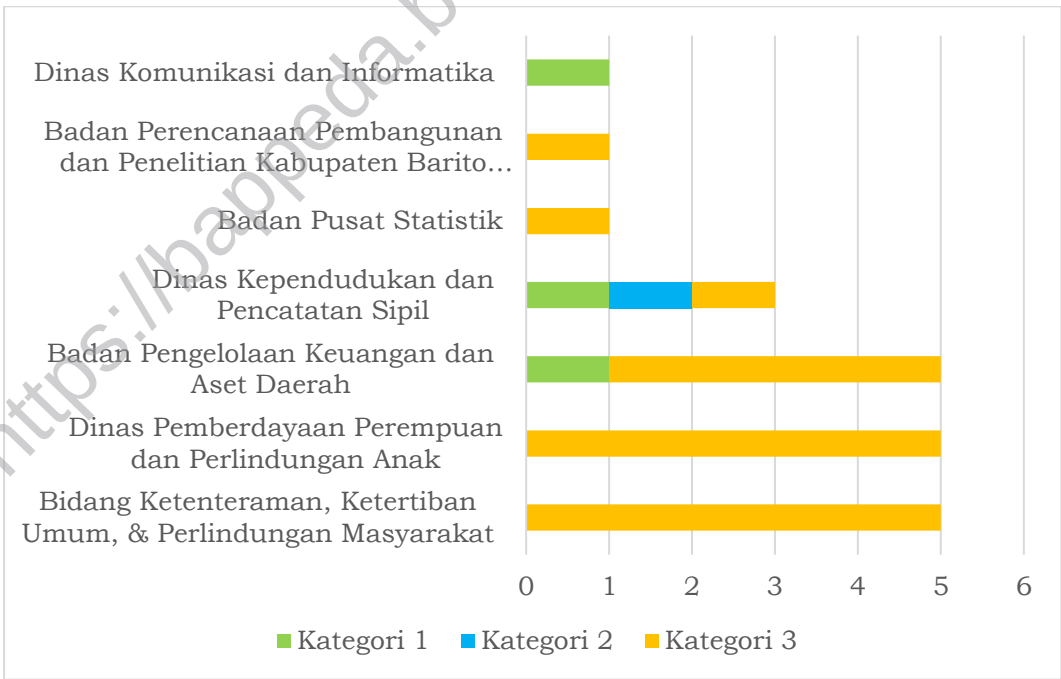
Tabel 4.15
Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	5
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	5
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	4
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1
5	Badan Pusat Statistik	0	0	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Barito Timur	0	0	1
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	0

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator TPB yang telah selesai ada 3 indikator dari total indikator pilar hukum. Capaian indikator yang belum terselesaikan ada 1 indikator dan indikator yang belum memiliki data adalah 17 indikator dari total indikator pilar hukum.

Gambar 4.8
Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum





*Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur
Tahun 2021-2023*

5) Isu Strategis TPB

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta konsultasi publik yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa Kabupaten Barito Timur memiliki tujuh isu pembangunan prioritas, di antaranya:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01);
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (TPB 02);
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (TPB 03);
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04);
5. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06);
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08);
7. Mengurangi ketimpangan (TPB 10);
8. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11).

6) Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil integrasi keterkaitan dengan tujuan pembangunan dengan indikator TPB yang relevan maka didapatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus Kabupaten Barito Timur adalah:

TPB 1 Tanpa Kemiskinan

TPB 2 Tanpa Kelaparan

TPB 4 Pendidikan Berkualitas

TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



TPB 15 Ekosistem Daratan

Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur adalah mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023 untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS, sehingga isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Bagian dari KLHS yang diadaptasi meliputi:

1. Permasalahan di Kabupaten Barito Timur yang selaras dengan sasaran dan target sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD
2. Rumusan alternatif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD
3. Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023.

Pemberian rumusan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai. Rekomendasi diuraikan untuk setiap TPB prioritas di Kabupaten Barito Timur pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.16
Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial
					Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin
					Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial
		Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.
					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	perkotaan		
		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perencanaan tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	
		Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan	Program perencanaan tenaga kerja	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		jenis kelamin dan kelompok umur	kelamin dan kelompok umur	tenaga kerja pada usia produktif		Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
		Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
		Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
				Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata Program peningkatan daya tarik pariwisata	
				Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	
		Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
15	Ekosistem Darat	Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan berkualitas baik, terutama melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, khususnya hutan di Kabupaten Barito Timur	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, penghentian deforestasi, dan pemulihan lahan kritis.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang tersinkronisasi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan evaluasi lingkungan hidup dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih rencana dan perizinan antar tingkat pemerintahan yang dapat mengganggu keberjalanan pembangunan yang berkelanjutan.
				Peningkatan pengelolaan DAS, pengelolaan	Program Pengelolaan Hutan	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				kawasan hutan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi ekosistem yang berkelanjutan;
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2. Pengendalian dan pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan rehabilitasi hutan serta sertifikasi hutan;
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	3. Integrasi program konservasi sumber daya air atau DAS terpadu dan konservasi sumber daya air tanah;
					Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	
				Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam.
				Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Program Pendidikan	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				dan perhutanan sosial	dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Tersedianya data dan informasi yang handal mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur	Ketersediaan data mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur masih minim.	Peningkatan pengadaan, pemanfaatan, dan publikasi data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penelitian dan pengembangan daerah bidang lingkungan hidup dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas dan tersinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial
					Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
					Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial
		Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan	Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarkat
					Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masvarakat



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Meningkatnya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, serta pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK.
					Program pembinaan Keluarga Berencana (KB).	
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan pada kegiatan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	posyandu dan penyuluhan imunisasi.
			Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu gizi ibu hamil, bayi, dan balita dengan pemenuhan upaya kesehatan melalui pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan ibu hamil, bayi dan balita dengan: 1. Penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. 2. Penanganan kerawanan pangan. 3. Pengawasan keamanan pangan segar. 4. Peningkatan ekonomi keluarga.
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Mengakhiri epidemi dan penyakit menular.	Tingginya prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan
	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular.			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				masyarakat		kesehatan penyakit menular dan tidak menular, serta pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, tidak menular, dan epidemi
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
				Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	Program penelitian dan pengembangan daerah.	Penelitian dan pengembangan daerah dalam hal penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	
				Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular dan epidemi dengan: 1. Penyelenggaraan penyuluhan
					Program pemberdayaan sosial.	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	terkait penyakit menular dan epidemi dan cara pencegahannya. 2. Pemberdayaan peran masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penularan. 3. Peningkatan ketertiban dan penegakkan aturan tentang pencegahan penularan.
				Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	
			Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat dengan pemberdayaan masyarakat dalam KIE perilaku hidup bersih dan sehat.
				Program pemberdayaan sosial.	
	Mengurangi tingkat kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Masih tingginya kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan pandemi dengan cara: a. pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). b. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, dan epidemi. 2. Pembinaan
	Mengurangi persentase penduduk < 18 tahun yang merokok	Masih tingginya Persentase penduduk < 18 tahun yang merokok		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	
	Mengurangi tingkat Prevalensi tekanan darah tinggi	Masih tingginya tingkat prevalensi tekanan darah tinggi		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
	Mengurangi tingkat Prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun	Masih tingginya tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	
	Meningkatkan angka Prevalensi penggunaan metode	Masih rendahnya angka prevalensi penggunaan metode			



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi. 3. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK
		Meningkatkan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Masih rendahnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	
		Meningkatkan cakupan jaminan Kesehatan nasional	Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan nasional		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	
4	Pendidikan Berkualitas	Mencapai cakupan Kesehatan universal, Termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan dasar



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
						dan reproduksi.
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.
					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata
		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Peningkatan akses masyarakat terhadap air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			sanitasi layak.	bersih baik perdesaan maupun perkotaan		rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja forma	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perencanaan tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa	Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	
		Mengurangi tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
		Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Meningkatkan Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
				Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	
				Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
					Program pengembangan kemitraan	
		Meningkatkan jumlah Wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
10	Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Tingginya jumlah daerah tertinggal yang belum terentaskan.	Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan	Program Penataan Desa	Fasilitas kerjasama antar desa dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
			Masih banyaknya jumlah desa tertinggal.	Penanganan kemiskinan terpadu lintas sector berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang terkini dan valid.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal masih tinggi		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pendataan penduduk miskin dan pengelolaan data fakir miskin di desa untuk pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023



4.2.5. Telaahan RPJMD Daerah Sekitar

Secara administratif, Kabupaten Barito Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan serta Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Kalimantan Selatan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan ketiga kabupaten. Berikut ini adalah telaah isu atau kebijakan strategis Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Uraian masing-masing kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten disajikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah: “Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa”.

Misi pembangunan dari visi di atas sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi



seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Pemerataan infrastruktur wilayah
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram
4. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung ekonomi unggulan daerah
6. Peningkatan partisipasi publik
7. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

b. Kabupaten Tabalong

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023 adalah: “Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera Dan Mandiri”.

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong didukung oleh 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah



Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai meliputi:

- a. Strategi 1: Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamais
- 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat.

- b. Strategi 2: Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- c. Strategi 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Arah Kebijakan: Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat

- d. Strategi 4: Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Arah Kebijakan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

- e. Strategi 5: Penanggulangan kemiskinan yang terpadu

Arah Kebijakan: Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin

- f. Strategi 6: Peningkatan pendapatan riil per kapita

Arah Kebijakan: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja

- g. Strategi 7: Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan

- h. Strategi 8: Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan keluarga sejahtera.



- i. Strategi 9: Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian.
- 2) Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah.

- j. Strategi 10: Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan

Arah Kebijakan: Meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan

- k. Strategi 11: Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen usaha.
- 3) Meningkatkan pengembangan IKM

- l. Strategi 12: Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dan merata

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
- 2) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sanitasi
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air.

- m. Strategi 13: Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis
- 3) Mendorong upaya penurunan emisi

- n. Strategi 13: Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.



- 2) Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- o. Strategi 14: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik
Arah Kebijakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.
 - 2) Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan.
- p. Strategi 15: Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik
Arah Kebijakan: Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI).
- q. Strategi 16: Perwujudan manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Arah Kebijakan:
 - 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan lintas sektor.
 - 2) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

c. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur. Visi bupati dan wakil bupati untuk periode 2017-2022 adalah: “Hulu Sungai Utara MANTAP”.

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis, dan Produktif. Adapun Misi yang mendukung Visi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumber daya lokal dengan berlandaskan potensi daerah;
4. Membangun infrastuktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal;
5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memerhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah
2. Peningkatan sistem pemerintahan yang berkualitas, efektif, dan efisien
3. Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan
4. Peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah
6. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Pemantapan integrasi ekonomi anta sektor primer, sekunder dan tersier
8. Pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian, dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya
9. Penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
10. Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan MDG's
11. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan
12. Pemantapan pemahaman dan pengamalan serta layanan keagamaan
13. Penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata
14. Peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan



15. Peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya
16. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem rawa

4.2.6. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional dan regional, isu dan kebijakan daerah, serta telaahan RPJMD daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Barito Timur pada periode pembangunan 2018-2023 sebagai berikut:

a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

b. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.



Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

c. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan,



drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

d. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

e. Pelestarian lingkungan hidup

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem



lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hail alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

f. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal daerah

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan). Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Maanyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ejambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, Isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Maanyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk menikmati kebudayaan lokal daerah. Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi



wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

g. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Kabupaten Barito Timur dikatakan belum melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting diperhatikan bahwa status ini seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dibutuhkan sejumlah program perangkat daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program perangkat daerah memuat seluruh program yang dibutuhkan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rencana alokasi anggaran untuk belanja program perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel 7.1.

Dalam melaksanakan program-program tersebut dibutuhkan anggaran untuk mencapai kinerja outcome dari setiap program. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program. Pagu anggaran untuk setiap program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun merupakan akumulasi dari kebutuhan anggaran kegiatan (dan sub kegiatan pada masing-masing program yang dimuat dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Secara keseluruhan, rencana program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Buku II Perubahan RPJMD.

Penyajian program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Program perangkat daerah **sebelum** penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, meliputi program tahun 2019 dan 2020. Program-program tersebut disajikan berdasarkan realisasi APBD tahun 2019 dan 2020, sebab dokumen ini merupakan Perubahan RPJMD.



- b. Program perangkat daerah **setelah** penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang selanjutnya dimuktahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, meliputi program tahun 2021 sampai dengan 2023.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
2	BELANJA	876.574.472.516	783.521.732.107			
2.1	Belanja Tidak Langsung	498.945.329.250	501.019.001.191			
2.1.1	Belanja Pegawai	332.929.510.237	311.994.623.753			
2.1.3	Belanja Subsidi	600.000.000	599.999.999			
2.1.4	Belanja Hibah	12.175.400.000	17.232.460.000			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	567.470.000	528.400.000			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	152.672.949.013	161.553.421.509			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		9.110.095.929			
2.2	Belanja Langsung	377.629.143.266	282.502.730.916			
2.2.1	Belanja Pegawai	67.640.587.583	65.332.978.621			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.940.509.290	145.037.200.809			
2.2.3	Belanja Modal	117.048.046.391	72.132.551.485			
5	BELANJA			865.793.820.103	921.558.104.388	943.084.417.460
5.1	Belanja operasi			594.144.730.584	642.778.049.277	661.716.607.064
5.1.01	Belanja pegawai			321.078.696.472	329.105.663.884	338.514.678.075
5.1.02	Belanja barang dan jasa			236.752.136.323	277.358.487.604	286.888.031.200
5.1.03	Belanja bunga			-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi			600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.1.05	Belanja hibah			35.015.910.789	35.015.910.789	35.015.910.789
5.1.06	Belanja bantuan sosial			697.987.000	697.987.000	697.987.000
5.2	Belanja modal			100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667
5.2.1	Belanja Modal			100.985.572.080	103.510.211.382	106.097.966.667
5.3	Belanja tidak terduga			9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929
5.3.1	Belanja tidak terduga			9.110.095.929	9.110.095.929	9.110.095.929
5.4	Belanja transfer			161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800
5.4.01	Belanja bagi Hasil			-	-	-
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan			161.553.421.509	166.159.747.800	166.159.747.800

Sumber: hasil analisis, 2021



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Dampak (*impact*) pembangunan menjadi komponen penting dalam arsitektur kinerja, sebab *impact* merupakan kinerja tertinggi yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah sampai akhir periode RPJMD. Indikator kinerja sasaran RPJMD akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam mencapai sebuah target IKU umumnya lintas perangkat daerah atau lintas urusan (*cross cutting*) sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Penentuan target kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 pada Perubahan RPJMD ini mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sosial yang berkembang sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berikut ini disajikan penetapan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi		Target Capaian		Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	LPE sektor Pertanian	persen	4,41	4,59	3,15	3,11	3,17	3,24	3,24
2	LPE sektor Industri Pengolahan	persen	5,84	5,71	3,68	2,92	2,31	1,83	1,83
3	PAD sektor pariwisata	rupiah		8.800.000	64.683.000				
4	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	orang	11.147	13.287	42.138	43.402	44.704	46.045	46.045
5	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	11.000	11.333	11.319	11.499	11.681	11.866	11866,24
6	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Miliar	250	71,24	94,6		99,7	105,8	105,8
7	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	2,45	155,446	300		321	386	386
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,5	2,89	2,91	2,85	2,79	2,74	2,74
9	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,05	9,2	9,21	9,26	9,30	9,35	9,35
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,81	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86	12,86
11	Angka harapan hidup	tahun	68,06	68,14	68,22	68,32	68,41	68,51	68,51
12	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	76,5	82,67		84,12	85,59	87,09	87,09
13	Persentase panjang jalan kondisi baik	persen	60,21	64,01	64,54	64,86	65,19	65,51	65,51
14	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	persen	76,2	74,01	77,34	77,76	78,18	78,60	78,60
15	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh	persen	34,75	19,27	19,27	18,31	17,39	16,52	16,52
16	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)	persen	99,84	98,13	98,81	98,86	98,91	98,96	98,96
17	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	61,98	92,57	93,46	90	90	90	90
18	Indeks Kualitas Air	poin	56,66	41,66	46	46	46,5	47	47



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi		Target Capaian		Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
19	Indeks Kualitas Udara	poin	96,35	87,64	99,72	90	91	93	93
20	Indeks Tutupan Lahan	poin	47,71	47,71	47,71	47,71	48	50	50
21	Persentase konflik yang diselesaikan	persen	82,17	78,01	96,01	96,49	96,97	97,46	97,46
22	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen			58,04	60	60	60	60
23	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	orang	231	152	152	154	155	157	157
24	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen							
25	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	predikat	C	CC	CC	CC	CC	B	B
26	Jumlah kasus korupsi	kasus	4			0	0	0	0
27	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	3,198	3,291		3,39	3,49	3,59	3,59

Sumber: hasil analisis, 2021



Dalam dokumen Perubahan RPJMD ini memuat kinerja dampak (*impact*) yaitu kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Indikator Kinerja *impact* digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dimuat juga kinerja hasil (*outcome*) yakni keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja *outcome* digunakan untuk mengukur kinerja program perangkat daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan juga beberapa indikator makro yang menjadi tolok ukur penilaian dari Pemerintah Pusat. Indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,34	71,39	71,66	71,93	72,20	72,20
2	Angka kemiskinan (%)	6,32	6,09	5,91	5,73	5,42	5,42
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,89	2,91	2,85	2,79	2,74	2,74
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45	-2,73	2,05	2,86	4,01	4,01
5	Pendapatan per kapita/PDRB ADHB per kapita (juta Rp)	59,5	54,56	55,65	56,76	57,90	57,90
6	Pendapatan per kapita/PDRB ADHK per kapita (juta Rp)	41,99	39,81	40,21	40,61	41,02	41,02
7	Gini Ratio (poin)	0,339	0,333	0,33	0,32	0,30	0,30

Sumber: hasil analisis, 2021

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam RPJMD. Dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode Perubahan RPJMD yakni tahun 2019 sampai dengan 2023, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan tingkat dampak (*impact*) dan hasil (*outcome*).



Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur ini dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Indikator-indikator kinerja pada aspek ini merupakan indikator kinerja tingkat dampak (*impact*) baik berupa indikator kinerja tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, maupun indikator kinerja tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Indikator kinerja pada aspek pelayanan umum. Indikator-indikator kinerja pada aspek ini adalah indikator kinerja tingkat hasil (*outcome*) yang merupakan indikator kinerja program.



Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,71	5,45	-2,73	2,05	2,86	4,01	4,01	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
2	Persentase penduduk miskin	persen	6,56	6,32	6,09	5,91	5,73	5,42	5,42	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
3	LPE sektor Pertanian	persen	4,41	4,59	3,15	3,11	3,17	3,24	3,24	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
4	LPE sektor Industri Pengolahan	persen	5,84	5,71	3,68	2,92	2,31	1,83	1,83	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
5	PAD sektor pariwisata	rupiah		8.800.000	64.683.000					Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
6	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	orang	11.147	13.287	42.138	43.402	44.704	46.045	46.045	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
7	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Miliar	250	71,24	94,6	94,6	96	96	96	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
8	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	2,45	155,446	3000	3000	3000	3000	3000	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,5	2,89	2,91	2,85	2,79	2,74	2,74	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	70,82	71,34	71,39	71,66	71,93	72,20	72,20	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	88,41	88,76	88,74	88,87	88,99	89,12	89,12	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
12	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,05	9,2	9,21	9,26	9,30	9,35	9,35	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
13	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,81	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86	12,86	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
14	Angka harapan hidup	tahun	68,06	68,14	68,22	68,32	68,41	68,51	68,51	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
15	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	76,5	82,67	n/a	84,12	85,59	87,09	87,09	Indikator Kinerja



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Sasaran RPJMD
16	Indeks Gini	poin	0,317	0,312	0,333	0,33	0,32	0,30	0,30	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	64,987	57,875	62,8	62,8	64	66,70	66,70	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
18	Persentase panjang jalan kondisi baik	persen	60,21	64,01	64,54	64,86	65,19	65,51	65,51	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
19	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	persen	76,2	74,01	77,34	77,76	78,18	78,60	78,60	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
20	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh	persen	34,75	19,27	19,27	18,31	17,39	16,52	16,52	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
21	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)	persen	99,84	98,13	98,81	98,86	98,91	98,96	98,96	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
22	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	61,98	92,57	93,46	90	90	90	90	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
23	Indeks Kualitas Air	poin	56,66	41,66	46	46	46,5	47	47	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
24	Indeks Kualitas Udara	poin	96,35	87,64	99,72	90	91	93	93	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
25	Indeks Tutupan Lahan	poin	47,71	47,71	47,71	47,71	48	50	50	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
26	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen			58,04	60	60	60	60	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
27	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	orang	231	152	152	154	155	157	157	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
28	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen								Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
29	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	NA	70	75	77	80	83	83	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
30	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	predikat	C	CC	CC	CC	CC	B	B	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
31	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	3,198	3,291		3,39	3,49	3,59	3,59	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
32	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	25	15,58	18,00	15,00	12,50	10,00	10,00	Dinas Kesehatan
33	Angka kematian ibu (AKI)		50	2,00	4,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
34	Angka kematian bayi (AKB)		4	1,00	15,00	2,00	1,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
35	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	Persen	3,73	4,80	3,10	2,00	1,50	1,00	1,00	Dinas Kesehatan
36	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.	Persen	17	40,80	32,20	9,00	95,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
37	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) balita	Persen	17	10,18	9,80	9,00	7,00	5,00	5,00	Dinas Kesehatan
38	Persentase bayi gizi kurang	Persen	0,05	0,06	9,40	0,04	0,03	0,25	0,25	Dinas Kesehatan
39	Cakupan program PIS-PK		18	70,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
40	Prevalensi <i>Tuberculosis</i>		5,07	1,26	0,74	2,00	1,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
41	Persentase Kasus malaria (<i>Annual Paracite Index-API</i>)	Persen	2,44	0,00	3,00	1,50	1,00	0,50	0,50	Dinas Kesehatan
44	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan	Persen	93,26	96,60	97,00	97,00	98,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
45	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen	74	81,60	14,90	90,00	95,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
46	Angka kesakitan DBD		2,48	2,48	2,08	1,50	1,00	0,50	0,50	Dinas Kesehatan
47	Tingkat Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	34,88	120,50	27,60	90,00	95,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
49	Tingkat Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	0,00	22,70	8,10	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
50	Tingkat Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Persen	0,00	160,60	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
52	Tingkat Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	0,00	85,10	94,20	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
53	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
54	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar	Persen	95	100,00	100,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
55	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 5 Jenis tenaga kesehatan	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
57	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
58	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
59	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	Persen	80	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00	Dinas Kesehatan
60	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)/ angka penggunaan tempat tidur		56	63,90	43,10	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Kesehatan
61	<i>Average Length of Stay</i> (ALOS)/rata-rata lamanya pasien menginap		2,88	3,60	6,00	4,00	5,00	6,00	6,00	Dinas Kesehatan
62	<i>Net Death Rate</i> (NDR)/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar		7,44	3,10	3,10	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Kesehatan
63	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)/angka perputaran tempat tidur		56,19	43,30	27,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Kesehatan
64	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)/tenggang perputaran tempat tidur		2,87	3,00	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Kesehatan
65	<i>Cost Recovery Rate</i> (CRR)		30,32	33,35	36,68	60,00	65,00	70,00	70,00	Dinas Kesehatan
66	Indeks kepuasan masyarakat (konversi) terhadap seluruh pelayanan	Persen	70,00	75,00	75,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Dinas Kesehatan
67	Lulus akreditasi	Persen	1,00	12,00	12,00	2,00	3,00	5,00	5,00	Dinas Kesehatan
68	Persentase Jalan yang dibangun dalam wilayah kabupaten	Persen		65	75	85	95	99	99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Persentase Jembatan yang dibangun dalam wilayah kabupaten	Persen		65	75	85	95	99	99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
70	Persentase Jalan yang dipelihara dalam wilayah kabupaten	Persen		50	60	70	80	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Terjaga dan Telestarikannya Daerah Aliran Sungai di Barito Timur maupun terkelolanya kawasan rawa	Persen		50	60	70	80	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Persen		50	60	70	80	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen		50	60	70	80	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Persentase kawasan strategis yang tertata	Persen		60	65	75	85	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Tingkat ketersediaan Perda RDTRK Perkotaan dan Rencana RDTRK	Persen		10	15	20	25	30	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Persentase kesesuaian Ruang dengan RTRW dan RDTR	Persen		10	10	15	20	25	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Jumlah rumah layak huni	Unit		200	200	200	200	200	200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Persentase Wilayah Siaga Bencana	Persen		-	-	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
79	Respon time	Menit		-	-	120	120	120	120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Kebakaran
80	Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	Persen		-	-	45	55	65	65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
81	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	Persen		2	4,00	5,00	7,00	10,00	10,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
82	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	Persen		50	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
83	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	Lembaga		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
84	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	Persen		15	15,00	25,00	25,00	20,00	20,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
85	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen		35	45,00	55,00	65,00	75,00	75,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
86	Tingkat keakuratan DTKS	Persen		70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
87	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persen		-	-	5	5	5	5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
88	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang		30	50	50	130	150	150	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
89	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang		115	130	15	75	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
90	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang		5	8	10	13	15	15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
91	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	Persen		-	-	6	7,50	8	8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
92	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen		-	-	28	28	28	28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
93	Jumlah orang yang mengikuti Pengelolaan Pelayanan Antar Kerja	Orang		-	-	3.430	3.430	3.430	3.430	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
94	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen		3,5	2,89	2,91	2,85	2,79	2,79	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
95	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat	Orang		61.361	63.629	66.006	68.511	71.173	71.173	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
96	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen		82,18	82,65	83,13	83,61	84,1	84,1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
97	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Persen		80,81	81,38	81,9	82,53	83,91	83,91	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
98	Persentase penerapan Sistem Layanan IPK, RTKD dan BKOL yang telah dilaksanakan	Persen		70	75	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
99	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang		1.224 orang	1.468	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
100	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen		23,13	24,73	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
101	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	Persen		-	-	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
102	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen		-	-	40	58	72	72	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
103	Jumlah perusahaan yang telah melakukan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh	Perusahaan		-	-	10	10	10	10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
104	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Orang		3.626	3.806	3.996	4.196	4.405	4.405	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
105	Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemda	Kasus		3	3	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
106	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus		50	45	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
107	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	PB		45	40	-	-	-		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
108	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen		-	-	20	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
109	Jumlah Sarana-Prasarana Industri RPIK	Unit		-	-	1	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
110	Jumlah IKM yang terbina	IKM		-	-	35	35	35	35	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
111	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen		5,71	3,68	2,92	2,31	1,83	1,83	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
112	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		-	-	60	70	80	80	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
113	Jumlah Izin IKM	IKM		-	-	2	3	4	4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
114	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	Persen		-	-	60	70	80	80	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
115	Jumlah IKM	IKM		-	-	620	620	620	620	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
116	Jumlah IKM mendapat akses untuk promosi produk	IKM		-	-	6	6	6	6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
117	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Mental dan Spiritual	Lokasi		-	-	2	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
118	Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	Persen		-	-	33	33	33	33	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
119	Persentase wilayah transmigrasi yang didata	Persen		-	-	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
120	Laju pertumbuhan penduduk	Persen		1,84	2,75	2,7	2,6	2,44	2,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
121	Total Fertility Rate (TFR)	Persen		2,24	2,23	2,23	2,2	2,18	2,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
122	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen		70	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
123	Persentase Dinas yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen		0	30	60	75	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
124	Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk	Perda/Perkada		0	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
125	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan	Sektor		0	2	3	4	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
126	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama		2	15	20	25	35	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
127	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Persen		2,23	2,23	2,23	2,2	2,18	2,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
128	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	Persen		79,99	81	83	83	84	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Berencana
129	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan sudah menikah usia 15-49 tahun	Persen		79,55	80,45	80,55	80,71	81	81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
130	Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	Persen		43,22	9	7	5	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
131	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun	Persen		70	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
133	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen		12,2	11,1	11	10,9	10,8	10,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
142	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen		77,02	74	76	77	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
145	Persentase penggunaan Metode Konrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		13,98	15,45	16,45	17,45	18,45	18,45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
146	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persen		60	80	85	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
147	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	Persen		60	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
148	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	Persen		60	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
149	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	PPKS		3	4	5	6	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
150	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Persen		70	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Berencana
151	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen		94	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
152	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen		50	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
153	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (jumlah PPKBD : jumlah desa)	Rasio		1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
154	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
155	Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
156	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen		90	95	98	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
157	Presentasi remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	Persen		-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
159	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	Persen		28	28	33	38	40	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
161	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen		70	70	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
174	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun		≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
175	Persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen		60	75	80	90	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Berencana
176	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah.	Persen	DP3AKB	53,21						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
178	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR.	Persen	DP3AKB	30						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
179	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	Persen	DP3AKB	45,24						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
181	Rasio KDRT	Persen	DP3AKB	68,25						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
182	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	DP3AKB	68,25						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
183	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	DP3AKB	95,32						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
186	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	DP3AKB	100						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
187	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit.	Persen	DP3AKB	100						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
188	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	DP3AKB	-						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
189	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Indeks	DP3AKB	79						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
190	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	85	86	87	88	89	90	90	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
191	Jumlah Desa Yang Terjangkau Layanan Media Komunikasi Publik Televisi	Desa/Kelurahan		-	-	70	75	85	85	Dinas Komunikasi dan Informatika
192	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Persen		-	-	70	80	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
193	Jumlah Fasilitas Unit Media Center Milik Pemerintah Dearah	Fasilitas		-	3	4	5	5	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
194	Jumlah Media Massa/Elektronik Yang Dibina	Media		35	37	49	52	55	55	Dinas Komunikasi dan Informatika
195	Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik	Berita		7600	7500	7500	7900	8000	8000	Dinas Komunikasi dan Informatika
202	Jumlah Data Center (server) Milik Pemerintah Daerah	Server		1	2	2	3	3	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
196	Jumlah Media Website Milik Pemerintah Daerah	Domain/Sub Domain		5	10	12	15	18	18	Dinas Komunikasi dan Informatika
197	Jumlah Pengunjung Website Milik Pemerintah Daerah	Pengunjung		194195	182776	182887	183878	184878	184878	Dinas Komunikasi dan Informatika
200	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	PD		20	35	36	37	37	37	Dinas Komunikasi dan Informatika
203	Jumlah Rata-rata Kecepatan Internet/Bandwidth Kantor	Mbps		5	6	7	8	8	8	Dinas Komunikasi dan Informatika



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	OPD/UPTD									
204	Jumlah Aplikasi Milik Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	Aplikasi		3	4	5	6	6	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
205	Jumlah Dokumen Perencanaan Command Center Milik Pemerintah Daerah	Dokumen		-	-	1	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
206	Jumlah Regulasi Terkait Penyelenggaraan TIK/E-Government	Regulasi		1	2	3	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
207	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	Akun		43	64	128	256	512	512	Dinas Komunikasi dan Informatika
208	Jumlah CCTV Terpasang di Ruang Publik dan Fasilitas Vital Milik Pemerintah Daerah	Titik		2	5	6	7	8	8	Dinas Komunikasi dan Informatika
211	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Kepada Masyarakat	Buku		1	1	1	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
212	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Secara Elektronik	Konten		-	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
215	Jumlah Layanan Internet di Ruang Publik	Titik		1	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
216	Jumlah Pengunjung/Pengguna Fasilitas Internet di Ruang Publik	Pengunjung		1000	2000	2000	3000	3000	3000	Dinas Komunikasi dan Informatika
217	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terjangkau Layanan Telekomunikasi Yang Berkualitas	Desa/Kelurahan		40	41	42	43	45	45	Dinas Komunikasi dan Informatika
218	Jumlah UMKM di Barito Timur Yang Dilatih/Diberdayakan Dalam Pemanfaatan Media Online (e-commerce)	UMKM		2	3	3	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
219	Jumlah UMKM di Barito Timur Yang Menjalankan Usaha Melalui Media Online (e-commerce)	UMKM		2	3	3	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
220	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif Bidang TIK	Komunikasi		-	1	2	3	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
221	Jumlah Fasilitas Pusat Komunikasi Kreatif	Fasilitas		-	-	-	4	5	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
222	Jumlah Angkatan Kerja Muda Yang Difasilitasi Untuk Memperoleh Pelatihan TIK Bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Org		-	2	2	3	3	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
223	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP			60	67	74	80	85	85	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
224	Standar Operasional Pelayanan yang ada di DPM-PTSP			70	75	80	85	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
225	Persentase Legalitas Perizinan			70	75	80	85	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
226	RUPMK			70	75	80	85	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
227	Persentase Data PMA dan PMDN			70	75	80	85	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
228	Tingkat pengecekan kelengkapan legalitas perusahaan			75	80	85	90	95	95	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
229	Jumlah pagelaran dan penyelenggaraan festival budaya daerah	Kegiatan		5	6	7	8	9	9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
230	Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara	Unit		225	239	235	240	245	245	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
231	Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan	obyek wisata		32	32	33	34	35	35	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
234	Jumlah sarana dan prasarana penunjang objek wisata daerah	Unit		11.149,00	11.735,00	11.990,00	12.245,00	12.500,00	12.500,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
235	Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi	Persen		0,42	0,45	0,51	0,75	1	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
236	Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan	Persen		70	75	80	85	90	90	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
237	Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan	Persen		70	75	80	85	90	90	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
238	Jumlah atlet berprestasi	atlet		186	289	337	405	475	475	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
239	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	orang	1.801	6.240	7.800	9.360	12.480	14.040	14.040	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
240	Jumlah Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	19.453	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
241	Jumlah koleksi judul buku	Judul Buku	4.052	4.152	4.210	4.300	4.400	4.500	4.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
242	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	orang	-	1	2	2	3	4	4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
243	Jumlah Perpustakaan desa	unit	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
244	Jumlah Tenaga pengelola perpustakaan	orang	70	72	74	76	78	79	79	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
245	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan Pembinaan kearsipan	OPD	5	7	10	12	15	2	2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
246	Persentase Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang dikelola	Persen	50	55	60	75	80	85	85	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
247	Skor Pola Pangan Harapan)PPH)	Poin	82,3	84,3	85,7	87,1	88,6	90	90	Dinas Pertanian
248	Penguatan Cadangan Pangan	Gapoktan	1	1	1	2	3	4	4	Dinas Pertanian
249	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian
250	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Persen	68,45	96,37	117,87	119,25	120	121,27	121,27	Dinas Pertanian
251	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	18	18	18	18	20	20	20	Dinas Pertanian
252	Luas sawah	Ha	11.051	9.798	9.848	9.848	9.868	9.888	9.888	Dinas Pertanian
253	Luas Ladang	Ha	3.323	2.612	2.978	2.978	2.988	2.998	2.998	Dinas Pertanian
254	Produktivitas Padi Sawah	Kw/Ha	31,2	32,1	45,79	46,22	47,75	49,28	49,28	Dinas Pertanian
255	Produktivitas Padi Ladang	Kw/Ha	18,8	18,1	19,92	21,25	22,58	23,91	23,91	Dinas Pertanian
256	Produksi Padi	Ton	49.894	44.135	51.028	51.847	52.666	53.485	53.485	Dinas Pertanian
257	Perkebunan									Dinas Pertanian
258	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	Ha	54.248,18	5.330,48	54.372,85	54.380,83	54.381,80	54.381,82	54.381,82	Dinas Pertanian
259	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	Ha	33,22	73,74	73,74	75,74	75,94	75,94	75,94	Dinas Pertanian



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
260	Luas Lahan Perkebunan Kakau Rakyat	Ha	120,01	218,01	224,01	225,51	226,01	226,01	226,01	Dinas Pertanian
266	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	Ha	491,75	491,75	500,75	502,25	502,45	502,45	502,45	Dinas Pertanian
267	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	Pasar	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
268	Jumlah Pasar yang tertata rapi	Pasar	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
269	Terlaksananya Pasar Murah/Operasi Pasar khusus	Kali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
270	Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
271	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	0	30,00	45,00	60,00	65,00	70,00	70,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
272	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	45,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
273	Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP	UTTP	297,00	325,00	375,00	465,00	578,00	658,00	658,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
274	Tersedianya SDM Kemetrolagian	Orang	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
275	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	Koperasi	2	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
276	Persentase koperasi aktif	Persen	44,18	54,18	59,18	64,18	69,18	74,18	74,18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
281	Koperasi berkualitas	Koperasi	30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Dinas Perdagangan,



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Koperasi dan UKM
282	KSP/USP sehat	Koperasi	26	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	36,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
283	Koperasi RAT	Koperasi	29	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
284	Koperasi berprestasi	Koperasi	0	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
285	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	Orang	200	250,00	470,00	650,00	830,00	970,00	970,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
286	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	Koperasi	11	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
287	meningkatnya aset koperasi	Persen	0	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	12,50	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
288	UMKM yang melaporkan Laporan Usaha	UMKM	0	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
289	UMKM yang memiliki IZIN usaha (SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha)	UMKM	50	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
290	Jumlah UMKM Aktif	UMKM	15328	15.353,00	15.378,00	15.403,00	15.428,00	15.453,00	15.453,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
291	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/ pelatihan penyuluhan, dll	Orang	0	20,00	40,00	120,00	200,00	280,00	280,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
292	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	Persen	0	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	12,50	Dinas Perdagangan,



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										Koperasi dan UKM
293	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	Persen	0	12,50	15,00	17,50	20,00	25,00	25,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
294	UMKM yang didampingi dalam mengakses modal	UMKM	0	0,00	0,00	100,00	250,00	450,00	450,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
295	UMKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UMKM yang didampingi mengakses modal)	Persen	0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
296	Jumlah UMKM yang bermintra	Mitra	0	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	45,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
297	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI	Sertifikat	0	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
298	UMKM yang menerima sarana usaha	UMKM	0	0,00	5,00	10,00	15,00	23,00	23,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
299	Produk unggulan UMKM	Produk	0	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
300	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
301	Persentase program/ kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Persen		87	88	89	90	91	91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
302	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persen		5	10	20	30	40	40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
303	Tercapainya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
304	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
305	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur BPKAD	Bulan	12	12	12	12	12			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
306	Meningkatnya Kapasitas dan Kopetensi Aparatur dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi	Bulan	12	12	12	12	12			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
307	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bulan	12	12	12	12	12			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
308	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten	1	1	1	1	1			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
309	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat		CC	CC	B	B	B	B	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
310	Indeks Profesionalitas ASN	Persen		0	67,74	75,01	77,62	80,2	80,2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
311	Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	Persen	54,01	66,61	70,61	70,61	80,31	88,31	88,31	Kecamatan Awang



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
312	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	55	60	70	75	80	80	80	Kecamatan Awang
313	Nilai SAKIP Kecamatan Awang	Poin	50	55	60	70	70	75	75	Kecamatan Awang
314	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.	Tahun		75	80	85	90	95	95	Kecamatan Paku
315	Meningkatnya disiplin aparatur.	Tahun		75	80	85	90	95	95	Kecamatan Paku
316	Meningkatnya sarana dan aparatur.	Tahun		75	80	85	90	95	95	Kecamatan Paku
317	Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	Tahun		75	80	85	90	95	95	Kecamatan Paku
318	Terlaksananya penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA	Tahun		75	80	85	90	95	95	Kecamatan Paku
319	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.	Persen					70	70	70	Kecamatan Paku
320	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik	Persen					100	100	100	Kecamatan Paku
321	Meningkatnya peran serta desa dan masyarakat dalam pembangunan.	Persen					100	100	100	Kecamatan Paku
322	Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah.	Persen					100	100	100	Kecamatan Paku
323	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Umum.	Persen					100	100	100	Kecamatan Paku
324	Meningkatnya peran dan fungsi serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.	Persen					100	100	100	Kecamatan Paku
325	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Indeks	91,58	74,48	98,17	80	80	80	80	Kecamatan Karusen Janang



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
326	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti.	Persen	74,13	88,98	90,5	80	80	80	80	Kecamatan Karusen Janang
327	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	85,32	72,1	69,77	80	80	80	80	Kecamatan Karusen Janang
328	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persen	-	80	81	83	86	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
329	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persen	-	80	81	83	86	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
330	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Persen	-	80	81	83	86	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Kriminalitas	poin	0,16			0,16	0,16	0,16	0,16	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD
2	Persentase konflik yang diselesaikan	persen	82,17	78,01	96,01	96,49	96,97	97,46	97,46	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
3	Jumlah kasus korupsi	kasus	4			0	0	0	0	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
4	Pengeluaran per kapita	Ribu Rupiah/O rang/Tahun	11.000	11.333	11.319	11.499	11.681	11.866	11866,24	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
III. ASPEK PELAYANAN UMUM										
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	78,55	153,17	114,25				114,25	
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	91,80	91,36	63,19				63,19	
3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun	Persen	99,69	99,69	101,22				101,22	
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	36,40	40,27	63,61				63,61	
5	Persentase sekolah negeri yang pengelolaannya baik	Persen	100	94,50	99,95				99,95	
6	Pendidikan masyarakat yang berdaya saing dan bermutu	Persen	74,54	99,92	98,58				98,58	
7	Rasio sekolah yang memperoleh dan mengelola dana BOS dengan baik	Rasio	95,55	100,86	96,69				96,69	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen				58	60	65	65	
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen				90	91,50	92	92	
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen				77	77,50	78	78	
11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen				90	90,45	91	91	
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen				81,5	82	83	83	
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen				70	71,50	72	72	
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen				88	89,50	91	91	
15	Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	Persen				95	95,5	96	96	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Kesehatan									
1	Persentase Informasi Kesehatan melalui Media Komunikasi	Persen	100	0,00		100	100	100		
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Persen	100	99,86	22,90	100	100	100	22,90	
3	PersentasePengawasan Kualitas Air dan sanitasi lingkungan, penembangan wilayah sehat, dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Persen	100	99,58	33,58	100	100	100	33,58	
4	Persentase penurunan angka penularan/kesakitan penyakit	Persen	100	96,10	91,42	100	100	100	91,42	
5	Persentase 12 Indikator SPM (Permenkes No.43 Tahun 2016)	Persen	100	88,33	89,14	100	100	100	89,14	
6	Persentase jumlah penduduk miskin yang menerima jaminan pelayanan kesehatan	Persen	100	100,00	66,26	100	100	100	66,26	
7	Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringan yang memadai	Persen	100	91,96	93,60	100	100	100	93,60	
8	Persentase ibu melahirkan dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	99,82	66,73	100	100	100	66,73	
9	Persentase serapan Biaya Operasioanal Puskesmas	Persen	100	98,05	85,24	100	100	100	85,24	
10	Persentase Informasi Kesehatan melalui Media Komunikasi	Persen	100	98,33	74,81	100	100	100	74,81	
11	Persentase Kegiatan Promotif dan Preventif bersumber DAK Non Fisik	Persen	100	98,08	94,70	100	100	100	94,70	
12	Persentase ketersediaan pelayanan dasar dan kefarmasian Puskesmas	Persen	100	93,58	98,09	100	100	100	98,09	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
13	Persentase serapan dana jaminan persalinan untuk ibu melahirkan	Persen	100	56,08	9,40	100	100	100	9,40	
14	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Buah	100	0,00	55,98	100	100	100	55,98	
15	Persentase akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga melalui gerakan PIS-PK	Persen	100	55,15	0,00	100	100	100	0,00	
16	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata yang memadai	Paket	100	100	97,34	100	100	100	97,34	
17	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	100	100	100	0,80	1,45	1,55	1,55	
18	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	82,49	84,08	84,08	84,08	
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	77,78	79,78	79,78	79,78	
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	88,69	89,72	89,72	89,72	
22	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	45,42	50,38	50,38	50,38	
23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	-	9,09	9,09	9,09	
24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	62,30	65,73	65,73	65,73	
25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	22,79	29,36	29,36	29,36	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	84,70	86,09	86,09	86,09	
27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	89,06	90,07	90,07	90,07	
28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	87,89	89,00	89,00	89,00	
29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	19,55	26,87	26,87	26,87	
30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	39,78	45,24	45,24	45,24	
31	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	Persen	100	100	100	41,51	41,51	41,56	41,56	
32	Persentase sarana kefarmasian yang berizin	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Persen	100	100	100	26,92	29,61	32,58	32,58	
34	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran rumah sakit	Persen	100	93,98	100				93,98	
35	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	80	99,83	100				99,83	
36	Rasio Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana rumah sakit yang dapat diadakan dan ditingkatkan kegunaannya	Persen	80	86,81	100				86,81	
37	Rasio Sarana dan Prasarana rumah sakit yang dalam kondisi baik	Persen	90	99,88	100				99,88	
38	Jumlah kemitraan lintas program dan lintas sektoral guna peningkatan	Kemitraan	1	1	1				1	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	pelayanan kesehatan									
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	Persen	0	76,12	99,88	99,90	99,95	99,98	99,88	
2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan dan Jembatan	Persen	100	87,00	83,42	88,50	99,00	95,50	95,50	
3	Tesedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan dalam kondisi baik	Persen	100	99,88	97,85	98,00	99,00	99,80	99,80	
4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	100	87,00	96,32	97,00	98,00	99,00	99,00	
5	Persentase Ketersediaan Sistem Air Limbah	persen	0	98,53	96,75	97,00	98,00	99,00	99,00	
6	Jumlah Titik Genangan	Persen	100	60	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00	
7	Luas Kawasan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang dikembangkan (Km2)	Persen	100	93,74	91,99	94,28	95,00	96,00	91,99	
8	Rasio Ketersediaan Kebutuhan Dokumen Tata Ruang	Persen	100	93,52	94,50	96,00	97,00	99,00	99,00	
9	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan	Persen	100	93,52	91,93	93,00	95,00	98,00	98,00	
10	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	99,38	92,3	94,00	95,00	98,00	98,00	
11	Rasio Panjang Jalan Yang Telah Ditingkatkan	Persen	100	70,00	71,4	74,00	76,00	80,00	80,00	
12	Tersedianya dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	20,10	25,35	32,00	40,00	50,00	50,00	
15	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	50,80	54,38	62,54	71,92	82,71	82,71	
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	100	74,01	77,34	80,7	95,6	98,98	98,98	
17	Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	Persen	100	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	68,00	76,80	80,56	92,56	97,19	97,19	
19	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	100	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
20	Persentase Luasan daerah yang tergenang	Persen	100	40,50	50,80	60,00	70,00	80,00	80,00	
21	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	65,00	75,00	80,00	95,00	98,00	98,00	
22	Rasio kepatuhan IMB	Persen	100	55,00	65,00	70,00	80,00	90,00	90,00	
23	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	Persen	100	40,38	45,00	50,00	80,00	90,00	90,00	
24	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	100	62,28	64,54	70,00	76,00	81,00	81,00	
25	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	10,00	13,00	20,00	40,00	50,00	50,00	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
27	Ketaatan terhadap RDTRK	Persen	100	65,00	70,00	75,00	90,00	100	100	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						-	-		
1	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100	70,48	82,48	90,00	95,00	98,00	82,48	
2	Rasio Permukiman Layak huni	persen	100	99,69	80,57	90,50	95,00	99,00	99,00	
3	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terkelola	persen	100	80,93	91,93	94,00	97,00	98,00	98,00	
4	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	persen	100	34,75	19,27	11,58	5,79	0	0	
5	Rasio pemenuhan kebutuhan listrik untuk ruang publik	persen	100	90,46	93,61	96,00	99,00	100	100	
6	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	persen	100	95,95	88,44	70,00	60,00	50,00	50,00	
7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	100	0,00	0,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	0,00	0,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	persen	100	30,00	40,00	52,22	62,22	74,00	74,00	
11	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	persen	100	70,00	60,00	50,00	20,00	30,00	30,00	
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana	persen	100	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	dan Utilitas Umum)									
13	Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	persen	0	0	0	0	20	40	40	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
1	Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100	100	100				100	
2	Persentase pemeliharaan kantratribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persen	100	100	100				100	
3	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persen	100	100	100				100	
4	Persentase Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan	Persen	100	100					100	
5	Persentase Ketersediaan Social Safety Net/Jaring Pengamanan Sosial Akibat Covid-19	Persen			100				100	
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen				100	100	100	100	
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen				100	100	100	100	
8	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen				40	60	75	75	
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen				40	60	75	75	
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen				40	60	75	75	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen				45	55	65	65	
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit				120	120	120	120	
	Sosial									
1	Rasio anak terlantar yang dibina	Rasio	85	95	49				49	
2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	96	61	46				46	
3	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina	persen	69	51	48				48	
4	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	51	51	56				56	
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	54	38	13				13	
6	Rasio tenaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Rasio	68	38	79				79	
7	Persentase perencanaan dan pelaporan tercapai	persen	8	21					21	
8	Persentase data pegawai yang terkelola dengan baik	persen	88	81	100				100	
9	Persentase jenis bantuan stimulan yang diberikan	Persen	88	94	100				100	
10	Rasio lansia terlantar yang dibina	Rasio	85	99					99	
11	Persentase Identifikasi, Pendampingan dan Monev Bantuan Sosial tercapai	persen	85		90				90	
12	Persentase Korban Pertama yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap Darurat	persen	100	88	13				13	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
13	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persen				70	75	75	75	
14	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen				60	75	75	75	
15	Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan	Persen				70	80	80	80	
16	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen				70	75	75	75	
17	IKM terhadap pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen				80	90	90	90	
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						-			
	Tenaga Kerja									
1	Tingkat pelaksanaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	100,00	100	100				100	
2	Tingkat pelaksanaan peningkatan kesempatan kerja	persen	74,99	54,45	65,56				65,56	
3	Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan buruh	PB	40	20	18				18	
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	12	61					61	
5	Tingkat Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan	persen	100,00	100	100				100	
6	Tingkat pelaksanaan perluasan kerja	persen	0,00	0					0	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen				28	28	28	28	
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	persen				5	5	5	5	
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	persen				6	7,5	8	8	
10	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	persen				100	100	100	100	
11	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen				40	58	72	72	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Jumlah Peraturan, Ketentuan Daerah yang Diterbitkan untuk mendukung peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	100	99,20	91,65				91,65	
2	Jumlah Ketentuan Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100	93,53	70,38				70,38	
3	Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	Persen	100	90,19	55,26				55,26	
4	Rasio KDRT terhadap Perempuan yang ditangani	Persen	100	58,88	98,35				98,35	
5	Rasio KDRT terhadap Anak yang ditangani	Persen	100	73,9	30,30				30,30	
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen				30	30	30	30	
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen				30	30	30	30	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen				0,0121	0,0119	0,0119	0,0119	
9	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	Persen				100	100	100	100	
10	Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	Persen				100	100	100	100	
11	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	Persen				100	100	100	100	
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen				100	100	100	100	
	Pangan									
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Dokumen	1	1	1				2	
2	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100				100	
3	Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Ketersediaan energi perkapita	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Ketersediaan protein perkapita	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase desa rawan pangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Pertanahan									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Tersedianya data lahan yang siap digunakan untuk sarana dan prasarana umum di 10 kecamatan	persen		89					89	
2	Terlaksananya Pengadaan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	persen	100	10	15				15	
3	Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Regristrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	persen					20	40	40	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	persen					20	30	30	
	Lingkungan Hidup							-		
1	Persentase cakupan area pelayanan	persen	0	100	96,94				96,94	
2	Rasio Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	persen	100	98,90	84,10				84,10	
3	Cakupan pemantauan kualitas air, udara dan tutupan lahan	persen	0	77,19	55,24				55,24	
4	Cakupan Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produk biomassa	persen	100	100	98,57				98,57	
5	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	persen	0	100					100	
6	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	persen	75	100	99,93				99,93	
7	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	persen	100	96,99					96,99	
8	Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	Persen					100	100	100	
9	Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persen				60	60	60	60	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
10	Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	Persen				25	25	25	25	
11	Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	Persen				60	60	60	60	
12	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	Persen				75	75	75	75	
13	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Obyek				1	1	1	3	
14	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	persen				25	25	25	25	
15	Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	persen				25	25	25	25	
16	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	persen				70	70	70	70	
17	Persentase sampah yang tertangani	Persen	93			93	93	93	93	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan secara lengkap	Persen	99,82	99.52	98,61	98.75	98.80	99	98,61	
2	Tingkat Perekaman KTP elektronik	Persen	85.51	87.66	89.72	91,03	93,45	94,5	94,5	
3	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	0	0	14.25	22,1	35,25	50	50	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	Persen	95,25	97,50	99,25	107,78	107,85	108,56	108,56	
5	Rasio pasangan berakate nikah	Persen	10,25	14,20	14,10	14,3	20,3	40,3	40,3	
6	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	Persen	40	50	50	60	70	80	80	
7	Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang diberdayakan	Organisasi	6	6	6				6	
2	Rata-rata Jumlah KLP Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Klp	300	350	83,82				83,82	
3	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	90	100	100				100	
4	Persentase Aparatur Pemdus yang terlatih	Persen	50	66					66	
5	Persentase PKK Aktif	Persen	70	75	73,06				73,06	
6	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persen				50	25		25	
7	Persentase desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	Persen				100	100		100	
8	Persentase PKK Aktif	Persen	0			90	95	100	100	
9	Persentase LKD Berprestasi	Persen	0			17	35	35	35	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	100	97,04	85,93	78,50	79	79,50	85,93	
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	Persen	100	91,39	60,39	80,55	80,71	81,00	60,39	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	Persen	100	92,17	100,00	83	83	84	100,00	
4	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	99,38	88,52	80	90	100	88,52	
5	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	3	3	4	5	6	7	6	
6	Persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	100	91,90	8769	80	85	100	8769	
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Poin	2,76	2,4	2,24	2,3	2,3	2,3	2,3	
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	78,40	79,4	79,99	80,55	80,71	80,8	80,8	
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,40	10,35	12,2	11	10,90	10,80	10,80	
10	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	3	3	3	90	90	90	90	
11	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	18	23	28	33	38	39	39	
	Perhubungan									
1	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun atau disediakan	unit	0	3					3	
2	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	Rasio	5	5,71	9				9	
3	Persentase layanan angkutan darat dan sungai	Persen	6	6,67	6				6	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Rasio ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan	Rasio	1/8	1/8,17	1/24,50				1/24,50	
6	Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Ratio)	Persen				4	38	40	40	
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen				15	38	46	46	
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun									
		Orang				520	520	520	520	
		Barang				4300	18400	24100	24100	
	Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen		77,68	99,47				99,47	
2	Rasio SDM bidang Kominfo yang terlatih	Persen		84,94	66,67				66,67	
3	Persentase Kegiatan Pembangunan yang dapat diakses Publik	Persen		75,05	98,54				98,54	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	0			70	75	80	80	
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	0			70	75	80	80	
6	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	5			70	75	80	80	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase Peningkatan UMKM dan Koperasi	Persen	98,74	99,23	99,97				99,97	
2	Rasio UKM yang di Bina	angka	99,27	100					100	
3	Persentase Koperasi Aktif		60,29	64,95	83,67				83,67	
4	Rasio UMK dan Koperasi yang di Fasilitas	angka	98,92	99,67					99,67	
5	Rasio UMK dan Koperasi yang di Bina	angka	65,83	69,08	90,65				90,65	
6	Rasio Kemitraan UMKM yang dibina	angka	99,23	99,88	100				100	
7	Persentase Penyaluran bantuan ke Masyarakat yang terdampak covid-19	Persen	0		99,97				99,97	
8	Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen					30	50	75	
9	Koperasi yang berkualitas	Persen				100	100	100	100	
10	Persentase Koperasi aktif	Persen				70	75	80	85	
11	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen				85	90	95	100	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen				70	75	80	80	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen				75	80	85	85	
14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen				75	80	85	85	
15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen				75	80	85	85	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persen				85	90	95	95	
17	Persentase usaha mikro yang bermitra	Persen				75	80	85	85	
18	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen				80	85	95	95	
	Penanaman Modal									
1	Kenyamanan para Investor berusaha	Persen	90	98	67	75	80	80	80	
2	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Persen	98	97	85	85	85	85	85	
3	Peningkatan Penataan Pelayanan Terpadu	Persen	90	88	80	80	85	85	85	
4	Meningkatnya Pengelolaan Kemudahan Pelayanan	Persen	80	73	60	80	85	90	90	
5	Persentase upaya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pada Bidang Penanaman Modal, terkendalnya data PMA dan PMDM serta pengecekan legalitas Perusahaan	Persen	78	67	74	74	74	74	74	
6	Terkendalnya Kegiatan Penanaman Modal	Persen	100	99	80	80	80	85	85	
7	Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kemitraan Usaha	Persen	90	98	88	80	80	88	88	
8	Persentase kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan tersusunya profil investasi penanaman modal yang dilaksanakan	Persen	60	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar	234,71	71,24	94,6	94,6	96	96	96	
10	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	13	14	22	22	24	24	24	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Poin	83	83	83	83	85	83	83	
12	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Persen	80	80	80	85	87	88	88	
13	Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	Persen	50	75	75	80	90	90	90	
	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan	Persen	65	61,24	70				70	
2	Persentase kegiatan kepemudaan	Persen	66	49,5	70				70	
3	Persentase organisasi olahraga yang aktif.	Persen	50	0,7	70				70	
4	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Org	39	27	10				10	
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Buah	211	183	183				183	
6	Jumlah atlit berprestasi.	Org	72	152	152				152	
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	49,10			49,45	50,49	51,50	51,50	
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	61,76			62	63	65	65	
9	Jumlah prestasi olahraga	Medali	10			11	12	15	15	
10	Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Persen					20	25	25	
	Statistik									
1	Presentase Data/Informasi /Statistik Daerah	Persen		83,14	99,60				99,60	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	0			70	75	80	80	
3	Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	0			70	75	80	80	
	Persandian									
1	Cakupan Informasi Pemerintah Penting yang tersandingkan	Persen	0	87,45	100				100	
2	Tingkat Ketersediaan Dukungan Peralatan Persandian	Persen	0	50	99,64				99,64	
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen				70	75	80	80	
	Kebudayaan									
1	Jumlah literatur	Buku	10	1	1				1	
2	Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan.	Buah	221	221	221				221	
3	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya serta Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya.	Event	3	3	-				3	
4	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	20				5	5	5	
5	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	40			5	10	15	15	
6	Persentase sejarah lokal yang dibina	Persen	8				3	5	5	
7	Persentase Cagar Budaya yang dilestaikan	Persen	32			60	70	80	80	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	Persen	100			75	85	95	95	
	Perpustakaan									
1	Cakupan penyuluhan kepada perangkat daerah	Persen	95	98	99	100	100	100	100	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	100	99,53	99,14	100	100	100	100	
3	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	Persen	99	98	96,14	97	98	99	99	
4	Persentase koleksi yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	96	95	98	98,5	99	99,8	99,8	
5	Tersedianya dokumen biografi perpustakaan desa dan sekolah	Persen	97	97	99	98	98	99	99	
6	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	1843	13.983	2.129	5.000	8000	10000	23.000	
	Kearsipan									
1	Persentase arsip yang di alih mediakan	Persen	100	99,25	99,61	80	90	100	100	
2	Persentase jumlah dokumen/ arsip daerah yang terkelola	Persen	100	99,97	99,5	70	80	90	90	
3	Persentase Arsip yang Dialihmediakan	Persen	100	99,25	99,61	80	90	100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen				85	90	95	95	
5	Persentase Arsip yang Dialihmediakan	Persen	100	99,25	99,61	80	90	100	100	
C.	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi perikanan budidaya (kolam, Karamba)	Ton		1.390,88	1.436,88				2.827,76	
2	Produksi perikanan tangkap	Ton		1.595,11	1.940,15				3.535,26	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Tercapainya kesejahteraan pelaku agribisnis	Persen		81,38	62,97				62,97	
4	Terikutinya semua kegiatan musrenbang tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi	Persen		53,19	47,4				47,4	
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton				2037,115	2001,65	2003,01	6041,775	
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton				1508,745	1482,45	1483,6	4474,795	
7	Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	Persen				50	55	60	60	
8	Konsumsi ikan	Persen				98,3	98,7	99,33	99,33	
	Pariwisata									
1	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan.	Obyek	30	20	48				68	
2	Jumlah destinasi wisata unggulan yang dikembangkan.	Obyek	12	18					18	
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	10.969	13.283	15.300				15.300	
4	Jumlah kontribusi PDRB sektor pariwisata.	Persen	8,810,000 (0,01%)	0,03	3,06				3,06	
5	Jumlah kegiatan pameran dan kelompok sadar wisata yang dibina.	Kelompok	2	3	3				6	
6	Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	Persen				20	25	30	30	
7	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	Persen				30	35	37	37	
8	Tingkat hunian akomodasi	Persen				20	30	40	40	
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Persen					22	25	25	
	Pertanian									
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	100,00	61,02	58,74				58,74	
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ Ha	25.000	25.100	39.780				64.880	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Nilai ekspor produk Pertanian	Rp	224.523.000	198.607.500	255.140.000				#####	
4	Rasio kelompok tani yang menggunakan teknologi	Persen	45	75,67					75,67	
5	Produksi Padi Sawah	Ton	49.849,00	44.135,00	51.028,00				95.163	
6	Produksi Perkebunan	Ton	12.200,39	5.942,35	14.045,60				19.988	
7	Rasio Penyuluh Tani yang diberdayakan	Rasio	85	65,56	84,67				84,67	
8	Rasio Kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang di tangani	Rasio	100	97,04	96,96				96,96	
9	Produksi Daging ternak	Ton	5.714	5.407	7.951				13.358	
10	Rasio kasus temuan penyakit ternak yang ditangani	Rasio	100	88,09	75,32				75,32	
11	Jumlah produksi daging dan telur									
	- Daging	ton				819037,58	819514,18	820070,21	2458622	
	- Telur	kg				51030,79	510601,74	510948,18	1072580,7	
12	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen					100	100	100	
13	Persentase sarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen				100	100	100	100	
14	Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen				100	100	100	100	
15	Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani	Persen				100	100	100	100	
16	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen				80	85	90	90	
17	Cakupan bina kelompok petani	Persen				80	85	90	90	
	Perdagangan									
1	Persentase sengketa perdagangan yang diselesaikan	Persen		86.58	99,90				99,9	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen		99,33	16,91				16,91	
3	Rasio pasar daerah yang representatif	Persen		92,02	92,73				92,73	
4	Cakupan perlindungan konsumen	Persen		70,06	95,06				95,06	
5	Persentase Kegiatan Perdagangan Sesuai Peraturan	Persen		100	99,84				99,84	
6	Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	Persen				70	75	80	80	
7	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen				50	60	70	70	
8	Persentase pasar daerah yang representatif	Persen				90	93	97	97	
9	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen				95	95	95	95	
10	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen				100	100	100	100	
11	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen				85	90	95	95	
12	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen				70	75	80	80	
13	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Persen				80	80	80	80	
14	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen				85	90	95	95	
	Perindustrian									
1	Jumlah IKM Baru	IKM	633	663	685				685	
2	Jumlah Kebijakan Bidang IKM yang diterbitkan	Kebijakan	1	1	1				2	
3	Jumlah Industri Logam, Mesin, Kimia,	IKM	20	25	31				31	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Tekstil, Transportasi, dan Telematika									
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen				20	25	25	25	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen				60	70	80	80	
6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	Persen				60	70	80	80	
	Transmigrasi									
1	Tingkat capaian transmigrasi	Persen	57,14	100	75				75	
2	Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	Persen				33	33	33	33	
3	Persentase wilayah transmigrasi yang didata	Persen				100	100	100	100	
4	Persentase satuan pemukiman yang dibina	Persen				40	40	40	40	
D.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
1	Persentase Tugas Kedinasan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	Persen	100	87	49				49	
2	Jumlah Kelompok/Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Bantuan	Kelompok / Organisas	100	77	50				50	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		i								
3	Peresentase Belanja Langsung Terhadap Total APBD	Persen	100	72	72				72	
4	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Terlatih	Persen	100	69	25				25	
5	Persentasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Secara Elektronik	persen	100	98	98				98	
6	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	100	84	78				78	
7	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Persen	100	65	90				90	
8	Persentase Tugas Kedinasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	88	75				75	
9	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persen	100	23	41				41	
10	Persentase Batas Desa yang telah Tertata	Persen	100	23	72				72	
11	Pemilihan dan Penyedia Pelayanan Barang dan Jasa	Persen	100	100	87				87	
12	Rasio ASN yang di Bina	Persen	100	59	75				75	
13	Rasio SDM Pengadaan Barang/Jasa yang bersertifikat	Persen	100	97	29				29	
14	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Persen	100	100					100	
15	Terlaksananya Pengendalian SDA dan Kehutanan	Persen	100	90	64				64	
16	Pelaksanaan Penataan Kelembagaan	Persen	100	83	82				82	
17	Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Pegawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persen	100	82	48				48	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
18	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Potensi Wilayah	Persen	100	99	81				81	
19	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	72	72				72	
20	Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100			90	90	95	95	
21	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100			90	90	90	90	
22	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100			95	95	95	95	
23	Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persen	100			90	90	95	95	
24	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100			89	90	95	95	
25	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100			90	95	95	95	
	Sekretariat DPRD									
1	Terlaksananya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persen		82,58	95,95				95,95	
2	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persen		97,69	94,48				94,48	
3	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Poin				70	70	70	70	
E.	Unsur Penunjang Urusan									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemerintahan									
	Perencanaan									
1	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan	Persen	50	50	50	50	50	50	50	
2	Tingkat ketersediaan dokumen rencana daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rata rata capaian kinerja OPD bidang Ekonomi	persen	90	90	90	90	90	90	90	
4	Rata rata capaian kinerja OPD bidang pendidikan dan kesra	persen	90	90	90	90	90	90	90	
5	Rata rata Capaian kinerja OPD bidang pemerintahan	persen	90	90	90	90	90	90	90	
6	Rta rata kinerja OPD bidang pemerintahan	persen	90	90	90	90	90	90	90	
7	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	persen	90	95	97	95	95	97	98	
8	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	persen	94	96	97	90	90	95	95	
9	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	persen	92	95	95	90	95	95	96	
10	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	persen	95	97	97	95	95	95	95	
	Keuangan									
1	Persentase peningkatan PAD	persen		87,52	87,12				87,12	
2	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen				90	90	90	90	
3	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	94,32	91,82	75,11				75,11	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Status (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	persen				67	68	69	69	
6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Status (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
7	Persentase BMD yang dikelola secara tertib dan akurat	Persen				97	98	98	98	
	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan									
1	Cakupan Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	persen	75,14	85,32	6,01	0	0	0	6,01	
2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	persen	98,91	14	98,76	0	0	0	98,76	
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	persen	62,18	52,73	54,10	0	0	000 0	0 54,10	0
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	90	90	95	95	
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	85	90	90	90	
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	85	90	90	90	
7	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin	0	0	0	3	3	3	3	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Kepegawaian									
	Penelitian Dan Pengembangan									
1	Persentase kajian litbang yang diterapkan	persen	10	10	20				20	
2	Persentase kajian litbang yang diterapkan	persen				30	40	50	50	
F.	Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan									
	Inspektorat Daerah									
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kebijakan pada Pemda	Persen	30	30	79	80	81	82	79	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	persen	30	50	65	85	87	90	90	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	persen	40	80	87	88	90	93	93	
4	Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti	persen	40	60	70	80	85	90	90	
5	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	30	50	55	75	80	85	85	
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	1	2	2	3	3	3	3	
G.	Unsur Kewilayahan									
	Kecamatan									
	Kecamatan Dusun Tengah									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persen			97				97	
2	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen			98				98	
3	Cakupan desa yang mendapat pembinaan	Persen	100	100	100				100	
4	Persentase keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	97	98	98				98	
5	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen				90	90	90	90	
6	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				95	95	95	95	
7	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					90	90	90	
8	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					90	90	90	
9	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				90	90	90	90	
	Kecamatan Pematang Karau									
1	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen		100	100				100	
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen					100	100	100	
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen					100	100	100	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
5	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	
6	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				100	100	100	100	
	Kecamatan Awang									
1	Terlaksananya Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Persen	50,00	100,00	100,00				100,00	
2	Persentase kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa	Persen	20,00	55,00	51,25				51,25	
3	Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen				100	100	100	100	
4	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				100	100	100	100	
5	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
6	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	
7	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen					100	100	100	
	Kecamatan Patangkep Tutui									



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Persen	100	89,98	79,45				79,45	
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen					100	100	100	
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen					100	100	100	
4	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
5	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	
6	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				100	100	100	100	
	Kecamatan Dusun Timur									
1	Terlaksananya administrasi dan Data Kependudukan yang Akurat	Persen			100	100	100	100	100	
2	Terlaksananya kegiatan gotong Royong masyarakat kelurahan selama 1 tahun	Persen			69,09			69,09	69,09	
3	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di desa	Persen	40,25	64,61	52,16			64,61	64,61	
4	Kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	95,96	95,96	91,16			95,96	95,96	
5	Tertatanya Administrasi Kependudukan	Persen	82	87,50				87,50	87,50	
6	Persentase Tingkat Kebijakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persen	70	71,43				71,43	71,43	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen				100	100	100	100	
8	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				100	100	100	100	
9	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen				100	100	100	100	
10	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen				100	100	100	100	
11	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				100	100	100	100	
	Kecamatan Benua Lima									
1	Cakupan Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	Persen	95	95	95				95	
2	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95	95	95				95	
3	Cakupan Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	Persen	95	95					95	
4	Persentase swadaya masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95	95					95	
5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Bidang Perkantoran	Persen	95	95					95	
6	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	95	95					95	
7	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	Persen	95	95					95	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen					95	95	95	
9	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				95	95	95	95	
10	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					95	95	95	
11	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					95	95	95	
12	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen					95	95	95	
	Kecamatan Paku									
1	Persentase Partipasi Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Bln	12	12	12				24	
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen				80	100	100	100	
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen					100	100	100	
4	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
5	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	
6	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan	Persen				100	100	100	100	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemerintahan Desa									
	Kecamatan Paju Epat									
1	Jumlah kelompok/ organisasi masyarakat yang mendapatkan bantuan	Persen	50,00	100,00	100,00				100,00	
2	Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih	Persen	20,00	55,00	51,25				51,25	
3	Cakupan desa yang mendapat pembinaan	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00	
4	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen					90	93	93	
5	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				70	75	80	80	
6	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
7	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	
8	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				100	100	100	100	
	Kecamatan Raren Batuah									
1	Persentase pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa	Persen		85,11	84.32				84.32	
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen				75	65	85	85	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				65	65	75	75	
4	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen				65	65	75	75	
5	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen				65	65	85	85	
6	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				65	65	75	75	
	Kecamatan Karusen Janang									
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	74,13	88,98	90,5				90,5	
2	Cakupan desa yang mendapat pembinaan	Persen	85,32	72,1	69,77				69,77	
3	Rasio layanan perizinan kecamatan yang tertata	Persen	91,58	74,48	98,17				98,17	
4	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen				80	80	85	85	
5	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen				85	85	85	85	
6	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen					100	100	100	
7	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen					100	100	100	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen				85	85	85	85	
H.	Unsur Pemerintahan Umum									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Yang dilaksanakan	persen	100	80	88				88	
2	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Yang dilaksanakan	persen	100	71,2	80				80	
3	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Wawasan Bangsa Yang dilaksanakan	persen	100	55	100				100	
4	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Wawasan Bangsa Yang dilaksanakan	persen	100	100	100				100	
5	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Yang dilaksanakan	persen	100	65	100				100	
6	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Yang dilaksanakan	persen	100	98	100				100	
7	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Yang dilaksanakan	persen	100	90	100				100	



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD	Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen				100	100	100	100	
9	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Persen				100	100	100	100	
10	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen					80	85	85	
11	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	Persen				100	100	100	100	
12	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persen				100	100	100	100	

Sumber: hasil analisis, 2021



BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat serta melibatkan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Timur, memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN Tahun 2020-2024.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun pembiayaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Timur.



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Timur berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD dan RKPD secara berkala.
5. Kepala perangkat daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara berkala untuk pencapaian target-target Perubahan RPJMD dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
6. Perubahan RPJMD ini akan menjadi dasar bupati dan wakil bupati dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Pemerintah Kabupaten Barito Timur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

9.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah pada tahun 2023 menyusun RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Timur dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. Selanjutnya, RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan permasalahan pembangunan yang terkini dan disusun dengan



mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur periode berikutnya.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mewujudkan visi **“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”**.

Bupati Barito Timur,

TTD

Ampera A.Y. Mebas, SE, MM